



PENGABDIAN SOFT POWER DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DI AFGHANISTAN

Mayjen TNI (Purn) Dr. Ir. Arief Rachman, M.M., M.B.A.
Duta Besar KBRI Kabul Afghanistan 2017-2021

PENGABDIAN *SOFT POWER* DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DI AFGHANISTAN



Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGABDIAN *SOFT POWER* DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DI AFGHANISTAN

Mayjen TNI (PURN) Dr. Ir. ARIEF RACHMAN, MM., MBA.



PENGABDIAN *SOFT POWER* DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DI AFGHANISTAN

Edisi Pertama

Copyright @ 2023

ISBN 978-623-377-982-1

15,5 x 23 cm

234 h.

cetakan ke-1, 15 Januari 2023

Penulis

Mayjen TNI (Purn) Dr. Ir. Arief Rachman, MM., MBA.

Editor

Dr. Adi Bandono, M.Pd.

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor I: Jl. Pahlawan, Kanor, Bojonegoro

Kantor II: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945

PEMBUKAAN (P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DASA PITUTUR

(10 Nasihat Sunan Kalijaga)

1. **URIP IKU URUP.** *Hidup itu Nyala! Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik.*
2. **MEMAYU HAYUNING BAWANA, AMBRASTA DUR HANGKARA.** *Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan, serta memberantas sifat angkara murka, serakah, dan tamak..*
3. **SURA DIRA JAYANINGRAT, LEBUR DENING PANGASTUTI.** *Segala sifat keras hati, picik, angkara murka, hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar.*
4. **NGLURUK TANPA BALA, MENANG TANPA NGASORAKE, SEKTI.** *Tanpa Aji-Aji, Sugih tanpa Bandha. Berjuang tanpa perlu membawa massa; menang tanpa merendahkan atau memermalukan; berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan, kekayaan atau kekuasaan, keturunan; kaya tanpa didasari kebendaan.*
5. **DATAN SERIK LAMUN KETAMAN, DATAN SUSAH LAMUN KELANGAN.** *Jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri! Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu!*
6. **AJA GUMUNAN, AJA GETUNAN, AJA KAGETAN, AJA ALEMAN.** *Jangan mudah terheran-heran! Jangan mudah menyesal! Jangan mudah terkejut-kejut! Jangan mudah kolokan atau manja!*
7. **AJA KETUNGKUL MARANG KALUNGGUHAN, KADONYAN LAN KEMAREMAN.** *Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan, dan kepuasan duniawi!*

8. **AJA KUMINTER MUNDAK KEBLINGER, AJA CIDRA MUNDAK CILAKA.** *Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah! Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka!*

9. **AJA MILIK BARANG KANG MELOK, AJA MANGRO MUNDAK KENDHO.** *Jangan tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah, cantik, dan indah! Jangan berpikir mendua agar tidak kendor niat dan kendor semangat!*

10. **AJA ADIGANG, ADIGUNG, ADIGUNA.** *Jangan sok kuasa, sok besar, sok sakti. Semoga kita selalu ingat dan membuang jauh jauh kesombongan, keangkuhan dan keserakahan sehingga kita menjadi manusia yang beruntung (tidak celaka). (yos)*

TIGA NASIHAT SUNAN KALIJAGA

- 1. *Ngaku Pinter Yen Durung Bisa Nggoleki Lupute Awake Dewe.***
Arti dari kalimat di atas adalah 'Jangan mengaku pintar jika belum bisa mencari kesalahan diri sendiri'. Ya, kebanyakan manusia memang suka menghakimi, Ojo merendahkan, menghina manusia lain tanpa berkaca terlebih dahulu, apakah dirinya sudah sempurna atau belum? Karena sesungguhnya, jika kita berkaca, introspeksi diri, pasti ada banyak kesalahan dan kekeliruan yang kita temukan dalam diri kita sendiri.
- 2. *Ojo Ngaku Unggul Yen Ijeh Seneng Ngasorake Wong Liyo.***
Nasihat kedua adalah 'Jangan mengaku unggul jika masih senang merendahkan orang lain'. Kita bisa lihat sendiri, berapa banyak orang yang menghina sesama. Enggak usah jauh-jauh deh, dalam berbagai media sosial kerap kali didapati orang yang menghujat dengan mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas seolah menganggap bahwa dirinya yang paling unggul dan hebat. Nah, melalui lakon Semar, Sunan Kalijaga ingin menyampaikan bahwa setiap manusia itu punya kedudukan sama, tak ada yang lebih unggul dari yang lain. Di mata ALLAH pun, semua sama, kecuali amal perbuatan mereka. Punakawan yang mencerminkan sifat manusia.
- 3. *Ojo Ngaku Suci Yen Durung Bisa Manunggal Ing Gusti.***
Nasihat ketiga, masih berkaitan dengan poin satu dan dua, 'Jangan mengaku suci jika masih belum bisa menyatu dalam Gusti'. Sejatinya tak ada memang yang namanya manusia suci. Semua pasti punya kesalahan dan dosa, bahkan para Nabi sekalipun juga pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, saat khilaf kita bisa kembali kepada sang pencipta dan meminta ampun atas kesalahan yang sudah kita perbuat.

PESAN SUNAN KALIJAGA PADA UMAT AKHIR ZAMAN

Pesan Kanjeng Sunan Kalijaga untuk Umat akhir Jaman yang dilantunkan dalam Laras Dandang Gulo Petet Songo

Yen pasar ilang kumandange...

Yen kali wis ilang kedunge...

Yen wong wadon wis ilang wirange...

Mlakuho topo lelono njajah deso milang kori,

Ojo nganti/ngasi bali yen durung bali patang sasi,

Golek wisik songko Sang Hyang Widhi...

Wejangan Sunan Kalijaga ini ditujukan kepada umat akhir zaman dengan menyebut tanda-tanda pantai & saran beliau untuk melakukan pendekatan kepada Allah melalui perjalanan Ruhani mencari petunjuk & hidayah dari-Nya.

KATA PENGANTAR



Mayjen TNI (Purn) Dr. Ir. Arief Rachman, MM., MBA.

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Alhamdulillah, dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, pada akhirnya buku dengan judul ***"Pengabdian Softpower Diplomasi Indonesia Dalam Perdamaian di Afghanistan"*** ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar, tanpa ada halangan yang berarti. Konten buku ini menyajikan secara khusus semua pengalaman penulis selama melaksanakan tugas negara sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Islam Afghanistan, yang berkedudukan di Kabul dari tahun 2017 sampai dengan 2021 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 32/P Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017.

Pada awal penugasan di Afghanistan yaitu pada tahun 2017, negara Afghanistan telah berbentuk Republik Islam berdasarkan Konstitusi 2004. Republik Islam Afghanistan tengah dipimpin oleh Presiden ke-2 yakni Dr. Ashraf Ghani Ahmadzai yang memerintah sejak 2014 menggantikan Presiden sebelumnya yakni Dr. Hamid Karzai yang memerintah selama 10 tahun (2004 - 2014). Meskipun terdapat berbagai kritik terhadap pelaksanaan Pemilu 2014, tetap saja berlangsung peralihan kekuasaan dari Presiden Hamid Karzai

kepada Ashraf Ghani. Begitu Ashraf Ghani memenangkan Pemilu pada tahun 2014 maka peralihan kekuasaan tersebut dianggap sebagai peralihan kekuasaan demokratis pertama dalam sejarah Afghanistan.

Meskipun Afghanistan telah menjadi negara demokrasi sejak tahun 2004, namun ketidakpastian kondisi keamanan di Afghanistan berimbas kepada sektor-sektor lainnya seperti ekonomi dan sosial budaya. Pemerintah Republik Islam Afghanistan sendiri masih belum sepenuhnya mampu menegakkan Pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, sementara itu serangan dari gerilyawan Taliban semakin gencar dan meningkat.

Potensi ketidakpastian kondisi di Afghanistan dapat berkembang menjadi tantangan dan ancaman yang nyata bagi perdamaian dunia pada umumnya dan khususnya bagi kepentingan Indonesia pula. Oleh karena itu, salah satu misi utama KBRI Kabul berdasarkan mandat dari Pemerintah RI adalah mengupayakan rekonsiliasi antara berbagai pihak di Afghanistan melalui jalur Ulama dan turut meningkatkan upaya Pemerintah Indonesia dalam membantu *Nation Building* Afghanistan melalui pemberdayaan perempuan, fasilitasi berbagai pelatihan, pelayanan kesehatan, pemberian beasiswa, dan lain sebagainya.

KBRI Kabul juga memandang penting upaya untuk melanjutkan pembangunan *Indonesia Islamic Centre* di Kabul khususnya *klinik* dan *learning center* sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan pemahaman bahwa Islam dapat berdampingan dengan demokrasi dan modernisasi dalam kehidupan bernegara sebagaimana telah dibuktikan di Indonesia. Buku ini juga banyak memuat tentang catatan penting penulis dalam menjalankan tugas diplomasi sebagai duta besar. Dari catatan tersebut penulis berharap dapat dijadikan sebagai referensi yang memperluas cakrawala tentang perjalanan sejarah sebuah bangsa.

Penulis,

Dr. Ir. Arief Rachman, MM., MBA.
Mayjen TNI (Purn)

DAFTAR ISI

Halaman Cover
Cover Dalam
Pembukaan UU NRI 1945-v
Dasar Pitutur-vi
Tiga Nasehat Sunan Kalijaga-viii
Pesan Sunan Kalijaga Pada Umat Akhir Jaman-ix
Kata Pengantar-x
Daftar Isi-xii

BAGIAN 1

MENUJU JALAN PERDAMAIAN

- 1.1 Jalan Optimis Menuju Perdamaian Afghanistan- 1
- 1.2 Pendekatan Softpower Diplomasi Indonesia- 3

BAGIAN 2

SEJARAH AFGHANISTAN

- 2.1 Awal Mula Berdirinya Afghanistan- 7
- 2.2 Invansi Uni Soviet di Afghanistan- 8
- 2.3 Invansi Amerika dan Sekutunya- 10

BAGIAN 3

KONDISI POLITIK AFGHANISTAN

- 3.1 Identitas Negara Afghanistan- 19
- 3.2 Kembalinya Pemerintahan Taliban di Afghanistan- 25

BAGIAN 4

KONDISI EKONOMI AFGHANISTAN

- 4.1 Keadaan Ekonomi- 35
- 4.2 Sumber Ekonomi- 42

BAGIAN 5

KONDISI SOSIAL BUDAYA AFGHANISTAN

- 5.1 Keadaan Sosial- 53
- 5.2 Etnis-Etnis di Afghanistan- 55
- 5.3 Perhubungan- 59
- 5.4 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi- 67

BAGIAN 6

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

- 6.1 ANSDF- 75
- 6.2 Penyebab Kekalahan Tentara Afghanistan Dari Taliban- 78

BAGIAN 7

HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AFGHANISTAN

- 7.1 Sejarah dan Perkembangan Hubungan Bilateral Indonesia-Afghanistan- 83
- 7.2 Lawatan Presiden RI Ir. Joko Widodo ke Afghanistan- 88
- 7.3 Beberapa Dokumen Perjanjian Indonesia-Afghanistan- 91

BAGIAN 8

SOFT POWER DIPLOMASI BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN DI AFGHANISTAN

- 8.1 Perkembangan Politik dan Keamanan Afghanistan Tahun 2017-2021- 93
- 8.2 Peran KBRI Kabul Dalam Mendorong Terwujudnya Perdamaian di Afghanistan- 99

BAGIAN 9

SOFT POWER DIPLOMASI BIDANG EKONOMI DI AFGHANISTAN

- 9.1 Perkembangan Neraca Perdagangan RI-Afghanistan-131
- 9.2 Aktifitas Ekonomi Indonesia-Afghanistan- 131

BAGIAN 10

SOFT POWER DIPLOMASI BIDANG SOSIAL BUDAYA DI AFGHANISTAN

- 10.1 Kerjasama RI-Afghanistan Bidang Keulamaan- 169
- 10.2 Kerjasama RI-Afghanistan Bidang Pendidikan- 183
- 10.3 Kerjasama Antar Perguruan Tinggi - 199
- 10.4 Kerjasama Bidang Lainnya- 208

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Susunan Pemerintahan Presiden Ashraf Ghani Pada Saat Jatuhnya Republik Islam Afghanistan- 22
- Tabel 2. Susunan Kabinet Pemerintahan Sementara Taliban (Diumumkan 7 September 2021)- 28
- Tabel 3. Armada Ariana Afghan Airlines Tahun 2019- 62
- Tabel 4. Armada KAM Air Tahun 2021- 64
- Tabel 5. Daftar Pengusaha Anggota Bussiness Council- 141
- Tabel 6. Daftar Penerima Beasiswa Dharmasiswa RI TA 2019/2020- 190
- Tabel 7. Durasi Lama Pemberian Beasiswa KNB- 193
- Tabel 8. Besaran Tunjangan Beasiswa KNB- 194
- Tabel 9. Daftar Peminat Beasiswa KNB TA 2018 Asal Afghanistan- 196
- Tabel 10. Daftar Pelamar Beasiswa KNB TA 2019- 197

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Lambang Negara Afghanistan- 19
- Gambar 2. Bendera Republik Islam Afghanistan- 20
- Gambar 3. Peta Afghanistan- 24
- Gambar 4. Lambang Pemerintahan Taliban di Afghanistan- 26
- Gamabr 5. Bendera Taliban- 26
- Gamabr 6. Peta Pertambangan di Afghanistan- 46

MENUJU JALAN PERDAMAIAN

1.1 Jalan Optimis Menuju Perdamaian Afghanistan.

Afghanistan telah menderita peperangan selama lebih 4 dekade. Perang ini telah melumpuhkan sektor ekonomi, politik, sosial budaya dan juga keamanan. Konflik yang berkepanjangan antara Pemerintah Afghanistan dan Taliban membawa dampak yang buruk bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat Afghanistan. Berangkat dari fenomena tersebut, Indonesia yang merupakan negara sahabat dan juga sebagai salah satu negara dengan **“Mayoritas Muslim terbesar di Dunia, mencoba membangun atmosfir perdamaian dengan memulai pendekatan ulama-ulama”**, dimana mereka akan berbagi pendapat mengenai Islam yang toleran dan moderat seperti yang tercermin dalam kehidupan berbangsa Indonesia, yang memiliki falsafah **“Bhineka Tunggal Ika”** berbeda namun tetap bersatu. Metodologi penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif dan dengan teori **Soft Power Diplomasi**, konstruktif dan antar budaya yang digunakan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pendekatan yang Indonesia lakukan melalui para ulamanya dalam menyebarkan benih perdamaian dan membangun semangat perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik di Afghanistan.

Jalan optimis menuju perdamaian Afghanistan, sebenarnya sudah dimulai dengan silaturahmi ke semua *stakeholder* melalui pendekatan agama dan budaya yang dilakukan oleh ulama-ulama Indonesia sejak hampir sepuluh tahun yang lalu di Afghanistan, dan terus dilakukan melalui rangkaian kegiatan pertemuan bersama NUA dan HPC. Selain itu tentunya tak hanya laporan pertemuan dengan Pemerintahan Afghanistan dan juga telah menemui lawan-lawan Politik Pemerintah, Kepala Perwakilan Asing dan Organisasi Internasional hingga Tokoh Masyarakat dan Ulama Afghanistan di

daerah-daerah. Meskipun demikian, kami menyadari masih memiliki kekurangan belum dapatnya bertemu langsung dengan Pihak yang mengaku sebagai perwakilan dari Taliban walaupun telah bertemu dengan pihak-pihak yang menjadi kunci mudahnya bila akan berkomunikasi dengan Taliban.

Berkenaan dengan Peran Ulama/NUA maupun HPC seterusnya telah melakukan banyak upaya untuk segera dapat mewujudkan **“Dialog Perdamaian”** antara dua pihak yang bertikai. Tetapi berbagai pihak telah mengecilkan arti peran keduanya, seolah-olah peran Ulama dan HPC belum maksimal, padahal peran utamanya telah dilakukan yaitu mengajak manusia untuk mau saling mengingatkan, mengajak kepada kebenaran, kepada Yang Khaliq atau pun belum berjalan sebagaimana mestinya. Memberi peringatan kepada saudara seiman adalah perkara yang sangat penting. ***Watawas Saubil Hakki Watawas Saubis Sobr.*** Harus dengan sabar, amal, akhlak dan mendatangi untuk memberi nasehat secara lembut dan hikmah. Perkara ini tidak boleh terhenti dan semua pihak *stakeholder* Afghanistan harus mengerti benar perkara yang prinsipil ini.

Pada pertemuan *Summit* di Riyadh, bahwa AS melalui Presiden Donald Trump menyampaikan bahwa AS tidak akan memusuhi orang Islam. “Penyelesaian persoalan antar agama diselesaikan melalui *Soft power*, pendekatan agama dan budaya. Demikian pula pada Pertemuan G20, Presiden Joko Widodo telah memberikan pernyataan bahwa, *“Sejarah telah mengajarkan kita bahwa senjata dan kekuatan militer tidak bisa memberantas terorisme. Pikiran sesat hanya bisa dikoreksi dengan cara berpikir yang benar. Untuk itu pendekatan Soft power berupa deradikalisasi dapat terus dilanjutkan”*. Sementara dalam pertemuan bilateral kedua negara, beliau sampaikan bahwa, “Berkurangnya pergerakan ISIS di Syria dan Iraq mengharuskan kita memberikan perhatian ekstra kepada pergerakan mereka di daerah lain, termasuk Afghanistan. Penyerangan terhadap masjid syiah merupakan bukti meningkatnya ancaman terorisme ISIS di Afghanistan”.

Kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi ke Kabul pada 6 November 2017, nampaknya menjadi momentum

penting bukan saja bagi hubungan persahabatan kedua negara, tetapi juga memberikan gaung positif pada perkembangan politik maupun keamanan dan keterlibatan semua *stakeholder* Afghanistan berkenaan dengan akan datangnya perdamaian yang dimediasi oleh Indonesia dalam *Peace Building* bahkan akan menjadi jembatan *Peace Making* di Afghanistan. **“Indonesia dianggap memiliki modalitas yang kuat”**. Untuk itu, Afghanistan mengharapkan kontribusi Indonesia dalam *Peace Building* guna memfasilitasi dan menjadi tuan rumah dari pertemuan *Afghan-Led Peace Process*, yang antara lain akan melibatkan HPC, wakil pemerintah Afghanistan dan Taliban menuju *Peace Making*.

Pada judul rangkuman buku di atas, tentang **Pengabdian Soft Power Diplomasi Indonesia dalam Perdamaian di Afghanistan**, adalah merupakan suatu hipotesis, Apakah Peran Ulama Indonesia mampu mempengaruhi proses perdamaian di Afghanistan. Tentu ini akan dapat dijawab oleh kesediaan rakyat Afghanistan sanggup dan bersedia difasilitasi maupun dimediasi baik dalam *Peace Building* dan *Peace Making* yang akan dilaksanakan Indonesia sebagaimana harapan Presiden Ashraf Ghani kepada Indonesia yang telah disampaikannya melalui Ibu Menteri Luar Negeri RI saat berkunjung ke Kabul pada tanggal 6 November 2017.

1.2 Pendekatan *Soft Power* Diplomasi Indonesia.

Jalan inilah yang dimaksud dengan jalan “*Soft power* Indonesia, bersama HPC, NUA dan lembaga riset serta akademisi dan tokoh-tokoh pemuda Afghanistan maupun pihak internasional melalui pendekatan yang **“*Rahmatan Lil Alamin,*”** dengan 5 Prinsip Kesederhanaan, Keadilan Sosial, Toleransi, Keseimbangan dan Partisipasi. Semoga semangat melakukan Silaturahmi antara Ulama, Stakeholders Afghanistan atau yang diwakilkan oleh HPC terus memberikan suasana optimis yaitu **“*Sharing the Best Practices,*”** kebaikan dalam mewujudkan hadirnya Perdamaian dan Persahabatan Kedua Negara yang lebih konkret diantara persaudaraan manusia menuju perdamaian dunia maupun keridhoan Allah SWT.

Buku ini kami buat bersamaan dengan berakhirnya penugasan jabatan kami selaku Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Islam Afghanistan. Kami telah berhasil menunaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kami selaku Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kabul, Afghanistan pada masa jabatan tahun 2017 - 2021. Pengakhiran Jabatan yang sejalan dengan petunjuk dan arahan dari Pimpinan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam kurun waktu penugasan kami di KBRI Kabul, hubungan Afghanistan dapat dikategorikan sebagai *strength to strength* karena dibangun dalam hubungan produktif dan konkrit guna memperkuat peran Indonesia dalam bina damai (*peace building*) di Afghanistan melalui, **“Pendekatan Soft Power Indonesia”**.¹

Pelaksanaan tugas yang penuh dengan berbagai dinamika dan tantangan telah kami tunaikan dengan baik dan lancar melalui kerja sama yang baik dengan seluruh staf KBRI Kabul, baik staf WNI maupun staf WN Afghanistan, meskipun di akhir penugasan kami terdapat serangan COVID 19 yang melanda KBRI Kabul dan pergantian Pemerintahan di Kabul dengan jatuhnya Pemerintahan Republik Islam Afghanistan, digantikan oleh Pemerintahan Taliban yang pernah berkuasa di Afghanistan tahun 1996 – 2001.

Adapun pokok-pokok kegiatan yang telah dilaksanakan pada kurun waktu penugasan kami antara lain: Kunjungan Kenegaraan Presiden Ashraf Ghani ke Indonesia 5 – 6 April 2017, Kunjungan Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo ke Afghanistan pada 29 Januari 2018, Kunjungan Delegasi Indonesia dalam Kabul Peace Proses II yang dipimpin WAPRES RI Yusuf Kalla pada 28 Februari 2017. pertemuan tingkat Menlu yang terselenggara setiap tahun pada 2017 – 2020, penyelenggaraan Konferensi Trilateral Ulama di Bogor 2018, pembentukan *Afghanistan – Indonesia Business Council* (AIBC) 2018, pembentukan *Afghanistan – Indonesia Women Solidarity Network* (AIWSN) 2019, penyelenggaraan beasiswa bagi putra dan putri

¹ Arief Rachman, 2022, *Harapan Cinta Damai dan Perdamaian*, Jakarta: Madza Media.

Afghanistan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, penyelesaian pembangunan Klinik di Indonesia Islamic Center (IIC), pemberian bantuan Kerja Sama Teknik (KST) dari Indonesia kepada Afghanistan, serta berbagai kerjasama bilateral lainnya yang bertujuan memberikan perhatian kepada Pemerintah Afghanistan yang masih dalam kondisi memprihatinkan karena pengaruh kondisi keamanan di Afghanistan yang masih memburuk.

Kami juga berupaya membangun berbagai sarana dan prasarana di KBRI Kabul guna lebih memberikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran kepada para staf dan hubungan baik kedua negara “ **Rumah Indonesia** “ di dalam mengemban tugas di sebuah negara yang dikategorikan sebagai Perwakilan Rawan dan Berbahaya. Berbagai upaya dan hasil yang telah dicapai dalam pengembangan hubungan kerjasama bilateral kedua negara, berbagai permasalahan yang dihadapi dan permasalahan yang masih tertunda selama pelaksanaan tugas, telah diuraikan secara komprehensif dalam buku ini.

Kami mengharapkan kiranya penulisan buku ini ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin membaca, mempelajari dan mendalami bidang soft power diplomasi, serta dapat menjadikan pedoman, pertimbangan, dan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dan pejabat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada umumnya. serta Duta Besar yang baru pada khususnya untuk merumuskan kebijakan dalam rangka lebih meningkatkan lagi hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Afghanistan di waktu yang akan datang.

2.1 Awal Mula Berdirinya Negara Afghanistan.

Afghanistan (افغانستان) adalah negara *land locked* yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah. Memiliki penduduk sekitar 32 juta, menjadikannya negara paling padat penduduk ke-37 di dunia. Negara ini berbatasan dengan Pakistan di Selatan dan Timur, Iran di Barat, Turkmenistan, Uzbekistan dan Tajikistan di Utara, dan RRT di Timur Laut. Wilayahnya meliputi 652.000 km² (252.000 sq mi), menjadikannya sebagai negara terbesar ke-40 di dunia. Lokasi Afghanistan sangat strategis karena telah menghubungkan negara ini dengan budaya Timur Tengah dan Asia bagian lain dan merupakan bagian dari Jalur Sutra Perdagangan. Selama berabad-abad, Afghanistan telah menjadi tempat bermukim banyak orang dan telah menjadi objek dari banyak kampanye militer seperti dari Alexander Agung, Kekaisaran Maurya, Arab Muslim, Mongolia, Inggris, Rusia dan di era modern oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Afghanistan juga menjadi tempat terbentuknya kerajaan-kerajaan besar antara lain Dinasti Kushan, Samanid, Safarid, Ghaznavid, Gurid, Khilji, Mughal, Hotaki, Durrani dan lain-lain.

Afghanistan terkenal dengan julukan *“The Graveyard of the Empire”*, dimana banyak kekaisaran-kekaisaran besar dan atau negara-negara besar berupaya menaklukkan Afghanistan, namun selalu berakhir dengan kegagalan. *“The Great Game”* telah banyak dimainkan oleh negara-negara besar di Afghanistan, termasuk *proxy wars*. Akibat letak geografisnya yang begitu strategis, negara-negara asing banyak menggunakan rakyat Afghanistan untuk kepentingannya sendiri-sendiri.

Sejarah Politik modern Afghanistan di mulai pada Abad ke 18 dengan kebangkitan etnis Pashtun (dikenal sebagai *Afghans* dalam bahasa Persia), ketika pada tahun 1709 Dinasti Hotaki naik ke tampuk

kekuasaan di Kandahar dan Ahmad Shah membangun pemerintahan kekaisaran pada tahun 1747. Ibu kota Afghanistan awalnya di Kandahar kemudian bergeser ke wilayah Kabul pada tahun 1776. Pada akhir abad ke-19, Afghanistan menjadi negara penyangga di antara konflik Kekaisaran Rusia dengan Kemaharajaan Britania Raya. Pada 19 Agustus 1919 setelah perang antara Anglo-Afghan ketiga kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian Rawalpindi. Afghanistan kembali merdeka dan memperoleh kebebasan guna menentukan kebijakan luar negerinya dari Inggris.

Afghanistan menjadi negara yang damai semasa Pemerintahan Raja Zahir Syah selama empat puluh tahun (1933 – 1973). Afghanistan menjadi Republik pada tahun 1973 setelah Jenderal Mohammed Daud Khan mengkuudeta Raja Zahir Syah ketika sang Raja tengah berada di Italia. Mohammed Daud Khan kemudian menjadikan dirinya sebagai presiden pertama Afghanistan.

2.2 Invansi Uni Soviet di Afghanistan.

Pada tahun 1978, Presiden Mohammad Daoud Khan dan seluruh keluarganya dibunuh ketika Partai Rakyat Demokratik Komunis Afghanistan melancarkan kudeta yang dikenal sebagai Revolusi Saur, dan mengambil alih Pemerintahan. Kudeta ini akhirnya menyebabkan Afghanistan jatuh ke dalam kubangan perang saudara berkepanjangan. Pada 24 Desember 1979, Uni Soviet memutuskan untuk melakukan invasi ke Afghanistan dengan mengirim 100.000 pasukan dan ditambah dengan 100.000 pasukan Afghanistan pendukung sosialisme. Guna merespon invasi Uni Soviet, kaum Mujahiddin melancarkan perang jihad melawan Komunisme. Sementara itu, AS dibawah Pemerintahan Presiden Ronald Reagan mulai meningkatkan persenjataan dan pendanaan bagi Mujahiddin yang mulai melakukan perlawanan gerilya.

Dalam 10 tahun pendudukan Uni Soviet di Afghanistan mengakibatkan 600 ribu – 2 juta penduduk Afghanistan terbunuh, sekitar 6 juta mengungsi ke Pakistan dan Iran, dimana lebih dari 38 ribu diantaranya berhasil ke Amerika Serikat dan lebih banyak lagi yang ke Eropa. Menghadapi tekanan internasional yang kuat dan

banyaknya jumlah korban, Soviet akhirnya mundur dari Afghanistan pada 1989. Hal ini dipandang sebagai kemenangan *proxy war* AS dalam Perang Dingin. Meskipun telah mundur dari Afghanistan, Uni Soviet terus mendukung Pemerintahan komunis Presiden Mohammad Najibullah hingga 1992 ketika rezim komunis Afghanistan benar-benar runtuh.

Pendudukan Soviet mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan perlawanan berbasis Islam atau disebut Mujahiddin. Setidaknya terdapat tujuh kelompok perlawanan Mujahiddin melawan Soviet yang berbasis di Pakistan: (1) *Hezb-i-Islami* pimpinan Gulbuddin Hekmatyar, (2) *Hezb-i-Islami* pimpinan Maulana Yunis Khalis (pecahan kelompok Hekmatyar), (3) *Jamiat-i-Islami* pimpinan Prof. Burhanuddin Rabbani dengan pejuangnya paling terkenal adalah Ahmad Syah Massoud, (4) *Ittihad-i-Islam Bara-i Azadi Afghanistan* pimpinan Rasul Sayyaf, (5) *Mahaz-i-Milli-i-Islami* pimpinan Sayyid Ahmad Gailani, (6) *Jabha-i-Nijat-i-milli* pimpinan Sebgnatullah Mojaddedi, dan (7) *Harakat-i-Inqilab-i-Islami* pimpinan Maulvi Nabi Muhammadi.

Setelah kaum Mujahiddin mampu mengusir Uni Soviet, para pemimpin Mujahiddin yang pada umumnya juga merupakan para *warlords* yang memiliki wilayah kekuasaan masing-masing justru mulai berperang antar mereka sendiri untuk berkuasa di Afghanistan. Meskipun berbagai upaya membentuk Pemerintahan persatuan nasional, yang terdiri atas berbagai partai Islam dilaksanakan tetapi akhirnya gagal karena perbedaan-perbedaan yang tajam di antara mereka. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pembentukan *The Peshawar Accords* pada 1992 untuk perdamaian dan pembagian kekuasaan antar kelompok-kelompok politik Afghanistan setelah jatuhnya rezim komunis Najibullah, dengan pendirian negara bernama *Islamic State of Afghanistan* dengan Presiden terpilih Prof. Burhanuddin Rabbani. Namun demikian salah satu *warlords* yakni Gulbuddin Hekmatyar berkeinginan menguasai sendiri Kabul sehingga menyebabkan para *warlords* lain juga berebut masuk Kabul untuk mencegah ambisi Hekmatyar.

Perjanjian Peshawar tersebut akhirnya gagal menjembatani dan menyatukan perbedaan antara berbagai faksi yang ada. Perang saudara pun tidak dapat dihindari. Dalam satu tahun masa kekuasaan Mujahiddin, tercatat 30.000 warga sipil terbunuh di Kabul dan 100.000 lainnya luka-luka. Kekacauan yang berlarut-larut pada akhirnya memicu munculnya kekuatan Taliban, sebuah kelompok siswa Madrasah yang ditengarai didukung oleh Pakistan. Taliban didirikan oleh Mullah Mohammad Omar pada tahun 1994. Mullah Omar adalah salah satu Mujahiddin yang ikut bertempur melawan Uni Soviet. Mullah Omar mendirikan gerakan Taliban didorong keinginan untuk menegakkan ketertiban berdasarkan hukum Islam, dan memberantas *warlord-ism*.

Gerakan Taliban berhasil menguasai kota Kabul pada 1996 dan membentuk Pemerintahan "*Islamic Emirate of Afghanistan*", yang keras dalam menafsirkan ajaran agama Islam. Kaum wanita diperintahkan menggunakan burqa dan tidak diperbolehkan bersekolah. Pada masa rezim Taliban, lembaga-lembaga Pemerintah hampir tidak berfungsi karena kekuasaan dipusatkan pada tokoh Mullah Omar dan pengikut yang dekat dengannya. Kelompok Taliban juga menyediakan tempat persembunyian bagi konglomerat Saudi Osama Bin Laden, yang telah diburu FBI sejak tahun 1998 karena dianggap sebagai dalang pengemboman Kedubes AS di Tanzania dan di Kenya pada tahun 1998.

2.3 Invasi Amerika Serikat dan Sekutunya.

Menyusul peristiwa serangan teroris di New York dan Markas Pentagon di Washington, DC, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, Pemerintah Amerika Serikat menuduh Osama bin Laden merupakan dalang serangan tersebut, dan meminta Taliban menyerahkan Osama bin Laden kepada AS. Penolakan Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden membuat AS dan sekutunya menyerang Afghanistan pada 7 Oktober 2001 melalui *Operasi Enduring Freedom* dan mendukung kelompok *United Front* atau *Northern Alliance* yang anti Taliban. Selanjutnya, kelompok *Northern Alliance* berhasil menguasai kota Kabul pada tanggal 14 November

2001 dan mengusir Taliban. Dalam sebuah konferensi di Bonn, Desember 2001, tercapai kesepakatan diantara faksi-faksi untuk membentuk Pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Dr. Hamid Karzai dan menempatkan pasukan penjaga perdamaian internasional (*International Security Assistance Force/ISAF*) yang bertugas di Afghanistan dari tahun 2001 – 2014 berdasarkan Resolusi PBB No. 1386 tanggal 20 Desember 2001.

PBB kemudian juga membentuk Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) untuk membantu negara dan rakyat Afghanistan dalam meletakkan dasar bagi perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan. UNAMA didirikan pada 28 Maret 2002 oleh Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1401. Mandat aslinya adalah untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Bonn (Desember 2001). Ditinjau setiap tahun, mandat ini telah diubah dari waktu ke waktu untuk mencerminkan kebutuhan negara dan diperpanjang dengan suara bulat selama enam bulan, pada 17 September 2021, oleh Dewan Keamanan PBB.

Dewan juga meminta Sekretaris Jenderal untuk menyiapkan laporan tertulis pada tanggal 31 Januari 2022 yang menguraikan “rekomendasi strategis dan operasional untuk mandat UNAMA sehubungan dengan perkembangan politik, keamanan, dan sosial baru-baru ini” di Afghanistan. Resolusi 2543 (2020) menyerukan UNAMA dan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Afghanistan, dalam mandat mereka dan dengan cara yang konsisten dengan kedaulatan, kepemimpinan dan kepemilikan Afghanistan, untuk terus memimpin dan mengoordinasikan upaya sipil internasional dalam kerja sama penuh dengan Pemerintah Afghanistan.

Dewan Keamanan juga mengakui bahwa mandat baru UNAMA adalah untuk mendukung asumsi penuh kepemimpinan dan kepemilikan Afghanistan di bidang keamanan, Pemerintahan dan pembangunan, konsisten dengan Dekade Transformasi (2015–2024) dan dengan pemahaman yang dicapai antara Afghanistan dan komunitas internasional dalam konferensi internasional di Kabul (2010), London (2010 dan 2014), Bonn (2011), Tokyo (2012), dan Brussels (2016), dan KTT NATO yang diadakan di Lisbon (2010),

Chicago (2012) , Wales (2014), Warsawa (2016) dan Brussel (2017), Kabul (2018), Jenewa (2018 dan 2020). PBB telah terlibat di kawasan itu sejak 1946 ketika Afghanistan bergabung dengan Majelis Umum. Sejak 2008, dan mengikuti arahan dari Sekretaris Jenderal PBB, UNAMA adalah misi terpadu. Ini berarti bahwa Misi Politik Khusus, semua badan, dana dan program PBB, bekerja secara multidimensi dan terintegrasi untuk membantu Afghanistan dengan lebih baik sesuai dengan prioritas yang ditetapkan secara nasional. Sejak 2020, UNAMA dipimpin oleh Deborah Lyons.

Dua Deputy Perwakilan Khusus (DSRSG) mengawasi pilar utama misi – isu politik dan pembangunan. Termasuk di bawah pilar-pilar ini adalah bagian misi yang mengkhususkan diri dalam isu-isu seperti analisis politik, pelaporan, dan penjangkauan, dan koordinasi donor, serta koordinasi dana dan program badan-badan PBB. Pilar urusan politik dipimpin oleh Mette Knudsen, seorang Deputy Perwakilan Khusus yang bertanggung jawab untuk mendukung penjangkauan politik, resolusi konflik, dan kerja sama regional. Pilar tersebut mencakup analisis dan pelaporan, urusan politik, supremasi hukum, kantor penghubung di Islamabad dan Teheran, unit gender dan kantor dukungan pemilihan.

Pilar pembangunan dipimpin oleh Ramiz Alakbarov, Deputy Perwakilan Khusus yang fokus pada pembangunan dan bantuan kemanusiaan. Pilar pembangunan UNAMA, berfungsi untuk lebih mengintegrasikan upaya pembangunan di Afghanistan, terutama dalam hal peningkatan kapasitas dan koordinasi bantuan kemanusiaan dari badan-badan internasional. Alakbarov juga merupakan Resident Coordinator PBB untuk Afghanistan, yang bertanggung jawab atas koordinasi kerja Country Team PBB. UNCT in Afghanistan terdiri dari 20 badan dengan kantor di Afghanistan:

1. FAO (*Food and Agriculture Organization*)
2. IFAD (*International Fund for Agricultural Development*)
3. ILO (*International Labour Organization*)
4. IOM (*International Organization for Migration*)
5. OCHA (*UN Office Coordination of Humanitarian Affairs*)
6. OHCHR* (*Office of the High Commissioner for Human Rights*)

7. UN WOMEN (*United Nations Development Fund for Women*)
8. UNAIDS (*United Nations program on HIV/AIDS*)
9. UNDP (*United Nations Development Programme*)
10. UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*)
11. UNFPA (*United Nations Population Fund*)
12. UN-HABITAT (*United Nations Centre for Human Settlements*)
13. UNHCR (*United Nations High Commission for Refugees*)
14. UNICEF (*United Nations Children's Fund*)
15. UNIDO (*United Nations Industrial Development Organization*)
16. UNITAR (*United Nations Institute for Training and Research*)
17. UNMAS (*United Nations Mine Action Service*)
18. UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*)
19. UNOPS (*UN Office for Project Services*)
20. WFP (*World Food Programme*)
21. WHO (*World Health Organization*)

Sampai dengan 2021, pasukan AS dan NATO telah berada di Afghanistan selama dua dekade. Dalam pertemuan KTT NATO pada November 2010, para pemimpin NATO sepakat untuk memberikan tanggungjawab keamanan secara penuh kepada Afghanistan pada akhir 2014. Pada awal tahun 2015 NATO-ISAF yang dimotori oleh AS merubah misi tempurnya menjadi *Resolute Support Mission* (RSM) untuk terus memberikan dukungan pelatihan dan nasihat kepada pasukan keamanan Afghanistan. RSM dibentuk berdasarkan Resolusi PBB No. 2189 dan bertugas di Afghanistan mulai 28 Desember 2014 hingga 12 Juli 2021.

Berdasarkan Konstitusi 2004, struktur politik Afghanistan diganti dengan Pemerintah yang dipilih melalui proses demokrasi/pemilu. Kemudian Republik Islam Afghanistan berdiri pada tahun 2004 dimana pemilu demokratis yang pertama kalinya dilaksanakan pada tahun tersebut dengan terpilihnya Dr. Hamid Karzai sebagai presiden pertama Republik Islam Afghanistan. Presiden Hamid Karzai terpilih untuk kedua kalinya pada tahun 2009. Berdasarkan Konstitusi 2004, masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 (dua) periode, oleh sebab itu pada tahun 2014, Presiden Karzai

menyerahkan kekuasaannya kepada Dr. Ashraf Ghani Ahmadzai sebagai pemenang Pemilu 2014. Pada Pemilu 2014, Ashraf Ghani kembali terpilih sebagai presiden dan kembali menjabat presiden hingga diselenggarakannya Pemilu tahun 2024.

Kendati transisi politik menuju demokrasi telah berlangsung, namun Taliban yang selama ini dianggap telah kalah, ternyata semakin hari semakin menunjukkan pengaruhnya. Taliban kembali menjadi pusat perhatian, karena kemunculan mereka sebagai salah satu kekuatan politik yang tidak bisa diabaikan. Sementara itu, kehadiran militer AS secara terus-menerus di Afghanistan semakin tidak populer di kalangan rakyat AS sendiri. AS juga menilai bahwa tujuan utama kehadirannya di Afghanistan telah terpenuhi dengan terbunuhnya Osama Bin Laden melalui *Operation Neptune's Spear* pada tahun 2011.

Jumlah kehadiran tentara AS dan NATO di Afghanistan terus menurun dari 130 ribu pasukan pada masa ISAF menjadi sekitar 17 ribu pada masa RSM. Presiden Donald Trump yang berkuasa di AS sejak Januari 2019 terkenal amat pragmatis. Pada awalnya, Donald Trump berupaya mengambil sikap keras terhadap Taliban. Namun demikian, dengan tidak populernya perang Afghanistan di kalangan rakyat AS, konsentrasi menghadapi rivalitas dengan China, ditambah dengan kebangkitan Taliban yang semakin kuat, plus pandemi COVID 19 yang menjadi-jadi di AS, diperkirakan membuat AS semakin kehilangan minat untuk memperpanjang kehadirannya di Afghanistan.

Pada 29 Februari 2020, Pemerintah AS dibawah Donald Trump akhirnya mengakui Taliban sebagai pihak yang sejajar melalui penandatanganan Perjanjian Doha (*Doha Agreement*) atau *The Agreement to Bring Peace to Afghanistan*. Perjanjian Doha tersebut mengatur penarikan pasukan NATO secara keseluruhan dari Afghanistan sebagai imbalan atas janji Taliban untuk mencegah Al Qaida beroperasi di wilayah-wilayah kendali Taliban, dan dimulainya pembicaraan damai dengan Pemerintah Afghanistan. Dalam Perjanjian Doha tersebut, Amerika Serikat menyetujui pengurangan awal tingkat kekuatannya dari 13.000 menjadi 8.600 dalam 135 hari (yaitu, pada Juli 2020), diikuti dengan penarikan penuh dalam 14 bulan yaitu pada 1 Mei 2021, jika Taliban mempertahankan

komitmennya. Amerika Serikat juga berkomitmen untuk menutup lima pangkalan militer dalam 135 hari, dan menyatakan niatnya untuk mengakhiri sanksi ekonomi terhadap Taliban pada 27 Agustus 2020.

Perjanjian Doha tersebut didukung oleh China, Rusia, dan Pakistan dan dengan suara bulat didukung oleh Dewan Keamanan PBB, tetapi tidak melibatkan Pemerintah Afghanistan. Sementara itu, India menyambut pakta tersebut. Ketika Presiden Biden berkuasa di AS mulai Januari 2021, ternyata Biden meneruskan kebijakan Trump tersebut. Meskipun ada perjanjian damai, serangan gerilyawan Taliban terhadap pasukan keamanan Afghanistan melonjak setelahnya, dengan ribuan orang tewas. Namun, penarikan tentara AS sesuai kesepakatan terus berlanjut. Pada Januari 2021, hanya 2500 tentara AS yang tersisa di negara itu, dan pasukan NATO sepenuhnya dievakuasi pada akhir musim panas 2021. AS menyelesaikan evakuasi penuhnya pada 30 Agustus 2021, ketika Taliban menguasai sepenuhnya Afghanistan.

Sempat berhentinya perundingan Doha, mendorong terselenggaranya Konferensi Moskow yang berlangsung pada 18 Maret 2021 yang dihadiri oleh negara-negara 'Perpanjangan Troika' yakni Rusia, China, AS, Pakistan serta perwakilan-perwakilan dari Pemerintah Republik Islam Afghanistan, Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional Afghanistan (*Afghanistan's High Council for National Reconciliation*), Taliban, tokoh politik Afghanistan terkemuka, serta Qatar dan Turki sebagai tamu kehormatan.

Konferensi Moskow telah menghasilkan "*Joint Statement of Extended Troika on Peaceful Settlement in Afghanistan*", 18 Maret 2021, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian konflik di Afghanistan hanya dapat dilakukan melalui negosiasi damai.
2. Pengurangan kekerasan termasuk pelarangan kepada Taliban untuk melakukan serangan militer di musim semi 2021.
3. Sesuai dengan Resolusi DK PBB 2513 (2020), negara-negara 'Perpanjangan Troika' tidak mendukung pengembalian *Islamic Emirate of Afghanistan* dan menyerukan Republik Islam

Afghanistan dan *High Council for National Reconciliation* untuk terus melakukan perundingan damai dengan Taliban.

4. Para peserta perundingan damai intra-Afghan agar segera mendiskusikan isu-isu fundamental bagi penyelesaian konflik termasuk dasar-dasar bagi negara Afghanistan yang stabil dan inklusif.
5. Mendukung pembentukan negara Afghanistan yang merdeka, berdaulat, bersatu, damai, demokrasi dan mandiri.
6. Menyerukan agar Pemerintah Republik Islam Afghanistan dan Taliban menjamin agar kelompok-kelompok teroris maupun individu-individu tidak menggunakan tanah Afghanistan untuk melancarkan serangan kepada negara mana pun.
7. Setiap perjanjian damai harus menjamin perlindungan atas hak-hak atas seluruh rakyat Afghanistan mencakup ekonomi, sosial, perkembangan politik dan *rule of law*.
8. Komitmen negara-negara Perpanjangan Troika untuk memobilisasi bantuan internasional apabila penyelesaian politik di Afghanistan tercapai.
9. Menyambut baik PBB memainkan peran positif dan konstruktif dalam proses perdamaian di Afghanistan.

Presiden Afghanistan Dr. Ashraf Ghani dalam pernyataannya pada tanggal 16 Maret 2021 menyatakan kesediaannya untuk *transfer of power*, asalkan melalui Pemilu. Kementerian Luar Negeri Republik Islam Afghanistan pada 19 Maret 2021 menyambut baik *Joint Statement* yang telah dihasilkan pada Konferensi Moskow dan menyerukan agar Taliban mematuhi Resolusi DK PBB 2513 (2020) yang tidak mendukung pengembalian *Islamic Emirates of Afghanistan*, dan menekankan prinsip bahwa Republik Islam adalah satu-satunya struktur yang inklusif dan dapat diterima untuk menjamin pluralisme Afghanistan.

Setelah Konferensi Moskow, menurut rencana akan diselenggarakan Konferensi perdamaian Afghanistan di Turki, namun Konferensi di Turki tersebut tidak pernah terjadi oleh karena tidak disetujui Taliban yang menganggap Turki lebih berpihak pada etnis Tajik. Taliban sendiri kemudian memulai serangan militer untuk

menguasai Afghanistan adalah pada 1 Mei 2021, bersamaan dengan penarikan pasukan AS. Satu per satu, provinsi-provinsi Afghanistan jatuh ke tangan Taliban, termasuk ibukota Kabul pada 15 Agustus 2021.

Pada awal penugasan kami yaitu Maret 2017, Afghanistan telah berbentuk Republik Islam yang didirikan berdasarkan Konstitusi 2004. Sedikit bisa kami ceritakan tentang kondisi keadaan politik negara Afghanistan pada waktu itu.

3.1 Identitas Negara Afghanistan.

1. Lambang Negara.



Gambar 1. Lambang Negara Afghanistan.

Terdapat kalimat syahadat dalam bahasa Arab di atas lambang, didalamnya terdapat masjid dan mihrab yang menghadap Mekkah dengan sajadah di dalamnya. Dua buah bendera Afghanistan mengapit mesjid. Di bawah mesjid terdapat penulisan tahun Afghanistan 1298 yang sama dengan tahun 1919 Masehi yang merupakan tahun Kemerdekaan Afghanistan dari Inggris. Di bagian bawah lambang terdapat tulisan nama negara Afghanistan. Gandum dan pita melingkari gambar masjid beserta kedua bendera. Lingkaran gandum melambangkan kemakmuran, sedangkan gambar masjid dan Dua Kalimat Syahadat melambangkan bangsa Afganistan yang religius Islami.

2. Bendera Republik Islam Afghanistan.



Gambar 2. Bendera Republik Islam Afghanistan

Tiga warna vertikal dari kiri kekanan hitam, merah, hijau dengan simbol lambang negara. Warna hitam melambangkan masa gelap dibawah penjajahan Inggris, warna merah melambangkan perjuangan melawan penjajah, hijau melambangkan kemerdekaan.

3. Lagu Kebangsaan.

Berdasarkan pasal 20 Konstitusi Tahun 2004 lagu kebangsaan Afghanistan liriknya dalam bahasa Pashtun dengan menyebutkan “Allahu Akbar” serta nama-nama suku yang ada di Afghanistan.

4. Hari-hari Penting.

Terdapat beberapa tanggal dan bulan yang dianggap oleh masyarakat Afghanistan sebagai tanggal yang memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain:

15 Februari : *Expulsion of Former Soviet Union*

21 Maret : Tahun Baru Penanggalan Afghanistan

22 Maret : Hari Pendidikan

28 April : Kemenangan Revolusi Islam di Afghanistan

24 Mei : Hari Guru

19 Agustus : Kemerdekaan Afghanistan 1919

9 September : Peringatan Martyrdom Pahlawan Nasional

Ditambah beberapa hari keagamaan seperti 10 Muharam Ashura, Idul Fitri, dan Idul Adha.

5. Konstitusi.

Konstitusi Afghanistan diratifikasi pada tahun 2004 yang disetujui secara konsensus oleh Loya Jirga dan merestrukturisasi Pemerintahan Republik Islam yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.

6. Sistem Pemerintahan (Pemerintahan Persatuan Nasional).

Eksekutif Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dibantu oleh Wakil Presiden I dan Wakil Presiden II. Legislatif Parlemen (Loya Jirga) menganut sistem dua kamar (bicameral) yang terdiri dari DPR (Wolesi Jirga) 249 kursi dan DPD (Meshrano Jirga) 102 Kursi. Lembaga yudikatif bersifat independen, Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas persetujuan DPR.

7. Majelis Shura.

Majelis Shura merupakan badan peradilan tradisional Afghanistan di wilayah di mana badan formal peradilan kehadirannya tidak dirasakan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menyelesaikan persoalan, khususnya yang dianggap bersifat 21ahasa melalui Majelis Shura. Hukum yang dipakai adalah hukum adat/tradisi dan hukum Islam. Dalam bahasa Pashtun Shura lebih dikenal dengan sebutan Jirga.

8. Lembaga Eksekutif.

Pemerintah Persatuan Nasional Afghanistan, *National Unity Government* (NUG) yang terdiri dari Presiden dengan dibantu 2 Wakil Presiden, serta dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu, yang diselenggarakan terakhir pada tahun 2019. Posisi CEO juga dibentuk pada tahun 2014 untuk mengakomodir peserta Pemilu yang kalah guna memperkuat Pemerintahan yang baru. Posisi CEO Afghanistan dipegang oleh Abdullah Abdullah dari tahun 2014 hingga 2020.

Tabel 1.
Susunan Pemerintahan Presiden Ashraf Ghani Pada Saat Jatuhnya
Republik Islam Afghanistan

Portfolio	Nama
President	Ashraf Ghani
First Vice President	Amrullah Saleh
Second Vice President	Muhammad Sarwar Danish
Chairman of High Council for National Reconciliation	Abdullah Abdullah
Foreign Affairs Minister	Mohammed Hanif Atmar
National Defense Minister	Bismillah Khan Mohammadi
Interior Affairs Minister	Abdul Satar Mirzakwal
Finance Minister	Mohammad Khalid Payenda
Economy Minister	Mustafa Mastoor
Agriculture Minister	Nasir Ahmad Durrani
Energy and Water Minister	Ali Ahmad Osmani
Justice Minister	Fazal Ahmad Manawi
Information and Culture Minister	Mohammad Qasim Wafayezada
Education Minister	Rangina Hamidi (Acting)
Higher Education Minister	Abas Basir
Trade and Commerce Minister	Nisar Ahmad Fizi Ghoryani

Transportation and Aviation Minister	Muhammad Hamid Tahmasi
Women's Affairs Minister	Delbar Nazari
Haj and Religious Affairs Minister	Faiz Mohammad Osmani
Public Health Minister	Wahid Majrooh (Acting)
Public Works Minister	Najibullah Yamin
Minister of Mining and Petroleum	Mohammad Haroon Chakansuri
Ministry of Communications and Information Technology	Masooma Khawari
Rural Rehabilitation and Development Minister	Hayatullah Hayat
Minister of Labor, Social Affairs, Martyrs and Disabled	Bashir Ahmad Tahyanj
Frontiers, Nations, and Tribal Affairs Minister	Gul Agha Sherzai
Urban Development and Housing Minister	Sayed Sadat Mansur Naderi
Counter Narcotics Minister	Salamat Azimi
Refugees and Repatriation Minister	Sayed Hussain Alemi Balkhi
Attorney General	Zabihullah Karimullah
Director of the National Directorate of Security	Mohammed Masoom Stanekzai
National Security Advisor	Mohammad Hanif Atmar

9. Lembaga Peradilan.

Badan Peradilan tertinggi adalah *Stera Mahkama* (Mahkamah Agung). Ketua dan Anggotanya dipilih oleh Presiden dengan persetujuan DPR untuk masa jabatan 10 tahun. Badan Peradilan lainnya adalah Pengadilan Tinggi, Pengadilan Banding, serta Pengadilan Distrik dan Lokal. Pengadilan diijinkan menggunakan Hukum Islam, khususnya Mazhab Hanafi, apabila suatu masalah tidak diatur oleh hukum sekuler.

10. Badan Kepolisian.

Afghan National Police (ANP) berada dibawah Kementerian Dalam Negeri Afghanistan. ANP terdiri dari beberapa unit: *Afghan Uniform Police* (komponen utama penegak hukum), *Afghan Border Police*, *Afghan Highway Police*, dan *Criminal Investigation Department*.

11. Badan Intelijen.

National Directorate of Security (Amniyat) merupakan badan intelijen Pemerintah Afghanistan. Direktur *NDS* bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

12. Pemerintah Daerah.



Gambar 3. Peta Afghanistan.

Jumlah Provinsi & Daerah Otonomi : 34 Provinsi. Afghanistan terdiri dari 34 provinsi dan setiap provinsi dibagi lagi ke dalam beberapa distrik yang keseluruhannya terdiri dari 398 distrik.

- | | |
|--------------|------------|
| 1. Badakshan | 18. Konar |
| 2. Badghis | 19. Kunduz |

- | | |
|--------------|---------------|
| 3. Baghlan | 20. Laghman |
| 4. Balkh | 21. Logar |
| 5. Bamyan | 22. Nangarhar |
| 6. Daykundi | 23. Nimruz |
| 7. Farah | 24. Nurestan |
| 8. Faryab | 25. Oruzgan |
| 9. Ghazni | 26. Paktia |
| 10. Ghor | 27. Paktika |
| 11. Helmand | 28. Panjshir |
| 12. Herat | 29. Parwan |
| 13. Jowzjan | 30. Samangan |
| 14. Kabul | 31. Sare pol |
| 15. Kandahar | 32. Takhar |
| 16. Kapisa | 33. Wardak |
| 17. Khost | 34. Zabol |

Setiap provinsi dikepalai oleh seorang Gubernur, sedangkan setiap distrik yang biasanya mencakup sebuah kota atau beberapa desa dikepalai oleh Gubernur Distrik. Setiap Gubernur dan Gubernur Distrik dipilih bersamaan pemilihan presiden. Gubernur dan Gubernur Distrik merupakan wakil Pemerintah pusat. Ibukota Kabul mendapat status khusus di mana Walikotaanya dipilih langsung oleh Presiden dan tidak berada dibawah Gubernur Provinsi Kabul.

3.2 Kembalinya Pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Sejak jatuhnya Kabul ke tangan Taliban pada 15 Agustus 2021, Taliban memang belum menyebutkan secara resmi nama negara Afghanistan yang baru. Meskipun demikian, Taliban menyebutkan bahwa Afghanistan akan berbentuk "Islamic Emirates".

1. Lambang Pemerintahan Taliban di Afghanistan.



Gambar 4. Lambang Pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Artinya adalah Sebuah mihrab dengan mimbar di dalam, mendukung Quran, dan dimahkotai oleh matahari. Pendukung Dua pedang, dua berkas gandum dan roda gigi. Motto Arab dan Pashto: لا اله الا الله محمد رسول الله - 10, 15 هـ ق - افغانستان اسلامي امارت "Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah - 1415-1-10 AH[b] - Islam Emirat Afganistan".

2. Bendera Taliban.



Gambar 5. Bendera Taliban.

Bendera bertuliskan “*La ilaha illallah Muhammadur Rasulallah*” (Tiada Tuhan Selain Allah dan Muhammad adalah Utusan Allah). Usai jatuhnya Kabul di tangan Taliban pada 15 Agustus 2021, pada 17 Agustus 2021, pemimpin partai Hezb-e-Islami Gulbuddin yang berafiliasi dengan Taliban, Gulbuddin Hekmatyar, bertemu dengan Hamid Karzai, mantan Presiden Afghanistan, dan Abdullah Abdullah, ketua Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional dan mantan Chief Executive Afghanistan, di Doha, Qatar, dengan tujuan membentuk Pemerintahan, meskipun belum jelas apakah Karzai atau Abdullah akan terlibat langsung dalam Pemerintahan semacam itu. Presiden Ashraf Ghani, setelah melarikan diri dari Afghanistan, muncul di Uni Emirat Arab dan mengatakan

bahwa dirinya mendukung negosiasi semacam itu dan sedang dalam pembicaraan untuk kembali ke Afghanistan.

Pada Agustus 2021, Emirat Islam sedang menjalani masa transisi politik dengan Dewan Koordinasi tidak resmi yang dipimpin oleh negarawan senior dalam proses koordinasi transfer lembaga negara Republik Islam Afghanistan ke Taliban. Pasukan Taliban, sementara itu, menjalankan otoritas polisi yang efektif di negara itu.

Pada 27 Agustus 2021, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi, berkunjung ke kantor Taliban di Doha, Qatar. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI bertemu dengan perwakilan Taliban. Ibu Menlu RI dan perwakilan Taliban membahas sejumlah poin. Salah satunya terkait hak-hak perempuan. Ibu Menlu RI menyampaikan kepada Taliban pentingnya: Pemerintah inklusif di Afghanistan, menghormati hak-hak perempuan, dan memastikan Afghanistan tidak menjadi tempat berkembang organisasi dan kegiatan teroris.

Beberapa jam setelah penerbangan terakhir pasukan Amerika meninggalkan Kabul pada 30 Agustus, seorang pejabat Taliban yang diwawancarai mengatakan bahwa Pemerintah baru kemungkinan akan diumumkan pada Jumat 3 September setelah Jumu'ah. Ditambahkan bahwa Hibatullah Akhundzada akan secara resmi bernama Emir, dengan menteri kabinet terungkap di Arg dalam sebuah upacara resmi. Abdul Ghani Baradar akan ditunjuk sebagai kepala Pemerintahan sebagai Perdana Menteri, sementara posisi penting lainnya akan dijabat oleh Sirajuddin Haqqani dan Mohammad Yaqoob. Di bawah pemimpin tertinggi, Pemerintahan sehari-hari akan dipercayakan kepada kabinet.

Menurut CNN News 18, Pemerintah baru kemungkinan akan menjadi mirip dengan Iran dengan Haibatullah Akhundzada sebagai pemimpin tertinggi mirip dengan peran seperti Supreme Leader Sayyid Ali Khamenei, dan akan berbasis di Kandahar. Baradar atau Yaqoob akan menjadi kepala Pemerintahan sebagai Perdana Menteri. Kementerian dan lembaga Pemerintah akan berada di bawah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pemimpin Tertinggi akan memimpin badan eksekutif yang dikenal sebagai Dewan Tertinggi dengan 11 hingga 72 anggota. Abdul Hakim Ishaqzai kemungkinan

akan dipromosikan menjadi Hakim Agung. Menurut laporan itu, Pemerintahan baru akan berlangsung dalam kerangka Konstitusi Afganistan 1964 yang diamandemen.

Pada awal September, Taliban merencanakan Kabinet hanya untuk laki-laki, menyatakan bahwa perempuan tidak akan diizinkan untuk "bekerja di posisi tinggi" di Pemerintahan dan bahwa perempuan "dikeluarkan" dari Kabinet. Wartawan dan aktivis hak asasi manusia lainnya, kebanyakan perempuan, memprotes di Herat dan Kabul, menyerukan agar perempuan dimasukkan dalam Kabinet. Kabinet yang diumumkan pada 7 September 2021 hanya beranggotakan laki-laki, dan Kementerian Urusan Perempuan nampaknya telah dihapuskan. Hingga Memorandum ini dibuat, belum ada satu negara di dunia yang menyatakan mengakui secara resmi Pemerintahan Taliban.

Tabel 2.
Susunan Kabinet Pemerintahan Sementara Taliban
(Diumumkan 7 September 2021)

Portfolio	Nama	Tahun Menjabat	Status
Supreme Leader	Hibatullah Akhundzada	2016-	
Prime Minister	Mohammad Hassan Akhund	2021-	Acting
First Deputy Prime Minister	Abdul Ghani Baradar	2021-	Acting
Second Deputy Prime Minister	Abdul Salam Hanafi	2021-	Acting
Minister of National Defense	Mohammad Yaqoob	2021-	Acting

Minister of Interior Affairs	Sirajuddin Haqqani	2021-	acting
Minister of Foreign Affairs	Amir Khan Muttaqi	2021-	acting
Minister of Finance	Hedayatullah Badri	2021-	acting
Minister of Education	Noorullah Munir	2021-	acting
Minister of Information and Culture	Khairullah Khairkhah	2021-	acting
Minister of Economy	Qari Din Hanif	2021-	acting
Minister of Hajj and Religious Affairs	Noor Mohammad Saqib	2021-	acting
Minister of Justice	Abdul Hakim Sharie	2021-	acting
Minister of Borders and Tribal Affairs	Noorullah Noori	2021-	acting
Minister of Rural Rehabilitation and Development	Mohammad Younus Akhundzada	2021-	acting
Minister of Public Work	Abdul Manan Omari	2021-	acting
Minister of Mines and Petroleum	Mohammed Isa Akhund	2021-	acting

Minister of Water and Energy	Abdul Latif Mansoor	2021-	Acting
Minister of Civil Aviation and Transport	Hamidullah Akhundzada	2021-	Acting
Minister of Higher Education	Abdul Baqi Haqqani	2021-	Acting
Minister of Telecommunications	Najibullah Haqqani	2021-	Acting
Minister of Refugees	Khalil Haqqani	2021-	Acting
Director of Intelligence	Abdul Haq Wasiq	2021-	Acting
Director of the Central Bank	Haji Mohammad Idris	2021-	Acting
Director of the Administrative Office of the President	Ahmad Jan Ahmady	2021-	Acting
Minister for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice	Sheikh Mohammad Khalid	2021-	Acting
Deputy Minister of Defense	Abdul Qayyum Zakir	2021-	Acting
Army Chief of Staff	Qari Fasihuddin	2021-	Acting

Deputy Foreign Minister	Sher Mohammad Abbas Stanekzai	2021-	acting
Deputy Interior Minister	Ibrahim Sadr	2021-	acting
Deputy Information and Culture Minister	Zabihullah Mujahid	2021-	acting
Deputy Director of Intelligence	Tajmir Javad	2021-	acting
Deputy Director of Intelligence	Rahmatullah Najeeb	2021-	acting
Deputy Interior Minister for Counter Narcotics	Abdulhaq Akhund	2021-	acting
Minister of Public Health	Qalandar Ibad	2021-	acting
Minister of Commerce and Industry	Nooruddin Azizi	2021-	acting
Deputy Minister of Commerce and Industry	Muhammad Basheer	2021-	acting
Deputy Minister of Commerce and Industry	Mohammad Azim Sultan Zada	2021-	acting
Deputy Minister of Public Health	Abdul Bari Omar	2021-	acting

Deputy Minister of Public Health	Mohammad Hassan Ghiasi	2021-	Acting
Deputy Minister of Water and Energy	Mujeeb-ur-Rehman Omar	2021-	Acting
Deputy Minister of disaster management	Ghulam Ghaos	2021-	Acting
Deputy Minister of Borders and Tribal Affairs	Haji Gul Mohammad	2021-	Acting
Deputy Minister of Borders and Tribal Affairs	Gul Zareem Kochai	2021-	Acting
Deputy Minister of Refugees	Arsala Kharoti	2021-	Acting
Deputy Minister of Higher Education and Technical affairs	Lutfullah Khairkhwa	2021-	Acting
Director of the Central National Statistics	Mohammad Faqeer	2021-	Acting
Head of the Afghanistan Nuclear Energy Agency	Engr. Najibullah	2021-	Acting
Minister of Agriculture, Irrigation and Livestock	Abdul Rahman Rashid	2021-	Acting

Deputy Minister of Agriculture, Irrigation and Livestock	Sadar Azam	2021-	acting
Deputy Minister of Agriculture, Irrigation and Livestock	Attaullah Omari	2021-	acting

4.1 Keadaan Ekonomi.

1. Gambaran Umum Ekonomi Afghanistan.

Perang selama lebih dari 40 tahun telah membuat infrastruktur Afghanistan hancur dan aktivitas perekonomian serta perdagangannya terhambat. Semenjak jatuhnya Taliban akibat invasi yang dipimpin NATO pada tahun 2001, ekonomi Afghanistan mengalami sedikit pertumbuhan yang didorong oleh faktor aliran bantuan dan investasi luar negeri. Perekonomian Afghanistan meningkat secara signifikan sejak tahun 2002 karena adanya suntikan dana milyaran dolar AS dari komunitas internasional, peningkatan aktivitas investasi serta kiriman uang ke Afghanistan dari para ekspatriasi yang tinggal di luar negeri. Hal ini juga disebabkan oleh pertumbuhan aktivitas produksi pertanian dan berakhirnya kekeringan di sebagian besar wilayah Afghanistan.

Namun demikian Afghanistan masih merupakan salah satu negara termiskin di dunia yang sangat bergantung kepada bantuan asing. Sekitar setengah dari populasinya tidak memiliki tempat tinggal, kekurangan fasilitas air bersih, pasokan listrik dan lapangan pekerjaan. Pada tahun 2020, Afghanistan menduduki peringkat ke-6 negara termiskin di dunia berdasarkan GNI per capita tahun 2020 standar *World Bank* yaitu sebesar sekitar US\$ 500. Sementara itu, negara termiskin di dunia urutan 1 hingga 5 adalah Burundi, Somalia, Mozambique, Madagascar, dan Sierra Leone. Sangat disayangkan, Afghanistan yang berada di jantung dunia dengan lokasi yang sangat strategis, disertai jiwa wira usaha rakyat yang tinggi akibat didikan Jalur Sutra ratusan tahun, namun karena perang yang tidak kunjung usai membuat negara yang indah ini belum dapat mencapai prestasi maksimalnya.

Ekonomi Afghanistan sangat bergantung pada bantuan internasional. Sektor swasta masih belum sepenuhnya berkembang,

dengan pekerjaan terkonsentrasi di pertanian dengan produktivitas rendah (44 persen dari total tenaga kerja bekerja di pertanian dan 60 persen rumah tangga memperoleh pendapatan dari pertanian). Pengembangan dan diversifikasi sektor swasta dibatasi oleh ketidakamanan, ketidakstabilan politik, institusi yang lemah, infrastruktur yang tidak memadai, korupsi yang meluas, dan lingkungan bisnis yang sulit (Afghanistan menduduki peringkat ke - 173 dari 190 negara dalam *Survei Doing Business 2020*).

Kelemahan berbagai institusi dan lemahnya kepemilikan hak milik intelektual (*property rights*) mengarah pada lemahnya keuangan dan akses keuangan, dengan kredit ke sektor swasta hanya sebesar tiga persen dari PDB. Daya saing yang lemah mendorong defisit perdagangan struktural, yang setara dengan sekitar 30 persen dari PDB, yang dibiayai hampir seluruhnya dari aliran masuk hibah. Hibah dari donor terus membiayai sekitar 75 persen dari belanja publik. Pengeluaran keamanan (keamanan nasional dan polisi) tinggi sekitar 28 persen dari PDB pada 2019, dibandingkan dengan rata-rata negara berpenghasilan rendah sekitar tiga persen dari PDB, mendorong total pengeluaran publik sekitar 57 persen dari PDB. Ekonomi gelap menyumbang bagian yang signifikan dari produksi, ekspor, dan lapangan kerja yaitu termasuk produksi opium, penyelundupan, dan penambangan ilegal.

Dengan masuknya bantuan sejak tahun 2002, Afghanistan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan perbaikan terhadap indikator sosial yang penting selama lebih dari satu dekade. Pertumbuhan tahunan rata-rata 9,4 persen antara tahun 2003 dan 2012, didorong oleh booming sektor jasa yang didorong oleh bantuan, dan pertumbuhan pertanian yang kuat.

Berbagai faktor telah memperlambat kemajuan ekonomi dan sosial, dengan pertumbuhan ekonomi hanya 2,5 persen per tahun antara 2015 - 2020, dan pencapaian indikator pembangunan melambat atau - dalam beberapa kasus - berbalik. Aliran bantuan menurun dari sekitar 100 persen dari PDB pada tahun 2009 menjadi 42,9 persen dari PDB pada tahun 2020.

Penurunan hibah menyebabkan kontraksi yang berkepanjangan dari sektor jasa, dengan penurunan pekerjaan dan pendapatan. Situasi keamanan memburuk, dengan Taliban menguasai wilayah yang meluas dan mengintensifkan serangan terhadap sasaran militer dan sipil, dengan korban sipil berjumlah lebih dari 10.000 per tahun antara 2014 dan 2019. Dampak dari penurunan hibah dan memburuknya keamanan diperburuk oleh ketidakstabilan politik menyusul sengketa hasil pemilihan presiden 2014. Pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional di bawah perjanjian pembagian kekuasaan ekstra-konstitusional menyebabkan gangguan administratif dan memperlambat kemajuan reformasi di Afghanistan.

Pada Konferensi Jenewa yang diadakan pada November 2020, para donor memperbarui komitmen mereka untuk membantu dukungan ke Afghanistan untuk 2021 - 2024. Namun, beberapa donor utama hanya memberikan janji satu tahun, bergantung pada Pemerintah Afghanistan untuk mencapai kemajuan dalam memerangi korupsi, mengurangi kemiskinan, dan memajukan pembicaraan damai yang sedang berlangsung. Dukungan bantuan periode 2021 - 2024 diperkirakan menurun sekitar 20 persen dari periode janji sebelumnya (US\$15,2 miliar selama 2016 - 2020) tetapi bisa turun lebih rendah lagi jika persyaratan tidak terpenuhi atau jika donor utama semakin mengurangi tingkat komitmen di tengah tekanan fiskal domestik.

Afghanistan sekarang menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan kemajuan pembangunan baru-baru ini dalam menghadapi ketidakpastian politik yang meningkat, menurunnya dukungan hibah internasional, dan ketidakamanan yang berkelanjutan. Opsi kebijakan dipersempit oleh lemahnya kapasitas implementasi lembaga Pemerintah, yang mencerminkan kendala tata kelola, dan opsi kebijakan makroekonomi yang sangat terbatas dalam konteks penyempitan ruang fiskal dan mekanisme transmisi moneter yang lemah.

Bank Dunia memperkirakan ekonomi Afghanistan mengalami kontraksi antara 5,5 persen dan 7,4 persen pada tahun 2020 sebab COVID-19 telah memburuk kemiskinan, dan mengarah pada

penurunan tajam dalam pendapatan Pemerintah. Bank Dunia memperingatkan bahwa proporsi orang Afghanistan yang hidup dalam kemiskinan dapat meningkat dari 55 persen pada tahun 2017 menjadi antara 61 persen dan 72 persen pada tahun 2020 karena penurunan pendapatan dan kenaikan harga makanan dan barang-barang rumah tangga lainnya. Bank Dunia memperkirakan Afghanistan akan membaik pada tahun 2021 pasca COVID 19 dengan pertumbuhan kembali positif sebanyak 1%.

Henry Kerali, Direktur Bank Dunia untuk Afghanistan menyatakan bahwa krisis COVID-19 memiliki dampak yang menghancurkan pada mata pencaharian rakyat Afghanistan, sekaligus merusak pendapatan Pemerintah dan kapasitasnya untuk membiayai program-program komprehensif untuk menyelamatkan nyawa, melindungi orang miskin, dan mendorong perekonomian. Virus COVID 19 telah berdampak pada pembangunan ekonomi Afghanistan karena negara itu terus menghadapi ketidakamanan, ketidakpastian mengenai tingkat dukungan internasional di masa depan. Secara umum dapat penulis rekapitulasikan gambaran kondisi riil perekonomian Afghanistan pada masa itu, sebagai berikut:

- a. GDP (PPP) : US\$ 19,81 Milyar (2020)
- b. GDP Tingkat pertumbuhan : - 1,9% (2020)
- c. GDP Per kapita (PPP) : US\$ 508,81 (2020)
- d. GDP (sektor): Pertanian (42.35%), Industri (18.25%), Jasa (39.4) (Estimasi 2020)
- e. Populasi kemiskinan: 47.3% (2020)
- f. Tingkat inflasi : 4.5% (2020)
- g. Jumlah tenaga kerja: 11 juta (estimasi 2021) terdiri dari sektor pertanian 78,6%, industri 5,7%, jasa 15,7%
- h. Tingkat Pengangguran: 11.73% (2020)
- i. Anggaran (GDP): - 2.5% dari GDP (tahun 2021)
- j. Industri: Produksi skala kecil tekstil, sabun, *Furniture*, sepatu, pupuk, dan semen; karpet *handwoven*, gas alam, minyak bumi, batubara, tembaga, marmer,
- k. Produk Pertanian: Bunga madat, gandum, buah-buahan, kacang-kacangan, bulu karakul.

- l. Nilai Ekspor: US\$ 776 Juta (2020) Komoditi Ekspor: buah-buahan, kacang-kacangan, karpet, wool, kapas, *gemstone*, kulit binatang, tanaman obat. Negara tujuan ekspor utama antara lain UAE (44.8%), Pakistan (24.3%), India (21.6%), dan AS (1.59%%), sedangkan negara mitra ekspor lainnya adalah China, Iran, Turki, Saudi Arabia, Jerman.
- m. Nilai Impor: US\$ 6.54 Milyar (2020). Komoditi Impor: minyak bumi, mesin dan perlengkapannya, bahan makanan, bahan metal (9%). Mitra impor Afghanistan adalah Iran (23.4%), Pakistan (17.1%), India (12.9%), China (8.68%), AS (8.61%), Uzbekistan (6.58%), Kazakhstan (5.77%), Turki (2.55%), Rusia (1.69%), dan Malaysia (1.59%).
- n. Utang Luar Negeri: \$ 2.84 miliar (2020).
- o. Mata Uang: Afghani (Kurs 1 USD ± 79.9 Afghani).

2. Sistem Perekonomian.

Afghanistan pada awalnya menganut sistem perekonomian tradisional, namun setelah pecah perang tahun 1979 menggunakan sistem perekonomian sentral (*Centralized Economy*) hingga tahun 2002 yang kemudian menganut sistem ekonomi pasar bebas (*Free Market*) berdasarkan Pasal 10 Konstitusi 2004 sampai dengan jatuhnya Republik. Hingga saat ini Dunia masih menunggu sistem kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh Taliban. Taliban sendiri telah meminta agar masyarakat internasional bersedia menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Taliban.

Perekonomian Afghanistan hingga saat ini masih bergantung pada pertanian, peternakan, perkebunan serta perdagangan kecil. Sejak tahun 1979 jutaan warga Afghanistan mengungsi ke Pakistan dan Iran serta negara-negara lain, mereka mengirimkan uang mereka ke kerabat mereka yang tinggal di Afghanistan sebagai sumber pendapatan.

Perang lebih dari 40 tahun telah menghancurkan sarana irigasi pertanian dan infrastruktur ekonomi lainnya. Masyarakat internasional menghadapi kendala berat dalam mengembangkan ekonomi Afghanistan karena tidak adanya stabilitas politik, lemahnya

fungsi lembaga ekonomi seperti perbankan, keuangan negara, sistem layanan publik serta merebaknya korupsi di lembaga Pemerintahan selain juga kurangnya sarana transportasi seperti kereta api dan akses laut.

Tahun 2002 menandai awal dari upaya internasional besar-besaran untuk membangun kembali ekonomi Afghanistan dan infrastrukturnya yang hancur melalui dana bantuan miliaran dolar. Dimulai dari Konferensi Tokyo pada tanggal 21 - 22 Januari 2002 yang menghasilkan dukungan untuk memulihkan ekonomi Afghanistan.

Afghanistan memulai program pengembangan ekonomi. Pemerintah mendirikan bank, memperkenalkan uang kertas baru, mendirikan universitas, dan mengirim siswa ke luar negeri untuk pendidikan. Dewasa ini sektor perbankan telah meningkat pesat di Afghanistan dengan lebih dari 16 bank beroperasi di Afghanistan sejak tahun 2003 termasuk *Da Afghanistan Bank, Bank Internasional Afghanistan, Islamic Bank of Afghanistan, Kabul Bank, Ghazanfar Bank, Azizi Bank, Pashtany Bank, Standard Chartered Bank, Micro Finance Bank*, dan lain-lainnya.

Jurnalis Mohamad Zahir Akbari dengan artikel "What Challenges the Free Market Faces in Afghanistan?" penerapan *Free Market* pada Republik Islam Afghanistan yang terlalu bebas. Akbari mengkritik bahwa apabila penerapan sistem pasar bebas namun tidak disertai dengan jaring pengaman social untuk melindungi yang lemah dan tidak mempunyai kemampuan bersaing. Penulis menyebutkan bahwa menurut para ahli ekonomi, tidak ada di dunia ini yang disebut sebagai murni *Free Market System*, namun merupakan gabungan antara sosialisme, komunisme, merkantilisme, *defence-mercantilism* dan tentu saja liberalisme.

Kesalahan interpretasi mengenai *free market system* di Afghanistan telah menyebabkan kenaikan jumlah warga miskin, kriminalitas yang semakin merajalela, dan tutupnya banyak pabrik akibat kenaikan harga bahan baku. Penulis meminta Pemerintah turun tangan apabila terdapat gangguan pada sistem pasar bebas seperti monopoli dan lain-lain yang dapat menyebabkan inflasi.

Sementara itu, PBB dan masyarakat internasional terus memberikan bantuan kemanusiaan yang cukup besar. AS, Uni Eropa (UE), dan Jepang merupakan negara-negara contributor terkemuka untuk Afghanistan. Menurut satu sumber, AS dan komunitas internasional telah menggelontorkan USD 1.2 trilyun dollar atau USD 62 milyar per tahun selama 18 tahun sejak tahun 2002.

Sesuai dengan hasil *Jenewa Conference on Afghanistan* pada 24 November 2020, negara-negara donor telah menjanjikan bantuan sebesar sekitar 3.3 milyar dollar per tahun sampai dengan tahun 2024. Indonesia sendiri berkomitmen memberikan bantuan total sebesar US\$ 5 juta untuk Afghanistan hingga 2024 dalam Konferensi Jenewa November 2020 tersebut.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Indonesia telah secara konsisten memberikan bantuan bagi pembangunan di Afghanistan. Total bantuan yang telah disampaikan oleh Indonesia kepada Afghanistan hingga saat ini mencapai US\$ 10 juta. Kontribusi tersebut diberikan diantaranya melalui program kerja sama trilateral dan peningkatan kapasitas di bidang UMKM, pemberdayaan perempuan, Pemerintahan yang baik, serta pengelolaan sumber daya alam di Afghanistan.

Namun demikian, pada Konferensi Jenewa 2020, negara-negara donor mulai bersikap kritis dimana perwujudan komitmen bantuan terhadap Afghanistan amat tergantung dari kinerja Pemerintah Republik Islam Afghanistan terhadap Pemerintahan yang bersih, transparan, dan pemberantasan korupsi. Sejak runtuhnya Pemerintahan Afganistan yang didukung Barat, dan pengambilalihan Taliban 15 Agustus 2021, Afganistan berada di ambang krisis kemanusiaan. Banyak negara yang sebelumnya bersedia memberikan bantuan telah menyatakan keraguan yang semakin besar karena kekhawatiran tentang bagaimana dana akan digunakan oleh Taliban yang kini berkuasa.

Di ambang krisis kemanusiaan yang besar di Afghanistan, PBB menjadi tuan rumah Konferensi Donor di Jenewa pada 13 September 2021 dalam upaya untuk mengumpulkan dana bantuan sebesar US\$ 606 juta untuk memenuhi kebutuhan mendesak Afganistan. Usai

Konferensi, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengumumkan bahwa negara donor telah menjanjikan dana bantuan lebih dari US\$1 miliar. Sekjen PBB menyatakan bahwa Konferensi ini sepenuhnya memenuhi harapannya sehubungan dengan solidaritas Dunia kepada rakyat Afghanistan.

Sebanyak 40 menteri negara-negara donor, termasuk Kepala Komite Internasional Palang Merah, serta puluhan perwakilan Pemerintah hadir baik secara langsung maupun virtual. Dalam Konferensi tersebut, Ibu Menlu RI Retno Marsudi menyampaikan komitmen Indonesia untuk membantu Afghanistan sebesar US\$ 3 juta kepada masyarakat Afghanistan untuk 3 (tiga) tahun ke depan, melalui mitra lokal yang terpercaya, sebagai dukungan konkret Indonesia. Dari total bantuan tersebut, sebesar USD 150.000 diperuntukkan bagi bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat.

4.2 Sumber Ekonomi.

1. Pertanian.

Secara umum hasil pertanian Afghanistan diperkirakan mencapai 52% dari GDP. Produksi utamanya adalah gandum, jagung, barley, padi, kapas, buah-buahan, kacang-kacangan. Ekonomi Afghanistan sangat tergantung pada hasil pertanian, meskipun faktanya hanya 12% dari tanah Afghanistan yang bisa ditanami dan kurang dari 6% saat ini yang digunakan untuk lahan pertanian. Produksi pertanian sangat tergantung kepada turunnya salju pada musim dingin dan air hujan pada musim semi. Sistem cocok tanam masih sangat tradisional dan masih sedikit petani yang menggunakan alat-alat modern seperti mesin traktor, pupuk kimia, atau pestisida.

Afghanistan adalah salah satu negara penghasil buah-buahan terbaik di dunia, berkat iklim yang sangat mendukung. Menurut keterangan Kementerian Pertanian, Irigasi dan Peternakan, setiap tahunnya Afghanistan dapat menghasilkan sekitar 1,5 juta ton buah segar setiap tahun. Afghanistan dikenal menghasilkan beberapa buah terbaik, terutama apel, aprikot, ceri, ara, anggur, melon, mulberry manis, persik, dan delima.

Provinsi Afghanistan utara terkenal dengan budidaya pistachio. Dalam beberapa tahun terakhir, petani di provinsi selatan dan barat juga mulai membudidayakan pistachio. Provinsi di bagian timur negara itu terkenal dengan kacang pinus. Provinsi utara dan tengah juga terkenal dengan almond dan kenari. Provinsi Bamyan di Afghanistan tengah dikenal karena menanam kentang berkualitas tinggi, dan rata-rata menghasilkan 140.000 hingga 170.000 ton. Provinsi Nangarhar terkenal dengan jeruk, zaitun, kacang tanah, dan kurma. Budidaya buah-buahan ini sekarang menyebar ke provinsi lain di bagian selatan negara itu.

Produksi gandum dan sereal adalah andalan pertanian tradisional Afghanistan. Produksi gandum nasional pada tahun 2020 adalah 5 juta ton. Lahan subur di Afghanistan sekitar 8 juta hektar. Pada tahun 2020 bahwa sekitar 8000 hektar tanah di Afghanistan digunakan untuk menanam safron. Safron Afghanistan adalah yang terbaik di dunia.

Gandum dan biji-bijian adalah produk andalan pertanian Afghanistan. Setelah kembalinya para pengungsi ke Afghanistan aktivitas pertanian mulai menggeliat kembali. Menurut *FAO (Food and Agriculture Organization)* Afghanistan saat ini sudah mendekati swasembada pangan. Kendala yang masih ada adalah kurangnya alternatif mata pencaharian khususnya bagi penduduk di pedesaan.

Produksi opium yang rata-rata keuntungannya mencapai 1.000-2.000 juta Afghani per tahun tetap menjadi pilihan petani dari pada tanaman gandum yang hasilnya rata-rata hanya 20 juta Afghani pertahunnya. Hal itulah membuat banyak petani tidak peduli dan berani mengambil risiko berurusan dengan kejahatan terorganisir untuk mencari pendapatan yang lebih baik².

Total area di bawah budidaya opium di Afghanistan adalah sekitar 224.000 hektar pada tahun 2020, yang merupakan peningkatan 37 persen atau 61.000 hektar jika dibandingkan dengan 2019, ringkasan eksekutif Survei Opium Afghanistan 2020, menyatakan. Pada 224.000 hektar, area yang ditanami adalah salah

². Agriculture, http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Afghanistan

satu yang tertinggi yang pernah diukur. Survei tersebut dirilis bersama oleh Otoritas Statistik dan Informasi Nasional Afghanistan (NSIA) dan UNODC.

Sementara area yang ditanami meningkat secara signifikan di semua provinsi utama penghasil opium, wilayah barat daya tetap menjadi wilayah penghasil opium utama negara itu, yang menyumbang 71 persen dari total produksi opium di Afghanistan. Jumlah provinsi bebas opium di negara itu menurun dari 13 menjadi 12 pada 2020, dengan Provinsi Kapisa di timur laut kehilangan status bebas opium. Dari data yang terkumpul, potensi produksi candu diperkirakan mencapai 6.300 ton. Pengumpulan data selama COVID-19 menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi para peneliti. Kerja lapangan secara langsung tidak mungkin dilakukan selama pandemi saat ini, yang menyebabkan NSIA dan UNODC mengembangkan dan menggunakan metodologi baru untuk memperkirakan hasil berdasarkan data satelit.

Nilai produksi opium di tingkat petani pada tahun 2020 diperkirakan mencapai US\$ 350 juta, yang merupakan indikator penting bagi pendapatan petani secara keseluruhan dari budidaya opium. Dengan US\$ 55 per kilogram, harga di tingkat petani berada pada level terendah sejak awal pemantauan, menunjukkan bahwa situasi ekonomi petani opium yang miskin akan segera menjadi lebih buruk. Berbagai faktor mendorong penanaman opium di Afghanistan, seperti ketidakstabilan politik, kesempatan kerja yang langka, kurangnya pendidikan yang berkualitas dan akses yang terbatas ke pasar. Budidaya opium poppy bukan masalah lokal. Dikonversi menjadi heroin tidak hanya dikonsumsi di Afghanistan dan negara-negara sekitarnya, tetapi juga di Eropa yang merupakan tujuan utama heroin yang diproduksi di Afghanistan.

2. Peternakan.

Lembu, kambing dan unggas menjadi hewan ternak utama penduduk pedesaan Afghanistan. Ketersediaan lahan yang cocok untuk menggembala ternak secara tradisional membuat peternakan merupakan bagian penting dari perekonomian Afghanistan. Ada 2

jenis peternakan di Afghanistan yaitu menetap, yang dilakukan oleh petani yang bercocok tanam dan beternak dan peternak nomaden yang dilakukan oleh suku Kuchi yang sering berpindah-pindah tempat. Padang rumput alam Afghanistan luasnya mencapai 7.500.000 hektar namun saat ini telah banyak yang gersang dan tandus. Daerah utara sekitar Mazar-e Sharif dan Maymanah dulunya merupakan kawasan subur di mana pada era 1990 an adalah tempat sekitar enam juta domba karakul digembalakan. Lembu merupakan binatang ternak yang paling utama dan sekaligus untuk membajak sawah. Unggas secara tradisional masih merupakan hewan ternak perumahan.

Banyak hewan ternak Afghanistan punah sejak merebaknya arus pengungsi Afghanistan ke Pakistan dan Iran. Pada tahun 2001, populasi hewan ternak Afghanistan menurun hingga 40%. Pada tahun 2002 populasinya menurun hingga 60%. Sebuah survei yang dilakukan *FAO (Food and Agriculture Organization)* di daerah utara Afghanistan menunjukkan bahwa sejak tahun 1997-2002 di provinsi Balkh, Juzjan, Sar-e Pol, dan Faryab, sekitar 84% ternak lembu punah dan sekitar 80% domba juga punah. Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas internasional telah membantu menghidupkan kembali bidang peternakan Afghanistan. Hal ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat petani dan peternak Afghanistan cara beternak yang baik.³

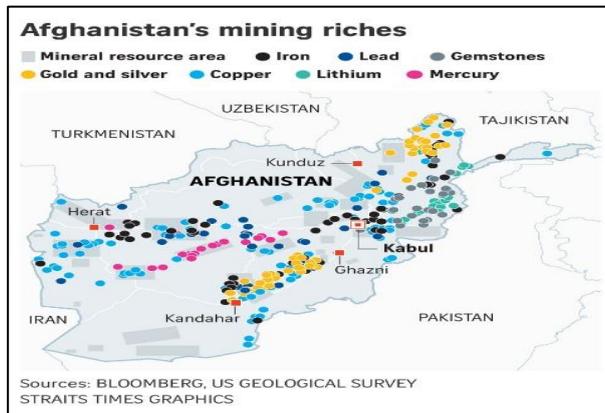
3. Pertambangan.

Afghanistan kaya akan sumber daya alamnya, termasuk deposit ekstensif gas alam, minyak bumi, batubara, marmer, emas, tembaga, kromit, *talc*, sulfur, seng, bijih besi, garam, batu mulia dan semi mulia, dan bahan lainnya. Pada tahun 2006, Badan Geologi AS memperkirakan bahwa Afghanistan memiliki sebanyak 36 trilyun kaki kubik ($1,0 \times 1.012 \text{ m}^3$) gas alam, 3,6 miliar barel ($570 \times 106 \text{ m}^3$) minyak dan kondensat cadangan. Sementara berdasarkan penelitian

³ Livestock, http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Afghanistan

tahun 2007, Afghanistan memiliki sejumlah besar sumber daya mineral non-BBM yang belum ditemukan sebelumnya.⁴

Gambar 6.
Peta Pertambangan
Di Afghanistan.



Para ilmuwan juga menemukan indikasi adanya deposit berlimpah dari batu permata berwarna, termasuk *emerald*, *ruby*, *sapphire*, garnet, lapis lazuli, kunzite, spinel dan andperidot turmalin. Pada tahun 2010, pejabat Pentagon AS bersama dengan ahli geologi AS telah mengungkapkan penemuan hampir US \$ 1 triliun cadangan mineral belum dimanfaatkan di Afghanistan, termasuk *lithium*. Pejabat Pentagon menyatakan bahwa Afghanistan bisa menjadi Arab Saudi kedua dari hasil *lithium*nya.

Afghanistan telah menandatangani kontrak tambang tembaga dengan perusahaan China (*Metalurgi Corp of China Ltd*) pada tahun 2008, dalam proyek penambangan tembaga di Aynak provinsi Logar dengan nilai investasi sebesar US\$2,8 milyar yang akan menyumbang pendapatan tahunan kepada Pemerintah sebesar US\$ 400 juta. Sumber daya alam utama Afghanistan lainnya adalah gas alam, yang pertama kali digali pada tahun 1967. Selama tahun 1980, penjualan gas alam tercatat sebesar US\$300 juta per tahun atau 56% dari pendapatan ekspor Afghanistan). 90% dari ekspor Afghanistan lari ke Uni Soviet untuk pembayaran barang impor atau pembayaran utang.

⁴ Trade and Industry, http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Afghanistan

Namun, selama penarikan mundur pasukan Soviet pada tahun 1989, ladang gas alam Afghanistan telah ditutup untuk mencegah sabotase para Mujahiddin. Restorasi produksi gas telah terhambat oleh perselisihan internal dan kekacauan hubungan perdagangan tradisional setelah runtuhnya Uni Soviet. Produksi gas turun dari 8,2 juta meter kubik ($2,9 \times 10^8$ cu ft) per hari pada 1980-an menjadi 600 ribu meter kubik ($2,2 \times 10^7$ cu ft) pada tahun 2001.

Dalam perkembangan penting di tahun 2020, Afghanistan telah mulai mengekstraksi gas dari ladang yang baru ditemukan di provinsi Jawzjan utara. Ini adalah pertama kalinya dalam empat dekade gas alam diekstraksi di Afghanistan. Afghanistan mengekstraksi 150.000 meter kubik gas dari sumur 1500 meter di lapangan di kota Jawzjan, Sheberghan. Feroz Bashari, kepala pusat informasi Pemerintah, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa pekerjaan penggalian sedang berlangsung untuk sementara waktu sebelum salah satu dari beberapa sumur dalam terbukti layak. Pemerintah bisa mendapatkan hingga US\$8,5 juta per tahun dari ekstraksi dan distribusi gas ini ditemukan di Jawzjan. Pembangunan akan membuka ratusan kesempatan kerja, dan juga memastikan pasokan gas yang tidak terputus ke Jawzjan dan provinsi tetangga Balkh.

4. Hasil Hutan.

Populasi hutan Afghanistan terus berkurang sejak perang melanda negeri ini dan adanya aksi penebangan liar. Pada pertengahan era 1980 an hanya sekitar 3% lahan Afghanistan yang memiliki hutan terutama di wilayah timur dan tenggara Afghanistan. Kayu Afghanistan habis ditebang secara illegal yang kemudian diselundupkan secara bebas ke luar negeri. Selain itu, pelestarian hutan juga tidak merata, dan sebagian besar hanya ditanam di daerah pegunungan di timur dan tenggara Afghanistan. Hutan Afghanistan terutama terdiri dua jenis yaitu: hutan lebat yang ditumbuhi oleh pohon ek, kenari, dan kacang-kacangan yang tumbuh di bagian tenggara dan di lereng utara dan timur Afghanistan; jenis kedua adalah hutan tipis yang berisi semak-semak belukar pada

semua lereng pegunungan Hindu Kush. Hutan lebat hanya mencakup 2,7% dari luas tanah di Afghanistan.

5. Industri.

Industri skala kecil di Afghanistan untuk keperluan domestik meliputi industri tekstil, sabun, furniture, sepatu, pupuk, semen, kerajinan tangan yang meliputi tenun karpet, kain sutra dan kerajinan kulit. Sementara Industri Skala Besar dan Teknologi Tinggi adalah pengolahan gas alam, batu bara dan batu mulia.⁵

Seperti halnya sektor ekonomi lainnya sektor industri Afghanistan hancur akibat perang dan konflik yang menyebabkan sebagian besar pabrik-pabrik dan industri rumahan tutup pada saat awal-awal pertumbuhannya, industri Afghanistan sangat lamban dan produksinya sangat terbatas. Industri modern terutama adalah kapas, tekstil, sabun, furnitur, sepatu, pupuk, semen, karpet buatan tangan, gas alam, batu bara, dan tembaga.

Pembuatan karpet adalah industri kerajinan yang paling utama di Afghanistan. Pembuatan karpet ini kebanyakan digeluti oleh masyarakat di bagian utara dan barat laut Afghanistan. Karpet-karpet Afghanistan cukup berkualitas terbuat dari wol murni dan rajutan tangan yang sebagian besar pekerjaannya dilakukan oleh kaum perempuan. Industri di Afghanistan telah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Industri lainnya termasuk feltmaking, tenun dari kapas, wol, dan kain sutra. Industri kayu dan batu pahat digeluti oleh penduduk di provinsi-provinsi timur Afghanistan, sementara industri perhiasan di wilayah Kabul. Pembuatan barang kulit juga telah menjadi industri kerajinan di Afghanistan.

Selama tahun 2018, Pemerintah Afghanistan membuka Koridor *Lapis Lazuli* yang merupakan Prioritas Nasional Afghanistan yang strategis. Koridor ini dibuka untuk meningkatkan perdagangan internasional baru yang ditujukan untuk membangun akses langsung

⁵ Afghanistan-Industri, <http://www.nationsencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/Afghanistan-INDUSTRY.html>

ke Asia Tengah dan Eropa. Koridor *Lapis Lazuli* yang menghubungkan Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia dan Turki melalui jalan darat dan kereta api yang merupakan rute perdagangan transit paling tepat di Asia Tengah, Balkan dan Eropa Tengah dan juga menghubungkan Asia Selatan, jalur ini sangat efektif ke negara-negara Eropa. Pentingnya rute ini bagi Afghanistan merupakan cara alternatif dan terpendek, termurah dan teraman ke daerah-daerah tersebut.

Dalam situasi geopolitik nasional tersebut di atas, jalur *Lapis Lazuli* sejalan dengan prioritas nasional negara-negara anggota, namun keterlibatan strategis AS di Afghanistan merupakan sisi lainnya bagi Afghanistan. Jalur *Lapis Lazuli* dapat memastikan pembangunan ekonomi regional melalui peningkatan integrasi dan kerjasama ekonomi, dengan implikasi untuk pembangunan secara keseluruhan di wilayah tersebut. Afghanistan berusaha membangun ekonominya yang hancur akibat perang selama puluhan tahun dan akan mengurangi ketergantungan pada Pakistan. Dari sisi analisis posisi geopolitik setiap negara anggota mengungkapkan implikasi penting bagi ekonomi politik global dan regional.

Perjanjian *the Afghanistan Transit Trade Agreement (ATTA)* dan *Afghanistan-Pakistan Transit Trade Agreement (APTTA)*, sudah tidak banyak membantu ekonomi Afghanistan karena ada tantangan perdagangan transit yang dimunculkan oleh Pakistan. Perjanjian kerja sama rute perdagangan ini ditandatangani oleh lima negara pada bulan Oktober 2017 yang *7th Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan (RECCA VII)* di Ashgabat, Turkmenistan setelah sebelumnya melalui proses pembahasan panjang. Pemerintah Afghanistan telah menjalin hubungan perdagangan melalui MOU tiga negara seperti penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* pengoperasian pelabuhan Chabahar oleh perwakilan dari negara Iran, India dan Afghanistan sudah dilakukan dalam rapat perdana yang diadakan di Tehran.

Menjadi negara *landlocked* bukanlah suatu kutukan bahwa negara tersebut tidak akan makmur. Austria, Luxemburg dan Swiss adalah bukti negara *landlocked* pun dapat makmur sejahtera. Kuncinya adalah bagaimana memanfaatkan situasi geografis yang

strategis di antara negara-negara lainnya. Apalagi rakyat Afghanistan memiliki jiwa *entrepreneurship* yang cukup tinggi, dimana negara ini adalah bagian dari jalur sutra (*silk road*) selama berabad-abad. Amat disayangkan perang yang terlalu lama telah menghambat potensi-potensi luar biasa yang dimiliki Afghanistan.

The Kabul Times 18 Oktober 2020 menurunkan artikel yang ditulis Lailuma Noori bertepatan dengan Hari Nasional Transportasi dan Transit di Afghanistan. Penulis menyampaikan bahwa Afghanistan mendapat keanggotaan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1983. Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri Afghanistan memiliki keanggotaan tetap Sistem Transportasi Jalan Dunia. Afghanistan telah mengoperasikan sistem tersebut sejak 18 Oktober 2010. Dengan penerapan sistem ini di Afghanistan, pedagang Afghanistan kemudian dapat mengeksport barang mereka ke negara lain. Pengaturan lisensi transit memberikan otorisasi kepada negara anggota untuk secara langsung transit atau mengeksport barang ke negara lain di dunia.

Transportasi memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Afghanistan karena merupakan negara yang terletak di jantung Asia dan tidak memiliki jalur ke laut. Oleh karena itu, transportasi darat dan udara dianggap sebagai satu-satunya cara untuk transit atau mengeksport barang ke negara lain di dunia. Saat ini terdapat banyak rute baik darat maupun udara untuk transportasi dan transit barang-barang Afghanistan ke negara-negara kawasan dan dunia. Misalnya, Jalur Sutra dianggap sebagai jalan raya dan jalan paling signifikan di Asia Tengah, menghubungkan Asia Timur dengan Samudera Barat dan Hindia dengan Asia Tengah. Oleh karena itu, Afghanistan memiliki posisi geopolitik strategis sehingga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kehidupan ekonomi negara tersebut.

Pelabuhan Chabahar merupakan jalur lain bagi Afghanistan untuk mengeksport dan mengimpor barang. Pelabuhan dinilai sebagai alternatif yang sangat baik dari segi ekspor dan impor. Menurut ekonom Afghanistan dan pejabat Pemerintah terkait, pemanfaatan pelabuhan Chabahar dapat bermanfaat bagi Afghanistan untuk

menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara kawasan dan dunia karena pelabuhan tersebut dianggap sebagai alternatif yang baik dibandingkan dengan pelabuhan Karachi dan Wagah di Pakistan.

Rute Lapis Lazuli sekaligus mencegah ketergantungan pada pasar Pakistan dianggap sebagai jalur yang baik bagi barang-barang Afghanistan untuk diekspor ke negara-negara regional dan dunia lainnya khususnya negara-negara anggota UE. Pemerintah Afghanistan telah menyatakan bahwa ini adalah rute terpendek bagi pedagang Afghanistan untuk mengekspor produk dan barang Afghanistan ke negara lain. Afganistan akan mendapatkan keuntungan jutaan dollar setiap tahunnya dari transportasi dan transit jika dilakukan melalui jalur Lapis Lazuli. Namun demikian, agar kebijakan rute Lapis Lazuli sukses, diperlukan perbaikan situasi transportasi di Afghanistan guna menarik kepercayaan negara-negara kawasan dan dunia, menjaga keamanan yang lebih baik di sepanjang jalan raya, memerangi korupsi di Pemerintahan. institusi dan langkah-langkah lain yang dapat membuka jalan bagi negara lain untuk memperhatikan masalah transportasi dan bekerja sama dengan Afghanistan dalam kaitannya dengan transportasi dan transit.

Berdasarkan pertemuan dengan Duta Besar Republik Islam Afghanistan untuk Republik Indonesia, Bapak Faizullah Zaki pada tanggal 22 Oktober 2020 bertempat di Kabul Star Hotel, Duta Besar Zaki menyampaikan kebijakan Presiden Ashraf Ghani yang akan menjadikan Afghanistan sebagai *Land Bridge* dengan menggunakan lokasi Afghanistan yang sangat strategis dikelilingi negara-negara kuat dunia. Kami sepakat bahwa *being landlocked country is not a cursed but a blessing* jika dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana yang dilakukan oleh Austria, Swiss, dan Liechtenstein.

KBRI Kabul mencatat bahwa untuk mewujudkan hal ini Afghanistan perlu mempelajari keberhasilan negara-negara yang dapat membangun visi dan konsep sebagai negara hub, dan menggalang kerja sama dan kepemimpinan dengan negara-negara sekitar antara lain dalam wadah kerja sama SAARC dan CAREC serta berbagai forum kerja sama lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh

Afghanistan. Kuncinya, perdamaian dari konflik militer harus lebih dahulu tercipta di Afghanistan.

Khusus hubungan ekonomi dengan Indonesia, Duta Besar Zaki mengharapkan kenaikan ekspor Afghanistan ke Indonesia, dimana neraca perdagangan amat timpang dengan ekspor Indonesia sebesar USD 35 juta dan ekspor Afghanistan sebesar USD 0,5 juta (dalam catatan Duta Besar Zaki). Dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan RI, Duta Besar Zaki menyampaikan kesepakatan untuk menaikkan ekspor Afghanistan ke Indonesia yang pada gilirannya akan meningkatkan volume perdagangan kedua negara. Duta Besar Zaki mengajak KBRI Kabul bekerja sama mencapai hal ini. Fungsi Ekonomi KBRI Kabul menyampaikan bahwa keikutsertaan pengusaha Afghanistan pada Indonesia *Virtual Trade Expo 2020* sangat penting untuk memperluas *networking* dengan pengusaha Indonesia yang selain dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke Afghanistan namun demikian pula sebaliknya.

5.1 Keadaan Sosial.

Pendidikan diselenggarakan di Masjid dan Madrasah masih hidup dan berjalan dengan baik terutama di wilayah-wilayah pedesaan maupun perkotaan. Seiring dengan masuknya pengaruh Barat, sistem pendidikan di Afghanistan mulai mengadopsi sekolah modern ala barat. Pelajaran-pelajaran seperti matematika, kimia, geografi dan bahasa asing terutama Inggris mulai diajarkan di sekolah pada jaman Raja Ali Khan (1868-1879) dengan membuka sekolah dasar Makhtab-e-Harbiya di sekitar Kabul. Sekolah ini pada mulanya dikhususkan untuk anggota keluarga kerajaan dan mendatangkan tenaga pengajar/guru dari luar negeri. Sistem pendidikan yang dikombinasikan antara yang tradisional (agama) dan yang modern (barat) terus berkembang dan pada tahun 1974 di kota Kabul dibuka Universitas yang terdiri dari Fakultas Hukum, Kedokteran, Sastra dengan pengantar umumnya dengan menggunakan bahasa asing.

Pada tahun 1978-1992 selama pendudukan Uni Soviet 1/3 penduduk Afghanistan mengungsi ke luar negeri termasuk orang-orang terpelajar, intelektual, profesor berpindah ke negara-negara Eropa, Amerika dan lainnya. Banyak gedung, bangunan sekolah dan universitas dihancurkan, keadaan membuat dunia pendidikan menjadi mundur dan mengalami masa suram. Pada tahun 1996, penguasa Taliban membatasi perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan sumber utama pendidikan dasar dan menengah adalah madrasah. Sekitar 1.2 juta pelajar terdaftar mengenyam

pendidikan di sekolah semasa rejim Taliban, dengan kurang dari 50,000 adalah perempuan⁶.

Setelah lengsernya Taliban pada tahun 2001, Afghanistan mulai mendapatkan bantuan internasional untuk membangun kembali sistem pendidikan. Menurut laporan UNICEF, diperkirakan saat ini terdapat sekitar 3.7 juta anak Afghanistan putus sekolah dan 60% nya adalah anak perempuan. Pada tahun 2017, anggaran pendidikan adalah 4.1% dari GDP.

Per Mei 2021 terdapat sekitar 220 ribu guru bagi sekitar 9.7 juta siswa di Afghanistan. Banyak sekolah yang diselenggarakan tanpa gedung dan fasilitas lainnya seperti buku-buku. Banyak orang tua yang khawatir mengirimkan anaknya pergi ke sekolah karena situasi yang tidak aman maupun rentannya bumi Afghanistan dengan bencana alam. Pada tahun 2021, terdapat serangan bom terhadap 24 siswa dan 11 luka-luka di Pul-i-Alam. Terdapat juga serangan mematikan ke Kabul *University* pada 2 November 2020 yang menewaskan 32 orang dan melukai 50 lainnya. Selain itu, terdapat serangan terhadap *Secondary School* di Kabul pada 9 Mei 2021 yang menyebabkan sekitar 50 orang tewas, kebanyakan siswi perempuan dari etnis Hazara.

Pendidikan di Afghanistan mencakup K-12 dan pendidikan tinggi, yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi negara tersebut. Afghanistan masih membutuhkan lebih banyak sekolah dan guru. Beberapa universitas besar di Afghanistan adalah Universitas Kabul, Universitas Amerika Afghanistan, Universitas Balkh, Universitas Herat, Universitas Nangarhar, Universitas Sheikh Zayed (dibantu UAE), dan Universitas Kandahar. Di Afghanistan, kuliah dari SD hingga Perguruan Tinggi Negeri digratiskan, namun kualitas perguruan tinggi negeri kurang baik. Perguruan Tinggi Swasta lebih baik kualitasnya di Afghanistan, namun berbayar.

⁶ Afghanistan country profile. Library of Congress Federal Research Division (May 2006)

Persentase melek huruf di Afghanistan adalah 43% yaitu pria sebanyak 55.5% dan wanita 29.8% pada tahun 2018. Sedangkan angka harapan lamanya bersekolah (*school life expectancy (primary to tertiary education)*) adalah 10 tahun dimana pria 13 tahun bersekolah dan wanita 8 tahun bersekolah (perkiraan 2018). Prosentase pengangguran pemuda usia 15-24 adalah 17.6% dimana pria menganggur sebanyak 16.3% dan wanita menganggur sebanyak 21.4%.

5.2 Etnis-Etnis Di Afghanistan.

1. Pashtun.

Secara Antropologi, Etnis Pashtun dikategorikan sebagai ras Kaukasian, yaitu dari ras Mediterania dengan campuran Nordic. Sementara itu, Bahasa Pashto yang mereka gunakan diklasifikasikan sebagai bagian dari famili Bahasa Indo-Eropa cabang Iran. Oleh karena itu, etnis Pashtun seringkali dianggap sebagai kelompok orang-orang Iran (Arya), dengan kemungkinan sebagai keturunan *Bactrian* dan *Scythian*. Etnis Pashtun terdiri dari banyak suku dan *clan*, diperkirakan terdapat sekitar 60 *clan* suku Pashtun utama dan lebih dari 400 *sub-clan*. Pada mulanya etnis Pashtun secara politik tercerai berai, namun kemudian mereka relatif bersatu setelah kebangkitan Dinasti Hotaki dan Kerajaan Durrani pada awal abad ke-18. Pashtun mempunyai peran vital pada masa "*Great Game*" dari abad ke-19 sampai abad ke-20 dimana mereka terjepit diantara skenario dua penjajah, Inggris dan Rusia.

Selama lebih dari 300 tahun, Pashtun telah tampil sebagai kelompok etnis dominan di Afghanistan dimana hampir seluruh pemimpin Afghanistan adalah orang Pashtun. Dalam sejarah modern, Pashtun menjadi perhatian masyarakat internasional atas peran penting yang dimainkan selama masa invasi Soviet di Afghanistan pada tahun 1980-an, dan pada saat kemunculan serta jatuhnya Taliban. Selain dominan di Afghanistan, Pashtun juga merupakan komunitas penting di Pakistan, dimana anggota etnisnya pernah memegang tampuk kepresidenan Pakistan, menduduki jabatan tinggi

di Militer Pakistan dan merupakan kelompok etnis terbesar kedua di Pakistan.

Etnis Pashtun disebut sebagai kelompok etnis yang menganut sistem *segmentary lineage* terbesar di dunia, dengan total populasi mencapai 42 juta orang. Sebuah masyarakat dengan sistem *segmentary lineage* adalah masyarakat yang diatur atau terorganisasi kedalam *segment-segment*.

2. Tajik.

Etnis Tajik adalah penutur Bahasa Parsi/dari keturunan Iran. Kebanyakan dari mereka hidup di Tajikistan, Afghanistan dan Uzbekistan Selatan. Sebagian kecil Tajik juga hidup di Iran dan Pakistan yang merupakan pengungsi dari Afghanistan. Dalam hal bahasa, budaya dan sejarah, Tajik terkait erat dengan budaya Persi dari Iran.

Tajik merupakan kelompok etnis utama di Tajikistan (lebih kurang mencapai 79,9%). Adapun di Afghanistan, Tajik adalah etnis terbesar kedua setelah Pashtun. Tajik kebanyakan mendiami wilayah Utara dan Barat Afghanistan, seperti di Provinsi Balkh, Takhr, Badakhsan, Parwan, Panjsir, Kapisa, Baghlan, Ghor, Badghis, dan Herat. CIA memperkirakan sekitar 27% populasi Afghanistan adalah Tajik.

Meskipun tergolong minoritas di Afghanistan, namun jumlah keseluruhan Tajik di Afghanistan lebih besar daripada jumlah Tajik di Tajikistan. Tajik adalah penduduk mayoritas di 4 kota terbesar di Afghanistan, yaitu Kabul, Mazar-e Sharif, Herat dan Ghazni. Di Afghanistan, Tajik tidak mengorganisir diri mereka berdasarkan etnis, namun menyebut diri mereka berdasarkan provinsi, kota, atau pun desa dimana mereka tinggal, seperti *Badakhsani*, *Baghlani*, *Mazari*, *Panjsheri*, *Kabuli*, *Herati*, dll.

3. Hazara.

Hazara adalah kelompok etnis penutur bahasa Parsi yang hidup di wilayah tengah Afghanistan, utamanya di Hazarajat. Mayoritas Hazara adalah Muslim Syiah dan sebagian kecil menganut Sunni.

Hazara adalah etnis ketiga terbesar di Afghanistan, dan lebih dari setengah juta Hazara hidup di Pakistan dan sejumlah yang sama juga dapat ditemukan di Iran.

Asal muasal Hazara tidak sepenuhnya diketahui, namun teori yang mengatakan bahwa Hazara merupakan keturunan Mongolia sulit terbantahkan. Ciri-ciri fisik Hazara dan budaya serta bahasa mereka mirip dengan orang-orang Mongol. Beberapa suku etnis Hazara juga dinamai dengan beberapa Jenderal ternama Mongol, termasuk Tulai Khan Hazara, yaitu dari nama Tolui, putra bungsu Gengis Khan. Teori lain mengatakan bahwa Hazara adalah keturunan Kushans, penduduk kuno Afghanistan, terkenal sebagai pembuat patung Budha Bamiyan. Namun teori ini tampaknya kurang meyakinkan. Teori lain dan lebih banyak diterima oleh akademisi adalah bahwa etnis Hazara merupakan ras campuran dari berbagai macam suku.

Sejak awal sejarah modern Afghanistan pada pertengahan abad 18, Hazara telah mengalami perlakuan diskriminatif dan represi dari etnis Pashtun serta diusir dari berbagai wilayah Afghanistan, termasuk Helmand dan Kandahar, serta ke Hazarajat.

4. Uzbek.

Sekitar 1,3 Juta Uzbek hidup berdampingan dengan Tajik di wilayah utara Afghanistan, sepanjang Provinsi Faryab sampai Faizabad, ibukota Provinsi Badakhsan. Banyak desa yang dihuni bersama-sama antara Uzbek dan Tajik, meskipun kelompok rumah-rumah mereka terpisah satu sama lain. Uzbek juga dapat ditemukan di Turki, dimana mereka adalah bagian dari kelompok orang (lebih kurang 4000 orang) berbahasa Turkic yang di-*resttle* dari Afghanistan ke Turki Pada tahun 1983. Etnis Uzbek juga tinggal di wilayah perbatasan utara Afghanistan dengan Uzbekistan, Tajikistan, dan Turkmenistan.

Uzbek termasuk dalam ras Mongoloid dengan campuran Mediteranian. Mereka menganut Islam Sunni dan merupakan penutur Bahasa Uzbeki dengan dialek Turkic sentral. Kebanyakan Uzbek bekerja sebagai petani dan peternak, namun banyak juga Uzbek yang

hidup di kota menjadi pedagang ataupun pengrajin, perak, kulit, besi, dan karpet.

Asal muasal Uzbek Afghan adalah dari Asia Tengah. Uzbek muncul sebagai kekuatan politik dominan di Afghanistan Utara menyusul runtuhnya Dinasti Timurid di Herat pada 1506. Mereka membangun 11 *principalities* dari Maimana sampai Kunduz dengan pemimpin yang kuat, ada yang independen namun ada yang beraliansi dengan Bukhara ataupun Kabul.

5. Turkmen.

Turkmen adalah kelompok etnis Turkic yang lebih kecil. Turkmen juga hidup di Turkmenistan dan Iran, terutama di wilayah Mashad. Mayoritas Turkmen adalah Muslim Sunni, asal muasal mereka mirip dengan Uzbek, namun Turkmen secara tradisi adalah orang-orang nomaden. Turkmen di Afghanistan diperkirakan mencapai 900.000 orang (perkiraan tahun 2006) dan mayoritas mendiami wilayah perbatasan Afghanistan- Turkmenistan di provinsi Faryab, Jowzan, dan Baghlan.

6. Baloch.

Etnis Baloch adalah termasuk dalam kelompok etnis Iran yang diperkirakan berjumlah 200.000 orang di Afghanistan. Etnis Baloch utamanya terdapat di Provinsi Balochistan, Pakistan, dan Provinsi Sistan dan Baluchistan di Iran. Kebanyakan orang Baloch adalah tinggal di desa/kampung dan gurun-gurun. Etnis Baloch mayoritas juga penganut Muslim Sunni.

7. Nuristani.

Etnis Nuristani adalah orang-orang Indo-Iranian, mewakili cabang independen ke-empat dari ras Arya (Indo-Aryan, Iranian, Nuristani, dan Dardic). Etnis Nuristani hidup di wilayah Barat Laut Afghanistan dan juga di sepanjang perbatasan Afghanistan – Pakistan di distrik Chitral Pakistan. Mereka menggunakan bahasa Nuristani dengan berbagai variasi. Etnis Nuristani dahulu dikenal sebagai orang-orang kafir atau Kafiristan. Mereka masuk Islam pada zaman

Emir Abdur Rahman dan wilayah mereka kemudian diganti nama menjadi “Nuristan”, yang artinya adalah “Tanah Cahaya” (berada dalam cahaya Islam). Nuristan juga kebanyakan menganut Islam Sunni.

8. Lain - lain.

Etnis-etnis lain yang lebih kecil termasuk antara lain Aimak, Pashai, Brahuis, Pamiris, Kyrgiz, Gujjar, dll., juga terdapat di Afghanistan.

5.3 Perhubungan.

1. Umum.

Afghanistan merupakan negara daratan yang tidak memiliki pantai (*landlocked*) sehingga Afghanistan tidak mempunyai angkutan laut. Untuk keperluan perdagangan melalui laut, Afghanistan memanfaatkan pelabuhan laut Karachi di Pakistan dan Bandar Abbas di Iran.

Secara karakteristik, Afghanistan dikelilingi oleh gurun yang luas, gunung tinggi dan lembah subur tersebar di sepanjang sungai-sungai utama. Pada tahun 1964, Afghanistan dengan dibantu oleh Pemerintah Uni Soviet melakukan pembangunan *Salang Pass*, yaitu terowongan yang membelah pegunungan Hindu Kush yang menghubungkan antara Kabul ke daerah-daerah lain di utara Afghanistan. Dengan dibangunnya *Salang Pass* jarak dan waktu tempuh dari wilayah tengah atau selatan menuju utara Afghanistan menjadi lebih singkat. Pada tahun 1980-an *Salang Pass* diperbaiki kembali tetapi pada bulan Mei 1997, Ahmad Shah Masoed, seorang Pahlawan Nasional Afghanistan meledakkan terowongan tersebut untuk upaya menjebak kelompok Taliban. Saat ini *Salang pass* sudah bisa diaktifkan kembali.

Afghanistan telah berupaya memperbanyak membangun jalan yang menghubungkan kota-kota utama di Afghanistan dan membuka daerah yang masih terisolasi sebelumnya. Afghanistan saat ini memiliki jalan total: 34,903 km (2017) dengan jalan aspal sepanjang 17,903 km (2017) dan yang tidak beraspal sepanjang 17,000 km

(2017). Perbaikan jalan banyak dibutuhkan karena mayoritas jalan di Afghanistan rusak akibat perang dan perubahan cuaca yang ekstrim.

2. Komponen Angkutan Umum.

a. Angkutan Udara.

- 1) Maskapai Penerbangan⁷. Saat ini Afghanistan mempunyai 5 maskapai penerbangan yang beroperasi antar provinsi dan antar negara. Ke-5 maskapai penerbangan tersebut adalah:

- a) *Ariana Afghan Airlines*.

Ariana Afghan Airlines merupakan maskapai penerbangan terbesar di Afghanistan. Didirikan pada tahun 1955, Ariana adalah maskapai penerbangan tertua di negara ini dan milik negara. Perusahaan ini memiliki basis utama. Bandara Internasional Hamid Karzai, yang mengoperasikan penerbangan domestik dan koneksi internasional ke tujuan di China, India, Rusia, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab. Maskapai ini bermarkas di distrik Shāre Naw, Kabul. Ariana Afghan Airlines telah masuk dalam daftar maskapai penerbangan yang dilarang di Uni Eropa sejak Oktober 2006.

Menyusul jatuhnya Kabul ke tangan Taliban pada tahun 1996 dan proklamasi Emirat Islam Afghanistan, negara itu menghadapi sanksi ekonomi yang substansial dari sektor internasional selama rezim Taliban. Sanksi tersebut bersama dengan kontrol Pemerintah Taliban terhadap perusahaan dan larangan terbang banyak penerbangan internasional maskapai tersebut, berdampak buruk pada kesehatan ekonomi Ariana selama tahun 1990-an. Armada dikurangi menjadi hanya segelintir An-26 buatan Rusia dan Ukraina, Yakovlev Yak-40, dan tiga Boeing 727, yang digunakan pada rute domestik terpanjang. Pada bulan Oktober 1996, Pakistan menyediakan basis pemeliharaan dan operasional

⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airlines_of_Afghanistan

sementara di Karachi. Tanpa aset luar negeri, pada tahun 1999 operasi internasional Ariana hanya terdiri dari penerbangan ke Dubai juga, penerbangan kargo terbatas berlanjut ke provinsi barat China. Namun, sanksi yang dijatuhkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 pada November 1999 memaksa maskapai untuk menanggukkan operasi di luar negeri. Pada bulan November 2001, Ariana dihukum sepenuhnya.

Dengan restu Taliban, Bin Laden secara efektif telah menggunakan Ariana, maskapai penerbangan sipil nasional Afghanistan untuk keperluan militer. Selama empat tahun, menurut mantan pembantu AS dan pejabat Afghanistan yang diasingkan, penerbangan penumpang dan charter Ariana mengangkut militan Islam, senjata, uang tunai, dan opium melalui Uni Emirat Arab dan Pakistan. Anggota jaringan teroris Al Qaeda Bin Laden diberikan identifikasi palsu Ariana yang memberi mereka akses bebas ke bandara di Timur Tengah.

Setelah penggulingan Pemerintah Taliban selama Operasi *Enduring Freedom*, Ariana mulai membangun kembali operasinya pada bulan Desember 2001. Sekitar sebulan kemudian, sanksi PBB akhirnya dicabut, yang memungkinkan maskapai untuk melanjutkan rute internasional lagi. Pada tahun 2002, Pemerintah India memberikan hadiah kepada maskapai tersebut berupa tiga pesawat Airbus A300 bekas Air India. Penerbangan penumpang internasional pertama Ariana sejak 1999 mendarat di Bandara Internasional Indira Gandhi pada Januari 2002, diikuti dengan rute ke Pakistan dan Jerman masing-masing pada bulan Juni dan Oktober pada tahun yang sama. Pada tahun 2005, India menandatangani perjanjian kerjasama penerbangan dengan Afghanistan, dengan Air India melatih 50 pejabat untuk Ariana. Semua penerbangan komersial dibatalkan setelah Taliban mengambil alih ibu kota Kabul pada tahun 2021.

Penerbangan domestik direncanakan akan segera dilanjutkan dalam kesempatan pertama.

Tabel 3. Armada Ariana Afghan Airlines Tahun 2019.

Jenis Pesawat	Jumlah	Penumpang		
		C	Y	Total
Airbus A310-300	2	18	192	210
		—	237	237
Boeing 737-400	2	8	134	142
Boeing 737-500	1	Tidak diketahui		
Total	5			

b) *Kam Air*.

Kam Air merupakan maskapai penerbangan swasta Afghanistan terbesar. Didirikan pada tahun 2003, *Kam Air* memiliki tujuh pesawat dan tenaga kerja lebih dari 1.200 orang, mengoperasikan layanan penumpang domestik terjadwal di seluruh Afghanistan dan layanan internasional ke tujuan di Asia Tengah, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Hubnya berada di Bandara Internasional Kabul di ibu kota Kabul. Karena runtuhnya Republik Islam Afghanistan, semua layanan sipil di negara itu ditangguhkan pada 15 Agustus 2021. Namun, penerbangan domestik dimulai kembali pada 5 September 2021. Kantor pusat *Kam Air* di Kabul.

Kam Air adalah maskapai penerbangan komersial swasta pertama yang didirikan di Afghanistan oleh pemilik dan pendiri Kamgar Group, Zamarai Kamgar, seorang pengusaha Afghanistan. Sertifikat Operator *Kam Air* (AOC Nr. 001) dikeluarkan pada Agustus 2003 oleh Kementerian Transportasi dan Penerbangan Sipil (MoTCA) Afghanistan. *Kam Air* terdaftar dengan ICAO kode 3 huruf KMF, kode 2 huruf IATA RQ dan kode keuangan 384. Penerbangan

pertama Kam Air dioperasikan dari Kabul ke Herat dan Mazar-i-Sharif pada November 2003 dengan Boeing B727-200, sedangkan penerbangan internasional pertama diresmikan pada Mei 2004 antara Kabul dan Dubai.

Pada 25 Januari 2013, AS memasukkan Kam Air ke daftar hitam dengan mengutip penyelidikan tentara AS bahwa maskapai tersebut menyelundupkan opium pada penerbangan sipil ke Tajikistan, sebuah tuduhan yang dibantah oleh maskapai dan Pemerintah Afghanistan. Larangan itu ditanggguhkan sebulan kemudian. Pada 24 Februari 2021, Kam Air mengoperasikan penerbangan awak wanita pertama di Afghanistan. Mantan pilot komersial wanita Afghanistan pertama dan terakhir maskapai, kemudian Mohadese Mirzaee yang berusia 22 tahun, sekarang bergabung dengan mantan Kapten Veronica Borysova dari Ukraina dalam mengemudikan Boeing 737-500 dari Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul ke Herat. Selain Veronica, kru perempuan seluruhnya terdiri dari perempuan dari kelompok etnis Hazara. Acara ini menjadi berita utama global dan pertama kali diliput oleh Josh Cahill yang mendokumentasikan penerbangan tersebut, dan kemudian ditampilkan di BBC, DW, dan Business Insider. Penerbangan memakan waktu 90 menit.

Menanggapi runtuhnya Pemerintah setelah jatuhnya Kabul, Kam Air menerbangkan beberapa pesawatnya ke Iran untuk mencegah kerusakan selama kekacauan. Per September 2019, Kam Air terbang ke total 16 tujuan: 7 tujuan domestik dan 9 internasional, di 8 negara. Maskapai ini memiliki jaringan domestik yang luas, terbang ke Herat, Zaranj, Kandahar, Trinkot, Mazar-e-sharif, dan Faizabad. Secara internasional, Kam Air terbang ke Istanbul, Ankara, Riyadh, Jeddah, Kuwait, Tashkent, Dushanbe, Islamabad dan New Delhi.

Tabel 4. Armada Kam Air Tahun 2021.

Jenis Pesawat	Jumlah	Penumpang		
		C	Y	Total
Airbus A340-300	2	—	346	346
Boeing 737-300	5	—	143	143
Total	7			

c) Bakhtar Afghan Airlines.

Bakhtar Afghan Airlines merupakan maskapai penerbangan dari Afghanistan, yang menawarkan penerbangan domestik. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1967 sebagai Bakhtar Airlines, nama itu disimpan sampai tahun 1985, ketika diubah namanya menjadi Bakhtar Afghan Airlines. Pada tahun 1985 perusahaan diserap Ariana Afghan Airlines dan menjadi satu-satunya perusahaan penerbangan Afghanistan. Pada tahun 1988 merek Ariana dan Bakhtar bergabung. Presiden Afghanistan pada Januari 2020 memutuskan untuk mengoperasikan kembali maskapai milik Pemerintah ini yang akan menawarkan penerbangan domestik. Bakhtar Afghan Airlines memulai kembali operasinya mulai 30 Oktober 2020 ketika presiden Afghanistan Dr. Ashraf Ghani meresmikan operasi maskapai ini. Bakhtar Afghan Airlines memiliki satu pesawat Boeing 737-500 yang disewa dari Ariana Afghan Airline. Bakhtar Afghan Airlines mengoperasikan 1 Boeing 727 dan 2 De Havilland Canada DHC-6.

2) Bandara Sebagai Komponen Pendukung Angkutan Udara.⁸

Afghanistan saat ini telah mempunyai 2 bandara internasional yaitu Bandara Internasional Kabul yang berada di ibukota Kabul dan Bandara Internasional Kandahar berada di

⁸ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airports_in_Afghanistan

wilayah selatan Afghanistan. Selain itu Afghanistan mempunyai 4 *bandara major domestic*, 14 *bandara regional domestic* dan 2 *military domestic*. Berikut adalah daftar bandara di Afghanistan:

- a) Bandara *Major domestic* merupakan bandara yang melayani penerbangan dalam negeri. Bandara *major domestic* di Afghanistan adalah bandara Herat, bandara Jalalabad, bandara Kunduz, bandara Mazar-e-Sharif.
- b) Bandara *Regional Domestic* melayani lalu lintas penerbangan di daerah kecil dan mempunyai penduduk yang sedikit. Berikut adalah bandara *Regional Domestic* di Afghanistan; bandara Bamyan, bandara Bost (provinsi Helmand), bandara Caghcharan (provinsi Ghor), bandara Fayzabad, bandara Khwahan, bandara Farah, bandara Khost, bandara Razer, bandara Maymana (provinsi Faryab), bandara Qala-e-Naw (provinsi Badghis), bandara Sheberghan (provinsi Jowzjan), bandara Taloqan (provinsi Takhar), bandara Tarin Koht (provinsi Uruzgan), bandara Zaranj (provinsi Nimruz).
- c) *Military Airport* merupakan bandara militer dan tertutup untuk umum. Di Afghanistan terdapat 2 *Military airport* termasuk Bagram Airbase yang terletak di provinsi Parwan dan Shindand Airbase berada di provinsi Herat.

b. Angkutan Darat.

Afghanistan mempunyai beberapa jalur angkutan darat termasuk rel kereta api. Afghanistan memiliki tiga jalur kereta api di utara negara itu. Yang pertama adalah antara Mazar-i-Sharif dan kota perbatasan Hairatan di provinsi Balkh, yang kemudian terhubung dengan Kereta Api Uzbekistan Uzbekistan (dibuka 2011). Jalur kedua menghubungkan Torghundi di provinsi Herat dengan Kereta Api Turkmenistan di Turkmenistan (dibuka tahun 1960). Yang ketiga adalah antara Turkmenistan dan Aqina di provinsi Faryab Afghanistan (dibuka pada 2016), yang membentang ke selatan ke kota Andkhoy. Negara ini saat ini belum memiliki layanan kereta api penumpang, tetapi jalur kereta api

baru dari Herat ke Khaf di Iran untuk kargo dan penumpang baru saja selesai. Layanan penumpang juga diusulkan di seksi Hairatan – Mazar-i-Sharif dan Mazar-i-Sharif – Aqina.

Jaringan kereta api Afghanistan masih dalam tahap pengembangan. Jalur kereta api saat ini akan diperpanjang dalam waktu dekat, rencananya mencakup jalur untuk lalu lintas kargo serta transportasi penumpang. Tetangga Afghanistan telah meningkatkan jaringan kereta api mereka sendiri selama awal abad ke-21. Rencana utamanya adalah menggunakan Afghanistan untuk menghubungkan dengan kereta api empat anak benua Asia.

Selain rel kereta api, ada beberapa alternatif jalur angkutan darat di Afghanistan. Di Kota Kabul sendiri, dahulu telah ada jaringan bus dan *trolleybus*. Penduduk kota di Afghanistan melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum, *truck*, bus umum dan sepeda. Masyarakat Afghanistan di kota, mayoritas menggunakan angkutan umum dengan sebutan *tunes*⁹ dengan biaya 10 Afghani. Bus umum yang banyak beroperasi di Kabul merupakan bantuan dari Pemerintah India dengan sebutan *millie bus*¹⁰ atau bis angkutan Pemerintah.

Pada tahun 2003, *millie bus* dikelola oleh Kementerian Perhubungan Afghanistan. Sedangkan *truck* masih seringkali digunakan untuk alternatif angkutan umum yang kadang digunakan untuk pengiriman hewan ternak. Biasanya *truck* di Afghanistan dihiasi warna-warni. Sedangkan di pedesaan, di mana sarana transportasi tidak ada, masyarakat melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dengan berjalan kaki, keledai, kuda atau unta.

c. Angkutan Pipa.

Afghanistan memiliki jalur pipa dari Bagram ke Uzbekistan dan Shindand ke Turkmenistan sekitar 180 kilometer (110 mil) yang dibangun pada masa Pemerintahan Soviet, namun saat ini

⁹ *Tunes*; berasal dari merk mobil Toyota Toonca

¹⁰ http://en.wikipedia.org/wiki/Milli_Bus

jalur pipa tersebut tidak dapat dipergunakan kembali karena rusak akibat perang. Pemerintah Afghanistan sedang melakukan proyek *the Trans-Afghanistan Pipeline* yang dinamai *TAPI* (Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India) yang dibantu oleh *the Asian Development Bank* senilai USD 3 juta. Jalur pipa tersebut nantinya akan menyalurkan gas alam dari pembangunan pipa di *Dauletabad* Turkmenistan melalui Afghanistan menuju Pakistan dan India¹¹.

d. Angkutan laut.

Afghanistan sebagai *Landlocked country* tidak mempunyai transportasi laut kecuali angkutan di jalur sungai Amu Darya yang merupakan perbatasan Afghanistan dengan Turkmenistan, Uzbekistan dan Tajikistan. Sungai Amu Darya memiliki panjang 2.400 kilometer dan aliran sungai sekitar 534.739 kilometer persegi (206.464 mil). Sungai Amu Darya sering kali digunakan untuk alat pengiriman kayu secara bebas.¹²

5.4 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

1. Sumber Daya Nasional.

Afghanistan masih memiliki keterbatasan akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk mengaplikasikan teknologi modern. Terutama dalam hal pengolahan sumber daya alam, negara ini sangat bergantung pada bantuan asing. Di bidang kesehatan, yang merupakan kebutuhan paling penting, Afghanistan tidak memiliki fasilitas medis maupun SDM yang memadai. Penggunaan teknologi maju dalam mendiagnosa dan mengobati penyakit yang sulit dan rumit diatasi merupakan keharusan, namun di Afghanistan penggunaan teknologi medis modern masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya teknologi yang tersedia dan kurangnya tenaga profesional yang dapat menangani teknologi tersebut.¹³

¹¹ <http://www.asiantribune.com/news/2010/04/13/tapi-gas-pipeline-talks-turkmenistan>

¹² http://en.wikipedia.org/wiki/Aral_Sea

¹³ <http://www.medicaltourismmag.com/detail.php?Req=282&issue=13>

Sementara bila melihat pada Sumber Daya Alam yang dimilikinya, Afghanistan memang kaya walaupun sebagian besar belum diolah termasuk cadangan gas alam, minyak bumi, marmer, emas, tembaga, kromit, *talca*, sulfur, seng, bijih besi, garam, batu mulia dan semi mulia, serta cadangan lainnya. Pada tahun 2006, Badan Geologi AS memperkirakan bahwa Afghanistan memiliki sebanyak 36 triliun kaki kubik gas alam, 3,6 milyar barel minyak dan kondensat cadangan¹⁴.

Sementara berdasarkan penelitian tahun 2007, Afghanistan memiliki sumber daya mineral non-BBM yang cukup besar yang belum ditemukan. Para ilmuwan juga menemukan indikasi adanya cadangan berlimpah dari batu permata berwarna, termasuk *emerald*, *ruby*, *sapphire*, *garnet*, *lapis lazuli*, *kunzite*, *spinel* dan *andperidot turmalin*. Pada tahun 2010, pejabat Pentagon AS bersama dengan ahli geologi AS telah mengungkapkan penemuan hampir US \$ 1 triliun cadangan mineral belum dimanfaatkan di Afghanistan. Rencana sedang dilakukan oleh Pemerintah Afghanistan untuk memulai penambangan cadangan mineral ini. Pejabat Pentagon menyatakan bahwa Afghanistan bisa menjadi Arab Saudi kedua dari hasil *lithiumnya* yaitu bahan pembuatan baterai laptop, baterai hp (*handphone*), dan baterai mobil listrik. Namun demikian secara keseluruhan potensi sumber daya alam Afghanistan masih banyak yang belum tergarap karena faktor keamanan.

2. Produk Iptek Afghanistan.

a. Produk Komunikasi.

- 1) Telepon. Keberadaan *handphone* memancing masuknya operator *GSM (Global System for Mobile Communication)* ke Afghanistan. Saat ini ada lebih dari 1,4 juta jaringan selular di Afghanistan. Salah satu perusahaan jaringan telepon selular

¹⁴ . http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Afghanistan, Trade and Industry

terkemuka adalah Roshan, yang telah berhasil menyediakan pelayanan di 224 kota serta 33 provinsi dari 34 yang ada di seluruh Afghanistan. Saat ini ada 6 perusahaan jaringan telepon yang sedang beroperasi di Afghanistan yaitu:

- (a) *Afghan Wireless*¹⁵ perusahaan selular yang pertama kali beroperasi di Afghanistan. *Afghan Wireless* diluncurkan pada tahun 2002. Perusahaan tersebut menyediakan *wireless voice* dan *data services* dengan jaringan nasional dan internasional. Saat ini *Afghan Wireless* menyediakan layanan GSM di Kabul, Kandahar, Herat dan Mazar-e-Sharif.
- (b) *Roshan*¹⁶ merupakan perusahaan telekomunikasi terkemuka *Afghanistan*, melayani sekitar 3,5 juta pelanggan aktif. Pada bulan Januari 2003, Roshan mendapatkan izin lisensi GSM di Afghanistan. Sejak 6 tahun beroperasi, *Roshan* telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, yang pada awalnya hanya 30.000 jaringan menjadi 3 juta jaringan di seluruh Afghanistan. Saat ini *Roshan* merupakan operator telekomunikasi yang memiliki pertumbuhan tercepat di dunia.
- (c) *Emirate Telecommunications Corporation*¹⁷, merupakan jasa pelayanan telekomunikasi dari UAE yang saat ini beroperasi di 18 negara Asia, Timur Tengah dan Afrika. *Emirate Telecommunications Corporation* sendiri lebih dikenal dengan nama *Etisalat* yang dalam bahasa Arab berarti komunikasi. Pada tahun 2009, *Etisalat* merupakan jaringan telekomunikasi terbesar ke-13 di dunia dengan total pelanggan 100 juta.

¹⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/Afghan_Wireless

¹⁶ [http://en.wikipedia.org/wiki/Roshan_\(telco\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Roshan_(telco))

¹⁷ <http://en.wikipedia.org/wiki/Etisalat>

- (d) *MTN Group*¹⁸ merupakan perusahaan telekomunikasi asal Afrika Selatan dan banyak melakukan operasi di Afrika dan Timur Tengah.
- (e) *Wasel* merupakan perusahaan telekomunikasi yang menggunakan teknologi *CDMA (Code Division Multiple Access)* yaitu suatu teknologi yang sering digunakan untuk frekwensi radio. *Wasel* merupakan perusahaan telekomunikasi CDMA pertama yang beroperasi di Afghanistan.
- 2) Internet. Sudah ada beberapa *service provider* yang memberikan layanan jasa internet di Afghanistan. Pada tahun 2015, pengguna jasa internet di Afghanistan sudah mencapai lebih dari 850.000 orang¹⁹. Berikut ini beberapa dari Penyedia Layanan Internet di Afghanistan yang terdaftar di Kementerian Komunikasi, Informasi dan Teknologi Afghanistan²⁰:
- (a) *AFSAT (Afghanistan Faiz Internet Company)*. Didirikan pada tahun 2006. Perusahaan AFSAT ini telah membangun jaringan melalui instalasi sistem *VSAT (Very Small Aperture Terminal)* yaitu teknologi penerimaan sinyal satelit dengan menggunakan dish 2 arah yang berukuran kecil. Perusahaan ini telah memberikan pelayanan kepada NGOs, lembaga-lembaga PBB, pasukan militer, Kedutaan Besar, Lembaga-lembaga Pemerintah di Afghanistan, pelanggan pribadi dan banyak lainnya.
- (b) *Neda Telecommunications Company*, adalah perusahaan *service provider internet* yang pertama kali beroperasi di Afghanistan yang mendapatkan izin operasi dari

¹⁸ <http://en.wikipedia.org/wiki/Areeba>

¹⁹ . http://en.wikipedia.org/wiki/Communications_in_Afghanistan, Internet

²⁰ . <http://www.mcit.gov.af/OurPartners/isp.asp>

Ministry of Communications and Information Technology of Afghanistan pada *January 2003*.

- (c) *Rana Technologies* adalah perusahaan Informasi & Komunikasi termuka di Afghanistan. Perusahaan ini memiliki kantor di Kabul dan mengembangkan jaringan operasinya ke kota-kota besar lainnya di Afghanistan seperti Herat, Mazar-e-Sharif, Kandahar dan Jalalabad. Saat ini, *Rana technologies* memberikan jasa layanan yang luas kepada lembaga-lembaga Komersial, Pemerintah, Organisasi Non-Pemerintah (LSM), Kedutaan Besar dan badan PBB di Afghanistan.
- (d) *Io Global Services*, perusahaan ini bergerak pada teknologi jaringan nirkabel, satelit bumi dan jaringan internet. Dalam rentang waktu yang relatif singkat didirikan pada tahun 2004 hingga kini, *Io Global Service* telah menempatkan dirinya sebagai salah satu *ISP (Internet Service Provider)* terkemuka di Afghanistan, terutama di bidang akses internet yang cepat bagi pelanggan.
- (e) *CeReTechs* merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *ICT (Information Communication Teknology)* sejak tahun 1996, namun pada tahun 2002 perusahaan ini berubah menjadi perusahaan *Internet Service Provider* di Afganistan.
- (f) *Insta Telecom*, merupakan perusahaan pemasangan jaringan *VSAT* di seluruh Afghanistan melalui lisensi dari Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Afganistan.
- (g) *GTSC* atau disingkat *Global Telecom Services Company* *Internet Service Provider* di Afghanistan yang berbasis di Dubai.
- (h) *Danesh net*, perusahaan *service provider* didirikan tahun 2005 yang berbasis di provinsi Nimroz. *Danesh net* ini merupakan perusahaan pertama di provinsi Nimroz.

3) Produk Media Elektronik dan Cetak

(a) Televisi. Saluran televisi merupakan media yang populer di Afghanistan, dengan sejumlah stasiun siaran nasional dan internasional. Saat ini diperkirakan telah beroperasi hampir 50 saluran TV di Afghanistan²¹, diantaranya:

- TV 1
- Afghan Entertainment Television
- Afghan TV
- Afghanistan National Television
- Ariana Afghanistan Television
- ARZU TV
- Ayna TV
- BTN
- Hewad TV
- Lemar TV
- Negaah TV
- Noor TV Afghanistan
- Noorin TV
- Payam-E-Afghan TV
- Rah-E-Farda (Farda TV)
- RTA (Radio Television of Afghanistan-Perusahaan milik Pemerintah)
- RTA Nangarhar
- Saba TV & Saba World
- Sepehr TV
- Shamshad TV
- TOLO TV
- Tamadon TV
- Ujala TV

(b) Radio. Saat ini setidaknya telah beroperasi lebih dari 10 stasiun radio *FM*, 21 *AM* dan 1 radio siaran dengan gelombang pendek di Afghanistan²². Radio di

²¹ . http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_television_channels_in_Afghanistan

²² . http://en.wikipedia.org/wiki/Communications_in_Afghanistan,_Radio

Afghanistan kebanyakan menggunakan bahasa Dari/Parsi sebagai pengantar, tetapi ada juga yang menggunakan bahasa Pashto dan bahasa Inggris. Beberapa stasiun radio yang sangat populer di Afghanistan diantaranya²³:

- Radio Arman FM 98.1
- Radio Afghanistan
- Radio Aryana FM 93.5 (Kabul Afghanistan)
- Radio Azadi FM 100.5 (Kabul Afghanistan)
- BBC Radio FM 89.0 (Kabul Afghanistan)
- Radio KILID FM 87.5 (Kabul Afghanistan)
- Radio FM 89.4 (Kabul Afghanistan)
- Radio Zala FM 89.2 (Kunar Afghanistan)
- Radio Shaher FM 95.5 (Kabul Afghanistan)

(c) Media Masa. Sejumlah surat kabar dan kantor berita yang saat ini beroperasi di Afghanistan²⁴:

- Bakhtar News Agency (Kantor berita Pemerintah Afghanistan).
- Afghanistan Times (Surat Kabar cetak yang beroperasi di kota Kabul berbahasa Inggris).
- Pajhwok Afghan news (Kantor berita yang beroperasi di Kabul dan daerah).
- Taglara Information Agency (Kantor berita di Kabul berbahasa Inggris).
- Daily Afghanistan (Surat kabar cetak yang beroperasi di Kabul berbahasa Dari/Parsi dan Pashto).
- Daily Annis (Surat Kabar berbahasa Dari/Parsi).
- Daily Cheragh (Surat Kabar berbahasa Dari/Parsi).
- Eqtedaare Melli Weekly (Surat Kabar berbahasa Dari/Parsi).

²³ . http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_radio_stations_in_Asia#Afghanistan

²⁴ . http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_newspapers_in_Afghanistan

- Kabul Weekly (Surat Kabar berbahasa Dari/Parsi dan Inggris).
- The Outlook Afghanistan (Surat Kabar berbahasa Inggris).
- Wakht News Agency (Kantor berita berbahasa Dari/Parsi).

Walaupun secara umum komunikasi telah berkembang pesat namun penggunaan produk komunikasi yang berhubungan dengan penggunaan citra satelit untuk keperluan *Remote Sensing* yaitu teknologi untuk memantau lingkungan, peramalan tanaman, peringatan dini, kekeringan, pengendalian belalang dan bahaya lain, belum banyak dilakukan. Keperluan pemetaan, pemantauan cuaca membutuhkan biayanya yang tidak murah. Dengan anggaran terbatas Afghanistan lebih menerjunkan tim survey langsung ke lokasi untuk pengumpulan data dari pada melalui satelit. Seperti untuk mengetahui kerusakan akibat musibah alam. Karakteristik daratan yang kasar dan bergunung serta kurangnya jalan di sebagian besar wilayah negara ini, seringkali menghambat tim survei untuk melakukan tugasnya dan menyebabkan keterlambatan pengiriman informasi dari satu tempat ke tempat lain.

Pada masa Republik Islam Afghanistan, *Afghan National Security Defense Force* (ANSDF) merupakan lembaga yang bertugas melindungi Afghanistan baik dari serangan pihak luar negeri maupun serangan dari dalam negeri. Angkatan bersenjata Afghanistan terdiri dari *Afghan National Army* (ANA) dan *Afghan National Air Force*. Sebagai negara *landlocked* Afghanistan tidak mempunyai Angkatan Laut. Jumlah tentara Afghanistan pada tahun 2021 mencapai 300.000 personel (180 ribu personil di Kementerian Pertahanan, 120 ribu personil di Kementerian Dalam Negeri), sehingga diharapkan oleh AS dan NATO bahwa ANSDF dapat / mampu menghadapi ancaman baik dari Taliban maupun pihak-pihak lain.

6.1 ANSDF.

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab melindungi Afghanistan dari serangan musuh yang baik datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, ANSDF disetting, terdiri dari:

1. Kementerian Pertahanan / *Ministry of Defense*.

- a. *Afghan National Army* / ANA
- b. *Afghan National Army Special Operations Command* (ANASOC)
- c. *Special Mission Wing* (SMW)
- d. *Afghan Border Force* (ABF)
- e. *Afghan National Civil Order Force* (ANCOF)
- f. *Afghan Air Force* (AAF)

2. Kementerian Dalam Negeri (*Ministry of Interior Affairs*).

- a. *Afghan National Police* (ANP)
- b. *Afghan Uniformed Police* (AUP)

- c. *Public Security Police (PSP)*
- d. *Afghan Border Police (ABP)*
- e. *General Directorate for Intelligence and Counter Crime (GDICC),*
- f. *formerly Afghan Anti-Crime Police (FAACP)*
- g. *Afghan Public Protection Force (APPF)*
- h. *Counter Narcotics Police of Afghanistan (CNPA)*
- i. *Afghan Local Police (ALP)*
- j. *General Command of Police Special Units (GCPSU)*
- k. *Afghan Territorial Force (ATF) 444*
- l. *Crisis Response Unit (CRU) 222*
- m. *Commando Force (CF) 333*

3. Direktorat Keamanan Nasional (National Directorate of Security / NDS).

NDS adalah lembaga keamanan dan intelijen negara dan bertanggung jawab kepada Presiden. ANASOC, SMW dan GCPSU disebut sebagai Afghan Special Security Forces (ASSF) dan dilatih oleh NATO. The ASSF disebut sebagai pasukan utama ANSDF. Pada tahun 2019, belanja militer Afghanistan adalah sebesar 1.2% dari GDP.

Kekuatan militer modern Afghanistan pertama kali dibentuk tahun 1800-an saat Pemerintahan Amir Abdurrahman Khan. Kemudian ditingkatkan pada masa Pemerintahan Raja Amanullah Khan pada awal 1900-an dan dimodernisasi pada masa Raja Zahir Shah dari tahun 1933 hingga 1973.

Semasa perang Soviet di era 1980-an tentara bertempur melawan pejuang Mujahiddin, pada saat tersebut jumlah korban tentara sangat besar hingga mencapai 50- 60.000 dan sekitar 50.000 lainnya disersi. Menjelang 1992, militer Afghanistan menjadi tidak berfungsi, melebur kedalam faksi-faksi yang dipimpin berbagai *warlord* karena Presiden Mohammad Najibullah dipaksa turun dari kekuasaan dan kelompok pejuang menguasai negeri. Masa ini kemudian dilanjutkan dengan era Taliban yang mendirikan kekuatan militer berdasarkan hukum syariah Islam.

Setelah invasi Amerika Serikat pada tahun 2001, militer Afghanistan dibentuk kembali oleh aliansi militer NATO, khususnya tentara Amerika Serikat. Meskipun pada awalnya mengalami banyak masalah khususnya rekrutmen dan pelatihan namun pada akhirnya dapat bersama-sama pasukan AS dan NATO memerangi kelompok insurjensi. Presiden Afghanistan merupakan Panglima Tentara Nasional Afghanistan yang bertindak melalui Menteri Pertahanan. Markas Besar Tentara Afghanistan sekaligus bertindak sebagai Pusat Komando Militer, berada di Kabul.

Sementara itu, menurut perkiraan AS, jumlah personil tentara Taliban berjumlah 75 ribu orang. Sementara menurut PBB kekuatan tentara Taliban adalah antara 55 ribu hingga 85 ribu orang.

Serangan militer oleh Taliban dan kelompok militan terhadap Republik Islam Afghanistan dimulai pada 1 Mei 2021, bertepatan dengan penarikan Amerika Serikat dan pasukan sekutu dari Afghanistan. Dalam tiga bulan pertama serangan, Taliban membuat keuntungan teritorial yang signifikan di pedesaan, meningkatkan jumlah distrik yang dikuasainya dari 73 menjadi 223.

Pada tanggal 6 Agustus 2021, Taliban melancarkan serangan ke ibu kota provinsi Afghanistan, dengan sebagian besar kota menyerah tanpa perlawanan, dan merebut semua ibu kota provinsi Afghanistan. Pada tanggal 15 Agustus, Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dari negara itu, dan Taliban merebut ibu kota Afghanistan, Kabul. Dengan demikian, Pemerintahan Republik Islam Afghanistan jatuh. Pengambilalihan Taliban mengejutkan banyak Pemerintah, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Barat, bahkan Rusia.

Presiden AS Joe Biden berbagi pandangannya tentang situasi yang memburuk di Afghanistan dan pengambilalihan Taliban atas negara yang dilanda perang. Biden membenarkan keputusannya untuk menarik semua pasukan AS keluar dari Afghanistan, dan menyalahkan kepemimpinan Afghanistan karena tidak melakukan perlawanan atas Taliban dalam beberapa pekan terakhir. Biden menyatakan bahwa para pemimpin politik Afghanistan menyerah dan melarikan diri dari negara itu. Militer Afghanistan menyerah,

terkadang tanpa berusaha untuk melakukan perlawanan. Biden menyatakan bahwa pasukan Amerika tidak bisa dan tidak seharusnya berperang, dan mati dalam perang yang pasukan Afghanistan tidak mau berperang untuk diri mereka sendiri.

6.2 Penyebab Kekalahan Tentara Afghanistan dari Taliban.

Masih membingungkan bagi banyak pengamat bagaimana tentara Pemerintah Afghanistan, yang dilatih dan diperlengkapi oleh AS selama dua dekade, bisa menyerah begitu cepat kepada Taliban. Dari perspektif ukuran, Taliban memiliki sekitar 80.000 pejuang, dibandingkan dengan lebih dari 300.000 tentara Pemerintah Afghanistan. Namun, Taliban mampu menguasai negara itu dalam beberapa minggu. Beberapa pengamat menyebutkan ada beberapa alasan mengapa hal ini dapat terjadi:

1. Tidak ada dukungan udara NATO.

Kekuatan udara merupakan faktor penting dalam operasi anti-Taliban selama dua dekade terakhir. Meskipun pasukan Afghanistan melakukan operasi kelompok, mereka selalu dapat mengandalkan dukungan NATO dan dukungan udara AS. Dengan penarikan NATO, pasukan Afghanistan di lapangan kehilangan elemen kunci di medan perang melawan pejuang Taliban yang terorganisir. Mohammad Shafiq Hamdam, seorang pakar keamanan yang berbasis di Kabul, mengatakan bahwa pasukan keamanan Afghanistan secara finansial dan militer bergantung pada AS, dan dibiarkan terbuka dan rentan saat penarikan berlangsung.

Perjanjian AS-Taliban di Doha tahun lalu dan penarikan tanpa syarat pasukan NATO dari Afghanistan tahun ini telah meningkatkan moral Taliban. Attiqullah Amarkhail, seorang pakar keamanan yang berbasis di Kabul, mengatakan bahwa tanpa dukungan AS dan NATO yang mendukung pasukan Pemerintah Afghanistan, para pemimpin Taliban tahu bahwa mereka dapat menggulingkan Pemerintah di Kabul.

2. Tentara Afghanistan terdemoralisasi oleh keluarnya AS.

Namun, ini tidak menyembunyikan fakta bahwa Washington menghabiskan sekitar \$83 miliar untuk melatih dan memperlengkapi militer Afghanistan, dan bahwa pasukan lokal seharusnya cukup kuat, setidaknya di atas kertas, untuk melawan Taliban. Analisis mengutip demoralisasi dan korupsi sebagai dua alasan penting di balik keruntuhan tentara Afghanistan. Banyak orang Afghanistan melihat kesepakatan AS-Taliban 2020 di Doha, yang disusun oleh Pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump, sebagai sinyal bahwa Washington tidak lagi tertarik dengan Afghanistan, yang pada gilirannya membuat demoralisasi pasukan Afghanistan. Ketika Joe Biden menggantikan Trump sebagai presiden pada Januari, para pejabat Afghanistan berharap pemimpin baru AS itu akan memberi mereka lebih banyak ruang untuk bernafas. Pada April 2021, Biden menggandakan rencana Trump tentang penarikan tanpa syarat semua pasukan AS dari Afghanistan, dan sekutu NATO AS mengikutinya.

Jelas bahwa Pemerintah Afghanistan tidak siap untuk penarikan yang begitu cepat, dan ini diperburuk oleh fakta bahwa Taliban tidak menyetujui gencatan senjata nasional dan pembicaraan intra-Afghanistan terhenti. Menurut sebuah laporan oleh Dewan Hubungan Luar Negeri AS, militer Afghanistan tidak dapat menyediakan pasokan penting seperti makanan dan amunisi ke pos-pos yang tersebar di seluruh negeri. Namun demikian, beberapa unit Afghanistan, khususnya komando elit, berjuang keras hampir sampai akhir.

3. Korupsi di dalam tentara.

Organisasi non-Pemerintah dan kelompok penelitian telah berulang kali melaporkan tentang korupsi yang merajalela di Pemerintahan Ashraf Ghani. Menurut proyek *The Washington Post Afghanistan Papers*, dari 352.000 tentara dan polisi yang dihitung sebagai anggota pasukan keamanan Afghanistan, hanya 254.000 yang dapat dikonfirmasi oleh Pemerintah sebelumnya. Komandan tidak hanya menciptakan "tentara hantu" untuk membayar gaji mereka, tetapi juga mengurangi gaji tentara yang bertugas. Komandan juga

gagal mengirimkan pasokan yang diperlukan. Menurut The Guardian, badan AS yang memantau pengeluaran dalam konflik melaporkan bahwa "cara-cara pembelanjaan bebas" telah memungkinkan korupsi semacam itu dan bahwa upaya untuk menghentikannya "setengah hati dan tidak efektif. Pertanyaan apakah uang itu dibelanjakan dengan baik pada akhirnya akan dijawab oleh hasil pertempuran di lapangan. Laporan badan tersebut sedang menunggu tinjauan Kongres AS.

4. Kurangnya ideologi untuk diperjuangkan.

Alasan lain di balik kejatuhan tentara Afghanistan adalah kurangnya tujuan, karena kesetiaan kepada suku atau daerah melebihi rasa kesetiaan kepada Pemerintah pusat di Kabul. Taliban, di sisi lain, dipersatukan oleh ideologi Islam militan. Sejak tahun 2001, ketika AS menginvasi Afghanistan dan menggulingkan rezim mereka sebelumnya, Taliban telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerah pada ideologi Islam mereka dan akan pergi sejauh apapun untuk mengusir "imperialis Barat" dan penjajah dari Afghanistan.

Komitmen setipis kertas untuk Kabul dari pasukan Afghanistan yang ditempatkan di seluruh negeri diilustrasikan dengan tepat oleh Nadeem Farooq Paracha, seorang komentator media Pakistan. Paracha menunjukkan bahwa Mujahidin membutuhkan waktu tiga tahun untuk menggulingkan mantan presiden sosialis Afghanistan Muhammad Najibullah setelah penarikan pasukan Soviet pada tahun 1989, tetapi pasukan Ghani bahkan tidak dapat bertahan selama sebulan.

Mantan Panglima Tertinggi NATO Laksamana (Purn) James G. Stavridis menyatakan: "Anda dapat membeli semua peralatan militer di dunia. tetapi Anda tidak dapat membeli kepemimpinan (*leadership*) atau kemauan politik (*political will*) atau, khususnya, kemauan bertempur (*battlefield will*). Dan karena itu, kita melihat bayangan tentara Afghanistan (*Afghan ghosting army*) ini. Ini cukup memilukan."

Dr. Abdool Hadi Miran, *Executive Director of Afghan Organization for Peace, Conflict & Integration Studies and Social & Cultural Director, Office of the President of Islamic Republic of Afghanistan* dalam pertemuan dengan Dubes RI Kabul 4 Maret 2021 menyatakan bahwa kesulitan yang dihadapi Pemerintah Afghanistan apabila terjadi perang terbuka dengan Taliban adalah *lack of narrative* atau *something to believe in* di kalangan tentara Pemerintahan Republik, sementara Taliban percaya akan cita-cita mendirikan negara Islam dan menegakkan syariat Islam.

Menurut Sami Sadat, seorang jenderal bintang tiga ANSDF, kesepakatan AS-Taliban Februari 2020 menghasilkan perubahan "secara efektif ... dalam semalam" dalam hal aturan dukungan udara AS untuk angkatan bersenjata Afghanistan, yang mengarah ke peningkatan mendadak efektivitas pertempuran Taliban. Konfirmasi Presiden Biden pada April 2021 tentang penarikan AS mengakibatkan hilangnya kontraktor, perangkat lunak berpemilik, dan sistem senjata termasuk sistem pertahanan rudal helikopter tentara Afghanistan. Tentara Afghanistan telah dilatih dengan model militer berteknologi tinggi menggunakan helikopter, serangan udara, dan unit pengintaian khusus secara teknis. Menurut Sadat, hilangnya dukungan teknis membuat model teknologi tinggi AS tidak efektif, kehilangan dukungan helikopter untuk memasok pangkalan militer, dan senjata berpemandu laser dan udara.

Ali Yawar Adili, direktur negara Jaringan Analisis Afghanistan, mengatakan bahwa para pejabat Afghanistan, termasuk Ghani, tidak pernah berharap bahwa AS akan menghentikan dukungan logistik dan udara kepada pasukan Afghanistan. Pasukan Afghanistan sangat bergantung pada dukungan logistik dan udara yang disediakan oleh AS dan mereka sangat terkejut ketika dukungan AS ditarik.

Sejarawan militer Frederick Kagan setuju bahwa langkah Presiden Biden membuat, menentukan waktu, dan mengumumkan keputusan penarikannya pada April 2021 adalah faktor kunci dalam kekalahan ANSDF. Dia berpendapat bahwa sangat sedikit sekutu AS, termasuk anggota NATO yang memiliki kapasitas untuk menyediakan

sendiri kekuatan udara, perlindungan udara, intelijen, pengawasan dan aset pengintaian.

Setelah Presiden Ghani kabur ke luar negeri, maka Amrullah Saleh (Wakil Presiden I) mengklaim kekuasaan dan tugas presiden, sebagai pejabat presiden Afghanistan dari 17 Agustus 2021 hingga 6 September 2021 ketika Taliban akhirnya berhasil merebut Lembah Panjshir. Amrullah Saleh menjabat sebagai Wakil Presiden I Afghanistan dari Februari 2020 hingga Agustus 2021, menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dari 2018 hingga 2019, dan sebagai Kepala Direktorat Keamanan Nasional (NDS) dari 2004 hingga pengunduran dirinya pada 2010.

Sebelum memimpin intelijen Afghanistan, Amrullah Saleh adalah anggota Aliansi Utara Ahmad Shah Massoud. Pada tahun 1997, Saleh ditunjuk oleh Massoud untuk melayani sebagai kantor penghubung Aliansi Utara di dalam Kedutaan Besar Afghanistan di Dushanbe, Tajikistan, menangani kontak dengan organisasi non-Pemerintah (kemanusiaan) internasional dan badan intelijen. Setelah mengundurkan diri dari NDS pada 2010, Saleh menciptakan gerakan pro-demokrasi dan anti-Taliban yang disebut Basej-e Milli (Mobilisasi Nasional) dan Green Trend. Setelah jatuhnya Kabul di bawah kendali Taliban, Ashraf Ghani melarikan diri dari negara itu, Saleh pindah ke Lembah Panjshir, di mana ia menyatakan dirinya sebagai Presiden sementara Afghanistan dan mengumumkan pembentukan front anti-Taliban, bersama dengan Ahmad Massoud (putra Ahmad Shah Massoud) dan Menteri Pertahanan Bismillah Khan Mohammadi.

Dilaporkan bahwa, menurut intelijen AS dan mantan pejabat Pemerintah Afghanistan, Saleh, bersama dengan Ahmad Massoud telah meninggalkan Afghanistan menuju Tajikistan tak lama setelah Taliban merebut Panjshir yang, menurut banyak pihak, merupakan langkah strategis (*strategic retreat*).

7.1 Sejarah dan Perkembangan Hubungan Bilateral Indonesia - Afghanistan.

Pemerintah Afghanistan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 23 September 1947 sebagaimana tercantum dalam buku berjudul “Kembali ke UUD-45”, terbitan Kementerian Penerangan RI tahun 1948. Setelah itu mulai terjalin hubungan diplomatik kedua negara, pada tanggal 20 Desember 1949 dan sebelum lahirnya “Republik Indonesia Serikat (RIS)”, Mayor Jenderal Abdul Kadir ditunjuk sebagai “*Representative of the Republic of Indonesia*” untuk Kerajaan Afghanistan di Kabul.

Presiden Republik Indonesia pertama Dr. Ir. H. Achmad Sukarno berkunjung ke Afghanistan pada 18 - 20 Mei 1961. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Sukarno kedatangannya disambut dengan karpet merah dan upacara yang megah oleh Raja Afghanistan Mohammed Zahir Shah. Sang Raja menyambut langsung Presiden Soekarno di kaki tangga pesawat diikuti jajaran menteri kerajaan Afghanistan serta pasukan kehormatan. Kedua kepala negara juga menyampaikan pidato dalam upacara penyambutan di Bandara Internasional Kabul.

Dalam pidato penyambutannya, Raja Mohammed Zahir Shah mengatakan bahwa Presiden Soekarno bukanlah orang asing di Afghanistan. Sang Raja mengatakan, rakyat Afghanistan mengetahui upaya dan perjuangan yang dilakukan Soekarno untuk kemerdekaan Indonesia. Sementara Presiden Soekarno yang mengenakan peci dan kacamata hitam serta memegang tongkat komando menegaskan pentingnya negara di Asia dan Afrika untuk bersatu dan bekerjasama lebih erat dalam situasi dunia yang bergejolak.

Sambutan hangat diberikan rakyat Afghanistan atas kedatangan Presiden Soekarno sepanjang perjalanan menuju ke Istana Kerajaan

di Kabul. Warga Kabul berkumpul di sepanjang jalan yang dilalui oleh iring-iringan mobil yang ditumpangi Presiden Soekarno, dengan mengibarkan bendera merah putih Indonesia.

Selama kunjungan, Presiden Soekarno melakukan sejumlah pertemuan dan kegiatan kenegaraan. Sang Proklamator juga membahas situasi dunia dengan Raja Mohammad Zahir Shah dan hubungan baik antara kedua negara. Selain itu, Presiden Soekarno juga berkunjung ke makam raja Afghanistan terdahulu, serta menyaksikan pertunjukan angkatan udara Afghanistan di Pangkalan Udara Bagram. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Soekarno dan Menteri Luar Negeri Soebandrio menerima anugerah bintang penghargaan dari Raja Afghanistan.

Selama periode 24 Februari 1959 – 28 April 1961, Mr. R. Djoemhana Wiriaatmadja menjadi Kuasa Usaha ad interim. Pada tanggal 28 Oktober 1960, bertepatan dengan Hari Pemuda, “Kedutaan RI” di Kabul ditingkatkan menjadi “Kedutaan Besar” RI dikepalai oleh Kuasa Usaha ad interim, MR. R.T Djoemhana Wiriaatmadja. Mr. R. Soegiarto, menjadi Duta Besar RI yang Pertama untuk Kerajaan Afghanistan, setelah menyerahkan Surat Kepercayaan pada tanggal 2 Mei 1961.

Tak lama setelah diproklamasikan negara “Republik Afghanistan” melalui kudeta yang dilakukan terhadap Raja Zahir Shah pada tanggal 17 Juli 1973, maka pada tanggal 6 Agustus 1973 Indonesia mengakui terbentuknya negara “Republik Afghanistan” tersebut sebagai mana tercantum dalam buku berjudul “Ariana”, terbitan Kementerian Penerangan dan Kebudayaan Republik Afghanistan, tahun 1973. Selama periode 29 September 1974 – 13 Oktober 1977, Abdul Habir menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Republik Afghanistan.

Dengan terbentuknya negara Republik Demokrasi Afghanistan (RDA) pada tanggal 27 April 1978, pada tanggal 14 Mei 1978 Indonesia mengakui kedaulatan negara RDA di bawah pimpinan Noor Mohammad Taraki, Ketua Dewan Revolusi dan Perdana Menteri RDA. Selama periode 7 Februari 1978 – 24 Januari 1980, Abdurrahman

Gunadirdja, MA, menjadi Duta Besar RI baik untuk Republik Afghanistan maupun Republik Demokrasi Afghanistan.

Sebelum berakhir masa jabatannya, pada tanggal 22 Januari 1980, Abdurrahman Gunadirdja, MA, Duta Besar RI untuk RDA ditarik dari Kabul sebagai protes atas invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada tanggal 27 Desember 1979. Pada tanggal 24 Januari 1980 Duta Besar Abdurrahman Gunadirdja meninggalkan Kabul dengan jalan darat melalui Pakistan karena terbatasnya fasilitas penerbangan. Selanjutnya KBRI Kabul dikepalai oleh seorang Kuasa Usaha ad interim.

Selama periode 12 November 1985 sampai akhir bulan November 1988, Abullah Fuad Rachman, *Minister Counsellor*, menjabat sebagai Kuasa Usaha ad interim untuk RDA dan selanjutnya menjadi Republik Afghanistan (yang diproklamasikan pada tanggal 1 November 1987). Bentuk Negara Afghanistan kemudian berubah kembali menjadi Republik Islam Afghanistan dan Pemerintah RI kembali mengangkat Kepala Perwakilan RI di Kabul seorang Duta Besar yaitu Drs. Havid Abdul Ghani untuk periode 1993-1996. Pada periode 1996 – 1999, Alwi Anas, menjadi Duta Besar RI untuk Negara Islam Afghanistan.

Setelah Taliban berhasil menduduki Kabul pada tanggal 27 September 1996 dengan menjatuhkan Pemerintahan Presiden Prof. Burhanuddin Rabbani, pada tanggal 27 Oktober 1997 Pemerintah Taliban mengubah nama negara dari Republik Islam Afghanistan menjadi Emirat Islam Afghanistan. Karena kondisi keamanan tidak kondusif sejak 3 Oktober 1996 KBRI Kabul dinyatakan "*non active*" dan memindahkan kegiatannya ke New Delhi, dan selanjutnya mulai tanggal 31 Maret 1999 kepentingan Indonesia di Afghanistan ditangani oleh KBRI Islamabad, Pakistan.

Menyusul serbuan pasukan Aliansi Utara (anti Taliban) ke Kota Kabul dengan bantuan tentara AS dan sekutunya pada bulan November 2001, Pemerintah Taliban tumbang dan digantikan oleh Pemerintahan Negara Islam Transisi Afghanistan yang dipimpin oleh Hamid Karzai. Setelah Pemilihan Presiden bulan Oktober 2004,

Hamid Karzai dikukuhkan menjadi Presiden, pada bulan Desember 2004 istilah Pemerintahan transisi dihapus dan berganti nama kembali menjadi Republik Islam Afghanistan.

Mengingat perkembangan positif yang terjadi di Afghanistan setelah kejatuhan Taliban serta hubungan historis yang telah terjalin sejak lama, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengaktifkan kembali KBRI Kabul di awal tahun 2004. Selama periode 13 Januari 2004 - 27 Oktober 2004, Drs. Mohammad Asruchin, MA, *Minister Counsellor*, menjabat sebagai Kuasa Usaha ad interim untuk Republik Islam Afghanistan.

Karena situasi keamanan dianggap sudah kondusif dan kepentingan Indonesia di Afghanistan makin meningkat, mulai Desember 2006 Brigadir Jenderal TNI Erman Hidayat diangkat sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Islam Afghanistan, yang bertugas sampai dengan Desember 2009 dan selanjutnya diperpanjang hingga Desember 2010.

Sebagaimana disampaikan di atas bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dengan Afghanistan telah terjalin dengan baik sejak pembukaan hubungan diplomatik pada tahun 1947. Sejarah hubungan kedua negara ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Persahabatan RI-Afghanistan (*Treaty of Friendship*) pada tanggal 24 April 1955 dan kehadiran delegasi Afghanistan pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. Hubungan persahabatan dan kerja sama yang baik di antara kedua negara selama ini tercermin terutama pada sikap saling mendukung di fora internasional.

Pemerintah Afghanistan mendukung pencalonan Indonesia pada Dewan HAM PBB tahun 2006 dan juga telah menyatakan dukungannya atas pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK-PBB periode 2007-2008. Di samping itu, Afghanistan juga mendukung *Commission of Truth and Friendship* (CTF) yang dibentuk oleh Pemerintah RI dan Timor Leste.

Saling dukung antara Pemerintah Afghanistan dengan Indonesia berlanjut hingga tahun 2010 di mana Pemerintah Afghanistan telah memberikan 3 dukungan kepada Pemerintah

Indonesia yakni pada *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) (of wild Fauna & Flora)* pada 13 – 25 Maret 2010 di Doha dalam keanggotaan Mr. Subarsono, *Intergovernmental Committee of Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO* tanggal 22 – 24 Juni 2010 di Paris dalam keanggotaan Indonesia pada *ICH UNESCO 2010 – 2014*, dan *International Telecommunication Union (ITU)* tanggal 4 -22 Oktober 2010 di Mexico dalam keanggotaan Indonesia pada *ITU Council 2010 – 2014*. Sedangkan Pemerintah Indonesia memberikan 1 kali dukungan kepada Pemerintah Afghanistan pada *International Telecommunication Union (ITU)* dalam keanggotaan *Engineer Nader Shah Arian* di *Radio Regulation Board (RRB) ITU 2010 – 2014*.

Pada tanggal 22 Agustus 2012, Mayjen TNI (Purn) Anshory Tadjudin dilantik Presiden sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Islam Afghanistan hingga Maret 2016. Pada tanggal 9 November 2012, disela-sela penyelenggaraan Konferensi “*Bali Democracy Forum*” telah ditanda tangani 4 (empat) buah perjanjian bilateral RI - Afghanistan, yaitu :

1. Perjanjian tentang Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas.
2. Perjanjian tentang Kerjasama Persahabatan.
3. Memorandum Saling Pengertian (MoU) tentang Program Pertukaran Kebudayaan.
4. Memorandum Saling Pengertian (MoU) antara Kementerian Luar Negeri RI dan Afghanistan tentang Konsultasi Bilateral.

Pada tanggal 13 Maret 2017, Mayjen TNI (Purn) Dr. Ir. Arief Rachman, MM, MBA dilantik Presiden RI sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Islam Afghanistan hingga 30 September 2021.

Hubungan persaudaraan Indonesia dan Afghanistan sangat erat dengan kesamaan sejarah dan tujuan negara karena kedua negara mayoritas penduduknya beragama Islam. Hubungan antar orang yang beragama Islam adalah bersaudara berkaitan dengan Al-Qur’an dan Hadits yang dipedomani sebagai jalan hidup (*way of life*) kedua

masyarakatnya. Masyarakat Indonesia dan Afghanistan memiliki keterikatan dalam budaya, adat istiadat, pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan satu sama lain. Selain daripada itu, kesamaan tujuan sebagai negara maupun bangsa yang berlatar belakang Islam maka saling meyakini bahwa keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat saling bersinergi. Kesamaan persaudaraan ini memberikan kemudahan untuk saling percaya dalam membangun persahabatan antar kedua negara dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan dasar kepercayaan, hubungan persaudaraan akan berkaitan dan bermanfaat demi perkembangan kemajuan kedua negara dimasa mendatang.

7.2 Lawatan Presiden RI Ir. Joko Widodo ke Afghanistan.

Saling kunjung Pejabat antara kedua negara berlangsung cukup intensif. Tercatat pejabat Pemerintah baik tingkat Direktur, Dirjen, anggota DPR hingga Presiden Afghanistan Hamid Karzai telah berkunjung ke Indonesia. Dari Indonesia beberapa pejabat Pemerintah, MPR RI dan Ulama telah berkunjung ke Afghanistan.

Peran Indonesia dalam mendukung perdamaian di Afghanistan memang sangatlah dinanti-nantikan. Kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi, pada tanggal 6 November 2017, tampaknya menjadi momentum penting bukan hanya bagi hubungan persahabatan antara kedua negara tetapi juga memberikan gaung positif terhadap perkembangan politik maupun keamanan serta keterlibatan semua *stakeholder* di Afghanistan berkenaan akan datangnya perdamaian yang dimediasi oleh Indonesia dalam kerangka *peace building*. Konsep *peace building* lahir setelah berlangsungnya konflik. Dalam sejumlah literatur *peace building* dimaknai sebagai upaya atau tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur guna memperkuat perdamaian sebagai upaya untuk mencegah suatu konflik yang telah didamaikan sehingga tidak berubah menjadi konflik kembali.

Setelah lawatan Menteri Luar Negeri RI, Retno L. P. Marsudi berlalu, di tengah aksi meluaskan kekerasan di Afghanistan, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, menyempatkan diri berkunjung

ke Afghanistan. Padahal beberapa hari sebelumnya telah terjadi tiga serangan secara berturut-turut, yakni terhadap Hotel *Intercontinental* pada 20 Januari 2018 yang menewaskan 43 orang, serangan bom bunuh diri di dekat kantor Kementerian Dalam Negeri pada 28 Januari 2018 yang menewaskan lebih dari 100 orang dan melukai hampir 300 orang, dan serangan ke Akademi Militer pada 29 Januari 2018 yang menewaskan 2 orang. Meskipun dalam situasi yang sangat mencekam, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo tetap bersikeras untuk berkunjung ke Afghanistan mengingat beliau merasakan pentingnya perdamaian di Afghanistan harus terwujud.

Dalam pidato Presiden RI Joko Widodo di Afghanistan menyatakan bahwa: “tanpa ada perdamaian tidak akan ada kesejahteraan, tanpa kesejahteraan perdamaian tidak akan bertahan lama, oleh karena itu, ketika bekerja sama dalam membangun perdamaian, kerja sama ekonomi harus ditingkatkan secara paralel”. Dalam mewujudkan upaya perdamaian dan pembangunan di Afghanistan perlu adanya keselarasan hubungan sosial, politik dan ekonomi. Peran Indonesia dalam mendukung perdamaian dilakukan melalui pendekatan diplomasi *soft power* yang mengintegrasikan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan perempuan. Komitmen Pemerintah Indonesia yang bersungguh-sungguh dalam mendukung perdamaian di Afghanistan inilah yang menjadikan pihak-pihak yang saling bertikai agak menjadi segan dan saling menahan diri.

Menindaklanjuti upaya perdamaian, Indonesia selanjutnya mengirim Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla ke Afghanistan, guna menjalankan misi penting mewujudkan *peace building*. Dalam Konferensi Proses Kabul II yang berlangsung di Istana Haram Sarai, Kabul, pada 28 Februari 2018, Jusuf Kalla berusaha meyakinkan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan seluruh peserta konferensi, bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah pertemuan ulama dari tiga negara, yakni Afghanistan, Pakistan dan Indonesia.

Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi melakukan kunjungan kerja ke Kabul, Afghanistan pada 1 Maret 2020. Kunjungan tersebut

dalam rangka peresmian *Afghanistan Indonesia Women Solidarity Network* (AIWSN), pertemuan bilateral *tête à tête* dengan sejumlah Menteri Kabinet Afghanistan, serta kunjungan kehormatan kepada Presiden Afghanistan Ashraf Ghani. Pada kesempatan tersebut Menlu Retno menerima anugerah Bintang Kehormatan “Malalai” yang disematkan langsung oleh Presiden Ghani sebagai simbol pengakuan dan penghargaan negara terhadap peran serta Indonesia dalam mendorong perdamaian di Afghanistan melalui berbagai bentuk kerjasama bilateral. Malalai Award merupakan bintang penghargaan tertinggi setingkat Pahlawan Nasional yang diberikan Pemerintah Afghanistan kepada tokoh masyarakat baik nasional maupun internasional yang dinilai memiliki kontribusi luar biasa bagi kemajuan bangsa Afghanistan. Penghargaan ini secara khusus didedikasikan bagi kaum wanita Afghanistan dan Indonesia untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan kemajuan dan solidaritas kaum wanita di seluruh dunia. Presiden Ashraf Ghani berharap bahwa capaian kerjasama yang telah dirintis saat ini dapat menjadi dasar kerjasama kedua negara dalam membangun dan memelihara perdamaian dunia.

Indonesia dan Afghanistan juga saling mendukung di forum internasional. Pada tanggal 24 Agustus 2016, Pemerintah Afghanistan memberikan dukungan atas pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota *International Law Commission (ILC)*, yang pemilihannya dilaksanakan di New York pada November 2016. Pada tanggal 24 Agustus 2016, Pemerintah Afghanistan memberikan dukungan Pemerintah Afghanistan atas pencalonan Indonesia sebagai anggota *Postal Operations Council (POC) of the Universal Postal Union (UPU)* periode 2017-2020, yang pemilihannya dilaksanakan di Istanbul, Turkey pada 19 September – 7 Oktober 2016. Pemerintah Afghanistan juga memberikan dukungan bagi terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB 2018 – 2020.

7.3 Beberapa Dokumen Perjanjian Indonesia-Afghanistan.

Secara keseluruhan terdapat beberapa dokumen perjanjian antara Indonesia dengan Afghanistan yang ditandatangani dan masih berlaku hingga saat ini, antara lain:

1. *Treaty of Friendship Between the Government of the Republic of Indonesia and the Kingdom of Afghanistan*, 24 April 1955.
2. *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Islamic Republic of Afghanistan on Capacity Building for Law Enforcement Personnel*, Jakarta, 17 September 2012.
3. *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan on Cultural Exchange Programme*, Bali, 9 November 2012.
4. *Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan on Bilateral Consultation*, Bali, 9 November 2012.
5. *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan on Friendship and Cooperation*, Bali, 9 November 2012.
6. *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passport*, Bali, 9 November 2012.
7. *Memorandum of Understanding between the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia and the Ministry of Women's Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan on the Empowerment and Protection of Women* Jakarta, 18 Desember 2013.
8. *Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Higher Education of the Islamic Republic of Afghanistan on Higher Education Cooperation*, Jakarta, 17 Januari 2014.

9. *Memorandum of Understanding on Mutual Cooperation between the Afghanistan Chamber of Commerce and Industries and the Indonesian Chamber of Commerce and Industry*, Jakarta, 10 Oktober 2014.
10. *Memorandum of Understanding Between the Embassy of the Republic of Indonesia in Kabul, Afghanistan and Noor Educational and Capacity Development Organization (NECDO) Concerning Grant to Build a Mosque at Indonesia Islamic Center in Kabul, Afghanistan*, 18 Oktober 2014.
11. *Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan for the Cooperation on Diplomatic Training and Education*, Jakarta, 6 Maret 2016.

SOFT POWER DIPLOMASI BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN DI AFGHANISTAN

8.1 Perkembangan Politik dan Keamanan Afghanistan Tahun 2017 – 2021.

Perang Afghanistan telah berlangsung selama 20 tahun, diawali oleh Amerika Serikat kepada Al-Qaeda dan Taliban lalu kemudian menjadi perang antara Pemerintah Afghanistan dan Taliban. Kejadian serangan teroris 9/11 yang dipimpin oleh Al-Qaeda telah menjadi pemicu awal perang Afghanistan.

Deklarasi *War of Terror* oleh Presiden AS George W. Bush telah menjadikan terorisme sebagai musuh dunia yang harus dilawan bersama-sama dan dalam melawan teroris, AS mengintervensi dan menyerang Afghanistan atau disebut sebagai *Operation Enduring Freedom* (OEF) ke Afghanistan. Bush dengan segera meminta Pemerintah Taliban untuk menyerahkan pemimpin al-Qaeda Osama bin Laden yang bersembunyi di Afghanistan, tetapi al-Qaeda justru didukung oleh rezim Taliban sehingga AS dan sekutunya menyerang Afghanistan.

Melalui Deklarasi *War on Terror*, Bush menjadikan hal tersebut sebagai justifikasi untuk menggalang dukungan dari semua negara untuk menyerang dan mengintervensi ke al-Qaeda dan Taliban di Afghanistan pada 7 oktober 2001. Dengan ini, Amerika Serikat (AS) mengintervensi al-Qaeda dan pangkalannya dengan serangan udara dan pengiriman pasukan keamanan AS. Amerika serikat pun menjadikan Afghanistan sebagai perhatian kebijakan luar negeri Amerika. AS mengerahkan tentara mereka untuk menyerang Afghanistan selama 19 tahun dan mengalokasikan sekitar \$141 miliar untuk rekonstruksi dan pasukan keamanan di Afghanistan.

Afghanistan dipandang sebagai musuh Amerika Serikat karena serangan teror 9/11 dilakukan oleh Al-Qaeda dengan dukungan rezim

Taliban, serangan demi serangan dan pasukan keamanan pun yang dikerahkan AS ke Afghanistan selama bertahun-tahun. Pada bulan Mei 2011, Osama bin Laden akhirnya berhasil ditemukan di Pakistan dan tewas dalam operasi khusus AS yaitu Operasi Neptune'Spear. Dengan demikian AS berhasil memenuhi tujuannya dan dibawah kepemimpinan Presiden Barack Obama pasukan keamanan AS ditarik keluar Afghanistan setelah melakukan intervensi dan serangan selama 10 tahun di Afghanistan. Pola hubungan Afghanistan dan Amerika Serikat berubah-ubah tergantung pada kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinan Presiden Bush, Obama, Trump, dan Biden.

Ari Tayyer (2020) membandingkan kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah di bawah kepemimpinan presiden Bush, Obama dan Trump. Kebijakan luar negeri AS di bawah Bush cenderung dilakukan secara sepihak terlebih terhadap intervensi dan penyerangan ke Afghanistan dalam rangka melawan al-Qaeda yang telah melakukan teror ke AS. Sedangkan Obama merubah arah kebijakan kearah positif dimana melakukan koordinasi pada Pemerintah regional dan tidak menggunakan opsi militer untuk menyelesaikan masalah, dengan demikian dalam urusan perang Afghanistan, Obama memutuskan untuk menarik keluar pasukan AS dari Afghanistan di tahun 2011 setelah Osama bin Laden berhasil di tangkap dan secara bertahap mengurangi jumlah pasukan yang ada di Afghanistan dari 180.000 orang tersisa hanya 15.000. Pada 28 Desember, 2014 dibawah kepemimpinan presiden Obama dan Sekretaris pertahanan Chuck Hagel mengumumkan berakhirnya OEF dan misi perang mereka berakhir dengan melakukan perjanjian bilateral dengan Presiden Ashraf Ghani.

Kebijakan luar negeri Trump menekankan *America First* sebagai fokus maksimalisasi kepentingan Amerika dalam masalah ekonomi dan politik. Trump menekankan bahwa prioritas utama AS adalah memerangi ISIS, pengurangan pengaruh Iran di Kawasan dan keamanan Israel. Trump juga mengupayakan perdamaian antara Taliban dan Pemerintahan Afghanistan mengingat jumlah pasukan AS di Afghanistan sudah semakin menurun dan pada 29 Februari 2020

lalu AS dan Taliban membuat kesepakatan dalam rangka mengamankan perdamaian di Afghanistan dan AS.

Selama intervensi dan serangan AS di Afghanistan berlangsung, Taliban telah jatuh pada 2001 dan Pemerintahan Afghanistan yang terpilih telah menggantikan Taliban. Perubahan dari rezim Taliban ke Republik Islam Afghanistan telah menjadi sebuah transisi ke Pemerintahan yang demokratis. Proses pemilihan presiden dan parlemen dilakukan dengan voting bukan lagi menunjuk pemimpin dari sebuah perjanjian atau pilihan oleh beberapa pemimpin seperti di bawah rezim Taliban. Pemilihan Presiden pertama di Afghanistan dilaksanakan pada tahun 2004 yang dimenangkan Karzai, kemudian pemilu di tahun pada 2014 dan 2019 lalu dalam pemilihan presiden di tahun yang dimenangkan oleh Ashraf Ghani.

Perubahan sistem Pemerintahan ke demokratis telah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan meningkatkan perekonomian Afghanistan. Transisi ke Pemerintahan demokratis dimulai melalui perjanjian Bonn tahun 2001, yang berusaha untuk menyatukan pendekatan Pemerintahan yang berdasarkan legitimasi legal-rasional lembaga negara modern melalui penyusunan konstitusi baru dan penyelenggaraan pemilu yang bebas. Setelah jatuhnya rezim Taliban di Afghanistan, Taliban secara cepat berpindah ke selatan Afghanistan dan melintasi perbatasan ke Pakistan. Dari sana, mereka melancarkan pemberontakan melawan Pemerintah Afghanistan yang didukung Barat dan *Afghan National Defense and Security Forces* (ANDSF).

Taliban secara aktif melakukan berbagai serangan di Afghanistan seperti bom bunuh diri di pusat kota dan memperebutkan distrik dalam rangka melawan Pemerintah Afghanistan. Taliban berhasil menguasai beberapa ibu kota provinsi seperti ibu kota provinsi Farah, ibu Kota Provinsi Ghazni. Berdasarkan perkiraan Pemerintah AS pada tahun 2019 hanya terdapat 53,8% distrik Afghanistan yang di bawah kendali pengaruh Pemerintah Afghanistan dan 33,9% diperebutkan dan 12,3% telah di bawah kendali dan pengaruh Taliban. Di tahun 2018 terdapat rekor tertinggi korban yang

berjatuhan karena serangan Taliban kepada Afghanistan yaitu 10.993 korban sipil (Council on Foreign Relations, 2020). Dalam kurun waktu 2019 - 2021 aksi kekerasan terus terjadi di Afghanistan, di mana AS meningkatkan penggunaan serangan udara dan penyerangan kepada Taliban dan Taliban terus melakukan penyerangan kepada Pemerintah Afghan dan mendapatkan wilayah serta menargetkan pangkalan *Afghan National Defense and Security Forces* (ANDSF). Serangan-serangan yang dilakukan Taliban di Afghanistan dapat membuat Afghanistan sebagai tempat perlindungan teroris yang aman kembali.

Dalam rangka menanggulangi hal ini, AS memutuskan untuk bernegosiasi dengan pihak Taliban pada Oktober tahun 2018 di Doha, Qatar yang berjalan selama delapan putaran. Negosiasi ini dihadiri oleh Zalmay Khalilzad perwakilan khusus AS untuk Afghanistan dan Washington dan Mullah Abdul Ghani Baradar dan Sher Mohammad Abbas Stanikzai sebagai perwakilan Taliban. Kemudian pada 14 Februari 2020, negosiasi antara AS dan Taliban telah mencapai perjanjian yang spesifik dalam mengurangi kekerasan di seluruh negeri termasuk serangan terhadap Afghanistan oleh Taliban, kemudian selama 7 hari telah dilaksanakan pengurangan kekerasan yang kemudian setelahnya kesepakatan damai yang komprehensif antara Afghanistan dengan Taliban ditandatangani pada 29 Februari 2020 lalu.

Dalam perjanjian ini AS setuju untuk menarik semua pasukan AS dalam waktu 14 bulan (April 2021) dan memfasilitasi pertukaran tahanan antara Taliban dan Pemerintah Afghanistan dan menghapus sanksi AS terhadap anggota Taliban. Dari pihak Taliban berkomitmen untuk tidak mengizinkan anggotanya atau kelompok lain termasuk al-Qaeda dan ISIS untuk menggunakan sumber daya Afghanistan untuk mengancam AS atau sekutunya termasuk mencegah perekrutan, pelatihan dan penggalangan dana.

Setelah dibentuknya kesepakatan damai ini, secara perlahan Pemerintah Afghanistan mulai berdialog dengan Taliban dalam membangun perdamaian. Pemerintah Afghanistan dan Taliban

berdialog Intra-Afgan yang diinisiasikan pada bulan Maret tetapi ditunda selama enam bulan karena adanya ketidaksepakatan mengenai pertukaran tahanan antara Taliban dan Pemerintah Afghanistan. Pemerintah Afghanistan membawa 21 orang tim perunding yang dipimpin oleh Ghani Ali Mohammad Masoom Stanekzai dan empat perempuan dan mewakili kelompok etnis utama Afghanistan.

Taliban juga turut membawa 21 orang tim perunding yang semuanya laki-laki yang nama-namanya tidak dipublikasikan. Melalui dialog Intra-Afgan menghasilkan perjanjian bahwa Taliban setuju untuk membebaskan 1.000 tentara Afghanistan dan Pemerintah Afghanistan akan membebaskan 5.000 tahanan Taliban, yang kemudian pada 12 September 2020, pembicaraan damai antara Pemerintah Afghanistan dan Taliban dibuka di ibu kota Qatar yang bertujuan untuk mengakhiri perang selama 20 tahun di Afghanistan

Kesepakatan damai antara AS dan Taliban serta perundingan antara Taliban dan Pemerintah Afghanistan telah membentuk sebuah upaya pembangunan perdamaian di Afghanistan. Dibalik ini, muncul beberapa ketakutan bagi para wanita di Afghanistan, terlebih apabila Pemerintah Afghanistan menerima permintaan Taliban untuk merevisi konsitusi yang menjamin hak seluruh masyarakat Afghanistan terlebih hak wanita dan minoritas. Selama 40 tahun, wanita telah menderita dan sangat menginginkan perdamaian. Mereka telah berjuang untuk memperjuangkan kesamaan hak dan setelah jatuhnya Taliban, para wanita berhasil mencapai hal ini, wanita di Afghanistan memiliki partisipasi aktif di Pemerintahan baik sebagai menteri, gubernur, hakim, polisi, hingga tentara dan parlemen Afghanistan juga memiliki presentasi tinggi akan anggota wanita dibandingkan AS.

Sebelumnya di bawah kepemimpinan rezim Taliban, hak-hak perempuan dirampas, wanita tidak dapat menjalani hak mereka atas pendidikan, pekerjaan hingga kebebasan bergerak. Partisipasi wanita mulai meningkat yang kemudian merubah norma dan harapan sosial yang berbahaya seputar peran wanita di Afghanistan. Ketika di bawah

rezim Taliban, perempuan mengalami pengalaman-pengalaman buruk dan segala bentuk akses informasi dan kebebasan berekspresi dibatasi.

Dalam rangka membangun perdamaian, Pemerintah Afghanistan memberikan ruang untuk wanita yang memiliki peran penting dalam menciptakan perdamaian, dalam pembicaraan intra-Afgan antara Taliban dan Pemerintahan Afghanistan, keterlibatan empat wanita dan turut masuk sebagai tim perunding dari perwakilan Pemerintahan Afghanistan telah menunjukkan bagaimana peran wanita dalam membangun perdamaian. Empat wanita ini adalah Habibi Sarabi, Fatima Gailani, Sharifa Zurmati Wardak dan Fawzia Koofi yang berhasil selamat dari upaya pembunuhan karena menjalankan sekolah di bawah tanah selama Pemerintahan Taliban. Keempat wanita ini juga memiliki partisipasi aktif dalam Pemerintahan Afghanistan setelah jatuhnya rezim Taliban.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Dewan Keamanan PBB mendesak semua pihak yang bertikai untuk mendeklarasikan gencatan senjata agar proses perdamaian lebih maju. Pada 17 Mei 2020, Ghani menandatangani kesepakatan pembagian kekuasaan dengan saingannya Abdullah Abdullah yang mengakhiri perselisihan yang sudah berlangsung lama mengenai hasil pemilihan presiden Afghanistan 2019, dan menyerahkan tanggung jawab negosiasi perdamaian kepada Abdullah.

Pada Agustus 2020, Pemerintah Afghanistan membebaskan 5.100 tahanan, dan Taliban membebaskan 1.000. Pada September 2020, Pemerintah Afghanistan telah membebaskan sekitar 5.000 tahanan Taliban setelah permintaan dari Pemerintahan Trump. Setelah penandatanganan Perjanjian Doha pada 29 Februari 2020, serangan gerilyawan Taliban terhadap pasukan keamanan Afghanistan melonjak. Taliban melanjutkan operasi ofensif terhadap tentara dan polisi Afghanistan pada 3 Maret 2020, melakukan serangan di provinsi Kunduz dan Helmand. Dalam 45 hari setelah perjanjian (antara 1 Maret dan 15 April 2020), Taliban melakukan lebih dari 4.500 serangan di Afghanistan, meningkat lebih dari 70%

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lebih dari 900 pasukan keamanan Afghanistan tewas dalam periode tersebut, naik dari sekitar 520 pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, karena pengurangan yang signifikan dalam jumlah serangan dan serangan udara oleh pasukan Afghanistan dan AS terhadap Taliban, korban Taliban turun menjadi 610 pada periode tersebut turun dari sekitar 1.660 pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada 20 Januari 2021, saat pelantikan Presiden Joe Biden, masih ada 2.500 tentara AS di Afghanistan. Penasihat keamanan nasional Biden, Jake Sullivan, mengatakan bahwa Pemerintah akan meninjau kembali perjanjian penarikan tersebut. Namun pada 8 Juli, Biden menetapkan tanggal penarikan AS pada 31 Agustus 2021. Pasukan Barat lainnya mengatur jadwal penarikan mereka sendiri. Jerman dan Italia menarik pasukan mereka dari Afghanistan pada 2 Juli 2021. Australia menyelesaikan penarikannya pada 15 Juli. Penerbangan Inggris terakhir adalah pada tanggal 28 Agustus. Mulai 1 Mei 2021, Taliban melancarkan serangan militer untuk menguasai Afghanistan. Sepanjang Agustus 2021, Taliban dengan cepat mengambil alih Afghanistan. Kabul jatuh ke tangan Taliban pada 15 Agustus 2021, menandakan jatuhnya Republik Islam Afghanistan. Tentara AS yang tersisa ditarik pada 31 Agustus 2021.

8.2 Peran KBRI Kabul dalam mendorong terwujudnya perdamaian di Afghanistan.

Sepanjang tahun 2017 – 2021, KBRI Kabul telah berupaya dalam mewujudkan perdamaian di Afghanistan dengan bermodalkan kekuatan Soft Power Indonesia dengan konsep *Soft Power Currency*. Berikut ini adalah rangkaian praktik diplomasi Indonesia yang dapat dipahami dan diterapkan oleh Afghanistan berdasarkan tiga konsep *Soft Power Currencies*:

1. **Beauty.** Komponen Beauty tersebut diwujudkan oleh Indonesia yang memiliki beberapa kesamaan dengan Afghanistan. Kesamaan ini mencakup gagasan umum, tujuan bersama, penyebab umum penyebab konflik, dan visi bersama. Dengan adanya kesamaan tersebut, Afghanistan tertarik untuk mempelajari dan meniru kebijakan dan metode yang telah digunakan Indonesia dalam pemberdayaan wanita untuk diaplikasikan dalam mendukung perdamaian di Afghanistan.
2. **Brilliance.** Diwujudkan oleh Indonesia dengan menunjukkan kemampuan dan keberhasilannya dalam menangani pemberdayaan wanita guna mendukung proses perdamaian di Afghanistan. Melihat kesuksesan Indonesia, Afghanistan memiliki rasa kagum terhadap Indonesia yang berharap dapat mengidentifikasi dirinya dan mengadopsi budaya dan perilaku dalam pemberdayaan wanita dari Indonesia. Semuanya dilakukan dengan harapan Afghanistan bisa sukses meningkatkan peranan wanita seperti di Indonesia.
3. **Benignity.** Diwujudkan Indonesia dengan memberikan kebaikan berupa bantuan kepada Afghanistan dalam upaya perdamaian. Bantuan tersebut diwujudkan dengan pemberian bantuan capacity building berupa upaya dalam bidang kesejahteraan, bantuan pemikiran, dan pendampingan penguatan sumber daya manusia dengan memberikan beasiswa dan pengiriman mahasiswi ke Indonesia, pelatihan tenaga kerja wanita pertambangan, UMKM, Diplomat dan Studi Banding untuk Pemilu dan pembentukan Nahdatul Ulama Afghanistan (NUA). Atas bantuan yang diberikan, Afganistan berterima kasih dan simpati kepada Indonesia yang telah bersedia untuk terus mendukung pemberdayaan wanita dalam rangka mendukung perdamaian Afghanistan.

Ketiga komponen *Soft Power Currencies* memiliki cara yang berbeda namun tetap memiliki tujuan yang sama yaitu menarik perhatian Afghanistan untuk meniru dan mendukung Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Dengan demikian, Indonesia dapat mempertahankan komitmen pemberdayaan wanita dalam upaya perdamaian dunia. Adapun kegiatan-kegiatan KBRI Kabul sepanjang 2017 - 2021 dalam mendukung perdamaian di Afghanistan, sebagai berikut:

1. Kunjungan Presiden Afghanistan ke Indonesia.

Presiden Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani, Rabu, 5 April 2017, melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Melalui pernyataannya, Presiden berpandangan bahwa Afghanistan merupakan negara yang memiliki kedekatan khusus dengan Indonesia. Kedua negara juga telah menjalin hubungan yang baik selama 62 tahun. Afghanistan adalah salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Kedua negara berperan aktif menyukseskan Konferensi Asia Afrika tahun 1955.

Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara membicarakan sejumlah isu bilateral. Presiden Joko Widodo menyambut baik upaya yang dilakukan Pemerintah Afghanistan dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian. Indonesia siap berbagi pengalaman mengenai rekonsiliasi untuk perdamaian.

Selain itu, untuk mendorong penyebaran nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin, Indonesia sebelumnya telah membangun Indonesia Islamic Center di Kabul, Afghanistan. Indonesia berharap, masyarakat Afghanistan dapat memanfaatkan fasilitas ibadah, kesehatan, dan pendidikan yang akan terus dibangun di sana dengan sebaik-baiknya. Pembangunan Masjid As Salaam di *Indonesia Islamic Center* telah selesai dan dapat menampung 2.500 jamaah. Indonesia juga telah menyelesaikan pembangunan klinik dan direncanakan akan membangun sarana pendidikan untuk penduduk setempat.

Afghanistan sendiri menganggap Indonesia sebagai negara yang besar dan memiliki citra positif. Bahkan, ketika Presiden Ghani masih

menjadi mahasiswa, ia telah mendengar nama besar Indonesia. Indonesia telah mencapai banyak sekali pencapaian yang signifikan, sehingga ketika saya masih menjadi mahasiswa, Indonesia menjadi contoh teladan dari negara-negara besar.

Adapun Lima Nota Kesepahaman yang disepakati dalam kunjungan ini antara lain:

- a. Kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan Republik Islam Afghanistan di bidang pendidikan.
- b. Kerja sama antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Kementerian Pertanian, Irigasi, dan Peternakan Republik Islam Afghanistan di bidang pertanian;
- c. Kerja sama teknis antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kementerian Keuangan Republik Islam Afghanistan;
- d. Kerja sama antara Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dengan Organisasi Pusat Statistik Republik Islam Afghanistan mengenai pemanfaatan dan pengembangan data statistik dan informasi teknologi, metodologi, serta sumber daya manusia di bidang statistik;
- e. Kerja sama antara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dengan Komisi Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi Republik Islam Afghanistan mengenai kerja sama teknis di bidang reformasi administrasi publik, manajemen kepegawaian, serta pelatihan dan pengembangan kapasitas.

2. Kunjungan Menteri PPPA ke Afghanistan.

Pada tanggal 15-16 Mei 2017, Menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Republik Indonesia, Ibu Yohana Yembise menghadiri *Symposium on the Role and Contribution of Afghanistan Women for Peace*, di Kabul, Afghanistan memenuhi

undangan dari Ibu Negara Republik Afghanistan, H.E. Rula Ghani untuk menjadi *keynote speaker* dalam simposium internasional tersebut. Kunjungan Menteri PPPA Yohana Yembise ke Afghanistan ini sekaligus merupakan tindak lanjut pertemuan Presiden Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada 5 April 2017 lalu. Pertemuan membahas area kerja sama yang terdapat dalam MoU RI – Afghanistan, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan perlindungan. Secara khusus, pihak Afghanistan menyampaikan harapannya agar sejumlah area kerja sama secara spesifik dapat ditambahkan menjadi bagian dari MOU tersebut, yaitu:

- a. Pendidikan berupa pelatihan kemampuan khusus maupun pendidikan formal berjenjang (Strata 1, 2 dan 3).
- b. Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi termasuk peningkatan akses pasar produk yang dihasilkan industri kecil milik perempuan.
- c. Peningkatan kapasitas perempuan untuk lebih berperan dalam proses perdamaian, termasuk sebagai negosiator perdamaian dan fasilitator dialog. Peran perempuan dalam perdamaian juga meliputi upaya mendorong pertukaran ulama perempuan dan penguatan kapasitas ulama perempuan di Afghanistan.
- d. Perlindungan perempuan dan anak.

Dalam mendukung pemberdayaan perempuan Afghanistan, Indonesia yang juga terlibat dalam Komisi Status Perempuan PBB yang merupakan bagian dari *Economic and Social Council (ECOSOC)* turut mendukung upaya pemerintah Afghanistan dalam pemberdayaan perempuan untuk mendukung proses perdamaian di Afghanistan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk turut meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dengan melakukan kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta MOWA.

Kerja sama antara KPPPA dengan MOWA telah dimulai sejak 18 Desember 2013 yang ditandai dengan penandatanganan MoU.

Kesepakatan dalam MoU tersebut menjadi dasar pijakan bagi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kabul, Afghanistan untuk melaksanakan beberapa kegiatan kerja sama yang telah disepakati oleh kedua negara. Kerja sama yang telah dilaksanakan di antaranya, yaitu:

- a. kunjungan Menteri KPPPA ke Afghanistan;
- b. kunjungan Ibu Negara Afghanistan ke Indonesia;
- c. mengundang *business woman* Afghanistan untuk mengikuti *trade expo, trade workshop*, dan seminar di Indonesia;
- d. memberikan beasiswa dan *short course* bagi mahasiswa perempuan Afghanistan untuk belajar di Indonesia; dan
- e. mengadakan *Women Dialogue* untuk Wanita Afghanistan dan berasosiasi dengan Taliban, yang dihadiri oleh para korban perang.

Adapun salah satu program prioritas KPPPA yang juga menjadi dasar keterlibatan Indonesia dalam mengupayakan pemberdayaan perempuan di Afghanistan, yaitu “*Three Ends*” atau tiga akhir. Program prioritas ini memiliki makna: akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; akhiri perdagangan manusia; dan akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan. Sejauh ini upaya kerja sama yang telah dilakukan KPPPA dengan MOWA adalah pelatihan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan melalui keluarga berencana, intervensi ekonomi, dan pelatihan desain busana muslim. Indonesia terus mendorong Afghanistan melalui program-program kerja sama dengan pihak ketiga dalam skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) dan berharap pihak Afghanistan juga terus aktif untuk melibatkan perwakilannya.

3. Kunjungan Menteri Luar Negeri RI ke Afghanistan.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi melakukan kunjungan kenegaraan bersejarah ke Afghanistan pada 6 November 2017 karena merupakan kunjungan kerja Menlu RI pertama sejak 1961. Setibanya di Kabul, Menlu RI segera melaksanakan pertemuan

dengan Presiden Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani. Dalam pertemuan, Retno menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendukung proses perdamaian dan rekonsiliasi di Afghanistan. Menlu Retno juga bertemu dengan Ketua *High Peace Council* (HPC) Afghanistan Mohammad Karim Khalili. Pertemuan itu membahas tentang persiapan kunjungan HPC ke Indonesia atas undangan Presiden RI Joko Widodo.

Selain itu, Menlu Retno juga menandatangani memorandum pembangunan klinik kesehatan yang berada di dalam kompleks *Indonesian Islamic Center* (IIC) di Kabul, serta berbagai kerja sama di bidang pendidikan. Usai kunjungan Menlu Retno, Indonesia-Afghanistan juga berkomitmen meningkatkan rencana kerja sama mengenai peningkatan sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, upaya deradikalisasi gerakan ekstremisme, dan proses perdamaian serta rekonsiliasi.

4. Kunjungan Delegasi High Peace Council (HPC) ke Indonesia.

High Peace Council (HPC) Afghanistan bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyelenggarakan dialog di Jakarta pada Selasa 21 November 2017. HPC Afghanistan datang ke Indonesia karena ingin belajar mengelola kemajemukan dari Indonesia melalui MUI dan ormas-ormas Islam. KH Ma'ruf Amin menyampaikan kepada Delegasi, *alhamdulillah* sampai dengan saat ini Indonesia masih tetap utuh di tengah kemajemukan yang ada. Bukan berarti tidak ada masalah di Indonesia, tetapi karena bersama-sama berusaha mengelola keutuhan bangsa dan hubungan antar umat beragama terbangun dengan baik maka bisa mengelola kemajemukan. Inilah yang tercantum dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia yang mempersatukan seluruh perbedaan. Hasilnya ialah keutuhan, kebersamaan, toleransi dan saling pengertian.

5. Kunjungan Ibu Negara Afghanistan, Rula Ghani ke Indonesia.

Presiden Joko Widodo pada 5 Desember 2017 menerima kunjungan Ibu Negara Afghanistan, Rula Ghani di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam pertemuan, Rula Ghani menyatakan kekagumannya terhadap kemajuan perempuan Indonesia. Pertemuan keduanya juga menyinggung soal pertukaran ulama. Tujuan pertukaran ulama kedua negara ini yakni untuk menyebarkan toleransi dan perdamaian. Rula Ghani juga melakukan pertemuan dengan beberapa kelompok perempuan antara lain dengan kelompok parlementarian, kelompok agama, para tokoh agama, hingga Lembaga swadaya masyarakat (LSM) perempuan.

6. Kunjungan Balasan Presiden Joko Widodo ke Afghanistan.

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Afghanistan pada 28 Januari 2018 disebut sebagai komitmen nyata Indonesia untuk mewujudkan perdamaian di Afghanistan. Kunjungan ini menjadi kunjungan perdananya ke Afghanistan dan juga merupakan kunjungan setelah 57 tahun lalu yang dilakukan oleh Presiden Ir. Soekarno pada tahun 1961. Presiden Joko Widodo tiba di Kabul di saat kondisi sedang tidak kondusif menyusul rangkaian serangan di Kota Kabul termasuk serangan 2 hari sebelum kedatangannya yang menewaskan ratusan orang. Meski demikian, Presiden Joko Widodo tetap tenang dan menyatakan bahwa akan melanjutkan agenda kunjungan meskipun di tengah hujan salju.

Presiden Joko Widodo dianugerahi "*Medal of Ghazi Amanullah*" yang hanya diberikan kepada tokoh dengan keberanian yang luar biasa serta komitmen nyata dalam mewujudkan perdamaian. Penyetanan medali ini merupakan tanda penghormatan tertinggi yang dipersembahkan oleh masyarakat Afghanistan melalui Presiden. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo menyempatkan untuk bertemu dengan sejumlah pejabat setelah pertemuan dengan Presiden Mohammad Ashraf Ghani. Presiden Joko Widodo menyebut bahwa komunikasi ini diperlukan karena kita ingin melihat

Afghanistan yang sudah didera konflik selama lebih dari 40 tahun kembali damai seperti sebelumnya.

Presiden Jokowi juga bertemu jajaran Dewan Perdamaian Afghanistan Karim Khalili di Istana Haram Sarai (Wisma Negara). Jokowi di dalam pertemuan itu menegaskan, Indonesia siap berkontribusi pada upaya perdamaian melalui rekonsiliasi di Afghanistan. Salah satu bentuk upaya itu adalah melangsungkan acara Pertemuan Ulama Internasional dan Indonesia siap menjadi tuan rumah pertemuan ulama internasional.

7. Kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Afghanistan.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan Menlu Retno menghadiri konferensi *Kabul Peace Process II* atas undangan langsung dari Presiden Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani. Ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo pada 29 Januari 2018. Kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menlu Indonesia dalam konferensi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya *peace building*. Pemerintah RI akan mengedepankan inklusifitas dan upaya non-kekerasan dalam upaya mencapai perdamaian di Afghanistan.

Wapres Jusuf Kalla menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong upaya *peace building* serta penggunaan *soft power*. Undangan langsung terhadap Wakil Presiden Jusuf Kalla bukanlah tanpa alasan, Jusuf Kalla dinilai memiliki pengalaman dalam mendamaikan konflik antara Pemerintah Indonesia dengan kelompok separatis di Aceh melalui pendekatan *soft power*. Modal ini yang digunakan sebagai senjata dalam pembicaraan *Kabul Peace Process II*. Di sela-sela penyelenggaraan konferensi *Kabul Peace Process II*, Jusuf Kalla juga bertemu dengan Presiden Ashraf Ghani dan ketua Dewan Perdamaian Tinggi (HPC) Afghanistan.

8. Konferensi Trilateral Ulama di Bogor, Indonesia.

Konferensi trilateral para ulama dari Indonesia, Afghanistan, dan Pakistan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor pada 11

Mei 2018 menghasilkan "*Bogor Ulema Declaration of Peace*." Deklarasi Bogor antara lain berisi seruan untuk mengedepankan perdamaian dan menyelesaikan konflik antar kaum Muslim sesuai Al Qur'an dan sunnah, khususnya penyelesaian konflik bersenjata di Afghanistan. Pertemuan itu dihadiri 19 ulama dari Afghanistan, 17 ulama dari Pakistan dan 17 ulama dari Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutannya ketika menutup konferensi, yang berlangsung dari pagi hingga sore hari, mengatakan bahwa "*Bogor Ulema Declaration of Peace*" menjadi catatan sejarah untuk dukungan dan kontribusi ulama bagi perdamaian. Ia menyebut bahwa saat ini kita hidup di masa di mana kita tidak dapat mendengar perintah nabi secara langsung, maka umat Islam akan mendengarkan ulama karena ulama adalah pewaris nabi. "*Bogor Ulema Declaration of Peace*" menjadi sangat bermakna untuk seluruh umat Islam dalam upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di Afghanistan.

Selanjutnya, Jusuf Kalla menegaskan proses perdamaian yang inklusif perlu segera dilakukan dan Indonesia siap berkontribusi dalam proses perdamaian di Afghanistan. Ia mengatakan semua berkat niat dan harapan yang tulus dari ulama, Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk melihat perdamaian di Afghanistan yang sudah lama dinantikan. Dalam Deklarasi Ulama Bogor untuk Perdamaian yang dibacakan oleh Quraish Shihab, para ulama antara lain setuju untuk mendukung berbagai inisiatif yang dilakukan para ulama dunia Islam. "Pesan utama Islam bermuara pada prinsip perdamaian, belas kasih dan kasih sayang. Piagam *Pakistan-Afghan declaration* merupakan inisiatif perdamaian yang dilakukan oleh para ulama dunia Islam yang mendorong perdamaian dan persaudaraan Islam, serta penolakan pada kekerasan dan terorisme.

Selain itu, poin penting lainnya adalah umat muslim didorong untuk selalu berpegang pada Al Quran dan Sunnah dalam menyelesaikan konflik dan pertentangan antar kaum Muslim, kata Quraish. "Perdamaian adalah perintah Allah dan kaum muslimin memiliki kewajiban untuk mengikuti perintah ini dalam hidupnya.

Oleh sebab itu, semua konflik dan pertentangan antara kaum muslim harus diselesaikan sesuai dengan kaidah Alquran dan Sunnah. Konferensi Trilateral para ulama dari ketiga negara membahas penyelesaian konflik bersenjata di Afghanistan, yang makin memburuk dengan kebangkitan milisi Taliban dan kehadiran para jihadis Daulah Islamiyah. Gagasan konferensi ini adalah hasil serangkaian pertemuan antara Indonesia dan Afghanistan.

9. Kunjungan Menteri Luar Negeri Afghanistan, Salahuddin Rabbani ke Jakarta.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Jumat 15 Maret 2018 menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Salahuddin Rabbani. Keduanya membahas berbagai hal dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan pada pertemuan itu dirinya kembali menegaskan komitmen dan dukungan Indonesia terhadap perdamaian di Afghanistan. Hal ini sebagai tindak lanjut dari komitmen Presiden Joko Widodo saat bertemu Presiden Afghanistan Ashraf Ghani pada Januari tahun lalu di Ibu Kota Kabul.

Menlu RI bersama Menlu Afghanistan Salahuddin Rabbani membahas berbagai kemajuan dalam proses perdamaian di negara Asia Tengah itu. Dia menekankan kembali kesiapan Indonesia untuk terus berkontribusi dalam menciptakan perdamaian di Afghanistan. Menurutnya, ada tiga hal dimana Indonesia dapat berperan serta dalam proses perdamaian di Afghanistan. Pertama adalah dalam konteks *trust building*. Yang kedua adalah dalam konteks *peace building* dan *state building* dan yang ketiga adalah di forum Internasional, termasuk di PBB. Lebih lanjut Retno mengatakan pembentukan rasa saling percaya antara pihak bertikai merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam setiap proses perdamaian. Karena itu, lanjutnya, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ulama bilateral dengan Afghanistan. Dalam konteks ini, Afghanistan menyatakan siap berpartisipasi dalam hal *trust building*.

10. Kunjungan Delegasi Taliban ke Indonesia.

Wakil Pemimpin Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman Wapres Jl. Diponegoro, Jakarta pada 27 Juli 2018. Mullah Baradar mengunjungi Indonesia untuk menghadiri Konferensi Ulama dan Cendekiawan Muslim di Jakarta. Baradar yang merupakan salah satu pendiri Taliban memimpin delegasi yang beranggotakan delapan orang.

Delegasi Taliban juga akan membicarakan proses perdamaian dengan Afghanistan yang terus mendapat dukungan dari Pemerintah dan para cendekiawan Islam dari Indonesia. Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid menyebut bahwa selama perjalanan ini pembicaraan akan difokuskan pada hubungan politik yang baik antara kedua negara, perdamaian dan pentingnya kerja sama masa depan dengan Afghanistan.

Pertemuan Jusuf Kalla dengan Baradar yang didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menegaskan Indonesia selalu menjaga komunikasi dengan semua pihak yang terlibat proses perdamaian di Afghanistan termasuk dengan Pemerintah Afghanistan dan Taliban. Komunikasi ini sangat penting artinya untuk menjaga kepercayaan semua pihak sehingga proses perdamaian dapat terus maju. Menlu Retno menegaskan bahwa Indonesia juga berkomunikasi dengan Amerika Serikat dan pihak lain yang terlibat. Di tengah upaya untuk mempercepat proses perdamaian yang baru lahir, perang yang berkecamuk terus merenggut banyak nyawa di Afghanistan. Upaya pembicaraan damai lain juga tengah diupayakan Amerika Serikat dengan Taliban, namun menuai kritikan dari Pemerintah Afghanistan yang merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perdamaian.

11. Partisipasi KBRI Di Konsensus Nasional Wanita Afghanistan.

Pada tanggal 15 Mei 2019, Duta Besar Arief Rachman MD menghadiri pertemuan *Afghanistan Women's National Consensus for Peace* yang diketuai oleh Ibu Negara, Rula Ghani. Dalam pertemuan tersebut Ibu Negara menyampaikan laporan hasil Konsensus Nasional Wanita Perdamaian Afghanistan yang dilaksanakan di Kabul pada 28

Februari 2019 yang dihadiri oleh 3000 wanita Afghanistan dari berbagai provinsi. Pertemuan tersebut menghasilkan Deklarasi yang terdiri dari 15 Pasal;

- 1) Kami, perempuan Afghanistan, meminta pemerintah, Taliban dan kelompok-kelompok lawan bersenjata lainnya untuk segera menghentikan perang dan menyatakan gencatan senjata tanpa syarat.
- 2) Kami, perempuan Afghanistan, sangat mendukung setiap gerakan akar rumput dan inisiatif pemerintah untuk mencapai perdamaian permanen dan menekankan pentingnya kelanjutan semua gerakan akar rumput lainnya untuk perdamaian di Afghanistan yang bertujuan mencapai perdamaian permanen.
- 3) Kami, wanita Afghanistan, percaya pada kekuatan pengaruh kami dan meminta agar semua wanita di Afghanistan, sebagai pengasuh utama masyarakat, mempromosikan perilaku damai berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dalam keluarga, sekolah, masjid, madrasah, dan universitas dan melalui sosial media, sehingga secara efektif mengubah pola pikir pemberontak.
- 4) Kami, perempuan Afganistan, menuntut agar pemerintah menciptakan lingkungan damai yang stabil dan langgeng dengan memasukkan topik-topik yang berkaitan dengan perdamaian dalam kurikulum pendidikan, dengan menciptakan lapangan kerja bagi kaum muda, dan dengan menerapkan aturan hukum. Ini akan menghasilkan penghapusan budaya impunitas, kekerasan, pengangguran dan korupsi, yang merupakan pendorong utama ketidakamanan.
- 5) Kami, perempuan Afghanistan, menganggap penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang bersenjata yang bertanggung jawab dan milisi lokal sebagai salah satu alasan utama ketidakamanan, dan meminta pemerintah untuk menerapkan aturan hukum di seluruh provinsi

Afghanistan dengan secara hukum menghadapi mereka dan melucuti mereka segera, untuk menciptakan suasana perdamaian dan stabilitas.

- 6) Menurut fatwa para pemimpin agama Islam di seluruh dunia, perang antara umat Islam tidak diizinkan secara agama. Sementara kami mendukung upaya para Ulama dalam mencerahkan masyarakat, kami para wanita Afghanistan menyerukan kepada mereka untuk mempromosikan persatuan dan ko-eksistensi nasional, dan penyelesaian konflik melalui dialog dan negosiasi, untuk tujuan menjaga nilai-nilai dan identitas agama dan nasional dan identitas.
- 7) Konstitusi Afghanistan adalah kesepakatan nasional kita dan dasar dari identitas nasional kita, yang menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya masing-masing warga negara
- 8) Kami, para wanita Afghanistan, mengutuk segala upaya untuk pembentukan pemerintahan sementara dan sangat menuntut pemilihan yang adil dan transparan untuk melindungi sistem pemerintahan dan nilai-nilai Republik Islam Afghanistan.
- 9) Kami, perempuan Afganistan, meminta pemerintah untuk mendukung keluarga pasukan keamanan yang gugur dan korban perang, dan untuk mengambil tindakan segera dan serius untuk memperkuat mekanisme pendukung yang memenuhi kebutuhan mereka.
- 10) Kami, para wanita Afghanistan, menyambut setiap perkembangan dalam proses perdamaian, tetapi sangat menekankan negosiasi antara warga Afghanistan di bawah kepemimpinan pemerintah dengan kepemilikan rakyat Afghanistan (pria dan wanita). Kami menuntut agar pemerintah yang tugas utamanya adalah memastikan perdamaian, keamanan dan keadilan sosial berpartisipasi

dalam negosiasi dari posisi otoritas dan martabat sambil tetap mengingat sudut pandang berbagai kelompok orang.

- 11) Kami, perempuan Afganistan, menyerukan kepada semua media nasional dan internasional, yang sebagian besar juga melaporkan pencapaian rakyat Afghanistan selama satu setengah dekade terakhir dan menangkap suara perempuan sejati untuk perdamaian.
- 12) Kami, Perempuan Afghanistan, berdasarkan prinsip hubungan baik antar tetangga, menyerukan negara-negara tetangga dan regional untuk menahan diri dari campur tangan dalam masalah-masalah internal Afghanistan dan mendukung proses perdamaian yang dipimpin Afghanistan dan yang dimiliki Afghanistan.
- 13) Sambil menyambut upaya masyarakat internasional dalam membawa perdamaian dan stabilitas di Afghanistan, kami para wanita Afghanistan mengharapkan mereka untuk benar-benar mendukung proses perdamaian yang dipimpin oleh pemerintah Afghanistan dan dimiliki oleh rakyat Afghanistan, dan dengan kuat berpegang teguh pada komitmen mereka untuk melindungi hak-hak demokratis, sipil dan hak asasi manusia.
- 14) Kami, wanita Afghanistan, ingin mencapai perdamaian yang tahan lama; untuk itu, kami ingin gerakan perdamaian dilanjutkan dan diperluas dari pusat provinsi ke semua kabupaten dan desa.
- 15) Kami, perempuan Afganistan, meminta tim perunding pemerintah untuk sepenuhnya membela tuntutan sah dan sah kami yang disebutkan di atas pada setiap tahap proses perdamaian, dan mencegah segala bentuk kompromi yang merongrong pencapaian perempuan.

12. Pertemuan Duta Besar RI Kabul dengan Komisi Pemilu Afghanistan.

Pada tanggal 27 Maret 2019, Duta Besar Arief Rachman MD bertemu dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Afghanistan Hawa Alam Nuristani untuk membahas kerjasama bilateral di bidang pemilu dan bertukar pandangan tentang pemilu di Indonesia dan di Afghanistan.

13. Penyerahan Klinik Persahabatan Indonesia-Afghanistan.

Pada 2 Juli 2019, pihak terkait pembangunan Hibah Klinik *Indonesia Islamic Center* (IIC) telah mengadakan pertemuan rutin untuk memastikan pembangunan Hibah Klinik IIC berjalan dengan lancar dan tepat waktu. *NECDO Implementing Agency*, Kontraktor Zia Ayyoubi Construction Company, Konsultan Pengawas Baradaran Shahzad Construction Company, dan KBRI Kabul telah mengidentifikasi persoalan-persoalan yang muncul dalam pembangunan Hibah Klinik IIC, memastikan kesesuaian kualitas dan waktu penyelesaian Hibah Klinik IIC dan pengadaan alat kesehatan sesuai dengan standar yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan Indonesia dan Kementerian Kesehatan Afghanistan.

Setelah 4 (empat) bulan perkembangan pembangunan, gedung Hibah Klinik IIC telah berdiri dengan megah dan kokoh. Lantai 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) beserta dengan atapnya telah selesai dibangun. Proses pengecoran rangka utama telah selesai, dan telah dimulai tahap *finishing* bangunan melalui pemasangan *frame* jendela dan pintu, instalasi listrik, dan dinding keramik. Hasilnya, pada tanggal 19 Agustus 2019 pemerintah Indonesia resmi menghibahkan klinik yang berlokasi di kompleks *Indonesia Islamic Center* (IIC) yang kemudian diberi nama klinik persahabatan Indonesia-Afghanistan. Serah terima kunci diberikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Afghanistan, Arief Rachman kepada Menteri Kesehatan Masyarakat Afghanistan, Ferozuddin Feroz.

Hubungan Indonesia dan Afghanistan di bangun dalam satu slogan: "*Peace, Friendship, and Prosperity*". Semoga pembangunan

Hibah Klinik IIC menjadi bagian dari diplomasi publik Indonesia di Afghanistan. Pelayanan dalam klinik direncanakan terdiri dari Poli Ibu, Poli Anak, Poli Penyakit Dalam, dan Poli Kesehatan Mental untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar yang saat ini menghadapi berbagai situasi konflik.

Pembangunan Hibah Klinik IIC merupakan implementasi dari Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hibah Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Klinik Kesehatan Indonesia Islamic Center (IIC) di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul, Afghanistan, dan Penandatanganan *Grant Agreement* Hibah Klinik oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno L.P. Marsudi dan Menteri Luar Negeri Republik Islam Afghanistan, Bapak Salahuddin Rabbani pada tanggal 6 November 2017 di Kabul. Kompleks IIC diharapkan dapat menjadi simbol kehadiran Indonesia di Afghanistan.

14. Pembukaan Program Diklat Pendalaman Agama Islam Bagi Pelajar Afghanistan.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia selalu mendoakan dan berusaha keras mencapai perdamaian untuk kemakmuran bersama. "Enam bulan lalu saya ke Kabul dan melihat bagaimana suasana keagamaan dan kemasyarakatan yang sangat tinggi hubungannya dengan sesama. Indonesia juga membantu membangun satu masjid di Kabul," kata Wapres saat membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Program Pendalaman Agama Islam di Indonesia bagi Pelajar Afghanistan di Istana Wapres, 31 Agustus 2019.

Wapres tak lupa memuji kehebatan bangsa Afghanistan yang memiliki semangat kepahlawanan yang tinggi. Sejak beberapa abad yang lalu pemerintah Afghanistan dapat mempertahankan negaranya dari negara-negara besar. Ia menyebut bahwa heroisme rakyat Afghanistan sangat tinggi untuk mempertahankan negara, bangsa dan agamanya. Wapres berharap peserta dapat bergaul, belajar tentang kehidupan keislaman di Indonesia yang moderat, dan penuh

kedamaian serta saling bertukar informasi dan pendapat dengan sesama generasi muda kedua negara. Wapres Jusuf Kalla berharap setelah selesainya program para pelajar dapat membawa pemikiran yang didapatkan di masa pendidikan dan pelatihan untuk diterapkan di Afghanistan di masa mendatang.

15. Pertemuan dengan Utusan Khusus Wakil Presiden RI, Hamid Awaluddin dengan Menteri Pertambangan Afghanistan.

Utusan Khusus Wakil Presiden, Abdul Hamid Awaludin dan delegasi dari Setwapres dan Kementerian Luar Negeri RI telah melakukan kunjungan ke Kabul, Afghanistan pada tanggal 30 Maret – 3 April 2019, sebagai bentuk dukungan Pemerintah RI dalam proses perdamaian Afghanistan dengan fokus pada pemberian dukungan peningkatan kapasitas, khususnya di bidang Pertambangan dan upaya bina damai Afghanistan. Hal ini merupakan salah satu manifestasi peran Indonesia sebagai anggota tidak tetap pada Dewan Keamanan PBB. Utusan khusus dan Delegasi RI telah bertemu dengan Nargis Nehan *Minister of Mines and Petroleum*. Hasil penting dalam pertemuan tersebut komitmen bahwa Indonesia tegaskan komitmen dan kesiapan untuk memberikan pelatihan di bidang Migas bagi 105 peserta asal Afghanistan yang akan dimulai pada Juni 2019.

16. Pertemuan Utusan Khusus Wakil Presiden RI, dengan IEC dan IECC.

Utusan Khusus Wakil Presiden, Abdul Hamid Awaludin dan delegasi dari Setwapres dan Kementerian Luar Negeri RI telah melakukan kunjungan ke Kabul, Afghanistan pada tanggal 30 Maret – 3 April 2019, sebagai bentuk dukungan Pemerintah RI dalam proses perdamaian Afghanistan dengan fokus pada pemberian dukungan peningkatan kapasitas, khususnya di bidang Pemilu dan upaya bina damai Afghanistan. Hal ini merupakan salah satu manifestasi peran Indonesia sebagai anggota tidak tetap pada Dewan Keamanan PBB. Utusan Khusus dan Delegasi RI telah bertemu dengan Ketua *Independent Election Comission (IEC)* dan *Independent Electoral*

Complaints Commission (IECC), dan *Minister of Mines and Petroleum*. Beberapa hasil penting dalam pertemuan tersebut adalah:

- 1) Utusan khusus telah menyampaikan undangan bagi masing-masing 7 orang dari IEC dan IECC untuk menyaksikan penyelenggaraan Pemilu Serentak Indonesia 2019;
- 2) Secara khusus dalam pertemuan dengan *Chief Negotiator* perdamaian Afghanistan, Abdul Salim Rahimi, telah dibahas perkembangan proses perdamaian.
- 3) Pemerintah Afghanistan (NUG) menyampaikan bahwa dalam komunikasi tertutup dengan Taliban, dirasakan perlunya tempat perundingan yang netral dan jauh dari tekanan. NUG menilai Indonesia sejauh ini merupakan opsi yang terbaik.
- 4) NUG mengindikasikan perlunya diadakan pendekatan khusus kepada Pakistan.

17. Kunjungan Delegasi IEC dan IECC Afghanistan ke Indonesia.

Empat orang delegasi dari *Independent Election Commission (IEC)* dan *Independent Electoral Complaints Commission (IECC)* Afghanistan berkunjung ke Jakarta untuk menyaksikan Pemilihan Umum di Indonesia pada tanggal 15-18 April 2019. Kunjungan delegasi IEC dan IECC Afghanistan ke Indonesia merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia dalam pengembangan kapasitas dan proses perdamaian di Afghanistan. Maksud dan tujuan kunjungan tersebut adalah untuk memperkuat *capacity building* di bidang pemilu, selama 4 hari delegasi diikutkan dalam program *Election Visit Program* yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia. *Election Visit Program* diikuti oleh 40 orang dari 13 KPU asing, ratusan pemantau dari Kedutaan Besar Negara-Negara Asing di Indonesia, lembaga non pemerintah International dan dalam negeri serta media massa asing dan nasional.

Dalam acara tersebut delegasi mendapatkan penjelasan dari KPU terkait sistem pemilu di Indonesia, seluk beluk penyelenggaraan

pemilu di Indonesia, dan sosialisasi pemilu. Delegasi juga berkesempatan mengunjungi tempat pemungutan suara di beberapa daerah antar lain di rumah tahanan kelas 1A Cipinang dan juga menyaksikan proses pemungutan suara serta penghitungan suara. Delegasi Afghanistan berkesempatan bertemu dengan ketua KPU, Arief Budiman dan ketua BAWASLU, Abhan. Saat bertemu dengan Abhan, beliau menjelaskan aplikasi SIWASLU dan kewenangan bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilu di Indonesia.

18. Konferensi Nahdlatul Ulama Afghanistan (NUA), 21 November 2019.

Dalam rangka menindaklanjuti pembentukan NUA, KBRI Kabul bekerja sama dengan Nadhatul Ulama Afghanistan mengadakan acara konferensi tahunan NUA yang rutin diadakan setiap tahun. Acara tersebut digelar sebagai diskusi untuk membahas mengenai sejumlah permasalahan yang dihadapi dan untuk mengetahui pencapaian yang telah diraih oleh NUA dalam beberapa tahun terakhir. Duta Besar RI untuk Afghanistan, Dr. Arief Rachman MD., menyampaikan bahwa konferensi tahunan ini dapat memperkuat hubungan Ulama dari kedua negara sebagaimana komitmen pemerintah RI dalam mendukung perdamaian di Afghanistan melalui pendekatan *soft power*.

Duta Besar Arief Rachman berpesan kepada para ulama untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan dan perdamaian di Afghanistan. Dengan adanya peran para ulama dapat meningkatkan pemahaman para pihak yang sedang bertikai untuk lebih menahan diri dan kepentingan kelompoknya untuk kepentingan Afghanistan. Pada konferensi tersebut, terdapat agenda mendukung kegiatan Konferensi Ulama yang rencananya akan diadakan di Indonesia.

Konferensi Nahdlatul Ulama Afghanistan sudah diadakan beberapa kali sejak dibentuknya Nahdlatul Ulama Afghanistan (NUA) atas kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Ini merupakan media dalam menyampaikan kebaikan dan ajakan melalui jalan damai sesuai yang diajarkan oleh Islam.

19. Kunjungan Menteri Luar Negeri RI dalam rangka Peresmian Afghanistan Indonesia Women Solidarity Network (AIWSN).

Delegasi RI yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi telah melakukan kunjungan kerja ke Kabul, Afghanistan pada 1 Maret 2020. Kunjungan tersebut dalam rangka peresmian *Afghanistan Indonesia Women Solidarity Network (AIWSN)*, pertemuan bilateral *tètè a tètè* dengan sejumlah Menteri Kabinet Afghanistan, serta kunjungan kehormatan kepada Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.

Melengkapi pembentukan AISWN, di samping Perempuan Afghanistan, terdapat Perempuan Indonesia yang menjadi anggota yaitu:

- Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo.
- Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo.
- Rahmawati Husein, PhD.
- Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin.
- Prof. Dr. Amany Lubis.
- Zanubba Ariffah Chafsoh, MPA (Yenny Wahid).

Pada kesempatan tersebut Menlu Retno telah menerima anugerah Bintang Kehormatan “Malalai” yang disematkan langsung oleh Presiden Ghani sebagai simbol pengakuan dan penghargaan negara terhadap peran serta Indonesia dalam mendorong perdamaian di Afghanistan melalui berbagai bentuk kerjasama bilateral. Malalai Award merupakan bintang penghargaan tertinggi setingkat Pahlawan Nasional yang diberikan Pemerintah Afghanistan kepada tokoh masyarakat baik nasional maupun internasional yang dinilai memiliki kontribusi luar biasa bagi kemajuan bangsa Afghanistan.

20. Ulama Wanita Indonesia bersama *Afghan Woman Organization for Peace and Freedom/ AWPFO* menyelenggarakan *The First National Afghan Woman Conference on Peace*.

Konferensi menyuarakan dukungan kaum perempuan Afghanistan atas proses perdamaian yang sedang berlangsung sekaligus meminta untuk dilakukannya gencatan senjata, ulama laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab agama, nasional yang sama dalam rangka mengurangi rasa kebencian dan permusuhan, kesetaraan dalam isu gender. Mengusulkan agar dalam intra Afgan negosiasi mengundang perempuan Taliban dan partisipasi perempuan Afghanistan dalam pembicaraan damai. Organisasi NU Indonesia serta peran ulama Indonesia akan dijadikan model bagi kaum perempuan Afghanistan dalam menciptakan kerukunan, memulihkan perdamaian di dalam masyarakat Afghanistan. Konferensi Ulama Indonesia Afghanistan ini mendatangkan pembicara dari Ulama Wanita Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2020 di Kabul yang diikuti oleh pejabat Afghanistan dan perwakilan tokoh/ulama wanita dari berbagai daerah.

21. Kunjungan Jusuf Kalla dalam Kapasitas sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia.

Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, H. Jusuf Kalla (JK), mengunjungi Afghanistan pada 23 – 25 Desember 2020 dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. JK hadir atas undangan dari Pemerintah Afghanistan untuk dimintai pendapatnya untuk menyelesaikan konflik di negara tersebut. Pemerintah Afghanistan ingin belajar dari pengalaman Jusuf Kalla dan Prof. Hamid Awaluddin di dalam perdamaian di Aceh.

Anggota delegasi terdiri Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PMI Pusat Prof. Dr. Abdul Hamid Awaluddin, Ketua Komisi Hubungan Internasional MUI Pusat Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat KH. Muhyiddin Junaidi, Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan MUI Pusat Prof. Dr Murniati Mukhlisin,

wakil Kadin Indonesia Solihin Kalla, Penasihat DMI Wahban, dan Ketua Komite Kemanusiaan PMI Pusat, Hussein Abdullah.

Selama kunjungan di Kabul delegasi telah melakukan serangkaian pertemuan dengan Presiden Ghani, Ketua Dewan Rekonsiliasi Dr. Abdullah Abdullah, Ketua Tim Negosiasi Mohammad Masoom Stanikzai, Menlu Haneef Atmar, Penasehat Keamanan Nasional (NSA) Hamdullah Mohib, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nisar Ahmad Ghoryani, dan Ketua Dewan Ulama Afghanistan, Maulvi Ataullah Ludin.

Pertemuan dengan Presiden Afghanistan, Dr. Mohammad Ashraf Ghani terselenggara pada 24 Desember 2020 pukul 17:30 sore. Dalam pertemuan tersebut Presiden Ghani menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam mendukung proses perdamaian di Afghanistan, termasuk penyelenggaraan *Trilateral Ulema Conference* di Bogor pada 2018 dan *Dialogue on the Role of Women in Building and Sustaining Peace* di Jakarta pada 26 – 30 November 2019. Dalam hal ini Plt. Menteri Urusan Perempuan Hasina Safi secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Menlu RI yang telah menginisiasi pembentukan *Afghanistan – Indonesia Women Solidarity Network* yang peresmianya telah terselenggara pada kesempatan kunjungan beliau ke Kabul pada 1 Maret 2020.

Presiden Ghani juga menyampaikan apresiasi atas sambutan pemerintah Indonesia saat berkunjung ke Jakarta pada 5-6 April 2017, yang dibalas dengan kunjungan Presiden RI ke Kabul pada 29 Januari 2018, dan kunjungan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI pada 28 Februari 2018 yang telah memperkuat fondasi dalam hubungan dua negara berpenduduk mayoritas Muslim. Dalam kaitan ini Presiden Ghani juga menyampaikan sangat menghargai kunjungan delegasi Bp. Jusuf Kalla kali ini, dan ingin belajar dari pengalaman beliau dalam memimpin proses perdamaian di Aceh.

Dalam pertemuan itu Presiden Ghani menyampaikan harapan pemerintah Afghanistan kepada pemerintah Indonesia bagi penyelenggaraan Konferensi Ulama Regional dengan kemungkinan pelaksanaan secara virtual mengingat pandemi COVID-19 yang masih

belum usai, dan kesediaan Indonesia menjadi salah satu tuan rumah bagi putaran-putaran pembicaraan damai selanjutnya (*one round of meeting*).

Plt. Ketua Dewan Ulama Afghanistan, Maulvi Ataullah Ludin yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengusulkan diadakannya Ijma' (kesepakatan bersama) antara MUI dan Dewan Ulama Afghanistan yang menyerukan diakhirinya kekerasan di Afghanistan, dan bahwa perang saudara yang tengah berlangsung saat ini diharamkan dalam ajaran Islam yang "Rahmatan Lil Alamin". Dalam kaitan ini baik Presiden Ghani maupun Maulvi Ludin memuji Indonesia, Malaysia, Brunei dan "to some extend Singapore" sebagai negara dengan penduduk muslim moderat, modern, toleran, dan inklusif yang patut menjadi contoh bagi Afghanistan.

Dalam tanggapannya Bp. Jusuf Kalla dengan merujuk pengalaman menyelesaikan masalah Aceh menyampaikan perlunya Pemerintah dan Taliban terus melakukan dialog yang serius untuk mencapai titik temu termasuk kemungkinan *sharing of power*. Presiden Ghani sepakat atas kemungkinan *sharing of power* namun beliau menegaskan bahwa sistem kenegaraan Afghanistan sudah terlalu sering berubah, sehingga tidak perlu lagi ada upaya untuk mengganti sistem Republik yang demokratis.

Dalam Pertemuan dengan Ketua HCNR Dr. Abdullah Abdullah terselenggara di Sapedar Palace pada 23 Desember 2020, dihadiri para anggota Dewan Kepemimpinan HCNR, Menteri Halimi dan Ketua Dewan Ulama Maulvi Ataullah Ludin. Pada pembukaannya, Dr. Abdullah menyampaikan sekilas kemajuan pembicaraan damai di Doha dan mengharapkan masukan Indonesia dalam dialog dengan tim negosiasi pemerintah sebagai persiapan pembicaraan damai putaran kedua pada 5 Januari 2021.

Beliau menyampaikan apresiasi atas inisiasi pembicaraan damai Afghanistan melalui *Trilateral Ulema Conference* dan sangat menghargai kunjungan Presiden Joko Widodo pada Januari 2018 serta kunjungan Menlu RI ke Kabul pada Maret 2020. Abdullah menegaskan Afghanistan perlu belajar dari Indonesia dalam

penanganan konflik internal. Terkait hal ini Abdullah juga menyampaikan apresiasi atas laporan Menteri Halimi tentang kesediaan Indonesia mempertimbangkan usulan bagi penyelenggaraan *Asia Regional Ulama Conference*. Abdullah berharap konperensi itu dapat mengeluarkan seruan bersama bagi penghentian kekerasan di Afghanistan, mewujudkan gencatan senjata dan penyelesaian konflik melalui jalur negosiasi yang dilaksanakan dan dimiliki oleh Afghanistan.

Abdullah menyatakan dalam hal ini Afghanistan perlu belajar dari pengalaman Indonesia menyelesaikan konflik di Aceh dan telah berperan sebagai salah satu fasilitator aktif bagi perdamaian di Afghanistan. Abdullah berharap Indonesia terus meningkatkan peran untuk membantu menghentikan kekerasan menuju gencatan senjata yang permanen di Afghanistan dan penyelesaian politik melalui negosiasi. Dia menggaris bawahi keinginan Afghanistan agar Ulama Indonesia dapat menyampaikan pesan tegas untuk mendorong Taliban bersedia menghentikan kekerasan dan melakukan gencatan senjata.

Tentang peran perempuan, Abdullah juga memuji peran Ulama perempuan dalam pembangunan kehidupan beragama di Indonesia dan mengharapkan dukungan untuk peningkatan kapasitas dan pengetahuan Ulama perempuan Afghanistan. Dengan kata lain, Abdullah ingin Indonesia dapat menyediakan beasiswa dan pelatihan bagi Ulama perempuan Afghanistan untuk mempelajari penerapan prinsip-prinsip keislaman dalam kehidupan modern termasuk di bidang politik, ekonomi maupun di bidang lainnya.

Dalam tanggapannya Jusuf Kalla menyatakan Indonesia memandang positif usulan Afghanistan tentang Konperensi Ulama Regional untuk menyatukan pandangan ulama tentang perdamaian di Afghanistan. Merujuk pengalaman dalam penyelesaian masalah Aceh, beliau mengakui jalan menuju perdamaian akan sulit dan butuh pengorbanan. Beliau menyatakan untuk mewujudkan perdamaian bagaimanapun peran ulama sangat penting. Tentang seruan ulama regional bagi perdamaian, beliau menyatakan yang terpenting adalah

bagaimana masyarakat siap menerima dan mengisi perdamaian. Harus ada kesepakatan untuk merujuk pada ajaran Islam yang komprehensif dan tidak hanya mengutamakan salah satu mazhab atau pandangan semata untuk bersatu.

Menambahkan tanggapan Jusuf Kalla, anggota DELRI, Hamid Awaluddin menjelaskan pengalamannya sebagai ketua tim negosiasi dalam penyelesaian masalah Aceh dan menyatakan dalam proses perundingan damai, pembicaraan harus didasarkan pada faktor kesamaan (*similarities*) dan kepentingan bersama, hindarkan semaksimal mungkin faktor perbedaan (*differences*).

Dalam pertemuan dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nisar Ahmad Ghoryani yang dihadiri juga oleh CEO *Afghanistan Chamber of Commerce and Industry* (ACCI) Sayed Zaman Hashimi, dan sejumlah anggota ACCI. Dalam pembicaraan tersebut Menteri Ghoryani memaparkan tentang potensi industri Afghanistan dan mengundang pengusaha Indonesia menanamkan modal di Afghanistan untuk mengembangkan industri dalam negeri, terutama di bidang pertanian, pertambangan dan energi yang sampai saat ini masih diimpor dari negara lain. Secara khusus Afghanistan berharap Indonesia dapat berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangunan waduk.

Dalam paparannya, Menteri Ghoryani menyatakan keyakinan Indonesia akan menghadapi kompetisi yang relatif rendah karena Afghanistan memiliki kekayaan alam melimpah yang selama ini belum diolah. Untuk mendorong minat investor, Afghanistan menjanjikan hak kepemilikan 100% dan mengusulkan pembentukan komisi bilateral bersama bagi peningkatan volume perdagangan Afghanistan dengan Indonesia.

Jusuf Kalla dalam tanggapannya menguraikan pengalamannya sebagai pengusaha dalam kontak-kontak dagang dengan pengusaha internasional. Dalam kaitan ini, wakil KADIN Bp. Solihin Kalla berjanji akan membahas hal ini secara khusus dengan para pengusaha Indonesia untuk menggali potensi perdagangan dengan Afghanistan. dalam paparannya, Jusuf Kalla sempat menyinggung skema FTA yang

telah dijalin antara Indonesia dengan sejumlah negara sahabat baik dalam kerangka bilateral maupun kerja sama regional. Namun dalam pembicaraan dengan delegasi Afghanistan belum dibicarakan kemungkinan dibentuknya FTA antara Indonesia dan Afghanistan.

Dalam pertemuan dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nisar Ahmad Ghoryani dihadiri juga oleh CEO *Afghanistan Chamber of Commerce and Industry* (ACCI) Sayed Zaman Hashimi, dan sejumlah anggota ACCI. Dalam pembicaraan tersebut Menteri Ghoryani memaparkan tentang potensi industri Afghanistan dan mengundang pengusaha Indonesia menanamkan modal di Afghanistan untuk mengembangkan industri dalam negeri, terutama di bidang pertanian, pertambangan dan energi yang sampai saat ini masih diimpor dari negara lain. Secara khusus Afghanistan berharap Indonesia dapat berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pembangunan waduk.

Dalam paparannya, Menteri Ghoryani menyatakan keyakinan Indonesia akan menghadapi kompetisi yang relatif rendah karena Afghanistan memiliki kekayaan alam melimpah yang selama ini belum diolah. Untuk mendorong minat investor, Afghanistan menjanjikan hak kepemilikan 100% dan mengusulkan pembentukan komisi bilateral bersama bagi peningkatan volume perdagangan Afghanistan dengan Indonesia.

Jusuf Kalla dalam tanggapannya menguraikan pengalamannya sebagai pengusaha dalam kontak-kontak dagang dengan pengusaha internasional. Dalam kaitan ini, wakil KADIN Bp. Solihin Kalla berjanji akan membahas hal ini secara khusus dengan para pengusaha Indonesia untuk menggali potensi perdagangan dengan Afghanistan. dalam paparannya, Jusuf Kalla sempat menyinggung skema FTA yang telah dijalin antara Indonesia dengan sejumlah negara sahabat baik dalam kerangka bilateral maupun kerja sama regional. Namun dalam pembicaraan dengan delegasi Afghanistan belum dibicarakan kemungkinan dibentuknya FTA antara Indonesia dan Afghanistan.

Dalam pertemuan dengan Ketua Tim Negosiasi Mohammad Masoom Stanikzai, Beliau meminta kepada Delegasi RI jika memiliki

buku tentang proses perdamaian Aceh yang dapat dicontoh oleh Afghanistan. Dubes RI Kabul kemudian menyerahkan buku *“Seeking Lasting Peace in Aceh”* karya salah satu putra terbaik Kemlu RI, Prof. Dr. Hasjim Djalal kepada Tim Negosiasi Pemerintah Afghanistan yang datang ke KBRI Kabul.

Pada pertemuan kedua dengan Dewan Ulama Islam Afghanistan yang dipimpin Bp. Jusuf Kalla dan Menteri Halimi, pihak Afghanistan kembali menyampaikan harapan agar Indonesia memberi dukungan terhadap pendidikan Islam bagi kaum muda Afghanistan agar di masa depan dapat dihasilkan para intelektual muda yang mampu menyuarkan dan menciptakan perdamaian di Afghanistan. Mereka menyatakan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan dianggap sebagai “Cahaya Islam yang Menerangi Dunia” sangat diharapkan dapat membantu modernisasi Islam di Afghanistan melalui pendidikan. Mereka juga berharap peran Indonesia semakin signifikan dalam mendorong proses perdamaian di Afghanistan.

22. Dubes RI Kabul Menerima Kunjungan dari Berbagai Kalangan di Afghanistan.

Sepanjang 2017 – 2021, hampir setiap hari Dubes RI Kabul menerima permintaan kunjungan maupun pertemuan via zoom dari Duta Besar negara-negara Sahabat yang berkedudukan di Kabul, ICRC, pejabat-pejabat Afghanistan, tokoh-tokoh terkemuka Afghanistan, pengusaha-pengusaha Afghanistan, jurnalis, aktivis dan lain-lain yang semuanya mengharapkan peran Indonesia yang terus-menerus dalam mewujudkan perdamaian di Afghanistan.

23. Duta Besar RI Kabul Sebagai Pembicara Kunci pada Seminar yang bertajuk *“Solidarity Dialogue between Male and Female Ulema in Promoting Mediation, Coexistence & Tolerance.”*

Acara yang diselenggarakan di Hotel Serena Kabul, Sabtu, 13 Maret 2021. Acara ini dihadiri sekitar 100 undangan terdiri dari para ulama Afghanistan baik pria maupun wanita, wakil-wakil dari kalangan diplomatik, kalangan pemerintahan Afghanistan yakni

Kementerian Urusan Agama, Kementerian Urusan Perempuan, Kementerian Perdamaian, dan kalangan jurnalis.

Dalam pidato pembukaan acara, Ketua Nahdlatul Ulama Afghanistan (NUA) Dr. Ahmad Noor Waqif menyampaikan maksud dan tujuan Seminar yakni untuk menyebarkan / memperkenalkan lebih luas lagi keberadaan dan berbagai aktivitas NUA kepada masyarakat Afghanistan, terlebih lagi menyebarluaskan ajaran NU yang menekankan kepada *Islam Rahmatan Lil 'Alamiin* (Islam yang membawa kedamaian kepada seluruh alam semesta).

Dalam pidatonya, Duta Besar RI Kabul menyampaikan hal sebagai berikut:

- 1) Afghanistan adalah salah satu negara mayoritas Muslim yang besar (*House of Islam*), dengan gerakan sufisme yang besar pula yang telah menjadi faktor kuat pendorong terciptanya perdamaian di Afghanistan;
- 2) Nahdlatul Ulama Afghanistan (NUA) yang berdiri sejak 10 (tahun) lalu tepatnya tahun 2011 telah memberikan sumbangsih yang amat besar bagi terciptanya proses perundingan damai di Afghanistan yang saat ini terus berlangsung. Hal ini disebabkan NU di Indonesia yang telah didirikan pada tahun 1926 adalah berdasarkan pada 3 (prinsip) yaitu *Amanat Diniyyah* (keagamaan) yang damai, *Amanat Wathoniyyah* (kebangsaan) yang pada gilirannya menciptakan *Amanat Basyariyyah* (perdamaian dunia). Duta Besar RI mengharapkan agar NUA dapat terus berjaya dan berkembang di Afghanistan.
- 3) Di Indonesia, NU yang berdiri jauh sebelum NKRI merdeka memiliki peranan yang amat penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara. NU senantiasa mengajak / menarik komponen bangsa yang berada di kanan maupun yang berada di kiri untuk menuju ke tengah (moderat) dan fokus bergerak maju mencapai cita-cita bangsa. Salah satu inspirasi berdirinya NU adalah Piagam Madinah (*Medina Charter*), suatu konstitusi negara

tertulis pertama di dunia yang inklusif dan mampu mengelola perbedaan.

- 4) Islam adalah agama yang paripurna, tidak saja semata-mata mengajarkan akidah (*Habluminallah*) melainkan juga telah membangun peradaban yang besar (*Habluminannas*). Oleh sebab itu seluruh rakyat Afghanistan harus optimis bahwa perdamaian akan segera terwujud demi menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Afghanistan bahkan kesejahteraan Dunia Islam pada umumnya. Afghanistan saat ini telah berada di depan gerbang kemerdekaan (*The Gate of Peace*) sehingga seluruh rakyat Afghanistan tidak boleh kehilangan momentum perdamaian. Apabila Afghanistan sakit, maka seluruh dunia akan merasakan dampaknya sebab Afghanistan adalah negara yang amat strategis berada di tengah-tengah dunia (*Central Asia*).

24. Penjajakan Potensi Kerja Sama Kesehatan RI – Afghanistan.

Kedutaan Besar RI di Kabul pada hari Selasa, 26 Mei 2021 telah menyelenggarakan pertemuan melalui *zoom* membahas mengenai potensi kerja sama kesehatan RI – Afghanistan, khususnya di bidang kesehatan jantung (*cardiovascular health*) dan kesehatan reproduksi perempuan, kehamilan dan kelahiran (*obstetric and gynecology*).

Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Duta Besar RI Kabul Dr. Arief Rachman, hadir peserta sebagai berikut:

- 1) Duta Besar Republik Islam Afghanistan di Jakarta Dr. Faizullah Zaki;
- 2) Penasihat Menteri Kesehatan Afghanistan Dr. Feda Mohammad Paikan;
- 3) Sekretaris Jenderal *Afghanistan Red Crescent* Dr. Nilab Mobarez;
- 4) Direktur *Indonesia – Afghanistan Friendship Clinic* Dr. Ahmad Shah;
- 5) Presiden *Indonesian Heart Association*, Dr. Isman Firdaus;

- 6) Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita Dr. Iwan Dakota;
- 7) Guru Besar UI / Mantan Direktur Utama RSJPD Harapan Kita Prof. Dr. Totok Anwar Santoso;
- 8) Spesialis Kesehatan Kandungan RS Budi Kemuliaan dr. Mohammad Baharuddin.

Duta Besar RI Kabul Dr. Arief Rachman menyampaikan bahwa dalam hubungan diplomatik RI – Afghanistan yang telah mencapai 67 tahun ini, berbagai bentuk kerja sama telah dilaksanakan yang mana semakin mempererat hubungan kedua negara sahabat. Pada tahun 2019, Indonesia telah menyelesaikan hibah klinik kepada Afghanistan. Hal ini menjadi salah satu momentum yang tepat bagi dimulainya kerja sama kesehatan RI – Afghanistan secara lebih luas dan mendalam.

Duta Besar Faizullah Zaki menyatakan bahwa Afghanistan menyambut baik kerja sama kesehatan dengan Indonesia. Dalam kaitan ini Pemerintah Afghanistan telah menyusun draft MoU Kerja Sama Kesehatan untuk dapat dipelajari oleh Pemerintah Indonesia. Seluruh peserta siap menindaklanjuti rencana kerja sama kesehatan RI – Afghanistan ini, yang mana telah diidentifikasi beberapa peluang kerja sama antara lain:

- 1) Kerja sama bidang kesehatan jantung yang terdiri dari *cardiac health service* dan *cardiac surgery*;
- 2) Kerja sama riset dan inovasi antara lain melalui kerja sama tenaga ahli kedokteran kedua negara;
- 3) Kerja sama pemberdayaan rakyat kedua negara untuk peningkatan kesehatan (*community engagement*);
- 4) Kerja sama penyempurnaan *health system resilience* yang lebih menekankan *outcome* guna menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat kedua negara;
- 5) *Accountability* penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

25. Duta Besar RI Berbicara di Berbagai Stasiun TV tentang Perdamaian Afghanistan

Dalam kurun waktu penugasan 2017 – 2021, Duta Besar RI Kabul telah diminta memberikan pesan-pesan perdamaian di Afghanistan pada berbagai stasiun TV baik di Afghanistan seperti Arezo TV dan lain-lain maupun di stasiun TV Indonesia seperti Kompas TV, Nusantara TV, IDN Times dan sebagainya.

9.1 Perkembangan Neraca Perdagangan RI-Afghanistan.

Neraca Perdagangan RI dengan Afghanistan menunjukkan kecenderungan perkembangan dinamis dalam periode 2017 – 2021. Total perdagangan Indonesia dengan Afghanistan pada tahun 2017 adalah sebesar US\$ 20,214.0 dan di tahun 2018 meningkat sebesar US\$ 22,279.7. Sempat menurun di tahun 2019 yaitu sebesar US\$ 15,673.9 namun di tahun 2020 total perdagangan Indonesia – Afghanistan naik lagi menjadi US\$ 21,867.2. Indonesia selalu surplus perdagangan dengan Afghanistan hampir 100%.

Per Juli 2021, total perdagangan Indonesia – Afghanistan mencapai US\$ 8,162.6. Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat adanya kenaikan nilai ekspor dari Indonesia ke Afghanistan pada Agustus 2021 meski situasi politik Afghanistan sedang memanas pasca Taliban berkuasa. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono, mencatat nilai ekspor ke Afghanistan mencapai 2,28 juta dolar AS. Nilai tersebut naik hingga 361,7 persen dari bulan sebelumnya 495 ribu dolar AS. Adapun, komoditas ekspor utama ke Afghanistan yakni produk farmasi, buah-buahan, karet, serta barang dari karet. Kendati situasi politik Afghanistan yang sedang tegang, kegiatan perdagangan antar kedua negara tetap stabil bahkan ekspor Indonesia bisa mengalami kenaikan.

9.2 Aktifitas Ekonomi Indonesia-Afghanistan.

Kegiatan Fungsi Ekonomi Sepanjang 2017 – 2021 yang berhasil di data KBRI Kabul, dapat diperinci, sebagai berikut:

1. Kunjungan Delegasi Bisnis Indonesia (WIKA) ke Afghanistan.

Pada tanggal 18 - 22 September 2017, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. telah mengadakan kunjungan ke Afghanistan. Pada kunjungan tersebut, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. diwakili oleh *General Manager* bidang Manajemen Proyek, Bapak Yulianto, dan Manajer Pengembangan Bisnis, Bapak Gelora Yala Nusantoro. Kunjungan tersebut merupakan kali pertamanya dilakukan oleh BUMN asal Indonesia selama beberapa dekade hubungan diplomatik dengan Afghanistan. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut permintaan Presiden Afghanistan, Moh. Ashraf Ghani, yang disampaikan saat kunjungan kenegaraan bulan April 2017 lalu ke Indonesia. Presiden Ashraf Ghani mengajak para pelaku bisnis asal Indonesia untuk datang ke Afghanistan dan menjajaki potensi dan peluang kerjasama ekonomi khususnya bidang investasi di Afghanistan. Selama kunjungannya di Afghanistan, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak di Afghanistan. Terdapat beberapa potensi proyek infrastruktur yang dapat digarap oleh PT. Wijaya Karya di Afghanistan.

2. Fasilitasi Transportasi Perdagangan dan Investasi.

KBRI Kabul melakukan pertemuan dengan Kepala Otoritas Penerbangan Sipil Afghanistan (*Afghanistan Civil Aviation Authority - ACAA*), Mr. Mahmood Shah Habibi, pada tanggal 31 Juli 2017, di Kantor ACAA, Kota Kabul, Afghanistan. Pada pertemuan tersebut, kedua belah pihak khusus membahas peluang kerja sama penerbangan komersial antara Indonesia - Afghanistan. Dubes RI Kabul, Dr. Arief Rachman MD. menyampaikan inisiatif Indonesia untuk menjajaki pembukaan jalur kerja sama kargo udara Kabul - Jakarta guna mendorong peningkatan kerja sama ekonomi terutama perdagangan dan investasi kedua negara. Ia juga menyampaikan bahwa terdapat dua maskapai penerbangan Indonesia yakni Sriwijaya Air dan Batik Air yang berminat untuk melakukan kerja sama penerbangan komersial dengan pihak Afghanistan. Terkait hal tersebut, pihak KBRI Kabul memohon koordinasi dan kerja sama

pihak ACAA, terutama dalam pengumpulan data dan informasi penting terkait penerbangan komersial di Afghanistan guna analisa dan pertimbangan lebih lanjut.

Kepala ACAA, Mr. Mahmood Shah Habibi, menyambut dengan baik inisiatif Indonesia tersebut dan menyampaikan bahwa pihak Afghanistan sangat membuka kesempatan bagi kerja sama penerbangan komersial dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik, khususnya Indonesia. Selain itu, pihak ACAA juga mengungkapkan bahwa terdapat potensi besar bagi peluang kerja sama penerbangan komersial di Afghanistan mengingat membaiknya kondisi ekonomi negara tersebut. Terkait dengan inisiatif kerja sama tersebut, pihak ACAA menyatakan bahwa Indonesia dan Afghanistan saat ini belum memiliki perjanjian di bidang pelayanan penerbangan udara, namun ACAA menyarankan untuk membuat Nota Kesepahaman antara Badan Otoritas Penerbangan Sipil kedua negara terlebih dahulu sebagai dasar bagi kerja sama penerbangan komersial antara Indonesia - Afghanistan. Pihak ACAA juga membuka peluang bagi perusahaan konstruksi asal Indonesia untuk berpartisipasi dalam proyek pengembangan Bandara Internasional Hamid Karzai yang saat ini masih dalam tahap awal persiapan master plan.

3. Fasilitasi Sistem Perbankan antara Indonesia dan Afghanistan.

KBRI Kabul telah memfasilitasi pembahasan tentang kerja sama perbankan antara Indonesia dan Afghanistan. Kerja sama Perbankan antara Indonesia dan Afghanistan dinilai sangat penting dalam meningkatkan hubungan baik kedua negara, khususnya hubungan perdagangan dan investasi. Kerja sama Perbankan antara Indonesia dan Afghanistan akan memudahkan kedua negara dalam melakukan transaksi perbankan dimana saat ini transaksi perbankan kedua negara masih terkendala sulitnya pengiriman uang antar bank kedua negara. Saat ini, untuk melakukan transaksi, khususnya bagi pebisnis, mereka menggunakan bank di negara pihak ketiga. Dalam hal ini, KBRI Kabul telah memfasilitasi pembahasan kerja sama perbankan antara

Ghazanfar Bank dengan beberapa bank di Indonesia seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Exim, dan Bank Central Asia (BCA). Selain itu, KBRI Kabul juga telah melakukan pembahasan terkait isu kerjasama perbankan, khususnya korespondensi bank, dengan pihak Bank Sentral Afghanistan (*Da Afghanistan Bank* - DAB).

Kurangnya minat bank-bank nasional di Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan bank asal Afghanistan didorong oleh masih kurangnya tingkat kepercayaan bank tersebut terkait kredibilitas bank dan juga situasi kondisi keamanan di Afghanistan. Oleh karena itu, KBRI Kabul berinisiatif untuk melakukan pendekatan kepada Bank Sentral di Afghanistan dan Indonesia agar dapat dilakukan pendekatan serta mendorong bank-bank di Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan bank-bank asal Afghanistan. Diharapkan pembahasan kerja sama tersebut dapat menghasilkan kerja sama yang efektif bagi kemudahan sistem perbankan antar kedua negara.

4. Penyelenggaraan Joint Exhibition, Trade Fairs, dan *Business-to-Business Matchmaking*.

KBRI Kabul telah memfasilitasi *business-to-business matchmaking* antara pengusaha asal Afghanistan dan Indonesia selama penyelenggaraan *Trade Expo Indonesia* ke-32, Oktober 2017. *B2B Matchmaking* tersebut menghadirkan pengusaha Indonesia dari berbagai sektor seperti pertanian, industri makanan dan minuman, obat-obatan, *fashion*, dan aksesoris, kosmetik, manufaktur, dan barang konsumsi lainnya.

5. Kunjungan ke Provinsi Herat, 25 - 26 Juli 2017.

Dalam rangka promosi kegiatan *Trade Expo Indonesia* 2017, Duta Besar RI Kabul mengadakan kunjungan ke Provinsi Herat, Afghanistan, pada tanggal 25-26 Juli 2017. Pada kunjungan tersebut, Duta Besar RI Kabul melakukan serangkaian pertemuan dengan Acting Gubernur Provinsi Herat, Jenderal Mohammad Juma Adeel, dan Ketua *Chamber of Commerce and Industry* (Kadin) Provinsi Herat,

Sahd Khatibi. Selain melakukan promosi kegiatan TEI 2017, kunjungan juga dikhususkan untuk membahas peningkatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Afghanistan, terutama perdagangan dan investasi. Adapun topik lainnya yang sempat dibahas adalah upaya pembentukan Indonesia - Afghanistan *Joint Business Council* (JBC) sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman yang disepakati pada tahun 2014 antara Kadin kedua negara.

Duta Besar RI Kabul menekankan komitmennya untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan pihak swasta dan meningkatkan fasilitasi kegiatan bisnis antara kedua negara. Khusus isu Visa, pihak KBRI Kabul sebaik mungkin akan memfasilitasi para pebisnis asal Afghanistan yang akan melakukan kegiatan bisnis dan ekonomi dengan pebisnis Indonesia. Duta Besar RI Kabul juga Kembali menyebutkan inisiatif pembukaan jalur langsung kargo udara dan penerbangan sipil antara Jakarta - Kabul guna mendorong peningkatan hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Afghanistan. Pihak Pemerintah daerah maupun Kadin Provinsi Herat menyambut baik kedatangan Duta Besar RI Kabul ke Provinsi Herat dan menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan peningkatan kerjasama bisnis antar kedua negara, khususnya dalam perdagangan dan investasi. Mereka mengungkapkan bahwa Provinsi Herat memiliki potensi yang sangat besar terutama di bidang pengembangan industri pertambangan, manufaktur dan produk pertanian.

6. Kunjungan ke Provinsi Bamiyan, 6 - 9 Agustus 2017.

Duta Besar RI Kabul mengadakan kunjungan ke Provinsi Bamiyan, Afghanistan, pada tanggal 6 - 9 Agustus 2017 guna menjajaki potensi kerja sama dengan salah satu Provinsi dengan potensi ekonomi yang besar di bidang pertanian dan pertambangan tersebut. Pada kunjungan tersebut telah dilakukan serangkaian pertemuan dengan Gubernur Provinsi Bamiyan, Tahir Zaheer, dan *Executive Director Chamber of Commerce and Industry* (Kadin) Provinsi Bamiyan, Ali Reza Hussainzada. Kunjungan dikhususkan

untuk melihat potensi peningkatan kerja sama ekonomi khususnya potensi investasi di bidang pertanian dan pertambangan. Sejalan dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* - MoU) bidang Pertanian antara Indonesia dan Afghanistan pada bulan April 2017, maka diharapkan kunjungan tersebut akan dapat mendorong implementasi MoU tersebut. Provinsi Bamiyan juga memiliki potensi yang sangat besar di bidang pertambangan. Wilayah Hajigak, Provinsi Bamiyan, merupakan pertambangan besi dengan cadangan terbesar di Afghanistan dan salah satu yang terbaik di dunia. Cadangan besi di wilayah Hajigak tersebut mencapai 1800 juta ton dan dengan kandungan besi sebesar 62 persen.

Duta Besar RI Kabul menekankan komitmennya untuk senantiasa mendorong peningkatan hubungan bisnis, khususnya investasi antara Indonesia dan Afghanistan. Dalam hal ini, KBRI Kabul akan mengajak para pengusaha asal Indonesia untuk melihat langsung potensi pertambangan di Provinsi Bamiyan. Pada pertemuan dengan pihak *Bamiyan Chamber of Commerce and Industry*, Duta Besar RI Kabul secara khusus mengajak pengusaha asal Provinsi Bamiyan untuk berpartisipasi pada kegiatan Trade Expo Indonesia ke-32 yang akan diselenggarakan pada tanggal 11-15 Oktober 2017 di Indonesia. Didampingi sejumlah pengusaha asal Provinsi Bamiyan, Duta Besar RI berkesempatan mengunjungi beberapa sentra kerajinan tangan khas Bamiyan, sentra penghasil dan pengolahan produk kentang dan pabrik pembuatan karpet skala menengah di Provinsi Bamiyan.

7. Kunjungan ke Provinsi Nangarhar, 12 - 13 Januari 2018.

Duta Besar RI Kabul melakukan kunjungan ke Kota Jalalabad, Provinsi Nangarhar, Afghanistan pada tanggal 12-13 Januari 2017. Pada kunjungan tersebut, Duta Besar RI Kabul melakukan serangkaian pertemuan dengan Gubernur Provinsi Nangarhar, Mr. Muhammad Gulab Mangal, Wakil Gubernur Provinsi Nangarhar, Mr. Abdullah Ragibi, Ketua *Chamber of Commerce and Industry* (Kadin) Provinsi Nangarhar, Mr. Gul Murad Arab, dan Rektor Universitas

Nangarhar, Mr. Babrak Miakhil. Kunjungan dikhususkan untuk membahas salah satu isu penting yakni peningkatan kerjasama ekonomi, terutama perdagangan dan investasi. Pertemuan Dubes RI dengan Gubernur Provinsi Nangarhar diselenggarakan di Istana Gubernur, Kota Jalalabad, Provinsi Nangarhar pada tanggal 13 Januari 2018. Pada pertemuan tersebut hadir pula Dewan Provinsi Nangarhar, Dewan Ulama Afghanistan, dan tetua dari beberapa kelompok suku di Nangarhar.

Pertemuan Dubes RI Kabul dengan pihak Kadin Provinsi Nangarhar diadakan di Kompleks Istana Gubernur Provinsi Nangarhar, pada tanggal 12 Januari 2018. Dubes RI Kabul menyampaikan beberapa hal penting antara lain: (1) peninjauan inisiatif pembukaan jalur udara langsung antara Kabul – Jakarta sebagai upaya peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi antar kedua negara, (ii) mendorong para pengusaha asal Nangarhar untuk melakukan bisnis dengan pelaku usaha swasta Indonesia dan menyampaikan bahwa pihak KBRI Kabul akan senantiasa memfasilitasi pelaku bisnis Afghanistan asal Nangarhar terkait dengan penyediaan informasi tentang bisnis di Indonesia serta kemudahan pemberian visa kunjungan bisnis, dan (iii) menyampaikan rencana pembentukan *Afghanistan - Indonesia Business Council* dan mendorong para pelaku bisnis di Nangarhar untuk mendukung inisiatif tersebut.

Pihak Kadin Provinsi Nangarhar menyampaikan apresiasi kepada pihak KBRI Kabul terkait dengan komitmennya untuk mendorong penguatan Kerjasama perdagangan dan investasi dengan investasi, salah satunya melalui kemudahan pemberian visa kunjungan bisnis. Selain itu, pihak Kadin juga menyambut baik inisiatif pihak KBRI Kabul untuk membuka jalur penerbangan kargo dan penumpang langsung antara Kabul dan Jakarta. Hal tersebut dinilai dapat membuka kesempatan lebih besar bagi pelaku bisnis antar kedua negara untuk memperkuat hubungan bisnis dan perdagangan.

Pihak Kadin menyampaikan usulannya terkait kerjasama dengan Indonesia seperti *sister city* dan *joint chamber*. Pihak KBRI Kabul mengusulkan kerjasama dapat dilakukan dengan pihak Kota Medan untuk *sister city* dan Kadin Kota Medan untuk *joint chamber*. Di akhir pertemuan, pihak Kadin mendorong pengusaha asal Indonesia untuk datang ke Provinsi Nangarhar dan melihat potensi kerjasama perdagangan dan investasi setempat. Nangarhar merupakan salah satu kota terbesar di Afghanistan dan paling aktif dalam kegiatan perdagangan dan investasi.

8. Kunjungan ke Provinsi Kandahar, 20 - 21 Januari 2018.

Duta Besar RI Kabul telah melakukan kunjungan ke Kota Kandahar, Provinsi Kandahar, Afghanistan pada tanggal 20-21 Januari 2018. Pada kunjungan tersebut, Duta Besar RI Kabul melakukan serangkaian pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kandahar, Jenderal (Purn) Zalmay Wesa, Wakil Gubernur Provinsi Kandahar, Mr. Abdul Hanan Moneeb, Ketua Kadin Provinsi Kandahar, Mr. Nasrullah Zaheer, Wakil Rektor Universitas Kandahar, serta dengan perwakilan Ulama dan Tetua Suku di Provinsi Kandahar. Kunjungan dikhususkan untuk membahas beberapa isu penting yakni: (i) Proses Perdamaian dan Rekonsiliasi di Afghanistan, (ii) Peningkatan kerjasama ekonomi, terutama perdagangan dan investasi, dan (iii) Penjajakan kerjasama di berbagai bidang lainnya seperti pendidikan. Ketibaan Dubes RI Kabul di Bandara Internasional Kandahar diterima oleh Wakil Gubernur Kandahar, Mr. Abdul Manan Moneeb: Walikota Kandahar, Mr. Roshan Wolasmal, Direktur Kantor Luar Negeri – Kemlu Afghanistan, Mr. Zahir Aloko, Presiden Kadin Kandahar, Mr. Nasrullah Zaheer, serta perwakilan tetua suku dan pengusaha swasta di Provinsi Kandahar.

Pertemuan Dubes RI dengan Gubernur Provinsi Kandahar diselenggarakan di Kantor Gubernur, Kota Kandahar, Provinsi Kandahar pada tanggal 20 Januari 2018. Pada pertemuan tersebut, Gubernur didampingi oleh Wakil Gubernur Provinsi Kandahar, Mr. Abdul Manan Moneeb dan Ketua Dewan Provinsi Kandahar, Mr. Sayed

Jan Khakraizwal. Hadir pula pada pertemuan tersebut, perwakilan Konsulat Jenderal Pakistan dan Iran, serta jajaran pejabat Dewan Provinsi Kandahar, Dewan Ulama Afghanistan, dan tetua dari beberapa kelompok suku di Kandahar. Dalam pertemuannya dengan Gubernur Kandahar, Duta Besar RI Kabul menyampaikan bahwa hubungan antara Indonesia dan Afghanistan sudah terjalin sejak lama, khususnya saat dimana Afghanistan merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dubes RI Kabul berharap bahwa kunjungan ke Provinsi Kandahar, provinsi terbesar kedua di Afghanistan dan paling aktif dalam kegiatan perdagangan, dapat mendorong peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi antar kedua negara.

Gubernur Kandahar sangat menyambut baik kedatangan Dubes RI Kabul ke Kandahar dan menyampaikan harapannya bahwa kunjungan Dubes RI Kabul ke Provinsi Kandahar, dapat meningkatkan hubungan antara kedua negara. Hubungan antara Indonesia dan Afghanistan tidak hanya antar Pemerintah, namun juga antar masyarakat di bidang perdagangan, budaya dan agama. Gubernur Kandahar juga berharap bahwa KBRI Kabul dapat memberikan kemudahan fasilitasi visa kepada pebisnis asal Afghanistan, khususnya dari Provinsi Kandahar, agar dapat meningkatkan kunjungan bisnis antar kedua negara. Sedangkan pertemuan Dubes RI Kabul dengan Presiden Kadin Provinsi Kandahar diadakan di Kantor Kadin Kandahar, pada tanggal 21 Januari 2018. Pada pertemuan tersebut Dubes RI Kabul diterima oleh Presiden Kadin Kandahar, Mr. Nasrullah Zaheer. Pertemuan dihadiri pula oleh jajaran anggota Kadin Kandahar dan perwakilan pengusaha swasta di Provinsi Kandahar.

Pada pertemuan tersebut, pihak Kadin Kandahar menyampaikan apresiasinya kepada pihak KBRI Kabul dalam mendorong peningkatan kerjasama ekonomi dan bisnis antara Indonesia dan Afghanistan serta mengharapkan kerjasama yang lebih baik khususnya dengan pihak swasta di Provinsi Kandahar dan Provinsi sekitar lainnya. Gubernur juga berharap bahwa KBRI Kabul dapat memberikan kemudahan fasilitas visa kunjungan bisnis bagi

pengusaha Afghanistan, khususnya dari Provinsi Kandahar. Selain itu, mereka juga menyampaikan keluhannya terkait perlakuan yang termasuk merepotkan dengan investigasi dan memakan waktu lama, oleh imigrasi Indonesia kepada pebisnis asal Afghanistan.

Selain itu, Gubernur juga berharap kerjasama di bidang industri manufaktur dimana Indonesia dapat memberikan program pembangunan kapasitas kepada para pelaku bisnis di Afghanistan dan mendorong peningkatan Kerjasama perdagangan antar pengusaha Indonesia dan provinsi Kandahar pada berbagai komoditi seperti buah-buahan kering, buah segar, karpet, obat-obatan, teh, ban, minyak kelapa sawit, tekstil, dan sebagainya. Dubes RI Kabul menyampaikan bahwa kunjungan ini adalah kunjungan pertama dari perwakilan RI ke Kota terbesar kedua di Afghanistan. Dubes RI Kabul menyampaikan pihaknya akan terus mengupayakan perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan fasilitasi visa bagi pebisnis asal Afghanistan yang hendak berkunjung ke Indonesia. Dubes RI Kabul menyampaikan komitmennya untuk memberikan kemudahan fasilitas visa kunjungan bisnis untuk mendorong peningkatan kerjasama perdagangan. Dubes RI Kabul berjanji akan menyampaikan kepada pihak berwenang terkait dengan proses keimigrasian di bandara internasional di Indonesia bagi pebisnis asal Afghanistan. Dubes RI Kabul, pada penutupan pertemuan, juga menyampaikan rencana penjajakan pembukaan rute penerbangan langsung Kabul - Jakarta yang diharapkan dapat meningkatkan hubungan bisnis antar Indonesia dan Afghanistan.

9. Pembentukan Afghanistan - Indonesia Business Council (AIBC).

Pembentukan *Afghanistan - Indonesia Business Council* merupakan mandat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman antara Kadin Indonesia dan Kadin Afghanistan yang ditandatangani pada tahun 2014. Untuk mewujudkan hal tersebut, KBRI Kabul melakukan pendekatan kepada *Afghanistan Chamber of Commerce and Industries*

(ACCI) untuk melakukan penjangkaran pebisnis yang berpotensi untuk menjadi calon anggota *business council*.

KBRI Kabul melakukan pendekatan kepada 21 orang pengusaha Afghanistan potensial yang sebelumnya telah memiliki hubungan dagang dengan pihak Indonesia, untuk menjadi anggota *Afghanistan – Indonesia Business Council* (AIBC). Daftar nama pengusaha Afghanistan yang menjadi anggota *business council*, antara lain sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar Pengusaha Anggota Business Council.

No.	Nama	Posisi AIBC	Perusahaan
1.	Mr. Muhammad Usman	Ketua	PT. Indocempaka International
2.	Mr. Nisar Ahmad Muhammad Shah	Presiden	Rumi Trading LLC
3.	Mr. Mohammad Shoaib Muskinyar	Wakil Presiden	Subhan Shereen Ltd.
4.	Ms. Nilofar Hesari	<i>Board Member</i>	Snow White Logistic Service Co.
5.	Mr. Muhammad Naeem	<i>Board Member</i>	PT. Mulia Exim Indoraya
6.	Mr. Zabihullah Wardak	<i>Board Member</i>	PT. Indo Afghan Trading
7.	Mr. Mohammad Samim Ayoubi	<i>Board Member</i>	Mark Travel & Tour
8.	Mr. Abdul Hameed Safi	<i>Board Member</i>	Omar Usman Safi Logistic Co.
9.	Mr. Nangialai Hajizada	<i>Board Member</i>	Almaka Ltd.
10.	Mohammad Mahdi Bazel	<i>Board Member</i>	Kabul E Maaser Vocational Institute
11.	Mr. Abdul Matin Qasim	<i>Board Member</i>	Pakiza Livestock and Dairy Production Co.
12.	Mr. Hikmatullah Hanifi	<i>Board Member</i>	Hikmat Hanifi Ltd.
13.	Mr. Abdul Saboor Afzal Ehrari	<i>Board Member</i>	Afzal Ehrari Brothers Co. Ltd.

14.	Mr. Ahmad Zia Azimi Shinozada	Anggota	Azimi Shinozada Group of Companies
15.	Mr. Ahmad Reshad Hashimi	Anggota	Khorshid Alamdar Logistic Services Co.
16.	Mr. M. Zarif Qeenat	Anggota	Zarif Delawar Ltd
17.	Mr. Jamshid Daqiq	Anggota	Daqiq Asri Ltd.
18.	Mr. Mohammad Aref Wardak	Anggota	Meta United Logistic Services Co.
19.	Sayed Mustafa Kamal Sadat	Anggota	Kamal Shahir Ltd.
20.	Ramazan Haidari	Anggota	Kamal Shahir Ltd.
21.	Ahmad Jan Hajizada	Anggota	Haji Zada Sahar Ltd.

Pembentukan AIBC didasarkan pada *bylaws* yang telah disetujui oleh seluruh *founding members*. *Bylaws* tersebut memuat seluruh pengertian mengenai struktur organisasi, regulasi keanggotaan, pertemuan anggota maupun *board members*, prosedur pengunduran diri, dan pembubaran organisasi. Terdapat 13 orang yang terpilih diantara anggota AIBC untuk menjadi *Board Members* yang mewakili seluruh wilayah (*region*) di Afghanistan seperti Kabul, Nangarhar, Balkh, Kandahar dan Herat. Dalam hal ini, *board members* memiliki wewenang dalam hal penerimaan dan pelepasan keanggotaan, pengaturan pertemuan umum anggota, perubahan pasal pada *bylaws*, dan pembuatan kontrak. Ketua AIBC, serta posisi Presiden dan Wakil Presiden akan dipilih diantara *Board Members* dimana masing-masing akan memegang posisi tersebut selama dua (2) tahun. Pemilihan Ketua dan *Board Members* dilakukan pada Pertemuan Umum Tahunan (*Annual General Meeting*), sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan pada Pertemuan *Board Members*.

10. Promosi 33rd Trade Expo Indonesia (TEI).

Duta Besar RI mengadakan pertemuan dengan para pengusaha yang berasal dari beberapa provinsi yang diadakan di hotel Kabul Star pada tanggal 7 Agustus 2018. Dubes RI didampingi oleh fungsi

ekonomi telah melakukan pertemuan dengan para pengusaha dari 5 provinsi besar yang ada di Afghanistan seperti Paktia, Paktika, Khost, Herat dan Kunar. Maksud kunjungan ini adalah untuk mencari peluang pasar bagi produk-produk Indonesia dan mengundang serta mengajak para pengusaha asal Afghanistan untuk berpartisipasi pada 33rd *Trade Expo Indonesia* (TEI) pada tanggal 24 - 28 Oktober 2018 di ICE - BSD City, Banten. Pertemuan dihadiri oleh Ketua Umum Partai *National United Solidarity Commission of Political Parties Social* (NUSCPPS), Ibrahim Rahimi serta para pengusaha perwakilan dari 5 provinsi yang berjumlah sekitar 30 pengusaha.

Dalam pertemuan, Dubes RI menyampaikan mengenai perkembangan ekonomi saat ini dan menyampaikan keunggulan produk-produk yang akan di tampilkan pada acara TEI 2018 di ICE BSD, Banten, peserta yang merupakan pengusaha Afghanistan akan mendapatkan mitra bisnis yang sesuai di TEI dan dapat membeli langsung dan mengikat kontrak kerja sama ekspor impor secara rutin ke Afghanistan. Ibrahim Rahimi menyampaikan dukungan penuhnya terhadap rencana tersebut dan sebagai perwakilan pengusaha dia dan para pengusaha Afghanistan yang berasal dari 5 provinsi akan turut hadir menyaksikan acara pameran dan berharap akan ada kontrak kerja sama dagang di antara kedua belah pihak.

Sementara itu, pada tanggal 8 Agustus 2018, Dubes RI beserta fungsi ekonomi juga melakukan kunjungan ke salah satu perusahaan impor yang berada di Kota Kabul, yaitu Rahil Mushkin Zai LTD. yang mengimpor *palm oil (cooking oil)*, *detergen* dan *laundry soaps* dari Indonesia. Dalam pertemuan tersebut turut hadir juga perwakilan dari beberapa perusahaan ekspor impor lainnya seperti Mustafa Shahid LTD. dan Farzad Shahzada Shaheen LTD. pemilik Rahil Mushkin Zai LTD, Mohammad Shoaib Mushkin menyampaikan bahwa ia mengimpor produk dari Malaysia sebesar 1.260 ton setiap bulan. Alasan ia memilih Malaysia adalah karena mudahnya proses pengurusan visa, harga bahan yang lebih murah dibandingkan Indonesia serta perusahaan di Malaysia mau *mengikuti* permintaan *packaging* sesuai yang diinginkan. Selain itu, proses regulasi yang

lebih mudah saat di pelabuhan juga menjadi alasan kuat mengapa banyak pengusaha asal Afghanistan yang memilih bekerja sama dengan negara Malaysia.

Oleh karena itu, saat ini KBRI Kabul berperan aktif untuk menarik perusahaan importir asal Afghanistan untuk ikut berpartisipasi dalam 33rd *Trade Expo Indonesia* 2018 di ICE BSD, Banten pada tanggal 24-28 Oktober 2018. Terakhir Dubes RI meyakinkan bahwa produk asal Indonesia memiliki kualitas yang lebih baik walaupun dari segi harga sedikit lebih mahal jika dibandingkan negara lain termasuk Malaysia.

11. Kunjungan ke Provinsi Herat, 29-30 Juni 2019.

Pada tanggal 29-30 Juni 2019, KBRI Kabul melakukan kunjungan ke Provinsi Herat dalam rangka mempromosikan *Trade Expo Indonesia* (TEI) yang ke-34 sesuai arahan Pemerintah Indonesia. Sementara pameran sendiri akan diadakan pada 16-20 Oktober 2019 di *International Convention Exhibition* (ICE) BSD, Tangerang. Rangkaian kunjungan diawali dengan kunjungan ke kantor *Chamber of Commerce and Industries of Herat* (CCIH) serta kunjungan ke kantor Gubernur dan Walikota Provinsi Herat.

Dalam agendanya, Dubes RI dan staf melakukan pertemuan dengan Ketua Kamar Perdagangan dan Industri (CCIH) dan Ketua Kamar Pertambangan dan Industri Provinsi Herat beserta anggota-anggotanya yang berjumlah 45 peserta. Kedua Ketua Kadin Provinsi menyambut baik kedatangan Dubes RI dan staf dari Kabul ke Provinsi Herat diharapkan kedatangan Dubes RI akan membawa manfaat kerjasama antara Indonesia dan Provinsi Herat, khususnya, umumnya dengan Pemerintah Afghanistan, sehingga akan terjalin hubungan dagang dan investasi kedua negara.

Provinsi Herat hampir sebagian produk kebutuhan pokok masyarakatnya diperoleh impor dari negara tetangga sekitar seperti Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, India, Pakistan termasuk Impor terbanyak, namun kualitasnya tidak bagus. Kahtibi mengharapkan dan menghimbau anggota CCIH untuk dapat

melakukan hubungan perdagangan dengan para pengusaha/eksportir Indonesia agar mendapatkan produk-produk yang berkualitas. Provinsi Herat memiliki hasil pertanian yang berkualitas seperti saffron, melon, semangka, anggur, dan kacang-kacangan dengan kualitas ekspor. Ketua HCIM, Hamidullah Khadem menyampaikan bahwa kualitas produk dalam negeri telah berkembang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan mereka dapat bersaing dengan merek asing di pasar lokal. Khadem juga menyampaikan bahwa produk Indonesia berkualitas baik dari pada China, mengharapkan investor Indonesia dapat berkunjung ke Provinsi Herat.

Provinsi Herat menghasilkan marmer yang berkualitas dan di ekspor ke luar negeri. Herat juga memiliki zone industri yang luas, sangat senang jika ada pebisnis Indonesia berminat investasi di zona industri provinsi Herat. Sekitar 600 pabrik/perusahaan di kawasan industri Herat yang beroperasi dan memproduksi antara lain jenis obat-obatan, produk plastik, makanan ringan, bola keju, biskuit, kemasan, logam timah, dan lain-lain.

Dubes RI menyampaikan dalam pertemuan kepada kedua organisasi kamar provinsi Herat merasa senang diterima dengan baik. Dubes RI juga mengundang dan mengharapkan para pengusaha dan importir potensial Provinsi Herat untuk melakukan kunjungan dan melihat barang-barang Indonesia pada *Trade Expo Indonesia* pada tanggal 16-20 Oktober 2019, produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat provinsi Herat ada di TEI. Duta Besar Indonesia mengundang para pedagang Herat untuk mengambil bagian dalam TEI 2019, dan sekaligus menjelaskan keberhasilan TEI tahun 2018 serta membagikan brosur TEI 2019. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Herat, Abdul Qayum Rahimi dan Wali Kota Herat, Ghulam Hazrat Mushfeq, keduanya menyambut baik atas kunjungan Dubes RI dan staf ke Provinsi Herat.

12. Kunjungan ke Provinsi Balkh, 19-21 Juli 2019.

KBRI Kabul kembali melakukan kunjungan ke Provinsi Balkh untuk mempromosikan pameran *34th Trade Expo Indonesia* (TEI) pada 16-20 Oktober 2019 di ICE BSD, Tangerang. Agenda pertemuan diawali dengan kunjungan ke kantor *Balkh Chamber of Industries and Mines* (BCIM) dan *Balkh Chamber of Commerce and Investment* (BCCI). Dalam kunjungannya, delegasi disambut langsung oleh *Chairman* BCIM serta kedua anggotanya dan dihadiri sekitar 103 pengusaha yang tergabung. Acara dilanjutkan dengan kunjungan ke kantor Gubernur Balkh.

13. Kunjungan ke Provinsi Kandahar, 7-8 Oktober 2019.

Mendekati pameran *34th Trade Expo Indonesia* (TEI), Duta Besar RI dan fungsi ekonomi KBRI Kabul kembali melakukan kunjungan promosi ke Provinsi Kandahar. Dalam kunjungan tersebut delegasi melakukan pertemuan dengan *Kandahar Chamber of Commerce and Industries* (KCCI) dan *Kandahar Chamber of Industries and Mines* (KCIM) serta kunjungan ke kantor Gubernur Provinsi Kandahar. Dubes RI dan staf melakukan pertemuan dengan Gubernur Kandahar, *Chairman Kandahar Chamber of Commerce and Industries* (KCCI) dan *Chairman Kandahar Chamber of Industries & Mines* (KCIM) beserta anggota-anggotanya yang berjumlah 80 peserta.

14. Pertemuan Dengan Menteri Perdagangan dan Industri Afghanistan.

Hubungan perdagangan antara Indonesia - Afghanistan telah terjalin sejak lama, namun nilai ekspor Indonesia ke Afghanistan masih dinilai rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tujuan ekspor lainnya di kawasan seperti Iran, Pakistan dan India. Selain itu, nilai impor Afghanistan dari Indonesia juga dinilai masih rendah dibanding dengan negara-negara asal impor Afghanistan di kawasan ASEAN seperti Malaysia dan Thailand. Beberapa hal yang menghambat peningkatan perdagangan dan kerjasama industri antar kedua negara antara lain kurangnya interaksi dan informasi yang

memadai mengenai potensi perdagangan, industri serta pasar masing-masing negara, belum adanya kerjasama korespondensi bank, jalur transportasi barang yang harus melalui negara ketiga seperti Iran dan Pakistan, kurangnya promosi perdagangan dan investasi kedua negara. Sejalan dengan hal tersebut, pada tanggal 28 Mei 2018, Duta Besar RI telah bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri Afghanistan, Humayoon Rasa, guna membahas beberapa isu yang dapat mendorong peningkatan kerjasama perdagangan dan industri antar kedua negara.

15. Pelatihan Prosedur Ekspor dan Impor.

Pada tanggal 7 - 9 Mei 2018, KBRI Kabul berkerjasama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI), Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), Kementerian Perdagangan RI, telah mengadakan program Pelatihan Prosedur Ekspor dan Impor yang diperuntukkan bagi partisipan asal Afghanistan. Pelatihan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo kepada Menteri Perdagangan RI sebagai tindak lanjut dari Kunjungan Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo ke Kabul, Afghanistan, pada tanggal 29 Januari 2018 silam. Melalui pelatihan ini, Indonesia dapat meningkatkan perannya dalam peningkatan kapasitas ekspor nasional, khususnya bagi para pelaku UMKM di Afghanistan.

Sehubungan dengan arahan Presiden, Kementerian Perdagangan mengirim 4 orang delegasi ke Afghanistan yang terdiri dari Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI), Ibu Iriana Trimurty Ryacudu, Staf Balai Besar PPEI, Ibu Titi Nur Izzarti, serta 2 (dua) orang instruktur pelatihan yakni Bapak Nursyamsu Mahyuddin Abdullah dari PT DaFa Teknoagro Mandiri dan Bapak Izmirta Rachman dari Energi Agro Nusantara. Pelatihan tersebut diikuti oleh sekitar 30 orang peserta dari berbagai komunitas bisnis, organisasi, dan badan Pemerintah di Afghanistan.

16. Pertemuan dengan KADIN Timur Tengah di Jakarta.

Pada tanggal 7 September 2018 fungsi ekonomi KBRI Kabul melakukan pertemuan dengan Ketua Komite Hubungan Bilateral Grup 3 KADIN Timur Tengah di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal antara lain: 1) Disela acara *Trade Expo Indonesia* (TEI), para pengusaha asal Afghanistan akan diarahkan untuk bertemu dengan pengusaha KADIN Indonesia khususnya komite Timur Tengah; 2) KADIN bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), akan menyelenggarakan *27th Board of Commerce, Industry & Agriculture* dengan tema *Inclusion In Sharia Economy: A New Paradigm* yang diselenggarakan pada tanggal 22-23 Oktober 2018 di The Ritz Carlton Hotel, Jakarta.

17. Pertemuan dengan Afghanistan Chamber of Commerce and Industries (ACCI).

Pada tanggal 30 September 2018, Duta Besar beserta fungsi ekonomi KBRI Kabul melakukan pertemuan dengan Direktur Hubungan Internasional ACCI, Khan Jan Alokozay. Dalam pertemuannya, KBRI Kabul mengajak para anggota ACCI serta beberapa divisi di bawahnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pameran *33rd Trade Expo Indonesia* (TEI) 2018 yang diadakan pada tanggal 24-28 Oktober 2018 di ICE BSD, Tangerang. Dalam kesempatan tersebut, ACCI menyatakan bahwa pihaknya siap untuk ikut berpartisipasi dan akan menginfokan seluruh anggotanya untuk turut serta dalam kegiatan pameran.

18. Kunjungan KADIN Timur Tengah ke Afghanistan.

KBRI Kabul mengundang KADIN Timur Tengah ke Afghanistan untuk melakukan peninjauan pasar produk Indonesia di Afghanistan yang terdiri dari sejumlah produk ekspor unggulan khususnya obat-obatan dan produk makanan serta menawarkan diri untuk berinvestasi di sektor pertambangan minyak dan gas. Kunjungan ini

di inisiasi langsung oleh Duta Besar RI Kabul, Dr. Arief Rachman MD. yang sebelumnya sudah melakukan pembicaraan dengan KADIN Timur Tengah di Jakarta disela kegiatan *Trade Expo Indonesia* (TEI) 2018.

Delegasi yang hadir terdiri dari 4 pengusaha yaitu 1) Mufty Hamka, *Vice Chairman* KADIN/CEO PT. Hati Internasional selaku ketua delegasi, 2) Mohammad Bawazeer, Wakil Ketua KADIN Timur Tengah/Presiden Direktur PT. Indrillco Bakti, 3) Ridwan Hamid, Ketua Komite Bilateral KADIN Timur Tengah/Direktur PT. Tekniko Indonesia, 4) Abdhy Pirsawan, Ketua *Indonesia-Afghanistan Business Council* (IABC)/Direktur PT. Pirss Hanny Indotama dan Presiden PT. Grace Hikmat. Keempat delegasi memiliki bisnis di beberapa sektor seperti obat-obatan dan makanan serta pertambangan. KBRI Kabul mempertemukan delegasi dengan sejumlah perusahaan dari masing-masing sektor di Afghanistan. Diharapkan setelah pertemuan ini akan ada peninjauan di antara pengusaha untuk melakukan transaksi.

19. Annual Economic Gathering of Indonesia (AEGIS) di Surabaya.

Pada tanggal 2 Oktober 2019, KBRI Kabul telah mengirimkan 10 orang peserta asal Afghanistan untuk menghadiri *Annual Economic Gathering of Indonesia* (AEGIS) di Surabaya, Indonesia yang berlangsung pada 12-14 Oktober 2019. KBRI Kabul mendukung rencana penyelenggaraan AEGIS di Surabaya sebagai upaya mendorong Pemerintah daerah dan pebisnis dalam memanfaatkan berbagai peluang kerjasama khususnya bidang perdagangan dan investasi dengan berbagai pihak di luar negeri, khususnya para pebisnis Asia Pasifik dan Afrika, dalam upaya tersebut, KBRI Kabul berupaya untuk menghadirkan para pengusaha/importir dari Afghanistan sejumlah 10 peserta.

20. Pertemuan Dengan Pengusaha Afghanistan di KBRI Kabul.

Duta Besar RI untuk Afghanistan dan fungsi ekonomi KBRI Kabul mengundang sejumlah pengusaha ekspor/impor asal Afghanistan ke KBRI kabul. Pertemuan dilaksanakan di halaman

kantor KBRI Kabul yang dihadiri lebih 50 peserta yang terdiri dari para pengusaha, pejabat Pemerintahan serta tokoh masyarakat. Dalam acara tersebut dipamerkan produk-produk Indonesia, seperti pakaian adat, batik, produk kopi dan teh, produk *palm oil*, produk biskuit, produk makanan, produk sabun, brosur peralatan pertanian, produk pupuk, dll. Dalam dalam paparan kami menjelaskan mengenai produk peralatan pertanian, produk teh, pupuk, bahan bangunan. Dalam akhir paparan beberapa pengusaha tertarik untuk peralatan pertanian dan pupuk, diharapkan dimasa mendatang Afghanistan untuk para petaninya dapat menggunakan peralatan pertanian dan pupuk dari produk Indonesia.

21. Pertemuan Dengan Pengusaha Ekspor Indonesia di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta.

Pada tanggal 19 Februari 2020, Fungsi Ekonomi KBRI Kabul mengadakan pertemuan dengan sejumlah pengusaha ekspor dan produsen yang difasilitasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat di Jakarta. Pertemuan ini dalam rangka diseminasi pameran *Indonesian Products Expo (IPE) 2020* yang diadakan di Kabul, 18-20 April 2020. Pertemuan dihadiri dari perusahaan obat-obatan, perusahaan ban, perusahaan *spare part* kendaraan bermotor, produk pakaian, minuman ringan, perusahaan herbal, perusahaan teh. Kami menjelaskan mengenai peluang ekspor ke Afghanistan.

22. Pertemuan Dengan *President of Islamic Bank of Afghanistan*.

Duta Besar RI untuk Afghanistan, Dr. Arief Rachman MD. mengadakan pertemuan virtual dengan Presiden Direktur Bank Islam Afghanistan, Syed Moosa Kaleem Al-Falahipada tanggal 1 September 2020. Bank Islam Afghanistan merupakan salah satu bank dengan reputasi baik yang berencana untuk melakukan kerja sama perbankan dengan salah satu bank di Indonesia. Duta Besar Arief menyambut baik keinginan *Islamic Bank of Afghanistan* dan telah meminta *Islamic Bank of Afghanistan* untuk mengajukan proposal resmi kepada KBRI Kabul untuk kemudian diteruskan kepada pihak-pihak yang

berwenang di Indonesia. Diharapkan nantinya dengan kerja sama ini maka akan ada suatu wadah yang digunakan oleh pengusaha dari kedua negara dalam bertransaksi.

23. Pertemuan Duta Besar RI untuk Afghanistan dan Duta Besar Afghanistan untuk RI bersama KADIN Timur Tengah.

Duta Besar RI untuk Afghanistan, Dr. Arief Rachman MD. beserta Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia, Faizullah Zaki melakukan pertemuan dengan KADIN Timur Tengah yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan KADIN. Dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang pelaksanaan *air cargo* Kabul-Jakarta yang telah dilakukan dapat berjalan dengan baik dan optimal, besar harapan pihak Afghanistan untuk mendapatkan kemudahan pengurusan berkas dokumen keimigrasian dan Pemerintah Indonesia tidak membatasi kuota buah-buahan yang telah disetujui untuk dapat diimpor dari Afghanistan.

Pihak Afghanistan meminta fasilitasi pertemuan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan untuk menginformasikan tentang *air cargo* yang telah dilaksanakan. Dalam pertemuan dengan Dirjen Daglu, pihak Kementerian Perdagangan menyatakan tidak keberatan sama sekali bahkan Dirjen telah memanggil Direktur terkait untuk memberikan kemudahan dan keterangan yang lebih mendetail dalam rangka pengurusan dokumen administrasi yang diperlukan.

Bersama dengan KADIN, Duta Besar RI dan Duta Besar Afghanistan telah berhasil melaksanakan pertemuan dengan para importir Indonesia yang bersedia menerima berbagai komoditas buah-buahan segar dan kering (*dry fruits*) Afghanistan yang dapat diimpor ke Indonesia. Duta Besar Afghanistan menyanggupi untuk memfasilitasi komunikasi dengan importir buah-buahan segar dan kering asal Afghanistan untuk bekerja sama dengan importir Indonesia.

24. Pertemuan Dengan German-Afghanistan Chamber of Commerce and Industries (GACCI).

Fungsi Ekonomi KBRI Kabul pada 14 Oktober 2020 menghadiri pertemuan dengan para pengusaha Afghanistan yang tergabung dalam German - Afghanistan Chamber of Commerce yang diketuai oleh Mr. Jalaluddin Saeed (Chairman of Kanda Group) yang juga menjabat sebagai Anggota High Economic Council, Government of Afghanistan. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh beberapa pengusaha terkemuka Afghanistan seperti Mr. M. Ismail Ghazanfar (CEO Ghazanfar Group), Mr. Najmuddin Sayas (President, Sayas Group), Mr. Hojat Fazly (CEO, Afghanistan International Chamber of Commerce), beberapa pengusaha terkemuka dari Kandahar, Duta Besar Noor Mohammad Qarqin (mantan Duta Besar Afghanistan untuk Kyrgyztan), dan Mr. Pashtoon Atif (Country Director, GoodWeave).

Pertemuan membahas peningkatan jejaring kerja sama ekonomi dan perdagangan antar pengusaha kedua negara yang semakin erat semenjak kunjungan Presiden Ashraf Ghani ke Indonesia pada tahun 2017 dan kunjungan balasan Presiden Joko Widodo pada tahun 2018, serta kunjungan KADIN Indonesia ke Kabul pada tahun 2019. Pertemuan juga membahas rencana pembentukan Task Force peningkatan kerja sama perdagangan RI - Afghanistan. Mr. Jalaluddin Saeed sangat mengapresiasi Indonesia sebagai negara mayoritas muslim yang patut diteladani dan mengharapkan agar semakin banyak generasi muda Afghanistan dapat meneruskan pendidikan tinggi di Indonesia sekaligus makin mempererat hubungan kedua negara.

25. Pertemuan Dengan Ghazanfar Bank.

Pada 19 Oktober 2020, Fungsi Ekonomi KBRI Kabul telah mengadakan pertemuan dengan CEO Ghazanfar Bank, Mr. Khisrow Fazli bertempat di KBRI Kabul. Pertemuan ini dilaksanakan atas permintaan Ghazanfar Bank. Adapun maksud dan tujuan pertemuan adalah Ghazanfar Bank ingin agar KBRI Kabul dapat menjembatani

kerja sama antar perbankan (*correspondence cooperation*) antara Ghazanfar Bank dengan bank-bank milik Pemerintah Indonesia guna mendukung arus perdagangan antara Indonesia dengan Afghanistan dan berbagai keuntungan lainnya di dalam mendukung eratnya hubungan antar negara maupun *people to people dan business to business*.

Ghazanfar Bank adalah salah satu bank swasta ternama di Afghanistan dengan predikat baik yang sudah beroperasi sejak Maret 2009 mendapatkan lisensi dari Bank Sentral Afghanistan yakni *Da Afghanistan Bank* (DAB). Ghazanfar Bank dimiliki oleh keluarga konglomerat Ghazanfar Family yang tergabung dalam Ghazanfar Group yang memiliki sejarah 100 tahun dan merupakan grup terbesar di Afghanistan. Ghazanfar Group terlibat dalam berbagai sektor bisnis diantaranya sebagai pelopor impor dan distribusi minyak dan gas serta berbagai sektor industri penting lainnya. Ghazanfar Bank terbuka dalam berbagai bentuk kerja sama perbankan dengan perbankan BUMN Indonesia baik dengan sistem Syariah maupun Konvensional. Dalam kaitan ini, KBRI Kabul telah mengirimkan proposal Ghazanfar Bank ini kepada Pusat untuk dipelajari.

26. Pertemuan Dengan Pengusaha Impor Afghanistan.

Pada tanggal 31 Oktober 2020, Duta Besar RI telah mengadakan pertemuan dengan Ahmad Baryali, pemilik perusahaan *Zulmai Sehat Baryalai Industrial Company* yang berlokasi di Provinsi Kandahar. Pertemuan diselenggarakan secara virtual. Perusahaan Zulmai Sehat Baryalai menyampaikan permintaannya kepada KBRI Kabul untuk mencarikan perusahaan yang memproduksi *soap noodle* atau bahan baku pembuatan sabun yang berbentuk mie. Ia menyampaikan nantinya akan memproses sendiri bahan baku mentah yang ada untuk dijadikan berbagai olahan sabun untuk kebersihan maupun kecantikan.

Menanggapi hal tersebut, KBRI Kabul telah menghubungi perusahaan tersebut dengan beberapa perusahaan yang khusus memproduksi *soap noodle* di Indonesia. Diharapkan akan ada tindak

lanjut kedua perusahaan terkait hal tersebut. Potensi kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara sangatlah besar mengingat kemiripan selera terhadap produk kedua negara meskipun kendala pengiriman masih menjadi penghalang terbesar selain dari proses visa.

27. Rangkaian Kegiatan Fungsi Ekonomi KBRI Kabul Dengan Duta Besar Afghanistan Untuk Indonesia, Faizullah Zaki.

Fungsi Ekonomi KBRI Kabul pada 22 Oktober 2020 telah mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Republik Islam Afghanistan untuk Republik Indonesia HE Faizullah Zaki bertempat di Kabul Star Hotel. Duta Besar Zaki yang tengah berada di Kabul untuk melakukan konsultasi mengajak KBRI Kabul untuk bekerja sama meningkatkan ekspor Afghanistan ke Indonesia yang amat tidak seimbang dengan ekspor Indonesia ke Afghanistan (dalam catatan Duta Besar Zaki, ekspor Indonesia ke Afghanistan sekitar USD 30 juta, sedangkan ekspor Afghanistan ke Indonesia sebesar USD 0.5 juta). Duta Besar Zaki menyatakan bahwa apabila ekspor Afghanistan ke Indonesia meningkat, dengan sendirinya akan lebih meningkatkan volume perdagangan Indonesia-Afghanistan.

Fungsi Ekonomi KBRI Kabul pada hari Senin, 23 November 2020 memfasilitasi pertemuan antara CEO Kareem International Bpk. Isnandar dengan Duta Besar Afghanistan untuk Republik Indonesia HE Bpk. Faizullah Zaki. Dalam pertemuan tersebut Dubes Zaki kembali mengajak kerja sama peningkatan volume perdagangan RI - Afghanistan. Produk-produk andalan Afghanistan adalah saffron, karpet dan buah-buahan.

Fungsi Ekonomi KBRI Kabul pada hari Jumat, 20 November 2020 telah memfasilitasi pertemuan antara Ahmed Sultan, Presiden Direktur PT. Indo Sultan Jaya dengan Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia, Faizullah Zaki. Dalam pertemuan tersebut disampaikan rencana PT. Indo Sultan Jaya berpartisipasi pada Afghanistan International Trade Fair Desember 2020 yang akan diadakan di Kabul pada 8-11 Desember 2020. Untuk mematangkan rencana partisipasi

PT Indo Sultan Jaya pada *Afghanistan International Trade Fair 2020*, KBRI Kabul juga mengadakan pertemuan dengan Hadi Sudibyo (*General Factory Manager*), Asih Sartika (*Assistant Manager Sales*), dan Muhammad Awais (*Supply Change Manager*) dari PT Indo Sultan Jaya pada tanggal 4 November dan 19 November 2020.

28. Duta Besar RI Kabul Menerima Excellent Award dari KADIN Afghanistan.

Atas upaya dan kerja sama KBRI Kabul, khususnya Duta Besar RI Kabul, dalam meningkatkan hubungan ekonomi antara komunitas bisnis kedua negara, pihak *Afghanistan Chamber of Commerce and Industries* (ACCI) telah menyerahkan **Excellent Award** kepada Duta Besar LBBP RI Kabul. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden ACCI, Mr. Khan Jan Alokozay, kepada Dubes RI Kabul, Bapak Arief Rachman MD, di kantor pusat ACCI di Kabul, Afghanistan (2/1/2018). Hadir pula pada penyerahan **Excellent Award** tersebut, Wakil Presiden Kadin SAARC (*South Asian Association for Regional Cooperation*), Mr. Mohammad Yonass Mohmand; Direktur Kerja Sama International ACCI, Mr. Omid Ghafarzai, dan beberapa pengusaha swasta Afghanistan.

Pada pertemuan tersebut, Mr. Alokozay menyampaikan bahwa pihak ACCI selalu mendorong pengusaha Afghanistan untuk melakukan kerjasama dengan pihak Indonesia. Selain itu, pihak ACCI juga berkomitmen untuk terus meningkatkan hubungan baik kedua negara melalui kerjasama perdagangan dan investasi. Pada kesempatan tersebut, Mr. Alokozay juga menyampaikan terima kasih kepada KBRI Kabul dalam memberikan kemudahan kepada pengusaha asal Afghanistan untuk dapat melakukan kunjungan bisnis ke Indonesia. Berkaitan dengan semakin meningkatnya perdagangan kedua belah pihak, pihak ACCI berharap pemberian visa Indonesia bagi pelaku bisnis Afghanistan dapat lebih dipermudah sebagaimana pihak Afghanistan yang akan berencana memberlakukan *visa on arrival* bagi pelaku bisnis.

Sementara itu, Dubes RI Kabul menyampaikan bahwa dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI dan Wakil Presiden Afghanistan pada Desember 2017 lalu, disepakati perlunya peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Afghanistan melalui fasilitasi transportasi udara yakni penerbangan langsung (*direct flight*) dan kargo udara untuk mendukung kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara. Dubes RI Kabul pada kesempatan tersebut mengajak para pengusaha swasta Afghanistan untuk melakukan investasi di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Dubes RI Kabul berjanji untuk lebih memberikan kemudahan dalam proses pemberian visa Indonesia bagi pelaku bisnis Afghanistan.

Kedua belah pihak sepakat untuk mendorong pembentukan *business council* antara Indonesia dengan Afghanistan dapat terealisasi sesegera mungkin pada kuartal pertama tahun 2018. Pembentukan *Afghanistan-Indonesia Business Council* (AIBC) merupakan mandat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman antara Kadin Indonesia dan Afghanistan yang ditandatangani pada tahun 2014.

29. Pertemuan Virtual Dengan Kementerian Perdagangan RI.

KBRI Kabul pada hari Jumat, 11 Desember 2020 menghadiri Koordinasi Penjajakan Skema Imbal Dagang RI-Afghanistan bersama Kementerian Perdagangan RI dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Persero secara virtual. Pertemuan dihadiri oleh Direktur Fasilitasi Ekspor Impor Kementerian Perdagangan RI, Merry Maryati, Direktur PT. PPI, Prasetyo Indroharto dan Kasubdit Peningkatan Akses Pasar Kemendag, Bambang Jaka Setiawan serta Ketua Gabungan Importir Seluruh Indonesia (GIMSI), Amalia Abdullah. Pertemuan secara khusus membahas mengenai rencana pendirian mekanisme imbal dagang RI-Afghanistan dalam rangka peningkatan ekspor sebagaimana arahan Presiden RI, Joko Widodo guna meningkatkan perekonomian negara.

Sebelumnya Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia, Faizullah Zaki telah melakukan pertemuan dengan Kemendag RI di Jakarta.

Dubes Zaki menyampaikan bahwa skema imbal dagang di Afghanistan sudah dilakukan dengan sejumlah negara seperti Rusia dan Tiongkok. Ini merupakan kabar baik sehingga proses peninjauan yang dilakukan dengan Pemerintah RI dapat dilakukan. Skema imbal dagang sendiri merupakan program utama atau *pilot project* Pemerintah RI dan saat ini sudah dilakukan dengan negara di wilayah Amerika Latin. Dubes RI untuk Afghanistan, Arief Rachman menyebut bahwa ini merupakan konsep yang baik dan berharap bahwa nantinya akan terwujud. Dubes Arief menyebut kendala yang masih dihadapi ialah banyaknya transaksi dagang yang tidak tercatat karena *port of entry* pengiriman harus melalui Pakistan dan Iran sehingga sulit untuk perdagangan kedua negara tercatat dalam laporan. Kendala lain yang dihadapi ialah penyesuaian tarif barang atau *Preferential Tariff Agreement* (PTA). Perlu adanya penyesuaian harga sehingga kedua negara saling diuntungkan.

30. Memfasilitasi Kunjungan Pengusaha Afghanistan dalam Pameran Dagang di Indonesia.

KBRI Kabul telah memfasilitasi kunjungan pengusaha Afghanistan dalam Pameran Dagang di Indonesia seperti pada 19th Indonesia International Furniture Expo (IFEX), 11- 14 Maret 2017, The 19th Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT), 26 - 30 April 2017, The 28th International Manufacturing, Machinery, Equipment, Material and Services Exhibition, 6-9 Desember 2017, The 20th Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 9 - 12 Maret 2018, TEI 2017, 2018 dan 2019.

Pada *Trade Expo Indonesia 2017*, 114 orang pengusaha Afghanistan hadir dan terlibat secara aktif dengan jumlah transaksi senilai USD. 1,453,800 pada beberapa produk seperti farmasi dan obat-obatan, logistik, konstruksi, elektronik, kertas dan alat-alat kantor, trading, fesyen, mesin pertanian, dll. Selain itu, terdapat nilai potensi transaksi sebesar USD 1,35 juta serta potensi investasi sebesar USD 2 juta di beberapa sektor usaha.

Pada TEI 2018, Peserta asal Afghanistan pada TEI 2018 tidak melakukan transaksi langsung, namun demikian terdapat potensi transaksi di masa depan, yaitu:

- 1) Zaland Sarsabz Ltd. dan PT. Dahlan Duta Utama untuk bidang pakan organik ternak sebesar USD 1 juta.
- 2) Sadais Hossainy Trading Ltd. dan PT. Santos Jaya Abadi bidang produk kopi dengan merek Good Day Cappuccino dengan nilai sebesar USD 300.000.
- 3) Melakukan kunjungan ke PT. Bio Farma (Persero) di Bandung, kunjungan ini juga memiliki prospek bisnis di masa depan.
- 4) Kunjungan ke PT. WIKA (Persero), potensi peluang kerja sama untuk proyek pembangunan bandara di kota Kabul senilai USD 200 juta dan proyek pembangunan bandara di kota Jalalabad, proyek pembangunan jalan, jembatan serta pembangunan infrastruktur di kota Jalalabad.
- 5) Pada tanggal 3 November 2018 ada pertemuan antara Zabiullah Zaland dengan PT. Medion untuk bidang vaksin hewan dengan potensi transaksi di masa depan sebesar USD 240.000.

Pada tanggal 6 November 2018 perusahaan *Jen Press & Oil Processing Ind.co* berencana membeli minyak goreng dari perusahaan PT. Mitra Pangrango senilai USD 242.000. Pada TEI 2019, peserta Afghanistan yang melakukan transaksi langsung adalah perusahaan Dost Afghindo Trade Company dengan PT. Agro Indomas untuk produk minyak goreng sawit dan turunannya senilai USD 300.000. Sedang yang tidak melakukan transaksi langsung, namun ada potensi transaksi kedepannya antara lain:

- 1) Perusahaan *Smart Engineering* berencana melakukan budidaya ikan air tawar di Kabul dengan Farm Biofloc-165 Depok, selain itu PT. WIKA, dan PT. Audie Building Industry tertarik untuk kerjasama pembangunan di Afghanistan baik apartemen maupun perkantoran melalui sub-contractor,

serta PT. Wika Rekayasa Konstruksi untuk produk panel surya.

- 2) Produk-produk yang berpotensi transaksi yang masih negosiasi adalah produk teh, produk odol dan kosmetik, *spare part* kendaraan bermotor, serta produk olahan kertas.
- 3) Potensi kerja sama produk makanan dan minuman olahan antara PT. Sinar Sosro dengan Mirzada Logistic Service Company (Afghanistan).
- 4) Potensi kerjasama PT. WIKA dengan Kementerian Energi dan Air (MEW) Afghanistan untuk pembangunan 40 MW *Solar Power Project Generation Facility* di Hisar-e-Shahi Industrial Park of Nangarhar (Provinsi Nangarhar), dengan menggunakan system *Build-Operate-Transfer (BOT) model and Invited Interested*.

Disela-sela kegiatan pameran TEI 2019, dilakukan pertemuan antara KADIN Divisi Timur Tengah dengan para pengusaha asal Afghanistan yang dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Afghanistan dan Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia serta anggota *Business Council* kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak fokus membahas regulasi ekspor impor. Banyak potensi yang dikembangkan oleh kedua negara, transaksi nilai perdagangan kedua negara belum maksimal. Salah satu alasan kecilnya angka perdagangan kedua negara ialah dikarenakan Afghanistan tidak memiliki pelabuhan laut, hanya dua perubahan negara tetangga yaitu di Karachi di Pakistan dan Chabahar di Iran.

Hal ini memaksa Afghanistan melakukan transaksi melalui kedua negara tersebut sehingga perdagangan yang tercatat bukanlah transaksi langsung. Catatan di *Central Statistic Organization of Afghanistan (CSO)* juga dinilai tidak sesuai dengan data perdagangan yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan Indonesia. Tidak sedikit transaksi yang dilakukan dengan perusahaan Indonesia, akan tetapi nilainya tidak tercatat didalam data CSO Afghanistan. Karena alasan tersebut, maka diperlukan kesadaran dari para pengusaha Afghanistan yang melakukan telah melakukan transaksi ekspor-impor

agar melaporkan nilai transaksi yang terjadi kepada negaranya masing-masing.

31. Menghadiri Pameran Dagang dan Konferensi di Negara Akreditasi.

KBRI Kabul menghadiri berbagai Pameran Dagang di negara akreditasi seperti 2nd *Balkh International Agriculture and Handicraft Expo* yang diselenggarakan pada tanggal 27 - 30 April 2017 di Mazar-i Sharif, Provinsi Balkh, Afghanistan. Penyelenggaraan kegiatan pameran tersebut merupakan hasil kerja sama dari *Afghanistan Chamber of Commerce and Industry* (ACCI) dan *Balkh Chamber of Commerce and Industry* (BCCI). Pameran diikuti oleh sekitar 130 *exhibitors* dari sekitar 98 Perusahaan Lokal maupun Mancanegara. Dalam pertemuan ini, KBRI Kabul mempromosikan penyelenggaraan TEI 2017 di Jakarta kepada pengusaha-pengusaha Afghanistan.

KBRI Kabul menghadiri 7th *Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan* (RECCA VII) yang diselenggarakan pada tanggal 14 - 15 November 2017 di Ashgabat, Turkmenistan. Pertemuan tersebut merupakan forum kerjasama ekonomi regional yang mendukung stabilitas dan pembangunan berkelanjutan di Afghanistan dan di kawasan yang lebih luas.

KBRI Kabul juga menghadiri *The 2nd International Women's Economic Forum and Exploration of Solution*, 31 Juli 2018, *Afghan Women Handicraft Expo* di Turkmen Association Office, 18 April 2019, *The India-Afghanistan International Trade & Investment Show* di hotel JW Mariot, Mumbai, 12 - 15 September 2021, KBRI Kabul Menghadiri Pameran *Our Homeland, Our Products* di Hotel Intercontinental, Kabul pada 14-16 Oktober 2020. KBRI Kabul juga telah mengumpulkan barang-barang pameran dari berbagai pengusaha Indonesia termasuk BUMN untuk dipamerkan pada *Afghanistan International Trade Fair*, 8-11 Desember 2020. Namun demikian karena situasi keamanan yang semakin memburuk membuat Pameran batal dilaksanakan.

32. KBRI Kabul Menghadiri Peluncuran 2020 Afghanistan Conference Secara Virtual.

KBRI Kabul pada 6 Oktober 2020 telah menghadiri peluncuran program “2020 Afghanistan Conference”. Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh perwakilan lebih dari 70 negara dan organisasi internasional, serta perwakilan masyarakat sipil baik secara fisik maupun virtual di Istana Presiden Char Chinar di ibukota Afghanistan. Dalam acara ini hadir Menteri Keuangan Afghanistan Abdul Hadi Arghandiwal, Utusan Khusus Finlandia untuk Konferensi Afghanistan 2020 Janne Talas, dan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afghanistan, Deborah Lyons. Konferensi Afghanistan 2020 akan diselenggarakan di Jenewa pada 23-24 November 2020, yang merupakan konferensi janji terakhir dari Dekade Transformasi (2015-2024), dengan tujuan untuk membawa negara Afghanistan menuju kemandirian, dan diharapkan memperbarui komitmen komunitas internasional terhadap pembangunan dan stabilitas Afghanistan hingga tahun 2024.

33. The 2020 Afghanistan Conference di Jenewa.

2020 Afghanistan Conference telah diselenggarakan tanggal 23-24 November 2020 di Jenewa. Konferensi ditujukan untuk mendukung Pemerintah dan rakyat Afghanistan dalam membangun perdamaian, kesejahteraan dan kemandirian terutama melalui koordinasi dukungan finansial. Konferensi yang diselenggarakan secara virtual ini diikuti oleh perwakilan 66 negara dengan 30 lebih diantaranya setingkat Menteri serta lebih dari 30 perwakilan organisasi Internasional terkait. Sebagian besar peserta berkomitmen untuk mendukung proses pembangunan dan perdamaian di Afghanistan. Konferensi juga berhasil mengumpulkan komitmen bantuan sebesar 12 miliar USD untuk pembangunan Afghanistan empat tahun ke depan. Dalam pernyataannya, Menlu RI menyampaikan hal-hal pokok antara lain:

- 1) Dorongan kepada komunitas internasional untuk terus dukung *Afghan-owned and Afghan-led peace process*.

- 2) Tekankan pentingnya peran perempuan serta ulama dalam mendukung proses perdamaian di Afghanistan.
- 3) Tegaskan komitmen bantuan RI senilai 5 juta USD dalam melanjutkan dukungan bagi Afghanistan yang akan difokuskan pada promosi nilai-nilai Islam moderat, pemberdayaan perempuan, dan tata kelola Pemerintahan yang baik.

34. Pertemuan KADIN Timur Tengah dengan Menteri Pertambangan dan Energi Afghanistan.

Pada 7 Januari 2021, KBRI Kabul memfasilitasi pertemuan antara KADIN Timur Tengah dengan H.E. Mr. Mohammad Haroon Chakhansuri (Menteri Pertambangan dan Perminyakan Republik Islam Afghanistan) beserta Delegasi, melalui teknologi virtual. Delegasi KADIN terdiri dari Bapak Fachry (Ferry) Thaib (Ketua KADIN Komite Timur Tengah dan OKI / *Chairman, Thamadita Group*), Bapak Mohammad Bawazeer (*Chairman, Indrillco Group*), Bapak Mufti Hamka (*Chairman, Hatin International*), Bapak Rudy Radjab (*Chairman, Kreasindo Resource Indonesia*), dan Bapak Ridwan Hamid (*Director, Delta Prima Steel*).

Pertemuan ini terwujud pada awalnya dilatar belakangi surat permohonan Ketua KADIN Timur Tengah kepada Menteri Pertambangan dan Perminyakan Afghanistan tertanggal 15 Oktober 2020 yang mengharapkan KADIN dapat melakukan eksplorasi pertambangan di Afghanistan khususnya bijih besi (*iron ore*), dimana surat ini telah dikirim langsung oleh KBRI Kabul kepada email pribadi Menteri Chakhansuri. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2020, Menteri Chakhansuri membalas surat Ketua KADIN Timur Tengah tersebut dengan mengundang melakukan pertemuan virtual.

Pertemuan ini bersejarah, sebab sejauh ini belum ada investasi Indonesia di Afghanistan, apalagi di bidang industri berat seperti pertambangan. Hal ini sejalan dengan semangat Pemerintah Afghanistan dalam pertemuan antara Ketua Dewan Masjid Indonesia Bapak Muhammad Jusuf Kalla dengan H.E. Mr. Nisar Ahmad Ghoryani

(Menteri Perdagangan dan Industri Republik Islam Afghanistan) pada Kamis, 24 Desember 2020 di Istana Kepresidenan, dimana Pemerintah Afghanistan mengundang pengusaha Indonesia untuk berinvestasi di sektor pertambangan dan energi di Afghanistan.

Duta Besar RI mengharapkan agar investasi / eksplorasi Indonesia di sektor pertambangan di Afghanistan dapat segera terwujud, selain guna lebih mempererat hubungan persahabatan dan persaudaraan Indonesia – Afghanistan, juga untuk mensejahterakan rakyat kedua negara. Duta Besar RI menyampaikan harapan KADIN untuk dapat berinvestasi di sektor pertambangan khususnya bijih besi (*iron ore*) dan *lithium*.

Menteri Pertambangan dan Perminyakan Afghanistan menyampaikan terima kasih atas keinginan KADIN berinvestasi di Afghanistan, dan kemudian melalui stafnya menyampaikan presentasi dan mengharapkan Indonesia dapat berinvestasi pada sektor batubara yang sangat dibutuhkan Afghanistan, lalu *hydrocarbon*, sektor perminyakan dan gas, dan *gemstone*. Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia, H.E. Mr. Faizullah Zaki menyampaikan kembali keinginan KADIN untuk dapat melakukan eksplorasi *lithium*, namun mengharapkan KADIN kiranya dapat mencarikan investor Indonesia yang bersedia berinvestasi di sektor-sektor yang diharapkan Pemerintah Afghanistan khususnya batu bara, *hydrocarbon*, minyak dan gas, dan sebagainya.

KADIN Timur Tengah mengharapkan dapat melakukan eksplorasi *lithium*, yang menurut United States Geological Survey (USGC) telah ditemukan kandungannya di Provinsi Hilmand dengan perkiraan kekayaan USD 89 milyar, yang dapat menjadikan Afghanistan berjuduk "*The Saudi Arabia of Lithium*". KADIN menyampaikan bahwa saat ini telah terdapat kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan dalam pembuatan baterai mobil listrik (*electric vehicles battery*) yang amat membutuhkan bahan baku *lithium*. Menteri Chakhansuri menyampaikan bahwa sejauh ini *lithium* masih berupa rahasia negara (*security of the nation*), sehingga memerlukan persetujuan Pimpinan. Apabila telah mendapatkan persetujuan maka

Indonesia dipersilahkan melakukan eksplorasi *lithium*. Namun Menteri Chakhansuri mengharapkan agar ada pengusaha Indonesia yang bersedia berinvestasi pada sektor batu bara, dan sektor-sektor lain seperti *hydrocarbon* serta minyak dan gas, dan sebagainya.

Pertemuan menyepakati pembentukan Tim Teknis yang akan melakukan serangkaian pertemuan lanjutan untuk pendalaman, termasuk apabila diperlukan kedatangan Tim baik ke Afghanistan maupun ke Indonesia. KADIN menunjuk Bapak Mohammad Bawazeer sebagai Ketua Tim Teknis, sedangkan pihak Afghanistan menunjuk Mr. Abdullah Asifi (*Advisor to the Minister of Mining and Petroleum*). Perkembangan terakhir sebelum Republik jatuh, KADIN Timur Tengah telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pertambangan dan Energi Afghanistan perihal usulan *Non Disclosure Agreement / MoU Bidang Pertambangan* namun belum mendapatkan jawaban hingga jatuhnya Republik Islam Afghanistan.

35. Pertemuan KBRI Kabul dengan Garuda Maintenance Facility via Zoom.

Fungsi Ekonomi KBRI Kabul pada hari Jumat, 22 Januari 2021 menyelenggarakan pertemuan via Zoom dengan Garuda Maintenance Facility (GMF) yang diwakili oleh Bapak *Rajesh Ferdinand Kusuma*, Senior Vice President-Sales & Marketing, *PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia*. Dalam pertemuan ini Fungsi Ekonomi KBRI Kabul mengikutsertakan pula 2 (dua) WNI yang bekerja di Kam Air yaitu Bapak Hairuddin Tahir dan Bapak Saragih.

Dalam pertemuan tersebut dibicarakan penajakan kerja sama kembali antara Kam Air dengan GMF dimana sebelumnya pesawat-pesawat Kam Air dahulunya sempat mendapatkan perawatan di GMF. Pihak Kam Air mengajukan beberapa usulan perbaikan pelayanan kepada GMF dan GMF akan mempelajari kemungkinan Kam Air mendapatkan pelayanan kembali di GMF.

Pertemuan ini diselenggarakan KBRI Kabul sehubungan dengan adanya permintaan Pusat pada tanggal 15 Desember 2020 agar Perwakilan-perwakilan RI di Luar Negeri melakukan penetrasi pasar

untuk BUMN Indonesia seperti PT INKA, PT GMF Garuda Maintenance, dan lain-lain. Kepada KBRI Kabul, pihak GMF meminta KBRI Kabul menjajaki pembukaan kembali kerja sama Kam Air dengan GMF.

36. Pertemuan Dubes RI Kabul dan Dubes Afghanistan di Jakarta dengan PT Surveyor Indonesia (Persero).

Pertemuan diselenggarakan pada 19 Februari 2021 di Hotel Fairmont, Jakarta dalam rangka peninjauan kerjasama strategis yang diharapkan mampu mendorong perbaikan ekonomi dan pengembangan iklim investasi untuk kedua negara di tengah kondisi pandemi global. Pertemuan dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Afghanistan, H.E. Dr. Arief Rachman MD beserta Delegasinya, Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia, H.E. Faizullah Zaki Ibrahim beserta Delegasinya, Fungsi Ekonomi Kedutaan Besar Indonesia di Kabul, Murdi Primbani, dan Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero), Dian M. Noer beserta Jajaran Direksi.

Dalam kegiatan tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Afghanistan, H.E. Dr. Arief Rachman MD turut mengapresiasi dukungan serta komitmen yang diberikan Surveyor Indonesia terhadap upaya peninjauan kerjasama antar negara, dan mengharapkan pertemuan hari ini dapat kemudian diikuti oleh langkah – langkah strategis oleh berbagai pihak terkait. Dubes RI Kabul berharap potensi alam di bidang pertambangan di Afghanistan itu besar sekali. Diharapkan potensi ini dapat dioptimalkan oleh Indonesia, terutama oleh Surveyor Indonesia. Sementara, Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia, H.E. Faizullah Zaki Ibrahim mengungkapkan bahwa saat ini banyak potensi ekonomi di Afghanistan yang tengah dikembangkan untuk menarik investor dari luar seperti di sektor pertambangan, migas, hingga perkebunan.

37. Pertemuan PT Wijaya Karya (WIKA) dengan Shinozada Group.

KBRI Kabul pada 3 April 2021 memfasilitasi pertemuan antara Shonozada Group dengan PT Wijaya Karya (WIKA). Dubes RI Kabul

berhalangan menghadiri pertemuan ini sebab mendapat undangan ke Istana Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Shinozada Group yang diketuai Mr. Ahmadzia menawarkan berbagai projek infrastruktur di Afghanistan seperti pembangunan bandara, rumah sakit, bendungan, Kawasan industri dan lain sebagainya kepada WIKA.

WIKA menyampaikan bahwa skema pembangunan ini harus G to G agar uang investasi Indonesia mendapat jaminan di tingkat Pemerintah Afghanistan, sementara proyek ini murni swasta sebab Pemerintah Afghanistan tidak memiliki cukup dana untuk menjamin proyek. Pihak Afghanistan mengatakan solusinya adalah dengan pembiayaan pihak ketiga.

38. Pertemuan Dubes RI Kabul dengan Pengusaha Afghanistan Dr. Jamshid Daqiq.

Fungsi Ekonomi KBRI Kabul pada 8 April 2021 mendampingi Dubes RI Kabul dalam pertemuan dengan Dr. Jamshid Daqiq, pengusaha Afghanistan yang setiap tahun melakukan import obat-obatan dari Indonesia khususnya dari PT Afifarma. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Daqiq menyampaikan apresiasi kepada KBRI Kabul yang senantiasa mendukung kerja sama perdagangan antara pihaknya dengan PT Afifarma. Dalam pertemuan tersebut, KBRI Kabul juga mengemukakan untuk mengusulkan Dr. Daqiq mendapatkan Primaduta Award pada ajang TEI 2021. Usulan tersebut telah dikirimkan kepada Panitia TEI 2021 di Jakarta.

39. Pertemuan Dubes RI Kabul dengan Pengusaha-pengusaha Afghanistan di Dubai.

Duta Besar RI Kabul pada hari Rabu dan Kamis, 19 – 20 Mei 2021 telah mengadakan pertemuan dengan pengusaha-pengusaha Afghanistan di Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA) dan juga pertemuan dengan Konsul Jenderal RI Dubai. Dengan belum kondusifnya situasi keamanan Afghanistan, banyak warga Afghanistan yang menjadi diaspora di seluruh dunia, termasuk kalangan pengusaha. Khusus di Dubai, pengusaha-pengusaha asal

Afghanistan adalah salah satu yang terkuat. Dengan lengkapnya fasilitas yang dimiliki Dubai termasuk terdapatnya penerbangan langsung dari Dubai ke Kabul, menjadikan Dubai tempat yang sangat menarik bagi banyak pengusaha Afghanistan menanamkan investasi dan bertempat tinggal di sana, sekaligus menjalankan usaha dari Dubai. Meskipun negaranya masih belum sepenuhnya kondusif, rakyat Afghanistan terkenal memiliki jiwa *entrepreneurship* tinggi, konsekuensi Afghanistan yang merupakan bagian dari jalur perdagangan *Silk Road* yang tercipta sejak sekitar 2000 tahun lalu.

Pada hari Rabu, 19 Mei 2021, Duta Besar RI Kabul mengadakan pertemuan dengan pengusaha-pengusaha Afghanistan yaitu Mr. Ahmad Durrani, Mr. Rajab Ali Andishman, dan Mr. Dawud Mahmoodie di kediaman Mr. Ahmad Durrani di Emirat Sharjah. Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar RI Kabul mendorong agar semakin banyak pengusaha-pengusaha Afghanistan dapat meningkatkan investasi di Indonesia maupun kerja sama perdagangan dengan Indonesia, dan bekerja sama meningkatkan volume perdagangan RI – Afghanistan yang pada tahun 2020 berada di angka USD 21 juta (meningkat dari tahun 2019 yang sebesar USD 15 juta). Duta Besar RI meminta pengusaha-pengusaha Afghanistan jangan terlalu *look to the west* tempat matahari terbenam, tapi sudah saatnya *look to the east* tempat matahari terbit.

40. Pertemuan Dubes RI Kabul dengan Mr. Ahmad Durrani dan pengusaha Afghanistan di Dubai.

Dalam tanggapannya, Mr. Rajab Ali Andishman yang merupakan Ketua Asosiasi Pengusaha Afghanistan di Dubai yang mengkoordinasikan banyak pengusaha Afghanistan di Dubai, menyampaikan bahwa akan terus mendorong pengusaha-pengusaha Afghanistan yang dikenalnya, baik yang berdomisili di PEA maupun di Afghanistan untuk berinvestasi di Indonesia maupun membuka / meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Indonesia. Mr. Rajab Ali Andishman juga menyampaikan bahwa selama ini telah menjalin kerja sama yang erat dengan Konsul Jenderal RI di Dubai.

Dalam pertemuan tersebut, Mr. Ahmad Durrani yang merupakan salah satu tokoh Afghanistan menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang patut dijadikan contoh bagi Afghanistan. Indonesia adalah negara mayoritas Muslim yang dinilainya berhasil mengelola perbedaan dengan baik. Mr. Durrani menyampaikan bahwa solusi bagi perdamaian di Afghanistan adalah dibentuknya Pemerintahan sementara (*interim government*) yang dapat menerima berbagai macam perbedaan termasuk perbedaan suku dan agama di Afghanistan.

Menanggapi hal tersebut, Duta Besar RI Kabul menyampaikan bahwa Afghanistan saat ini telah berada di depan pintu gerbang perdamaian (*Gate of Peace*). Belum pernah terjadi sebelumnya Pemerintah Afghanistan dan Taliban duduk di meja perundingan seperti sekarang ini. Dubes RI Kabul menekankan agar Afghanistan jangan sampai melepaskan peluang emas perdamaian yang telah diperoleh. Kuncinya adalah tingkatkan semangat persaudaraan di antara sesama orang Afghanistan, saling menerima, dan berada di tengah-tengah (bersikap moderat) untuk dapat maju membangun Afghanistan. Dubes RI Kabul mencontohkan berdirinya Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama di Indonesia pada tahun 1926 yang mengambil jalan tengah (Moderat Islam) dan menarik saudara sebangsa baik yang berada di kiri maupun yang berada di kanan guna bersama-sama melangkah maju mendirikan NKRI yang akhirnya terwujud pada 17 Agustus 1945.

SOFT POWER DIPLOMASI BIDANG SOSIAL BUDAYA DI AFGHANISTAN

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk membantu Afghanistan menjadi negara yang aman, demokratis dan sejahtera. Salah satu upaya konkrit sebagai perwujudan dari komitmen tersebut adalah mendorong terwujudnya rekonsiliasi dan perdamaian di Afghanistan melalui jalur sosial dan budaya. Beberapa kegiatan KBRI Kabul dalam bidang sosial dan budaya selama periode 2017-2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

10.1 Kerjasama RI-Afghanistan Bidang Keulamaan.

1. Konferensi Nahdlatul Ulama Afghanistan Wilayah Barat, 1 Maret 2017.

Pada tanggal 1 Maret 2017, KBRI Kabul bekerja sama dengan NECDO (*Noor Educational and Capacity Development*), menyelenggarakan Konferensi Nahdlatul Ulama Afghanistan (NUA) di Kata Herat, Provinsi Herat, Afghanistan. Konferensi tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang diadakan di 4 (empat) Zona di Afghanistan yakni: Utara, Barat, Selatan dan Timur. Konferensi yang bertajuk "*Role of Ulama – NUA in Strengthening Peace and Development in Afghanistan*" ini, bertujuan untuk meningkatkan peran penting ulama Afghanistan, khususnya di Wilayah Barat Afghanistan, dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi, demi terciptanya Afghanistan yang damai, aman dan sejahtera.

Konferensi tersebut dihadiri oleh sekitar 100 Ulama, yang terdiri dari 90 Ulama Pria dan 10 Ulama Perempuan, dari Provinsi Herat dan sekitarnya, Dewan Syura NUA dari Kata Kabul, Perwakilan KBRI Kabul, institusi Pemerintah, Departemen Keamanan Herat, dan dari kalangan Media. Komite NUA Herat ditunjuk oleh Dewan Pengarah NUA (Syura) untuk menyelenggarakan kegiatan Konferensi

tersebut. Guna memperlancar berlangsungnya kegiatan, NUA mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Agama dan Urusan Haji Afghanistan dan sekaligus meminta dukungan kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Peradilan Afghanistan.

Konferensi dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci al-Qur'an dan dinyanyikannya lagu kebangsaan Afghanistan. Kemudian, Ketua NECDO sekaligus pendiri NUA, Mr. Fazal Ghani Kakar, memberikan presentasi pengenalan terkait tujuan dari kegiatan konferensi, yakni:

- a. Pengenalan organisasi NUA kepada Ulama dan Imam di Provinsi Herat dan sekitarnya.
- b. Penguatan peran Ulama dalam proses perdamaian, rekonsiliasi dan pembangunan di Afghanistan.
- c. Pengenalan tentang rencana kemandirian finansial NUA kepada Ulama di Provinsi Herat dan sekitarnya.
- d. Menggalang komitmen para Ulama di Provinsi Herat dan sekitarnya guna pemberdayaan dan perluasan NUA.

Konferensi dibuka secara resmi oleh Mr. Sayed Abdul Wahid Aasemi, Perwakilan dari Kementerian Agama dan Urusan Haji Afghanistan, yang menekankan pentingnya penyelenggaraan Konferensi serupa yang telah diupayakan oleh NUA dan KBRI Kabul di tengah kebutuhan akan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan dengan menguatkan peran Ulama.

Ketua NUA, Mr. Sayed Salahuddin Hashemi menekankan peran Ulama dalam memperkuat persatuan dan persaudaraan serta mengucapkan terima kasih kepada Ulama Herat atas dukungannya kepada NUA. Ketua Komite NUA Herat, Mr. Jalaluddin Haqani, mengucapkan terima kasih kepada Dewan Syura NUA atas inisiatifnya dan memberikan penghargaan kepada KBRI Kabul atas dukungan teknis dan dana dalam penyelenggaraan Konferensi. Beliau juga menekankan peran Ulama dalam perdamaian dan komitmennya untuk bekerjasama dengan Ulama di Wilayah Barat dalam mendorong perdamaian.

Kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi Kelompok dimana seluruh peserta dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok:

- a. Kelompok Satu diberikan tugas untuk membahas Moderat dalam Islam dan Dampaknya terhadap Keberlangsungan Perdamaian.
- b. Kelompok Dua diberikan tugas untuk membahas Keadilan Sosial dan perannya dalam Persatuan.
- c. Kelompok Tiga diberikan tugas untuk membahas Toleransi dan Keseimbangan dalam Islam dan perannya dalam memperkuat proses perdamaian.
- d. Kelompok Empat diberikan tugas untuk membahas peran Perempuan dalam Perdamaian melalui pembentukan generasi mendatang yang cinta damai.

Perwakilan KBRI Kabul, Jhony Ahmad, memberikan pidato singkat yang menekankan pentingnya pembahasan penyelenggaraan Konferensi dalam mendorong nilai-nilai Keadilan, Keseimbangan, Toleransi, dan Moderat.

Pada akhir kegiatan, anggota Komite NUA Herat membacakan **FINAL STATEMENT** yang terdiri dari 8 (delapan) hal penting yaitu:

- a. NUA merupakan organisasi *non-profit* dan non-politis, dimana berdasarkan prinsip dan ajaran Islam.
- b. Berdasarkan keyakinan yang kuat dalam ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Sebagai sumber dari segala keselamatan dan keberhasilan manusia, NUA berjuang untuk bekerja dengan diiringi berkah dari Allah Swt. dan persatuan para Ulama untuk memastikan hal tersebut di setiap kegiatannya di seluruh Afghanistan.
- c. NUA memandang bahwa segala permasalahan di negara Afghanistan memiliki 2 (dua) elemen eksternal dan internal yang diakibatkan oleh korupsi serta permainan politik dari kelompok etnis dan politik yang berbeda untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, NUA mengajak seluruh Ulama terkait seluruh Afghanistan untuk bekerjasama guna persatuan bangsa serta perdamaian dan keamanan di Afghanistan.
- d. Berdasarkan ayat suci al-Qur'an, NUA memanggil seluruh

Ulama untuk berupaya menghilangkan segala perselisihan dan kekerasan yang terjadi di tengah Ulama dan umat.

- e. NUA mengetahui bahwa negara sahabat dan saudara kita, Republik Indonesia akan mengadakan sebuah pertemuan tentang Perdamaian di Afghanistan dimana Presiden Ashraf Ghani akan berpartisipasi, NUA mengagumi inisiatif oleh Republik Indonesia tersebut dan akan mendukung kegiatan tersebut.
- f. NUA percaya bahwa solusi dari seluruh permasalahan politik dan sosial adalah ajaran Islam yang sejati, yang sekaligus memastikan persatuan bangsa.
- g. NUA merupakan organisasi sosial serta budaya dan memiliki anggota-anggota yang berpengaruh, jujur, dan simpatik dari seluruh Afghanistan yang siap untuk bekerja dengan Pemerintah Afghanistan dalam Perdamaian, Rekonsiliasi dan Pembangunan.
- h. NUA memohon perhatian Kepala Negara terhadap Ulama Afghanistan, khususnya NUA, dan meminta pihak berwenang untuk merujuk pada NUA dalam perjuangannya menciptakan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan.

Kegiatan Konferensi diakhiri dengan mengadakan tur ke beberapa situs di Kota Herat bersama perwakilan KBRI Kabul.

2. Konferensi Tahunan Nahdhatul Ulama Afghanistan (NUA) 2017, 15-16 Mei 2017.

KBRI Kabul menyelenggarakan Nahdhatul Ulama Afghanistan (NUA) Conference pada tanggal 15-16 Mei 2017 di Hotel Safi Landmarks, Kata Kabul, Afghanistan. Konferensi tersebut bertemakan *Role of Ulama in Peace, Development, Respect to Human Rights, and Love to Humanity*. Penyelenggaraan konferensi dilakukan atas kerjasama KBRI Kabul dengan *Noor Educational & Capacity Development Organisation* (NECDO) serta Nahdhatul Ulama Afghanistan (NUA). Konferensi dihadiri oleh sekitar 165 orang Ulama (100 Ulama Laki-laki dan 65 Ulama Perempuan), serta perwakilan

dewan syura NUA dari sekitar 20 Provinsi di Afghanistan, delegasi ulama dari Indonesia, KBRI Kabul, pejabat Pemerintahan, Departemen Keamanan, dan Media.

Konferensi tersebut diawali dengan pembacaan ayat suci Al-qur'an dan diikuti oleh lagu kebangsaan Afghanistan dan Indonesia. Mr. Fazal Ghani Kakar, pendiri NUA, memberikan paparan tentang tujuan dan misi dari penyelenggaraan Konferensi NUA 2017. Tujuan umum dari penyelenggaraan Konferensi tersebut adalah untuk memperkuat peran Ulama dalam menjaga perdamaian, pembangunan, penghargaan kepada hak asasi manusia, dan cinta kepada kemanusiaan. Adapun tujuan khusus dari Konferensi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Memperbaharui komitmen anggota NUA baik laki-laki maupun perempuan, untuk bekerja menjaga perdamaian di Afghanistan;
- b. Memberikan kesempatan kepada Ulama Afghan untuk bertukar pandangan dan keahlian dengan Ulama dari Indonesia;
- c. Memperluas peran Ulama dalam perdamaian, pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia dalam koridor ajaran Islam dan konstitusi Afghanistan;
- d. Bekal bagi anggota NUA untuk melakukan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik di level Provinsi;
- e. Memperdalam pemahaman terhadap 5 prinsip NUA: Moderasi, Keadilan Sosial, Toleransi, Seimbang dan Partisipasi;
- f. Memperkenalkan program-program NUA kepada Pemerintah Republic Islam Afghanistan, masyarakat madani, komunitas internasional dan partai politik.

Konferensi menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing dan membahas topik-topik seperti Persatuan antar Ulama, Peran Perempuan Muslim dalam Perdamaian, Islam Moderat, Keadilan Sosial dalam Masyarakat Islam, dan Peningkatan Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia di

Komunitas Muslim, khususnya di kawasan konflik. Konferensi juga menghadirkan 2 (dua) pembicara asal Indonesia yakni: (i) Bapak Dr. Abdul Ghofur, MA, Wakil Katib Syuriah PBNU, dan (ii) Bapak DR. Muhammad Suaib Tahir, MA, Staf Satgas Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Sadan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kedua pembicara asal Indonesia membahas tentang peran Ulama di Indonesia dalam Perdamaian dan Kesatuan bangsa, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam masyarakat Muslim dan bagaimana menghadapinya serta bagaimana pandangan Islam terhadap Hak-hak Asasi Manusia.

Perwakilan NUA dari tiap-tiap provinsi juga diberikan kesempatan untuk mempresentasikan kegiatan dan upaya yang telah dilakukan di tingkat daerah dalam menyebarkan nilai dan prinsip Islam yang *rahmatan lili 'alamin*. Perwakilan NUA provinsi melakukan tukar pikiran dan berbagi pengalaman 7 terkait dengan upaya penyebaran nilai-nilai Islam yang moderat dalam mendorong perdamaian dan rekonsiliasi di Afghanistan yang didasari oleh prinsip-prinsip utama seperti Moderat (Attawasot), Keadilan (Al-Adalad), Seimbang (Attawazon), Toleransi, (Attasamoh), dan Partisipasi (Al-Musharaka).

Pada hari kedua Konferensi juga dilakukan seleksi kepemimpinan NUA yang baru untuk periode 2017-2018. Pemilihan dilakukan dengan sistem *voting* dimana terdapat 4 (empat) kandidat dari Provinsi berbeda yang mencalonkan diri. Empat kandidat tersebut antara lain adalah: (i) Mr. Sayed Salahuddin Hashemi, (ii) Mr. Dr. Muhammad Sulaiman Nesary, (iii) Mr. Muhammad Sarwar Sarwari, dan (iv) Mr. Ahmad Noor Waqef.

Hasil pemungutan suara (berjumlah 118 suara) oleh para peserta Konferensi berjalan dengan sangat lancar dan memenangkan kembali Ketua NUA Petahana, Mr. Sayed Salahuddin Hashemi, sebagai Ketua NUA untuk periode 2017-2018. Seluruh peserta Konferensi berharap bahwa kepemimpinan baru NUA tersebut akan membawa semangat baru bagi pergerakan NUA ke depan dalam menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi di Afghanistan.

Pada akhir kegiatan dibacakan kembali *Final Statement* dari Konferensi NUA 2107 yang berisikan 10 poin antara lain sebagai berikut:

- a. NUA merupakan organisasi non-profit, non-politis dan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan dan bertujuan untuk mencerahkan pandangan bersama, terutama generasi baru di Afghanistan untuk melindungi nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan serta berkontribusi pada proses perdamaian dan memastikan integritas dan kedaulatan negara;
- b. NUA menganggap perdamaian yang langgeng dan hidup berdampingan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi Afghanistan dan sangat serius untuk mewujudkan hal tersebut;
- c. NUA menghargai pengorbanan kepolisian maupun tentara nasional dan berkewajiban untuk mendukung mereka;
- d. NUA mengutuk keras segala tindakan teror dan akan berupaya melawan segala macam bentuk ekstremisme;
- e. NUA menghargai tindakan seluruh institusi nasional maupun internasional yang bekerja mengedepankan perlindungan kepada nilai-nilai agama dan kepentingan nasional di Afghanistan;
- f. NUA mengutuk segala bentuk tindak pelanggaran hak asasi manusia dan berkomitmen untuk menghapus pelanggaran hak asasi manusia;
- g. NUA berkomitmen untuk melakukan pemberdayaan terhadap Ulama dan para pemimpin agama tanpa adanya diskriminasi atau afiliasi politik;
- h. NUA berkomitmen untuk memberantas segala macam bentuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang;
- i. NUA mendukung Republik Islam Afghanistan untuk mengimplementasikan proyek-proyek pembangunan di Afghanistan berdasarkan Konstitusi Nasional; dan

- j. NUA menekankan komitmen mereka terhadap artikel-artikel dari pernyataan akhir yang terdiri dari 10 poin ini.

3. Konferensi Tahunan Nahdhatul Ulama Afghanistan (NUA) 2018.

Pada tanggal 11-12 Agustus 2018, KBRI Kabul bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Nahdhatul Ulama Afghanistan (NUA) menyelenggarakan Konferensi Tahunan NUA ke-7, bertempat di Gedung ASSA 2, Kabul, Afghanistan. Konferensi dihadiri oleh 100 (seratus) peserta anggota NUA dari seluruh provinsi di Afghanistan (32 provinsi). Konferensi yang terdiri atas 2 (dua) hari ini dibagi menjadi beberapa sesi yang dihadiri oleh panel pembicara yang berkompeten dibidangnya dan dikenal luas di Afghanistan. Dalam sesi pembukaan, Dubes LBBP RI Kabul menyampaikan beberapa hal penting sebagai berikut:

- a. Pemri dan KBRI Kabul menghargai langkah-langkah organisasi NUA di bawah kepemimpinan **Maulana Sayed Salahuddin Hashemi** pada periode tahun 2017-2018 dengan upayanya mewujudkan penegakan Islam sebagai ***rahmatan lili alamin*** di Afghanistan, sesuai dengan ajaran-ajaran Nahdhatul Ulama di Indonesia.
- b. Ulama memiliki peran besar dalam masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Ulama merupakan pemimpin dalam masyarakat Afghanistan yang dapat menjadi motor penggerak perubahan dan membentuk *mindset* masyarakat secara umum.
- c. Indonesia memiliki komitmen besar bagi kemajuan Afghanistan dalam berbagai bidang. Peran Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Ulama Trilateral Indonesia, Afghanistan dan Pakistan pada Mei 2018 telah menjadi awal Bergeraknya kesadaran terhadap peran ulama dalam perdamaian dan *peacebuilding*, dimana upaya Indonesia ini diikuti oleh pertemuan-pertemuan ulama di Afghanistan dan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya.

- d. Dalam upaya perdamaian, Indonesia akan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan salah satu fokusnya adalah perjuangan menuju perdamaian dengan *Afghan-led* dan *Afghan-own process*.

Pembicara lain dalam Konferensi Tahunan NUA ini terdiri atas cendekiawan dan ulama yang dikenal luas di Afghanistan, diantaranya H.E. Ahmadi Sulaiman (Wakil Menteri Urusan Haji Republik Islam Afghanistan/RIA), Mr. Ubburi dari *High Peace Council* Afghanistan, Abdul Hakim Mojahid, Dr. 7 M. Ayaz Neyazee, Ahmad Noor Waqif, dan tokoh-tokoh lain. Tema yang diambil untuk Konferensi Tahunan NUA kali ini adalah Peran Ulama dalam Perdamaian, Pembangunan dan Ekonomi (*Role of Ulama in Durable Peace, Development and Economy*). Isu-isu yang dibawakan oleh para panelis meliputi bahasan tentang peran ulama dalam berbagai bidang kehidupan, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Afghan, sampai dengan peranan kaum wanita dalam perdamaian dan rekonsiliasi Afghanistan.

Nahdhatul Ulama Afghanistan merupakan organisasi kemasyarakatan yang diilhami oleh peranan organisasi Nahdhatul Ulama di Indonesia yang mengedepankan 5 (lima) pokok ajaran yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat Afghanistan, yakni toleransi, moderat, partisipatif, berkeadilan, dan berkeadilan. NUA telah berhasil untuk menghimpun tokoh-tokoh ulama dengan visi yang sama dari berbagai provinsi di Afghanistan.

4. Trilateral Ulama Conference Afghanistan–Pakistan–Indonesia, tanggal 12 Mei 2019.

Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Trilateral Ulama Conference antara Afghanistan, Pakistan dan Indonesia pada 12 Mei 2019 bertempat di Istana Bogor yang menghasilkan berbagai poin diantaranya:

- a. *Islam is a religion of peace, tolerance, and ai'tidal (Ar.). The word of Islam derives from the root word of sa/eema (Ar.)*

- which means peace or salvation. The true believers of Islam are bound and must project the quality of mercy and compassion.*
- b. The core message of Islam is centred upon the principle of peace, mercy and compassion. We, therefore, support Paigham-e-Pakistan, Afghan declarations and other peace initiatives about peace in Afghanistan by the U/ema from Islamic World which favour peace, Islamic brotherhood, and denouncing violence and terrorism.*
 - c. Peace is the commandment of Allah and Muslims have an obligation to follow this injunction in their lives in Jetter and spirit. All conflicts and disputes among Muslims should therefore be resolved in the light of Qur'an and Sunnah. We the ulema, therefore appreciate and support the offer of the Government of Islamic Republic of Afghanistan as announced by President Ashraf Ghani during the Kabul Peace Process, February 2018 for peace and reconciliation in Afghanistan. We also appreciate regional countries, Islamic world and the international community for expressing their full support to Afghan Peace Process.*
 - d. We take note of conducive environment for peace in Afghanistan and call upon all sides to join direct peace talks, as peaceful deliberation is enshrined in the Holy Qur'an, titled "The Consultation" (As-ShuraaJ (Ar.), and as hinted in the verse 38th that Consultation is among the virtues of the faithful believers.*
 - e. As the heirs of Allah's Messengers, and as authoritative voice in interpreting the Quran and Hadith, the U/ema play pivotal role in Muslim communities to uphold the true nature of Islam (the true legacy of Prophet Muhammad, PBUH) as Rahmatan Lil 'Alaamin. The U/ema therefore bear this huge amanah (Ar.) on their shoulder to preserve high moral principles and promote Ukhuwah Islamiyah and Ukhuwah Insaniyah.*
 - f. The Ulema being the Waratsatul Anbiya (Ar.), have the obligations to promote Islam's universal values of peace,*

tolerance, social justice and Ai'tidal, as well as encourage the adoption of these principles as benchmarks and guiding principles.

- g. Ulema of the Islamic Ummah, especially from countries like Indonesia, Afghanistan and Pakistan, having a deeper understanding of the difficult challenges facing the Muslim countries, can play an active role in promoting peace and solidarity in the Muslim world, especially in Afghanistan.*
- h. Ulema's abled guidance and discourse based on the injunctions of the Holy Qur'an and examples set by the Holy Prophet Mohammad, PBUH, whereby he always preferred to adopt the 'middle course' (Wasath) (Ar.) in life, is the best course to set the direction right for the Muslims. As ordained by Rasulullah PBUH (Al-Bukhari Vol. 8, hadith 470) "Do good deeds properly, sincerely and moderately; Always adopt a middle, moderate regular course, whereby you will reach your goal (of paradise)".*
- i. We reaffirm that violence and terrorism cannot and should not be associated with any religion, nationality, civilization, or ethnic group, as violent extremism and terrorism in all its forms and manifestations including violence against civilians and suicide attacks, are against the holy principles of Islam.*
- j. As one family of Ummah, we support an inclusive peace process and stand ready to contribute constructively to the process, while recognizing various efforts and peace offers to find viable solutions for peace in Afghanistan. As stipulated in in the following Nas (Ar.): • Quran (Al Hujuraat:10): "The believers are nothing but brothers, so make peace between two brothers and beware of Allah that perhaps you may be shown mercy". • Hadith at Tirmidzi "Shall I not tell you of something that is better than fasting, prayer and charity?" They said: Yes. He said: "Reconciling between two people, for the corruption of that which is between the hearts is the shaver (destroyer)". • Hadith of Rasulullah PBUH Him that the parable of the*

believers in their affection, mercy, and compassion for each other is that of a body. When any limb aches, the whole body reacts with sleeplessness and fever (Sahih Bukhari 5665 and Sahih Muslim 2586).

- k. *In this regard, we support the important role of U/ema of Afghanistan, Indonesia, and Pakistan in promoting peace, harmony and brotherhood among the Ummah in the light of Islamic teachings based on Qur'an and Sunnah.*
- l. *We conclude by presenting our highest appreciation to the Government of the Republic of Indonesia for its sincere support to initiate a process of cooperation amongst the Ulema of the three countries and the Islamic world.*

Pemberitaan media di Afghanistan pada tanggal 11 - 13 Mei 2018 terkait pelaksanaan *Trilateral Ulama Conference* Afghanistan-Pakistan-Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Juru Bicara *High Peace Council* (HPC), Ehsanullah Taheri, menyatakan bahwa pertemuan ulama tiga negara dinilai sangat penting untuk proses perdamaian di Afghanistan. Seperti yang diberitakan Tolo News (11/05), deklarasi pertemuan menghasilkan kesepakatan bahwa tidak ada agama yang membenarkan tindakan terorisme dan ekstrimisme. Semua kegiatan terorisme melanggar ajaran agama Islam. Para ulama menegaskan bahwa Islam adalah agama damai dan harus dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Ulama ketiga negara mendukung perdamaian yang ditawarkan oleh Pemerintah Afghanistan kepada Taliban yang bertujuan untuk menyelesaikan perang di Afghanistan yang dicanangkan pada konferensi "*Kabul Process*" bulan Februari 2018 lalu. Para ulama juga meminta semua pihak untuk meletakkan senjata mereka dan memulai perundingan damai.
- b. Tolo News juga melaporkan bahwa *Trilateral Ulama Conference* di Bogor menuai berbagai tanggapan dari anggota Parlemen (Wolesi Jirga). Anggota Parlemen dari

Kota Kabul, Sayed Ali Kazemi mengatakan bahwa serangan born bunuh diri harus diberikan fatwa haram. Anggota Parlemen lainnya, Bashir Ahmad Tahyani, mengatakan bahwa pertemuan ulama di Indonesia hanya simbolik dan tidak dapat membantu proses perdamaian, kecuali langkah serius diambil langsung oleh Taliban dan ISIS. Anggota Parlemen lain, Ali Alizada, mengatakan bahwa pertemuan trilateral ini tidak akan dapat menghentikan perang di Afghanistan.

- c. Sebelumnya, pada tayangan berita Tolo TV tanggal 11 Mei 2018 pukul 20.00, reporter Tolo TV menyampaikan bahwa sebelum dilaksanakan pertemuan ulama trilateral tersebut, Pemri telah melakukan pertemuan dengan Perwakilan Taliban di Dhoha, Qatar.
- d. Berita di 1TV melaporkan bahwa 20 ulama Afghanistan dan 18 ulama Pakistan menghadiri pertemuan ulama trilateral di Indonesia untuk mendesak semua pihak agar mengakhiri konflik di Afghanistan dan bersedia berunding secara damai. Deklarasi yang dikeluarkan pada pertemuan tersebut mendukung penuh tawaran perdamaian yang ditawarkan oleh Presiden Ghani kepada Taliban. Deklarasi menegaskan bahwa perdamaian adalah perintah dari Allah dan umat Muslim berkewajiban untuk mengikuti perintah tersebut dalam kehidupan mereka. 1TV memberitakan bahwa tidak ada fatwa khusus ditujukan kepada Taliban.
- e. Khaama Press (11/05) memberitakan bahwa pertemuan ulama tiga negara Pakistan-AfghanistanIndonesia mendukung penuh proses perdamaian yang ditawarkan oleh Pemerintah Afghanistan. Deklarasi pertemuan ulama tersebut mendesak Taliban untuk menerima tawaran dari Pemerintah Afghanistan dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi. Kelompok Taliban belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai pertemuan ulama tersebut.

- f. Afghanistan *Times* melaporkan bahwa 20 ulama Afghanistan menghadiri Pertemuan Ulama Trilateral di Indonesia yang dipimpin oleh Mualvi Qeyamuddin Kashaf di tengah penolakan kelompok Taliban yang mendesak ulama Pakistan agar memboikot pertemuan tersebut. Selain itu, Pemerintah Afghanistan mengucapkan terima kasih kepada Indonesia yang telah aktif dalam proses rekonsiliasi Afghanistan.
- g. Laporan *Daily Time* (08/05) menyatakan bahwa Taliban Afghanistan telah mengirim surat kepada ulama Pakistan yang ditujukan kepada Majelis Ulama Pakistan yang meminta ulama Pakistan untuk memboikot konferensi ulama internasional. Taliban Afghanistan meminta agar ulama tidak menyalahgunakan nama ulama untuk membenarkan invasi orang-orang kafir di Afghanistan. Taliban mendesak kepada para peserta pertemuan tersebut seharusnya mengutuk invasi asing jika mereka mau jujur tentang resolusi perdamaian. Surat Taliban tersebut ditujukan kepada Ketua Majelis Ulama Pakistan.
- h. Berita media Pajhwok (12/05) melaporkan bahwa Pemerintah Afghanistan menyambut baik deklarasi ulama tiga negara yang diadakan di Bogor. Para Ulama meminta seluruh Muslim di dunia untuk memainkan peran mereka dalam memberantas kekerasan, ekstrimisme dan terorisme di Afghanistan. Pernyataan dari Istana Kepresidenan menyebutkan bahwa perdamaian di Afghanistan adalah perintah Allah. Presiden Ghani jga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Indonesia yang telah mengadakan konferensi bersejarah tersebut.
- i. Pertemuan Ulama tiga negara di Indonesia disambut baik oleh sebagian besar masyarakat Afghanistan. Salah satunya bernama Samiullah, warga kota Kabul, yang menyatakan optimis terhadap peran aktif para tokoh agama dalam perdamaian di Afghanistan. Farooq Hasnat, pengamat politik internasional, seperti yang diberitakan VoA, mengatakan

bahwa kelompok teroris menggunakan agama untuk membenarkan tindakan mereka. Adanya fatwa dari mayoritas ulama akan berdampak positif dalam mencegah penggunaan agama dalam tindakan kekerasan mereka. Hussain Vasa, redaktur *Outlook News Afghanistan*, mengatakan bahwa Taliban juga memiliki ulama yang menjabat posisi strategis dalam struktur organisasi mereka tetapi merekalah yang mendorong militansi kekerasan.

10.2 Kerjasama RI-Afghanistan Bidang Pendidikan.

10.2.1 Beasiswa Darmasiswa RI.

1. Beasiswa Darmasiswa RI TA 2017/2018.

Melalui Surat No. 75740/A1 .4/LN/2016 tanggal 13 Desember 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah kembali menawarkan Program Beasiswa Darmasiswa RI TA 2017/2018. Kuota untuk Afghanistan adalah sebanyak 3 (tiga) orang dan terdapat sebanyak 59 perguruan tinggi yang menjadi tempat penyelenggaraan perkuliahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, KBRI Kabul telah mengirimkan nota diplomatik Nomor 022/PEN/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang ditujukan kepada: (i) Direktorat Jenderal Hubungan Kebudayaan, Kemlu Afghanistan, (ii) Kementerian Pendidikan Afghanistan, dan (iii) Kementerian Pendidikan Tinggi Afghanistan.

Mengingat pengalaman sebelumnya, masalah pengadaan tiket pesawat (pergi-pulang) bagi peserta akan menjadi kendala dalam menarik minat para kandidat. Oleh karena itu, KBRI Kabul, melalui Brafaks Kepala Perwakilan RI Kabul Nomor 8-00005/Kabul/170105, telah mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta untuk memfasilitasi tiket penerbangan (pulang-pergi) Jakarta- Kabul bagi para penerima beasiswa Darmasiswa 2017/2018. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespon dengan baik permintaan KBRI Kabul dan melalui Serita Faksimile Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar

Negeri, Kemendikbud, Nomor 1298/A 1.4/LN/2017, akan menyediakan fasilitas tiket penerbangan kepada 3 (tiga) penerima beasiswa Darmasiswa 2017/2018 asal Afghanistan.

Berbeda dengan penerimaan Beasiswa Darmasiswa RI pada tahun-tahun sebelumnya, proses registrasi peminat dilakukan secara *online* melalui *darmasiswa.kemdikbud.go.id* atau *apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id* yang ditutup pada tanggal 9 Februari 2017. Melalui surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kemendikbud, Nomor 737 4/A 1.4/LN/2017 tertanggal 3 Februari 2017, masa tenggat waktu pendaftaran *online* diperpanjang menjadi tanggal 25 Februari 2017. Perpanjangan waktu tersebut memberi kesempatan yang lebih besar bagi para pelajar Afghanistan untuk mengikuti seleksi penerimaan beasiswa Darmasiswa 2017/2018. Per tanggal 25 Februari 2017, terdapat 140 peminat Beasiswa Darmasiswa 2017/2018 asal Afghanistan yang terdaftar secara *online*, namun hanya sekitar 28 orang yang melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan.

Informasi awal menyebutkan bahwa periode wawancara bagi peminat beasiswa Darmasiswa 2017/2018 dilakukan pada tanggal 26 Februari 2017 hingga 10 Maret 2017. Melalui surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kemendikbud, Nomor 16462/A 1.4/LN/2017 tanggal 3 Maret 2017, waktu pelaksanaan wawancara bagi peminat beasiswa Darmasiswa 2017/2018 diperpanjang hingga tanggal 19 Maret 2017.

Sebagai informasi, dari 28 orang yang telah mengirimkan dokumen yang disyaratkan, KBRI Kabul memanggil 23 orang diantaranya untuk melakukan proses wawancara yang dilakukan di ruang rapat KBRI Kabul. Berdasarkan data, peserta wawancara tidak hanya berasal dari Kota Kabul, namun juga ada yang berasal dari beberapa provinsi lainnya di Afghanistan seperti Herat, Balkh, Kandahar, Nangarhar dan Baghlan. Selain itu, KBRI Kabul menerima permohonan dari salah satu penerima Beasiswa Darmasiswa 2016/2017, an. Mushtaq Hussain Sarwari, yang saat itu masih menjalankan programnya di Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI)

Bandung, untuk mengikuti program seleksi Beasiswa Darmasiswa 2017/2018. Permohonan tersebut disampaikan melalui surat rekomendasi Dosen Darma Siswa Mata Kuliah Kacapi dan Suling serta diketahui oleh Kepala Prodi Seni Karawitan ISBI Bandung, Nomor 076/IT8/PP.02.00/2017 tanggal 6 Februari 2017. KBRI Kabul telah meminta konfirmasi terkait hal tersebut kepada pihak Sekretariat Darmasiswa di Jakarta dan mereka memberikan konfirmasi bahwa peserta tersebut dapat mengikuti kembali seleksi penerimaan beasiswa Darmasiswa periode 2017/2018, namun tidak melalui jalur *online*.

Panelis wawancara terdiri dari 3 orang yakni PF Politik dan PF Ekopensosbud KBRI Kabul dan satu orang penterjemah. Penilaian pada wawancara dilakukan dengan memperhatikan 4 (empat) komponen penilaian, yakni:

- a. Penguasaan Bahasa Indonesia;
- b. Penguasaan Bahasa Inggris;
- c. Pengetahuan Dasar mengenai Studi yang dipilih;
- d. Komitmen Menyelesaikan Studi; dan
- e. Komitmen Kontribusi setelah Menyelesaikan Studi.

Dari 23 orang yang diwawancarai, KBRI Kabul merekomendasikan 3 (tiga) orang peserta asal Afghanistan kepada Sekretariat Beasiswa Darmasiswa. 3 (orang) tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hamid ur Rahmad Himat
- b. Sayed Rahman Himad
- c. Mushtaq Hussain Sarwari

Melalui surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, No. 24289/A 1.4/LN/2017 mengenai Pengumuman Hasil Seleksi Program Darmasiswa RI T.A. 2017/2018, Sekretariat Beasiswa Darmasiswa telah mengumumkan bahwa mereka telah melaksanakan proses seleksi terhadap 1087 calon peserta dari 95 negara dan yang dinyatakan lulus sebanyak 710 peserta. Namun, dari daftar peserta yang lulus tersebut **tidak ada** satupun peserta asal Afghanistan.

Terkait hal tersebut, KBRI Kabul telah menghubungi pihak Sekretariat Darmasiswa RI dan meminta keterangan kepada mereka mengenai alasan tidak lulusnya peserta asal Afghanistan.

Pihak Sekretariat Darmasiswa RI menjelaskan beberapa hal terkait tidak lulusnya peserta asal Afghanistan pada tahap seleksi Universitas. Mereka menjelaskan bahwa kedua peserta asal Afghanistan yakni (i) Hamid ur Rahmad Himat dan (ii) Sayed Rahmad Himad kebetulan memilih Universitas Indonesia dan Universitas Katolik Soegipranata Semarang yang merupakan Universitas favorit dan kedua Universitas tersebut membatasi penerimaan peserta beasiswa. Selain itu, kedua peserta tersebut juga hanya mendaftarkan pilihan pertama tanpa mengisi pilihan kedua, sehingga kesempatan mereka semakin kecil.

Sehubungan dengan hal tersebut, KBRI Kabul menanyakan apakah masih ada kemungkinan bagi mereka untuk mengikuti program Beasiswa Darmasiswa RI tahun 2017/2018. Pihak Sekretariat Darmasiswa RI menjelaskan bahwa peserta Afghanistan masih memungkinkan untuk mengikuti program Beasiswa Darmasiswa tahun ini, apabila terdapat penerima beasiswa yang mengundurkan diri dari program Beasiswa Darmasiswa RI T.A. 2017/2018.

Melalui brafaks Kepala Perwakilan RI Kabul No. B-00141/KABUL/170531 tanggal 31 Mei 2017 kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (PKLN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, KBRI Kabul mengajukan kembali 2 (dua) nama calon kandidat penerima Beasiswa Darmasiswa Tahun Akademik 2017/2018 asal Afghanistan atas nama (1) Hamid ur Rahman Himat, dan (2) Sayed Rahmad Himad. Melalui brafaks dimaksud, KBRI Kabul mengusulkan kedua nama tersebut ke Universitas Telkom Bandung untuk Program Bahasa Indonesia.

Sebagai balasan brafaks tersebut, melalui Serita Kepala Biro PKLN, Kemdikbud RI No. 37289/A1.4/LN/2017 tanggal 12 Juni 2017, Biro PKLN menyampaikan persetujuan kedua nama kandidat asal Afghanistan: (1) Hamid ur Rahman Himat, dan (2) Sayed Rahman

Himad sebagai calon peserta Darmasiswa 2017/2018 untuk belajar Bahasa Indonesia di Universitas Telkom Bandung. Pihak Biro PKLN menyampaikan bahwa calon peserta diharuskan untuk melakukan konfirmasi keikutsertaan dalam program Darmasiswa 2017/2018 melalui akun pendaftaran online yang bersangkutan.

Melalui berita tersebut pula disampaikan bahwa usulan perpanjangan beasiswa a.n. Mushtaq Hussain Sarwari tidak diterima baik oleh Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung karena kuota sudah penuh. Berdasarkan informasi tersebut, melalui brafaks nomor B-00152/Kabul/170615, KBRI Kabul kembali mengajukan nama kandidat calon peserta Beasiswa Darmasiswa 2017/2018 atas nama **Mohammad Samim Ahmadi** ke Universitas Komputer Indonesia pada Program Bahasa Indonesia.

Melalui surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 38614/A1.4/LN/2017, tertanggal 19 Juni 2017, Biro PKLN menyampaikan bahwa kandidat an. Mohammad Samim Ahmadi ke Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung, tidak dapat diterima di Lembaga tersebut karena kuota telah penuh. Sebagai pengganti, Biro PKLN menginformasikan bahwa lembaga yang siap menerima yang bersangkutan adalah IKIP Budi Utomo Malang, untuk program Bahasa Indonesia.

Satu kandidat asal Afghanistan an. Hamid ur Rahman Himat yang sekiranya akan belajar di Universitas Telkom Bandung, menyatakan pengunduran dirinya dari program Beasiswa Darmasiswa 2017/2018 karena alasan keluarga. Dengan demikian, terdapat 2 (dua) orang kandidat penerima beasiswa Darmasiswa T.A. 2017/2018 asal Afghanistan yakni: (i) Sayed Rahman Himad dan (ii) Mohammad Samim Ahmadi. Menindaklanjuti informasi tersebut, KBRI Kabul segera memproses visa kunjungan budaya bagi kedua kandidat penerima beasiswa Darmasiswa tersebut.

Pada tanggal 29 Agustus 2017, kedua orang penerima beasiswa Darmasiswa RI T.A. 2017/2018 telah tiba di Jakarta dan mengikuti

orientasi di Hotel Gran Sahid Jakarta selama dua hari yakni 30-31 Agustus 2017. Sejak tanggal 1 September 2017, kedua penerima beasiswa Darmasiswa RI T.A. 2017/2018 telah berangkat ke universitas masing-masing di Bandung dan Malang.

2. Beasiswa Darmasiswa RI TA 2018/2019.

Melalui brafaks No. B-10531/KEMLU/171215 perihal Tawaran Program Beasiswa Darmasiswa RI Tahun Akademik 2018/2019 dan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kemendikbud No. 78737 /A 1.4/LN/2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah menawarkan Program Beasiswa Darmasiswa RI TA 2018/2019. Kuota untuk Afghanistan adalah sebanyak 2 (dua) orang dan terdapat sebanyak 72 perguruan tinggi yang menjadi tempat penyelenggaraan perkuliahan. Selain Afghanistan, tawaran beasiswa Darmasiswa juga diberikan kepada 172 negara lainnya. Pada akhirnya, mahasiswa peserta Beasiswa Darmasiswa bagi Afghanistan diperoleh sebanyak 3 orang.

Mengingat pengalaman sebelumnya, masalah pengadaan tiket pesawat (pergi-pulang) bagi peserta Afghanistan akan menjadi kendala dalam menarik minat para kandidat. Oleh karena itu, KBRI Kabul telah mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta untuk memfasilitasi tiket penerbangan (pergi-pulang) Kabul-Jakarta-Kabul bagi para penerima beasiswa Darmasiswa 2018/2019. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menanggapi dengan baik permintaan KBRI Kabul dan melalui Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kemendikbud, Nomor 9132/A 1.4/LL/2019 akan menyediakan fasilitas tiket penerbangan kepada 3 (tiga) penerima beasiswa Darmasiswa 2018/2019 asal Afghanistan.

Berbeda dengan penerimaan Beasiswa Darmasiswa RI pada tahun-tahun sebelumnya, proses registrasi peminat dilakukan secara *online* melalui *darmasiswa.kemdikbud.go.id* atau *apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id*. Setelah melakukan pendaftaran online, peserta melaksanakan wawancara yang dilakukan oleh KBRI

Kabul. Berdasarkan data, peserta wawancara tidak hanya berasal dari Kota Kabul, namun juga ada yang berasal dari beberapa provinsi lainnya di Afghanistan seperti Herat, Balkh, Kandahar, Nangarhar dan Baghlan. Penilaian pada wawancara dilakukan dengan memperhatikan 4 (empat) komponen penilaian, yakni:

- a. Penguasaan Bahasa Indonesia;
- b. Penguasaan Bahasa Inggris;
- c. Pengetahuan Dasar mengenai Studi yang dipilih;
- d. Komitmen Menyelesaikan Studi; dan
- e. Komitmen Kontribusi setelah Menyelesaikan Studi.

Dari hasil wawancara, KBRI Kabul merekomendasikan 4 (empat) orang peserta asal Afghanistan kepada Sekretariat Beasiswa Darmasiswa. Keempat orang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Maaz Safi
- b. Jamil Rizwan
- c. Mukhtar Hassan Poor
- d. Faisal Durani

Dalam perjalanan proses penerimaan, Faisal Durani menyatakan mengundurkan diri dari kepesertaan Beasiswa Darmasiswa TA 2018/2019. Pada tanggal 5 Oktober 2018, ketiga orang penerima beasiswa Darmasiswa RI T.A. 2018/2019 telah tiba di Jakarta dan telah berangkat ke universitas masing-masing di Jakarta, Medan dan Malang pada 6 Oktober 2018.

3. Beasiswa Darmasiswa RI TA 2019/2020

Pemerintah Indonesia melalui Kemlu cq Direktorat Diplomasi Publik dan Kemdikbud cq Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri telah menerima total 673 calon peserta Beasiswa Darmasiswa dari 195 negara. Lima orang diantaranya merupakan peserta dari negara Republik Islam Afghanistan.

Sebagai perbandingan, jumlah beasiswa Darmasiswa yang diterima tahun 2019 adalah 5 orang, lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 4 orang peserta dan akhirnya hanya 3 orang peserta yang berangkat menuju Indonesia untuk mengikuti program

beasiswa. Adapun data lengkap 5 (lima) peserta yang terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar Penerima Beasiswa Dharmasiswa RI TA 2019/2020.

No	Name	Universitas	Program Studi	Masa Studi
1.	Mohsen Arbabi	Universitas PGRI Semarang	Bahasa Indonesia	12 bulan
2.	Mohammad Zarif Safa Bakhtyari	STBA-LIA Jakarta	Bahasa Indonesia	10 bulan
3.	Hasibullah Atiqi	Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta	Seni / Budaya	10 bulan
4.	Abdul Qadir Hakimi	Universitas Muhammadiyah Malang	Bahasa Indonesia	10 bulan
5.	Aziza Akbari	IKIP Malang	Bahasa Indonesia	12 bulan

Mengingat pengalaman sebelumnya, masalah pengadaan tiket pesawat (pergi-pulang) bagi peserta Afghanistan akan menjadi kendala dalam menarik minat para kandidat. Oleh karena itu, KBRI Kabul juga mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta untuk memfasilitasi tiket penerbangan (pergi-pulang) Kabul-Jakarta-Kabul bagi para penerima beasiswa Darmasiswa 2019/2020. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyetujui melalui Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kemendikbud, akan menyediakan fasilitas tiket penerbangan kepada 5 (lima) penerima beasiswa Darmasiswa 2019/2020 asal Afghanistan. Akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyetujui pemberian tiket pesawat bagi penerima beasiswa Afghanistan. Seluruh peserta program Beasiswa Darmasiswa telah tiba di Indonesia pada bulan September 2019.

4. Beasiswa Darmasiswa RI TA 2020/2021.

Sebagaimana diketahui, selama tahun 2020 pandemi virus Covid-19 telah melanda hampir di seluruh dunia. Negara yang terkena dampak tersebut telah mengambil kebijakan menutup diri dari

masuknya orang asing, *lockdown*. Menyadari begitu luasnya dampak Covid-19, Pemerintah Indonesia cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang semula menawarkan beasiswa bagi negara berkembang melalui program Darmasiswa dan Kerjasama Negara Berkembang/KNB, pada bulan Juli 2020 Kemdikbud telah membatalkan kelanjutan program tersebut. Proses yang semula sudah berlangsung hingga proses pendaftaran calon penerima beasiswa terpaksa harus dihentikan oleh semua Perwakilan RI di luar negeri. Semua calon peserta dari Afghanistan berharap Pemerintah Indonesia dapat membuka kembali penawaran beasiswa, Darmasiswa dan KNB, pada tahun 2021.

5. Beasiswa Darmasiswa RI TA 2021/2022

Hingga bulan Mei 2021, KBRI Kabul belum menerima pemberitahuan resmi dari Pusat tentang adanya penerimaan beasiswa Darmasiswa RI untuk tahun 2021/2021.

10.2.2 Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB).

1. Beasiswa KNB TA 2017/2018.

Melalui brafaks Direktur Diplomasi Publik, Nomor B-10857/KEMLU/170307 tanggal 7 Maret 2017, telah disampaikan surat Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), No. 941/CS/KL/2017, tanggal 20 Februari 2017 perihal penawaran Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) tahun 2017. Jumlah beasiswa yang ditawarkan pada tahun 2017 adalah sebanyak 135 beasiswa untuk jenjang pendidikan S2 (pasca sarjana) dan 5 beasiswa untuk jenjang pendidikan S1 (sarjana) di 16 Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia.

Untuk mengikuti seleksi penerimaan beasiswa KNB tahun 2017, pelamar diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administrasi dan akademik serta melakukan pendaftaran secara daring melalui laman

www.knb.ristekdikti.go.id yang dibuka pada tanggal 1 Maret 2017 dan ditutup pada tanggal 30 Mei 2017. Laman tersebut dikelola bersama oleh 16 perguruan tinggi yang telah ditunjuk oleh Ditjen Kelembagaan Iptek-Dikti, yaitu sebagai berikut:

- a. Institut Pertanian Bogor;
- b. Institut Teknologi Bandung;
- c. Institut Teknologi Sepuluh November;
- d. Universitas Airlangga;
- e. Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- f. Universitas Diponegoro;
- g. Universitas Gadjah Mada;
- h. Universitas Indonesia;
- i. Universitas Katolik Parahyangan;
- j. Universitas Muhammadiyah Malang;
- k. Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- l. Universitas Negeri Malang;
- m. Universitas Negeri Yogyakarta;
- n. Universitas Padjajaran;
- o. Universitas Pendidikan Indonesia; dan
- p. Universitas Sebelas Maret.

Salah satu syarat yang harus disiapkan oleh pelamar adalah Surat Rekomendasi dari Perwakilan RI (Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal) di negara terkait, oleh karena itu KBRI Kabul selaku perwakilan RI di Afghanistan terlebih dahulu melakukan penelaahan atas permohonan Surat Rekomendasi tersebut oleh peserta. Penyelenggara beasiswa mengharapkan Perwakilan RI untuk memanfaatkan penawaran Beasiswa KNB secara maksimal (namun tidak terbatas) kepada calon mahasiswa potensial yang bekerja atau terafiliasi dengan institusi Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan bekerja di sektor pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi.

Pada akhir periode registrasi *online*, KBRI Kabul telah menerima sekitar 51 aplikasi dari pelamar beasiswa dan telah memberikan sekitar 48 Surat Rekomendasi kepada pelamar beasiswa tersebut.

Lamanya pemberian beasiswa KNB tergantung dari durasi program akademis yang diambil oleh peserta, seperti yang terlihat di bawah ini. Tabel 7. Durasi Lama Pemberian Beasiswa KNB.

No.	Program	Durasi
1.	Kursus Bahasa Indonesia dan Program Persiapan Pasca Sarjana	Maksimal 12 Bulan
2.	Program Pasca Sarjana	Maksimal 24 Bulan (4 Semester)
3.	Program Sarjana	Maksimal 48 Bulan (8 Semester)

Beasiswa akan dibayarkan untuk 12 bulan kalender per tahun akademis selama periode studi normal, kecuali pada tahun akademik akhir pada periode studi normal dimana beasiswa dibayarkan untuk 8 bulan saja. Sekiranya program diselesaikan lebih awal, seluruh pembayaran beasiswa akan dihentikan ketika penerima beasiswa kembali ke negara bersangkutan.

Beasiswa KNB merupakan beasiswa penuh yang memfasilitasi seluruh kebutuhan mahasiswa penerima beasiswa selama menjalani program pendidikan di Indonesia. Adapun biaya yang ditanggung oleh pihak penyelenggara adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Tunjangan Tempat Tinggal sebesar Rp. 1,000,000 ketika baru tiba di Indonesia;
- b. Selama menjalani kursus Bahasa Indonesia dan program persiapan, mahasiswa baru hanya akan menerima Tunjangan Hidup sebesar Rp. 2,550,000 per bulan;
- c. Selama masa Program Pasca Sarjana, mahasiswa penerima beasiswa KNB akan memperoleh skema tunjangan per bulan seperti di bawah ini:

Tabel 8. Besaran Tunjangan Beasiswa KNB.

No.	Tunjangan	Jumlah
1.	Tunjangan Hidup	Rp. 2.550.000,00-
2.	Tunjangan Penelitian	Rp. 400.000,00-
3.	Tunjangan Buku	Rp. 350.000,00-

- 1) Asuransi kesehatan diberikan maksimum sebesar Rp. 200,000 perbulan (seandainya biaya pengobatan melebihi jumlah tersebut, sisa biaya akan ditanggung oleh mahasiswa bersangkutan.
- 2) Tiket penerbangan pulang-pergi (kelas ekonomi) dari Afghanistan ke Indonesia, termasuk transportasi lokal ke lokasi perguruan tinggi.
- 3) Biaya lain diluar hal-hal yang dicantumkan di atas dianggap sebagai pengeluaran pribadi dan ditanggung oleh masing-masing mahasiswa.

Pengumuman hasil seleksi Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) T.A. 2017/2018 disampaikan pada tanggal 14 Juli 2017 melalui surat Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, nomor 4249/C5/KL/2017. Surat tersebut menyampaikan hasil seleksi penerima Beasiswa KNB tahun akademik 2017/2018 dengan hasil rincian sebagai berikut:

- a. 4 calon penerima Beasiswa KNB program Sarjana (S1);
- b. 136 calon penerima Beasiswa KNB program Pascasarjana (S2); dan
- c. 1 calon penerima Beasiswa KNB program BIPA dalam kerangka Kerja Sama RI - Hongaria. Adapun berdasarkan pengumuman tersebut terdapat 1 (satu) orang calon penerima Beasiswa KNB program Sarjana asal Afghanistan, an. Amin Gui Oriakhail yang diterima di Universitas Muhammadiyah Malang untuk program Teknik Sipil. Sehubungan dengan hal tersebut, KBRI Kabul telah menyampaikan informasi tersebut kepada yang

bersangkutan dan meminta yang bersangkutan untuk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan serta mengirimkan hasil pindaian Surat Pernyataan tersebut kepada pihak Sekretariat Beasiswa KNB, Universitas Muhammadiyah Malang, dan KBRI Kabul.

Sebagai informasi, calon penerima beasiswa KNB asal Afghanistan an. Amin Gui Oriakhail merupakan siswa penerima program Beasiswa Darmasiswa T.A. 2016/2017 di Politeknik Negeri Jakarta untuk program Bahasa Indonesia. Pada tanggal 30 Agustus 2017, penerima beasiswa KNB T.A. 2017 telah tiba di Jakarta.

2. Beasiswa KNB TA 2018/2019.

Beasiswa KNB ditawarkan melalui surat Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), No. 545/C5/KL/2018, tanggal 26 Januari 2018 perihal Penawaran Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Tahun Anggaran 2018. Jumlah beasiswa yang ditawarkan pada tahun 2018 adalah sebanyak 140 beasiswa untuk jenjang pendidikan S2 (Pasca Sarjana) dan 5 beasiswa untuk jenjang pendidikan S1 (Sarjana) di 16 Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia, sebagaimana tahun 2017.

Untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan beasiswa KNB tahun 2018 ini, para pelamar diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administrasi dan akademik serta melakukan pendaftaran secara daring melalui laman www.knb.ristekdikti.go.id. Banyak para peminat dari para remaja yang mengikuti seleksi penerimaan beasiswa KNB tahun 2018. Semangat belajar para remaja Afghanistan sangat tinggi dan mereka sangat tergugah untuk belajar agar dapat memperbaiki kondisi negaranya. Maka dari itu beasiswa yang ditawarkan melalui kerjasama antar kedua negara berkembang (Indonesia-Afghanistan) ini banyak yang mengambilnya.

Terdapat sembilan orang peminat beasiswa asal Afghanistan berhasil memperoleh beasiswa ini:

Tabel 9. Nama Peminat Beasiswa KNB TA 2018 Asal Afghanistan.

No	Nama	Universitas	Jurusan	Tingkat
1.	Malalai Ahmadzai	Universitas Muhammadiyah Malang	Hubungan Internasional	Sarjana
2.	Abdul Rafi	Universitas Negeri Malang	Manajemen	Sarjana
3.	Sayed Rahman	Universitas Negeri Malang	Teknik Informatika	Sarjana
4.	Mohammad Samim Ahmadi	Universitas Negeri Malang	Desain DAN Komunikasi Visual	Sarjana
5.	Shaukat Rahman	Universitas Negeri Malang	Pendidikan Ekonomi	Sarjana
6.	Ahmad Khalil Yaqubi	Universitas Indonesia	Fisika	Master
7.	Esmatullah Khyber	Institut Pertanian Bogor	Manajemen SDA dan Lingkungan	Master
8.	Parwiz Mosamim	Universitas Padjadjaran	Administrasi Negara	Master
9.	Sayed Momin Hashemi	Universitas Muhammadiyah Malang	Manajemen	Master

Pada tanggal 30 Agustus 2018, para penerima beasiswa KNB TA 2018 telah tiba di Jakarta.

3. Beasiswa KNB TA 2019/2020.

Pemerintah Indonesia melalui Kemlu cq Direktorat Diplomasi Publik menyampaikan pengumuman dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi hasil seleksi penerima Beasiswa KNB dimana total 120 calon mahasiswa diterima untuk Program Pasca Sarjana, dan 13 orang diterima untuk Program Sarjana. Enam orang calon penerima beasiswa program pascasarjana dan 7 orang penerima program sarjana diantaranya berasal dari Republik Islam Afghanistan.

Sebagaimana tahun sebelumnya, untuk mengikuti seleksi penerimaan beasiswa KNB tahun 2019, pelamar diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administrasi dan akademik serta melakukan pendaftaran secara daring melalui laman www.knb.ristekdikti.go.id.

Laman tersebut dikelola bersama oleh 16 perguruan tinggi yang telah ditunjuk oleh Ditjen Kelembagaan Iptek-Dikti.

Adapun 13 (tiga belas) orang pelamar beasiswa asal Afghanistan yang berhasil memperoleh beasiswa adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Nama pelamar Beasiswa KNB TA 2019.

No	Nama	Universitas	Jurusan	Tingkat
1.	Nesar Ahmad Sahibzada	Institut Teknologi Bandung	Visual Art	Master
2.	Mohammad Jamil Rizwan	Universitas Airlangga	Management	Master
3.	Mohammad Eqbal Amiri	Institut Teknologi Bandung	Urban Design	Master
4.	Maryam Asghari	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Information System	Master
5.	Zala Shinwari	Universitas Airlangga	Psychology	Master
6.	Zabihullah Rezaie	Universitas Gadjah Mada	Public Policy Management	Master
7.	Adiba Hakim Zada	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Informatics Engineering Education	Bachelor
8.	Ahmad Fayaz Naziry	Universitas Muhammadiyah Malang	Economic Development	Bachelor
9.	Ikramullah Qayyumi	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Information System	Bachelor
10.	Muhammad Younas Darvish	Universitas Negeri Malang	Information Technology	Bachelor
11.	Mohsen Samadi	Universitas Negeri Malang	Sports Trainer ship	Bachelor
12.	Meena Hakim Zada	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Informatics Engineering Education	Bachelor
13.	Hamed Stanikzai	Universitas Muhammadiyah Malang	International Relations	Bachelor

Jumlah ini merupakan jumlah terbanyak sepanjang penerimaan program Beasiswa KNB asal Afghanistan. Seluruh penerima beasiswa telah tiba di Indonesia pada bulan Agustus 2019.

4. Beasiswa KNB TA 2020/2021.

Sebagaimana diketahui, selama tahun 2020 pandemi virus Covid-19 telah melanda hampir di seluruh dunia. Negara yang terkena dampak tersebut telah mengambil kebijakan menutup diri dari masuknya orang asing, *lockdown*. Menyadari begitu luasnya dampak Covid-19, Pemerintah Indonesia cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang semula menawarkan beasiswa bagi negara berkembang melalui program Darmasiswa dan Kerjasama Negara Berkembang/KNB, pada bulan Juli 2020 Kemdikbud telah membatalkan kelanjutan program tersebut. Proses yang semula sudah berlangsung hingga proses pendaftaran calon penerima beasiswa terpaksa harus dihentikan oleh semua Perwakilan RI di luar negeri. Semua calon peserta dari Afghanistan berharap Pemerintah Indonesia dapat membuka kembali penawaran beasiswa, Darmasiswa dan KNB, pada tahun 2021.

5. Beasiswa KNB TA 2021/2022.

Pemerintah Indonesia cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali membuka penawaran beasiswa KNB TA 2021/2021. Total Perguruan Tinggi yang berpartisipasi adalah 23 (tahun sebelumnya 16 perguruan tinggi). Pendaftaran dibuka secara *online* mulai tanggal 10 Februari 2021 sampai 4 Mei 2021 dan peserta yang terpilih diharapkan tiba di Indonesia pada bulan Agustus 2021. Hingga bulan Mei 2021, proses penjangingan calon peserta beasiswa KNB 2021/2021 masih terus berlangsung.

10.3 Kerjasama Antar Perguruan Tinggi.

KBRI Kabul telah melakukan inisiatif kerjasama antar perguruan tinggi RI dan RIA, diantaranya adalah sebagai berikut:

Lembaga Pendidikan di Afghanistan	Lembaga Pendidikan di Indonesia	Bidang Kerja Sama
Khateb University	Universitas Yarsi	<ol style="list-style-type: none">1. Penjajakan kerja sama di bidang pertukaran mahasiswa dan tenaga pengajar2. Kerja sama dalam kurikulum dengan standar Internasional3. Kerja sama pengadaan alat-alat medis/kedokteran untuk studi dan Rumah Sakit di Afghanistan4. Rencana bantuan sosial bagi masyarakat Afghanistan di bidang medis, seperti operasi bibir sumbing, katarak dan bedah5. Rencana kerjasama di bidang pengiriman dokter dan perawat untuk Rumah Sakit yang dikelola Khateb University di Afghanistan
Kabul Polytechnic University	Belum Ada	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kapasitas pengajar2. Peningkatan laboratorium dengan teknologi modern3. Proyek-proyek penelitian4. Pembangunan gedung baru

Kardan University	UIN Syarif Hidayatullah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjajakan kerja sama di bidang pertukaran mahasiswa dan tenaga pengajar 2. Kerja sama dalam kurikulum dengan standar Internasional.
Kardan University	President University	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertukaran mahasiswa dan tenaga pengajar 2. Kesempatan beasiswa 3. Penelitian gabungan 4. Program magang 5. Pembelajaran Bahasa Indonesia dan Kebudayaan Indonesia 6. Kunjungan kampus 7. Pertukaran materi tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 8. Kuliah tamu, seminar dan pelatihan 9. Konferensi gabungan
Kabul-e-Masser Vocational Insitute	Darunnajah	<p>Kerja sama <i>sister-school</i>, dengan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertukaran kurikulum dan kegiatan 2. Pertukaran pelajar dan tenaga pengajar 3. Pembentukan kelas pelopor melalui komunikasi dan IT 4. Pembentukan kelompok kunjungan dan penggalangan dana 5. Fasilitas konferensi video 6. Penerapan best practice antara kedua sekolah

10.2.3 Program Capacity Building.

Pemerintah Indonesia memberikan secara rutin program *Capacity Building* dalam bentuk Pelatihan, Kursus, Workshop, dll, diselenggarakan di Indonesia. Program ini sering diikuti oleh Pejabat, PNS, pelajar dan *civil society* Afghanistan. Adapun catatan pemberian *capacity building* selama periode 2017 – 2021 adalah:

1. Program Capacity Building Tahun 2018.

- a. *Global Counter-Terrorism Forum Countering Violent Extremism (CVE) Working Group Monitoring and Evaluation Workshop*, 19-20 Februari 2018.
- b. *Training on Strategic Partnership with Muslim Religious Leaders in Family Planning*, 23-28 April 2018 di Jakarta dan Purworejo, bekerjasama dengan UN *Population Fund*.
- c. *International Training on Small and Medium-sized Enterprises for Asia Pacific Countries*, 22 April-1 Mei 2018 di Jakarta.
- d. *International Workshop on Infrastructure Development for Afghanistan*, Juni 2018, di Jakarta.
- e. *Training on Export and Import Procedure for Afghanistan Participants*, 7-9 Mei 2018 di KBRI Kabul, diberikan oleh Kementerian Perdagangan RI.
- f. *Capacity Building Program on Enhancing the Development of Small and Medium Industry Year 2018*, 5-15 Juli 2018, di Jakarta dan Bandung.
- g. *Sharing Best Practices on the Implementation of Child Friendly City in Indonesia*, 10-14 September 2018 di Solo, kerjasama antara KemenPPPA RI dan *Colombo Plan Gender Affairs*.
- h. *Kick-off Meeting on the Implementation of Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Afghanistan on the Empowerment and Protection of Women*, 9-11 Oktober 2018 di Jakarta, diselenggarakan oleh KemenPPPA RI.
- i. *Integrated Maternal Neonatal and Child Health Services with Maternal and Child Health (MCH) Handbook in 2018*, 28

Oktober-2 November 2018 di Lampung, diselenggarakan oleh Kemenkes bekerjasama dengan Pemerintah Jepang/Japan *International Cooperation Agency*. Materi pelatihan difokuskan untuk mendiskusikan hal-hal strategis terkait pengembangan Maternal and Child Health (MCH) Handbook dengan pendekatan kemitraan multi-stakeholders.

- j. *Training Program of Capacity Building for Diplomats of New Asia African Strategic Partnership (NAASP) Member Countries*, 26 November-3 Desember 2018 di Jakarta.

2. Program Capacity Building Tahun 2019.

- a. Kementerian Sekretariat Negara bersama *Colombo Plan Secretariat* menyelenggarakan Program *Capacity Building Program on Enhancing Development of Small and Medium Industry*, di Surabaya tanggal 2-13 Juli 2019. Kegiatan diselenggarakan atas kerjasama dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian. Pemerintah Afghanistan mengirimkan 2 (dua) orang peserta, yaitu (1) Mohammad Iqbal Zalmal, (2) Muhammad Musa Tarakhil.
- b. *7th Indonesian International Geothermal Convention and Exhibition* pada 13-15 August 2019 di Jakarta *Convention Center*.
- c. Kementerian Sekretariat Negara menjalin kemitraan dengan *Colombo Plan Secretariat* menyelenggarakan Program “*Sharing Best Practices on Women’s Economic Empowerment in Indonesia*” di Bali, tanggal 15-21 September 2019. Materi pelatihan difokuskan untuk pengembangan kapasitas aspek pengetahuan dan teknis implementasi, diutamakan calon peserta telah menduduki jabatan tingkat menengah atau senior-level manager. Pemerintah Afghanistan menominasikan 3 (tiga) orang peserta, yaitu (1) Ms. Marina Sarwari, *Staff of Directorate of Women Empowerment, Ministry of Women’s Affairs*, (2) Ms. Fahima Esar, *Staff of the Afghanistan Women Chamber of*

- Commerce and Industries*, (3) Ms. Nahid Hamidi, *Staff of the Afghanistan Women Chamber of Commerce and Industries*.
- d. Kementerian Sekretariat Negara bekerjasama dengan Pemerintah Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency (JICA)* mengadakan *International Training Program on the Strengthening of Maternal and Child Health Handbook Implementation in Collaboration with Professional Organizations* di Sulawesi Utara, Manado, tanggal 15-20 September 2019. Pemerintah Afghanistan mengirimkan 3 (tiga) orang peserta, yaitu (1) Dr. Mohammad Asef Kabir, *Grade 3/ Primary Health Care Officer, Directorate of Public Health of Herat Province*. (2) Ms. Farzana Fanee, *Grade 4/Pregnancy Health Officer, Directorate of Public Health of Faisabad, Badakhshan*, (3) Mr. Rahmatullah Sadid, *Grade 3/ Primary Health Care Officer, Directorate of Public Health of Parwan Province*.
- e. Kementerian Sekretariat Negara bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan mengadakan Kegiatan *Workshop on Cold Chain Vaccine Management*, di Bandung, tanggal 30 September - 3 October 2019. Pemerintah Afghanistan menunjuk 1 (satu) orang pejabat dari Kementerian Kesehatan Publik untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut yaitu Mr. Abdul Mateen Qahiri.
- f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Kementerian Sekretariat Negara dan GIZ menyelenggarakan kegiatan *Second Workshop on Women Economic Empowerment for Afghanistan: Toward the Drafting of Concept(s) on the Economic Empowerment of Women in Afghanistan*, yang berlangsung di Mataram, Nusa Tenggara Barat tanggal 4-9 November 2019. Kegiatan ini merupakan lanjutan kegiatan serupa di Yogyakarta pada bulan Juli 2019. Kegiatan ini diikuti oleh 5 orang Afghanistan, yaitu (1) Spozgmai Wardak (*Deputy Minister of MoWA for Technical and Policy, Head of Delegation*), (2) Halima Pakhtiani (*Director for Women Empowerment MoWA*), (3) Gulrukh Badkshi (*Head of Legal*

Affairs Department MoWA), (4) Gulali Noor Safi (*Director of Samangan Province MoWA*), (5) Sultana Amani (*Senior Adviser of Agriculture, focal point*).

- g. Pada bulan November 2019, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI menyelenggarakan “*Dialogue between Women of Afghanistan: Bridging the Gap and Sharing Experience*” yang berlangsung di Jakarta dan dibuka secara resmi oleh Menteri Luar Negeri RI tanggal 29 November 2019. Dialog Perempuan Afghanistan merupakan implementasi komitmen Indonesia dalam mendukung proses perdamaian di Afghanistan yang mengedepankan keterlibatan peran perempuan sebagai agen perdamaian. Kegiatan diikuti oleh 38 orang peserta perwakilan perempuan dari berbagai latar belakang dan daerah serta dipimpin oleh Menteri Informasi dan Kebudayaan Afghanistan, Y.M. Hasina Safi. dilengkapi juga dengan kegiatan *capacity building* tanggal 27, 28 dan 30 November 2019 diikuti oleh peserta Afghanistan yang berasal dari daerah/provinsi. Dalam Dialog Perempuan Afghanistan, Pemerintah Indonesia menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain: Prof. Nazaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal), Siti Ruhaini Dzuhayatin (Tim Komunikasi Mensesneg), Yenny Wahid (Direktur *Wahid Foundation*), dan Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yango (Ketua Bidang Fatwa MUI).
- h. Program *Capacity Building* Pendidikan dan Pelatihan Bidang ESDM untuk Afghanistan dalam upaya diplomasi *peacebuilding* RI di Afghanistan, Pemri dhi. Sekretariat Wakil Presiden, Kemenlu dan Kernen ESDM telah merencanakan untuk memberikan bantuan diklat bidang ESDM bagi pegawai di Ministry of Mines and Petroleum, RIA. Diklat akan dilakukan di pusat pelatihan Kementerian ESDM RI kota Cepu dan Bandung dalam 6 buah kursus terpisah bagi 100 orang pegawai dengan periode diklat berbeda-beda, dari 1 bulan sampai dengan 4 bulan. Namun demikian, beberapa masukan dan masalah

terkini terkait penyelenggaraan diklat kemudian muncul ke permukaan, baik dari sisi Pemri maupun Pemerintah Afghanistan sebagai berikut:

- 1) Sehubungan dengan masalah pengurusan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang masih dalam proses, Pemri menyatakan mengundurkan pelaksanaan diklat sampai dengan bulan Agustus 2019. Pemerintah Afghanistan, c.q. MoMP dapat menerima penjelasan pengunduran pelaksanaan program bagi persiapan yang lebih baik di kedua belah pihak.
- 2) MoMP menyampaikan komitmen untuk tetap mengirimkan 100 (seratus) orang pegawainya untuk mengikuti seluruh 6 (enam) bidang kursus.
- 3) Terkait pengiriman peserta, MoMP menekankan terhambatnya kinerja organisasi yang akan dialaminya jika pengiriman peserta dilakukan secara serentak untuk 100 (seratus) orang peserta sekaligus, disebabkan kurangnya SDM yang handal untuk menangani pekerjaan sehari-hari. Sehubungan hal tersebut, MoMP menyampaikan permohonan pengaturan diklat dan pengiriman peserta sebagai berikut:
 - a) MoMP mengusulkan agar pengiriman *batch* pertama peserta dilakukan untuk 30 (tiga puluh) orang peserta yang mengikuti pembukaan dan kursus *Mining Economy Feasibility Courses* dan *Coal and Mineral Mining Policy Courses* dengan jangka waktu kursus 1 (satu) bulan.
 - b) MoMP akan menyampaikan daftar nama berikutnya untuk *batch* kedua pengiriman peserta dalam waktu dekat. Terkait terhambatnya kinerja organisasi MoMP, berikutnya MoMP mengusulkan dipersingkatnya waktu kursus untuk diklat dengan periode lebih dari 1 (satu) bulan, sebagai contoh: untuk kursus yang memakan waktu 4 (empat) bulan dipersingkat menjadi 2 (dua) bulan atau 2 (dua) bulan setengah, dan untuk kursus

selama 2,5 (dua setengah) bulan menjadi 1,5 (satu setengah) bulan.

- c) Sehubungan dengan hal tersebut, MoMP menyampaikan permohonan untuk disampaikan hal ini kepada penyusun kurikulum badan-badan diklat Kementerian ESDM RI dengan permohonan maaf terkait tidak ada pilihan lainnya bagi mereka selain mengajukan permintaan ini. MoMP mengusulkan penyingkatan waktu diklat ini dilakukan dengan 2 (dua) cara:
- 1) Mengurangi waktu/jam pelajaran masing-masing *subject/mata* pelajaran, dengan tidak menghapus mata pelajaran apapun dalam kurikulumnya. Misalnya untuk *subject* yang dijadwalkan selama 20 jam, dapat dipersingkat menjadi 10 jam. MoMP menyerahkan sepenuhnya metode penyingkatan waktu dimaksud kepada Pemri.
 - 2) Menghapus mata pelajaran yang menurut MoMP memiliki relevansi yang tidak terlalu besar dengan kondisi keseharian MoMP di lapangan di Afghanistan. Pemri, c.q. Setwapres, masih menunggu hasil dari penelaahan anggaran terkait penyelenggaraan diklat yang dilakukan bersama dengan Kementerian Keuangan untuk dapat ditindaklanjuti pada proses berikutnya oleh KBRI Kabul.

3. Program *Capacity Building* Tahun 2020.

Kementerian Sekretariat Negara bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Japan International Cooperation Agency (JICA) mengadakan *Online Course of Knowledge Sharing Program (KSP) on "Sharing the Experiences and Lessons Learned on Maternal and Child Health (MCH) Handbook Implementation in the Era of COVID-19 Pandemic"*, pada 17-18 November 2020. Afghanistan menugaskan 5 (lima) orang pejabatnya untuk mengikuti kegiatan tersebut.

4. Program *Capacity Building* Tahun 2021.

Mengingat dampak pandemi Covid-19 telah menyita perhatian seluruh Pemerintah negara, termasuk Pemri, maka hingga bulan Mei 2021, KBRI Kabul belum menerima tawaran dari Pusat program capacity building untuk tahun 2021. Pertemuan dengan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Islam Afghanistan. Duta Besar RI Kabul Dr. Arief Rachman MD pada hari Minggu, 30 Mei 2021 telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Islam Afghanistan Dr. Gulam Abbas Bashir bertempat di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi Afghanistan di Kabul. Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar RI mengajak Menteri Bashir untuk bekerja sama dalam bidang pendidikan. Duta Besar RI menyerahkan daftar berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang bersedia memberikan beasiswa kepada mahasiswa/i Afghanistan dengan sistem *Half Funded* (daftar masih bisa bertambah). Yang dimaksud dengan *Half Funded* dalam hal ini adalah dimana *tuition fee* ditanggung perguruan tinggi di Indonesia, namun tiket Indonesia – Afghanistan pp, *living allowance*, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya ditanggung mahasiswa/i Afghanistan itu sendiri (sejauh ini dalam daftar, baru Tazkia Institute yang memberikan beasiswa *Fully Funded*).

List beasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia ini adalah sebagai upaya Duta Besar RI bekerja sama dengan Duta Besar Afghanistan di Jakarta, berangkat dari kenyataan dimana hingga saat ini beasiswa *Fully Funded* bagi mahasiswa Afghanistan masih terbatas. Sebagai ilustrasi, pada 2019 lalu, jumlah mahasiswa Afghanistan yang diterima pada program Beasiswa KNB hanya 13 orang dari jumlah pelamar di atas 100 orang. Pada tahun 2021 ini, jumlah pelamar KNB dari Afghanistan mencapai 312 orang yang menunjukkan betapa besarnya minat generasi muda Afghanistan untuk belajar di Indonesia.

Menteri Gulam mengucapkan terima kasih atas upaya Duta Besar RI yang telah memperjuangkan lebih banyak lagi beasiswa bagi generasi muda Afghanistan untuk dapat belajar di Indonesia, dan

mengharapkan adanya kerja sama pendidikan RI – Afghanistan secara lebih luas dan mendalam seperti di bidang riset, beasiswa, *sister university*, *double degree*, dan lain sebagainya. Dubes RI dan Menteri Pendidikan Tinggi Afghanistan sepakat bahwa tidak ada artinya pendidikan tanpa riset. Riset adalah kunci kemajuan bidang pendidikan.

Menteri Ghulam mengamati bahwa mahasiswa/i Afghanistan yang telah berhasil menempuh pendidikan di Indonesia telah menjadi insan yang lebih berkualitas dan berpandangan moderat. Sumber daya manusia (SDM) seperti inilah yang banyak diperlukan guna membangun Afghanistan dan mengurangi kekerasan di Afghanistan. Menteri Ghulam berpandangan bahwa sistem pendidikan Indonesia sudah amat bagus dan mampu bersaing dengan pendidikan di negara-negara maju. Afghanistan perlu belajar banyak dari Indonesia dalam mengelola perbedaan (*unity in diversity*). Afghanistan juga banyak memiliki *diversity* namun sayangnya tanpa *unity*. Menteri Ghulam menyatakan bahwa sedang menyusun turunan dari MoU Kerja Sama Pendidikan RI – Afghanistan yang telah ditandatangani pada 5 April 2017 dan akan menyampaikannya kepada Pemerintah Indonesia dalam kesempatan pertama.

10.4 Kerjasama Bidang Lainnya.

1. The 2nd International Conference on Family Business and Entrepreneurship (ICFBE).

Duta Besar LBBP RI Kabul telah menghadiri "*The 2nd International Conference on Family Business and Entrepreneurship (ICFBE)*" yang diselenggarakan oleh President University, Indonesia, yang bekerjasama dengan Kardan University, Kabul, pada 2 - 4 Mei 2018 di Kuta, Bali. Sejumlah kurang lebih 150 orang peserta mengikuti konferensi ini, berasal dari Indonesia, Afghanistan, India, Malaysia, Sri Lanka, Inggris, Thailand, Bahrain dan Pakistan. Sebanyak 40 orang peserta berasal dari negara Republik Islam Afghanistan, dimana sebagian besar merupakan civitas akademika Kardan University, Kabul.

ICFBE 2018 seperti halnya pada penyelenggaraan tahun lalu yang menghadirkan Bapak Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai keynote speaker selain sejumlah pembicara lain, pada tahun ini menghadirkan Veland Ramadani Ph.D (*South East European University*), Dr. Ir. Patdono Suwignjo (Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti, Kemenristekdikti), dan Haryadi B. Sukamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (API).

ICFBE 2018 merupakan konferensi internasional yang membahas bisnis keluarga dan entrepreneursip di kawasan Asia Pasifik. Even ini ditujukan untuk menjadi ajang berkumpulnya para peneliti untuk menyampaikan temuan-temuannya, selain juga ajang pertemuan praktisi bisnis dan Pemerintah sektor terkait. ICFBE bekerjasama dengan 15 jurnal yang termasuk dalam indeks *Scopus*, *Clarivate Analytics* dan *Web of Science*. Tahun ini, konferensi ini diselenggarakan oleh President University dan co-host secara bersama oleh Bisnis Indonesia, Kardan University Afghanistan, *Indonesia Strategic Management Society*, dan IFIM Business School India.

Prof. Budi Susilo Soepandji, Ketua Yayasan President University membuka secara resmi konferensi ini, dengan diikuti oleh paparan Roen Rahmani, Rektor dan *Chancellor Kardan University* yang berbicara bersama-sama dengan Haryadi B. Sukamdani, Ketua API pada sesi hari pertama konferensi. Sesi *plenary* kedua dan ketiga dilaksanakan pada hari kedua konferensi yang menampilkan pembicara Veland Ramadani dari *South East European University*, dan Srividya Raghavan, *Chairperson IFIM Busines School*, India. Kedua pembicara berbicara mengenai penerapan *performance management* dan *sustainability* dalam bisnis keluarga.

2. Pengiriman 15 Penerima Beasiswa Afghanistan Penerima Beasiswa Rektor UIN.

Sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI pada saat kunjungan kenegaraan di Kabul, Republik Islam Afghanistan, pada Januari 2018 yang lalu dan atas kerja sama Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta

dan KBRI Kabul, pada Tahun Ajaran 2018, KBRI Kabul mengirimkan 15 orang calon mahasiswa tingkatan sarjana yang telah dinyatakan memperoleh Beasiswa Rektor di UIN Jakarta. Kelimabelas peserta beasiswa ini merupakan hasil seleksi dari sebanyak 100 orang calon mahasiswa yang mengajukan diri ke KBRI Kabul selama kurun waktu Januari sampai dengan Mei 2018. Dalam perkembangannya, 6 dari 15 mahasiswa UIN memutuskan untuk tidak meneruskan beasiswa mereka di UIN Jakarta dan kembali ke Afghanistan.

3. Pengiriman Penerima Beasiswa Ponpes Darunnajah, Jakarta, dan Institut KH Abdul Chalim, Mojokerto.

Sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI pada saat kunjungan kenegaraan di Kabul, Republik Islam Afghanistan, pada Januari 2018 yang lalu dan atas kerja sama Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta, dan Institut KH Abdul Chalim, Mojokerto, dan KBRI Kabul, pada Tahun Ajaran 2018 ini KBRI Kabul mengirimkan 11 orang calon mahasiswa tingkatan sarjana dan sekolah menengah atas yang telah dinyatakan memperoleh beasiswa di kedua lembaga pendidikan tersebut. Kesebelas peserta beasiswa ini merupakan hasil seleksi dari sebanyak 80 orang calon siswa yang mengajukan diri untuk proses seleksi ke KBRI Kabul selama kurun waktu Januari sampai dengan Mei 2018.

4. *Exposure Visit* dan *Workshop UN Women Afghanistan dan Pejabat Republik Islam ke Indonesia dalam rangka Gender Responsive Budgeting, 9 Agustus 2018.*

Pada akhir Juli 2018, KBRI Kabul telah menerima pemberitahuan dari *United Nations (UN) Women Afghanistan* yang bekerjasama dengan UN Women Indonesia rencana kunjungan dan *workshop Gender Responsive Budgeting (GRB)* berdasarkan *UN Women Letter of Agreement* dengan Kementerian Keuangan Republik Islam Afghanistan (RIA) tertanggal 27 Maret 2018 berjudul *Capacity Enhancement of Deputy Ministers and Directorate Generals of 10 pilot ministries and directorates on GRB in the form of exposure visit and workshop(s)*. Dalam kesepakatan ini, kota di Indonesia yang akan

dikunjungi adalah Jakarta dan Yogyakarta. Tujuan dari kunjungan ini adalah sebagai berikut:

- a. Para pejabat senior pada Pemerintah RIA yang terkait dengan GRB dapat belajar tentang *good practices* dalam penerapan GRB di instansinya masing-masing.
- b. Para pejabat senior akan memperoleh kapasitas yang akan berguna bagi: (i) institusionalisasi dan penerapan GRB; dan (ii) mengembangkan para spesialis dan pejabat GRB di lingkungan Pemerintah RIA.
- c. Prioritas, tujuan strategis dan tindakan praktis akan dapat diidentifikasi dalam konteks kebutuhan Afghanistan di masing-masing kementerian dan lembaga pada Pemerintah RIA.

Exposure visit akan membawa 12 (dua belas) pejabat wakil menteri (*deputy ministers*) Pemerintah RIA, direktur jenderal, direktur, dan pejabat lain di 17 (tujuh belas) kementerian dan lembaga Pemerintah RIA. Rencananya, kunjungan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018.

5. Partisipasi Afghanistan pada Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

KBRI Kabul telah menjadi bagian dari rangkaian persiapan, keberangkatan dan pelepasan kontingen Republik Islam Afghanistan pada *Asian Games* ke 8 di Jakarta dan Palembang tahun 2018. Kontingen Afghanistan terdiri atas 118 (seratus delapan belas) atlet dan ofisial yang akan bertanding di 15 (lima belas) cabang olahraga, i.e. atletik, renang, badminton, tinju, voli pantai, angkat besi, gulat, basket, judo, kurash, terbang layang, wushu, jujitsu, karate, dan *rugby*. Pihak *Afghanistan National Olympic Committee* (ANOC) dari tahap awal persiapan telah berkoordinasi dengan KBRI Kabul untuk berbagai pengaturan keberangkatan dan promosi Asian Games ke-8 tahun 2018, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pada 5 Agustus 2018, Duta Besar LBBP RI Kabul memenuhi undangan ANOC dalam rangka peninjauan *training camp*

kontingen Afghanistan yang terletak di Kompleks Ghazi Stadium, Kabul. Seluruh atlet dalam kontingen Afghanistan memberikan peragaan untuk masing-masing cabang olahraga yang diikutinya.

- b. Pada 6 Agustus 2018, KBRI Kabul mengundang *Advisor* Presiden Afghanistan untuk bidang olahraga, Mr. Hashmat Ghani dan Presiden ANOC serta seluruh atlet Afghanistan yang berlaga di *Asian Games* dalam acara resepsi di KBRI Kabul.
- c. Pada 13 Agustus 2018, Duta Besar LBBP RI Kabul memenuhi undangan Presiden Afghanistan dalam acara pelepasan atlet Afghanistan yang akan berangkat menuju Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden Afghanistan menyampaikan bahwa RI-Afghanistan telah memiliki hubungan yang sangat erat dengan ditandai kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI ke Afghanistan pada bulan Januari dan Februari 2018 lalu. Presiden Afghanistan mengucapkan terima kasih atas fasilitasi yang diberikan kepada atlet Afghanistan untuk berlaga di *Asian Games* dan berharap bahwa hubungan bilateral yang lebih dekat di bidang olahraga dapat terealisasi di masa yang akan datang.

6. Pengiriman *Short Course* 80 Siswa asal Afghanistan ke Indonesia.

KBRI Kabul bekerjasama dengan Kemenlu, Sekretariat Wakil Presiden di Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia, serta *High Peace Council* (HPC) dan organisasi Nahdhatul Ulama Afghanistan (NUA) di Afghanistan, telah menyelenggarakan dan mengorganisir keberangkatan 80 orang siswa dan 3 orang pendamping dari Afghanistan untuk mengikuti *short course* di pondok-pondok pesantren di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tujuan *short course* adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai Islam dan nilai-nilai yang dianut oleh umat Islam di Indonesia terkait dengan toleransi dan keberagaman kepada siswa-siswa asal Afghanistan.

Short course berlangsung selama 3 bulan setengah dari akhir bulan Agustus 2018 atau awal September 2018 sampai dengan pertengahan Desember 2018. Diharapkan, kegiatan ini akan berlangsung secara kontinyu sebagai perwujudan penyampaian pemahaman Islam yang *rahmatan lil alamiin* dengan perbaikan di berbagai aspek pelatihan dari waktu ke waktu.

Pemberian Beasiswa untuk Afghanistan menjadi mahasiswa tingkat Doktoral/S3 sebanyak 2 orang di Universitas Islam Negeri Jakarta dan 2 orang di Universitas Islam Negeri di Yogyakarta tahun akademik 2019/2020. Seluruh peserta beasiswa tersebut telah tiba di Indonesia pada bulan September 2019.

7. Penjajakan Kerjasama *Sister City*.

Pada bulan September dan November 2019, KBRI Kabul menerima kunjungan Pejabat pada AOP/*Administrative Office of President* Afghanistan yaitu: Mr. Walid Rahman, *Policy and Strategic Communication Advisor*; Mr. Safiullah Amani, *Director of National and International Commitments*, Mr. Said Zadran, *Deputy of Investment Support and National Project Cohesion* dan Mr. Wais Ahmad Hikmat, *Head of Export Development Department*.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan keinginan Pemerintah Afghanistan untuk mengadakan kerjasama dengan beberapa kota di Indonesia dalam kerangka *Sister City*. Beberapa kota di Afghanistan yang siap menjalin kerja sama *sister city* dengan kota-kota di Indonesia memiliki karakteristik yang mirip, adalah:

- a. Kota Herat (budaya dan ekonomi) dengan Yogyakarta.
- b. Kota Kabul (ekonomi) dengan kota Surabaya.
- c. Kota Kandahar (ekonomi) dengan kota Medan.
- d. Kota Jalalabad (ekonomi) dengan kota Semarang atau Surabaya.
- e. Kota Mazar-e-Sharif (ekonomi) dengan kota Banten.
- f. Kota Khost (budaya) dengan kota Bandung.

Selain *Sister City*, Afghanistan memahami pentingnya persamaan dan interaksi antara anak pemuda Indonesia dan

Afghanistan. Oleh karena itu, pihak Afghanistan bermaksud merencanakan kegiatan *Intercultural Conference* antara Indonesia dan Afghanistan yang akan berlangsung di Kabul. Pemerintah Afghanistan memiliki keinginan kuat menjalin kerja sama dengan Indonesia di berbagai bidang patut mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Bagi Afghanistan, negara Indonesia merupakan negara dengan berbagai keragaman budaya, suku, bahasa dan aspek sosial lainnya menarik Afghanistan untuk dijadikan model.

Pembentukan *Sister City* Indonesia-Afghanistan mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua kota, dimana Afghanistan dapat belajar dari Indonesia dalam hal pengelolaan administrasi kota dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, KBRI Kabul berupaya menyetarakan potensi kota di Afghanistan dengan kota di Indonesia. Sebagai tindaklanjut AOP Afghanistan akan menyusun draft MoU *Sister-City*, bersama Wakil Gubernur, Walikota dari kota-kota di atas sebelum melakukan kunjungan ke Indonesia, pertengahan Desember 2019 atau Januari 2020. Kantor AOP Afghanistan akan menyiapkan informasi yang lebih rinci potensi kota dan program ini juga kepada Kedubes Afghanistan di Jakarta. Namun hingga bulan Mei 2021, rencana pembentukan sister city masih belum terwujud, mengingat semakin merebaknya pandemi virus Covid-19 di seluruh dunia.

INDEKS

A

Aimak, 59
Ariana Afghan Airlines, 60, 61, 62
Asean Games, 211, 212
Afghan Border Force (ABF), 75
Afghan Highway Police, 24
Afghan National Police (ANP), 24
Afghan National Security Defence Force (ANSDF), 75
Afghan National Civil Order Force (ANCOF), 75
Afghan National Army (ANA), 75
Afghan National Airforce, 75
Afghan Uniform Police, 24

B

Balach, 58
Bakhtar Afghan Airlines, 64
Bandara Major Domestic, 65
Beasiswa Darmasiswa RI, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191
Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
Brahuis, 59

C

Capacity Building, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
Criminal Investigation Department, 24

F

Free Market System, 40
Food and Agriculture Organization (FAO) Afghanistan 43, 44, 45

G

Gender Responsive Budgeting, 210, 211
Gujjar, 59

H

Hazara, 56

I

Invansi Amerika Serikat, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Invansi Uni Soviet, 8, 9, 10
Institut KH Abdul Chalim, Mojokerto, 210

J

Jenewa Conference on Afghanistan, 41

K

KAM Air, 62, 63, 64
Konferensi Tokyo, 40
Kyrgyz, 59

L

Land Bridge, 51
Landlocked Country, 67

M

Military Airport, 65

N

National Directorate of Security (NDS), 24, 76, 77
NATO, 78, 79

Nuristani, 58

P

Pamiris, 59
Pasthun, 55, 56
Pashai, 59
Property Rights, 36

R

Recca VII (7th Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan), 49

S

Sister City, 213, 214
Silk Road (jalur sutra), 50
Special Mission Wing (SMW), 75
Softpower Diplomasi, 3, 4, 5
Stera Mahkama, 24
Susunan Kabinet Pemerintahan Sementara Taliban, 28, 29, 30, 31, 32, 33

T

Tajik, 56
The^{2nd} International Conference on Family Business and Entrepreneurship (ICFBE), 208, 209, 210, 211
The Afghanistan Transit Trade Agreement (AFTA), 49
Afghanistan-Pakistan Transit Trade Agreement (APTTA), 49
Turkmen, 58

U

Uzbek, 57
Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, 209, 210

DAFTAR PUSTAKA

Arief Rachman, 2022, *Harapan Cinta Damai dan Perdamaian*, Jakarta: Madza Media.

Afghanistan-Industri, <http://www.nationsencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/Afghanistan-INDUSTRY.html>

Afghanistan country profile. Library of Congress Federal Research Division (May 2006)

Agriculture, http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Afghanistan

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_newspapers_in_Afghanistan

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_radio_stations_in_Asia#Afghanistan

http://en.wikipedia.org/wiki/Communications_in_Afghanistan, Radio

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_television_channels_in_Afghanistan

<http://www.mcit.gov.af/OurPartners/isp.asp>

http://en.wikipedia.org/wiki/Communications_in_Afghanistan, Internet

http://en.wikipedia.org/wiki/Afghan_Wireless

[http://en.wikipedia.org/wiki/Roshan_\(telco\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Roshan_(telco))

<http://en.wikipedia.org/wiki/Etiscalat>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Areeba>

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Afghanistan, Trade and Industry

<http://www.asiantribune.com/news/2010/04/13/tapi-gas-pipeline-talks-turkmenistan>

http://en.wikipedia.org/wiki/Aral_Sea

<http://www.medicaltourismmag.com/detail.php?Req=282&issue=13>

Tunes; berasal dari merk mobil Toyota Toonce

http://en.wikipedia.org/wiki/Milli_Bus

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airlines_of_Afghanistan

<http://www.asiantribune.com/news/2010/04/13/tapi-gas-pipeline-talks-turkmenistan>

http://en.wikipedia.org/wiki/Aral_Sea

PENGABDIAN SOFT POWER DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DI AFGHANISTAN

Buku berjudul *"Pengabdian Softpower Diplomasi Indonesia Dalam Perdamaian di Afghanistan"* ini menyajikan secara khusus sejumlah pengalaman penulis selama melaksanakan tugas negara sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Islam Afghanistan, yang berkedudukan di Kabul dari tahun 2017 sampai dengan 2021 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 32/P Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017.

Meskipun Afghanistan telah menjadi negara demokrasi sejak tahun 2004, namun ketidakpastian kondisi keamanan di Afghanistan berimbas kepada sektor-sektor lainnya seperti ekonomi dan sosial budaya. Pemerintah Republik Islam Afghanistan sendiri masih belum sepenuhnya mampu menegakkan Pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, sementara itu serangan dari gerilyawan Taliban semakin gencar dan meningkat.

Potensi ketidakpastian kondisi di Afghanistan dapat berkembang menjadi tantangan dan ancaman yang nyata bagi perdamaian dunia pada umumnya dan khususnya bagi kepentingan Indonesia pula. Oleh karena itu, salah satu misi utama KBRI Kabul berdasarkan mandat dari Pemerintah RI adalah mengupayakan rekonsiliasi antara berbagai pihak di Afghanistan melalui jalur softpower diplomasi diantaranya pendekatan kepada Ulama dan turut serta membantu *Nation Building* Afghanistan melalui pemberdayaan perempuan, fasilitasi berbagai pelatihan, pelayanan kesehatan, pemberian beasiswa, dan lain sebagainya.

Buku ini juga banyak memuat tentang catatan penting penulis dalam menjalankan tugas diplomasi sebagai duta besar. Dari catatan tersebut penulis berharap dapat dijadikan sebagai referensi yang memperluas cakrawala tentang perjalanan sejarah sebuah bangsa.

